



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Morowali untuk periode Tahun 2025-2045

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Morowali periode Tahun 2025-2029 terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Morowali untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah Kabupaten/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Kabupaten/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
26. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

27. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Morowali yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Morowali.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Morowali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
33. Bupati adalah Bupati Morowali.
34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
35. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten.

Pasal 2

- (1) RPJMD adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. Visi dan Misi Bupati terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan:
 - a. RTRW Kabupaten;
 - b. KLHS;
 - c. SDGs;
 - d. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika:
 - b. bab I Pendahuluan;
 - c. bab II Gambaran umum daerah;
 - d. bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - f. bab V Penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijabarkan dalam RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan jika:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD sebagaimana yang

- diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
 - (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, Bupati pada tahun terakhir menyusun RKPD mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD ini.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan, harus dibaca dan dimaknai sebagai nomenklatur Perangkat Daerah sesuai urusan masing-masing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 014

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH 25.05 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIPO.19820602 2 00604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam konteks pemerintahan daerah karena merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh kepala daerah terpilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJMD Kabupaten ini berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi Pembangunan Kabupaten "Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan" mencerminkan filosofi dasar bahwa pembangunan daerah harus menjamin keseimbangan antara kemajuan ekonomi, penguatan kapasitas manusia, pelestarian lingkungan hidup, serta pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pembangunan dalam kerangka RPJMD ini bukan hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada penguatan harkat dan martabat manusia, partisipasi aktif masyarakat, pelestarian nilai-nilai kultural dan spiritual, serta harmoni antara pembangunan fisik dan sosial. Dalam konteks ini, konsep "maju" mencerminkan kemajuan teknologi dan keterhubungan antarwilayah; "mandiri" mencerminkan kedaulatan fiskal dan kemampuan daerah mengelola potensi lokalnya; dan "berkeadilan" menekankan pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama antara wilayah daratan dan kepulauan, serta kelompok sosial.

Filosofi pembangunan berkeadilan juga memuat nilai-nilai inklusivitas, tanggung jawab antar generasi, dan penghargaan terhadap keberagaman. RPJMD ini menjadikan pembangunan sebagai instrumen untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan bermartabat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sosiologis, RPJMD ini disusun sebagai respons terhadap perubahan sosial, demografis, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Percepatan pembangunan industri di kawasan khusus dan sekitarnya telah memicu migrasi besar-besaran, pertumbuhan ekonomi tinggi, namun di sisi lain juga menciptakan tantangan serius seperti:

1. ketimpangan antar wilayah yakni wilayah daratan dan kepulauan;
2. cenderung terjadi kesenjangan pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur;
3. keterbatasan akses informasi dan konektivitas digital;
4. ancaman degradasi lingkungan dan konflik agraria; dan
5. ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia.

RPJMD ini dirancang termasuk untuk menjawab seluruh kebutuhan dan persoalan sosial tersebut, melalui rumusan Visi Pembangunan Kabupaten yang diturunkan menjadi 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah. Setiap Misi Pembangunan Kabupaten secara langsung menjawab isu Strategis, antara lain:

1. Transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan melayani.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah dan kelompok masyarakat.
4. Pengembangan sektor unggulan berbasis lokalitas, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan industrialisasi berbasis hilirisasi.

Sosiologis RPJMD juga mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan yakni melalui musyawarah perencanaan pembangunan, *Focus Group Discussion*, konsultasi publik, yang menjadi cerminan demokratisasi pembangunan. RPJMD ini memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan masyarakat adat, agar tidak tertinggal dari arus pembangunan.

Penyusunan dan penetapan RPJMD ini dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang kuat dan sistemik, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 264 mengamanatkan bahwa RPJMD disusun paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan *Pembangunan Nasional*, yang menekankan pentingnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan nasional dan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai pedoman teknis penyusunan RPJMD.

RPJMD ini juga secara legal terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, RTRW Kabupaten, KLHS, dan RPKD.

Sebagai dokumen hukum perencanaan daerah, RPJMD ini memiliki fungsi strategis:

1. Menjadi acuan bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Menjadi dasar penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD tahunan;
3. Menjadi dasar pengukuran kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah;
4. Menjadi sarana koordinasi dan integrasi antar Perangkat Daerah, antar sektor, dan antar wilayah;
5. Menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.

Dengan memperhatikan seluruh aspek di atas maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 ini disusun untuk memberikan arah strategis, dasar hukum, serta legitimasi partisipatif atas seluruh kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0873



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana pada Pasal 1 metitikberatkan pada keberadaan rancangan awal dokumen RPJMD sebagai rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan kerangka berpikir ilmiah melalui pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya dilengkapi penyusunannya sesuai dengan arahan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menekankan bahwa satu dari sekian tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan pasal 65 dan pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045, yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD dan Peraturan Presiden



Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen RPJMD mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan pembangunan daerah secara berkelanjutan, khususnya bagi Kabupaten Morowali sebagai satu dari 12 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan arahan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 mempertimbangkan sejumlah informasi mengenai kondisi daerah, hasil evaluasi atas capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun sebelumnya, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, hasil telaah terhadap sejumlah dokumen perencanaan lainnya, serta identifikasi dan perumusan isu strategis daerah. Selain berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029, mengacu dan mempertimbangkan arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali 2015-2035, sehingga setiap kebijakan pembangunan yang dibuat memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang (program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis) yang menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen RPJMD sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, walaupun dalam implementasinya juga menggunakan pendekatan analisis dan kajian ilmiah dan partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up) hasil evaluasi capaian pembangunan masa lalu, serta penggunaan pendekatan sesuai dengan keputusan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali untuk masa bhakti Tahun 2025-2029 pada Tanggal 20 Februari 2025.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Nasional, menyatakan bahwa pendekatan politik memandang pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan berdasarkan pendekatan



politis adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam dokumen RPJMD. Proses perencanaan juga dilaksanakan berdasarkan arahan dalam pendekatan partisipatif melalui pelibatan sejumlah pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (topdown) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah guna menjamin muatan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 menyajikan informasi yang berkaitan dengan analisis atas gambaran umum kondisi daerah dan keuangan daerah, analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan, analisis dokumen RPJPD dan dokumen tata ruang daerah, serta penentuan sejumlah strategi, kebijakan, program pembangunan dan program prioritas yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);



29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 132);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 175);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 882);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 07);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 03);



39. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 06 Tahun 2024).
40. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0373)

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD dan RPJPD Kabupaten Morowali

Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Morowali (Tahun 2025-2030). Oleh sebab itu, penyusunan dokumen RPJMD selain memuat kondisi umum daerah, pengelolaan keuangan daerah, masalah pembangunan dan isu-isu strategis, visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan, pagu indikatif, indikator kinerja daerah, dan pedoman transisi.

2. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali dan RPJM Nasional 2025-2029

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN Periode 2025-2029 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Pusat. Prioritas pembangunan nasional Periode 2025-2029 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Kabupaten Morowali adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan



kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah terluar, konflik, kebudayaan, kreativitas, serta inovasi teknologi.

3. Dokumen RPJMD Morowali dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029, juga memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi pertimbangan utama.

4. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029, juga memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Morowali. Selain itu, Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 juga memuat arah pembangunan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan yang mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.

5. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali dan Renstra OPD

Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang koordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun.



Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (Renja-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

6. Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Morowali

Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Morowali yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA-PPAS), serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

7. Dokumen RPJMD dan KLHS RPJMD dan RPKD Kabupaten Morowali

RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 akan mengakomodir sejumlah kebijakan dan rekomendasi arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029.

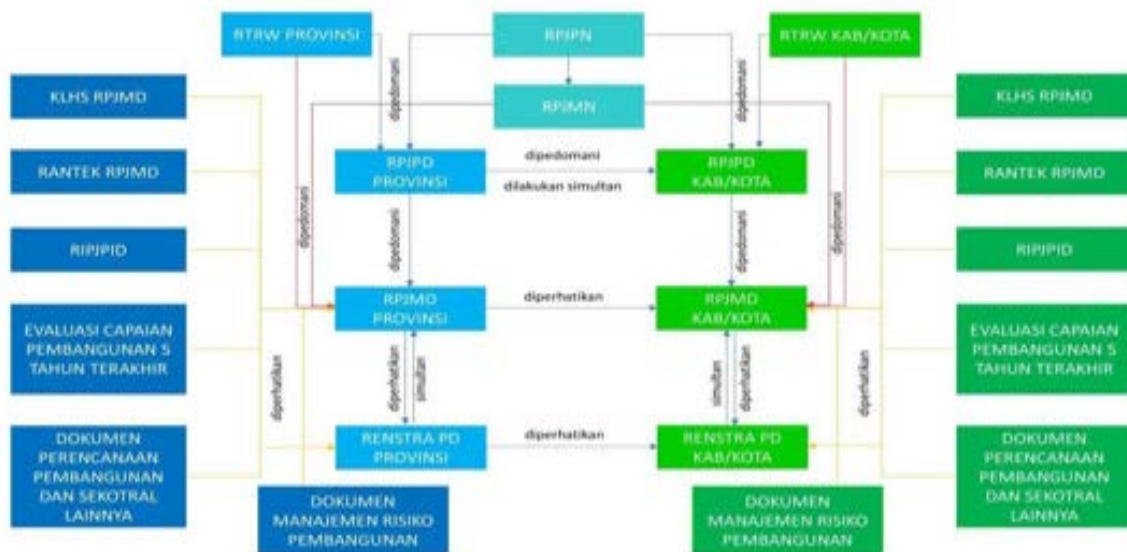
8. Dokumen RPJMD dan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 akan memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, serta Kabupaten Morowali. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain: Agenda Pembangunan Rencana Aksi Nasional Sustainable Development Goals (RAN-SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Sulawesi Tengah Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Sulawesi Tengah, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tengah, dan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tengah (RAD GRK), Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK)

Sulawesi Tengah serta RAD Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Sulawesi Tengah.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah perlu disusun secara sinergis dengan RIPJPID agar arah pembangunan daerah selaras dengan pengembangan iptek yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Dokumen RIPJPID berperan sebagai panduan strategis dalam pemajuan iptek di daerah yang mencakup rencana jangka panjang dan tahapan implementasi iptek. Oleh karena itu, integrasi RPJMD dengan RIPJPID akan mendorong pencapaian visi pembangunan daerah yang lebih inovatif dan kompetitif. Keterkaitan ini juga memastikan bahwa program-program unggulan dalam RPJMD mendukung pengembangan ekosistem iptek yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan global dan lokal.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Morowali dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

9. Dokumen RPJMD dan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan di berbagai sektor. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah disusun sebagai dokumen teknis yang lebih spesifik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.



Rencana Induk berfungsi memberikan kerangka strategis jangka panjang dalam pengembangan dan pemanfaatan IPTEK di daerah, sedangkan Peta Jalan disusun untuk menguraikan langkah-langkah operasional, tahapan, serta target pencapaian pemajuan IPTEK dalam periode tertentu.

Dokumen ini memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi, dokumen RPJMD menjadi payung kebijakan yang memastikan arah pengembangan IPTEK selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Sebaliknya, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK memberikan kontribusi substansial dalam menjabarkan program dan kegiatan strategis IPTEK yang perlu diakomodasi ke dalam RPJMD. Dengan demikian, integrasi antara RPJMD dan dokumen pemajuan IPTEK menjamin bahwa agenda penguatan riset, penerapan teknologi tepat guna, digitalisasi layanan publik, serta pengembangan inovasi daerah dapat terlaksana secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana penyusunan RPJMD harus selesai paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Morowali terpilih.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali juga dimaksudkan untuk menjadi acuan atau pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Renstra PD, Renja PD, RKPD, Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan PD, dan KUA-PPAS.

Dokumen RPJMD berfungsi sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029, berdasarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Morowali terpilih. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :

- a. Mempercepat pembangunan Kabupaten Morowali berdasarkan karakteristik dengan fokus pada pemantapan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan;



- b. Menyediakan suatu rujukan resmi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penyediaan Renstra PD, Renja PD, RKPD, KAK sebagai wujud memastikan ketepatan perencanaan dan penganggaran dalam membiayai program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029, serta komitmen menjalankan sejumlah prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Morowali, APBN dan sumber dana lainnya;
- c. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya se-Sulawesi Tengah, secara lebih khusus antar Pemerintah Kabupaten Morowali, dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, serta antara Kabupaten Morowali dengan kabupaten tetangga di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan), Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Timur), Maluku Utara (Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Taliabo) yang memiliki kemiripan dalam keberagaman pada aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi;
- d. Menyediakan tolok ukur yang relevan dengan kondisi Kabupaten Morowali sesuai dengan acuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali;
- e. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, amanah, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. Memfasilitasi keselarasan antara RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta RPJPD dan RPJMD Kabupaten Morowali hingga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Kabupaten Morowali;
- g. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Tetangga, serta pihak swasta dan masyarakat;
- h. Memfasilitasi penyusunan Kerangka Acuan Kerja masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Morowali selama kurun waktu Tahun 2025-2029.



1.5. Sistematika Penulisan

Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, memuat uraian tentang Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan Tujuan, Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, Sistematika penulisan;

BAB II: Gambaran Umum Daerah

- a. Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat uraian tentang Aspek geografi dan demografi, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum, dan Aspek daya saing daerah;
- b. Gambaran Umum Keuangan Daerah, memuat uraian tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu (realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024); Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan/Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis, memuat uraian tentang Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Daerah.

BAB III: Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

- a. Visi dan Misi, memuat uraian tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, memuat tentang uraian strategi dan arah kebijakan daerah untuk mencapai tujuan, sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV: Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- a. Program Perangkat Daerah, memuat tentang uraian Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



- b. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memuat tentang uraian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V: Penutup, yang memuat uraian tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sasaran pembangunan di daerah.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Posisi dan peran strategis daerah menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi ini dapat berupa kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Morowali.

A. Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Morowali terletak antara 01° 31' 12" Lintang Selatan dan 03° 46' 48" Lintang Selatan serta antara 121° 02' 24" Bujur Timur dan 123° 15' 36" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Morowali, adalah berupa daratan seluas 5.472,00 km² atau 8,85 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Bungku Tengah. Data wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Morowali selengkapnya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa, dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024

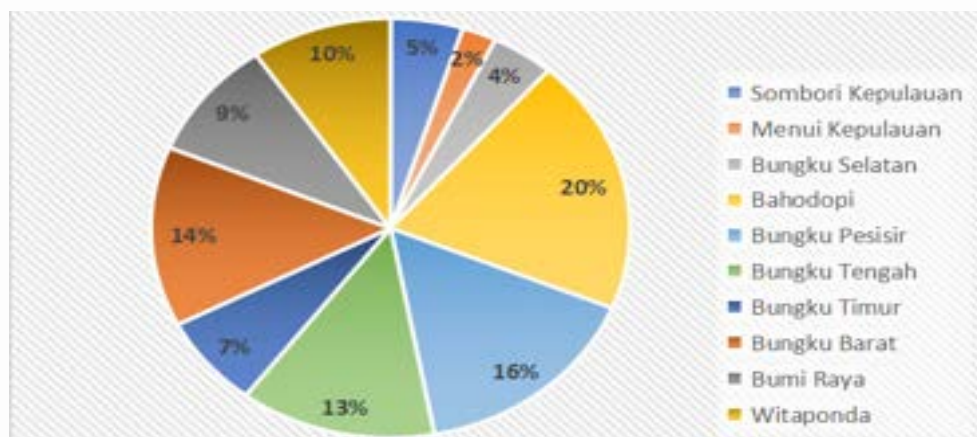
Kecamatan	Luas (Km2)	%	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibukota Kecamatan	Jarak (mil laut/Km)
Sombori Kepulauan	267,78	4,89	13	Tanjung Harapan	98
Menui Kepulauan	127,65	2,33	15/1	Ulunambo	160
Bungku Selatan	232,1	4,24	23	Kaleroang	103
Bahodopi	1.080,98	19,75	10	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867,29	15,85	10	Lafeu	75
Bungku Tengah	725,57	13,26	13/6	Marsaoleh	0
Bungku Timur	387,23	7,08	10	Kolono	18
Bungku Barat	758,93	13,87	10	Wosu	27
Bumi Raya	504,77	9,22	13	Bahonsuai	48
Witaponda	519,7	9,50	9	Laantula Jaya	61
Luas Kabupaten	5.472,00	100	126/7		

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2024

Akhir Tahun 2024, wilayah administrasi Kabupaten Morowali terdiri dari 10 wilayah kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan yaitu: Sombori Kepulauan (267,78 km²), Menui Kepulauan (127,65 km²), Bungku Selatan (232,10 km²), Bahodopi (1.080,98 km²), Bungku Pesisir (867,29 km²), Bungku Tengah (725,57 km²), Bungku Timur (387,23 km²), Bungku Barat (758,93 km²), Bumi Raya (504,77 km²), Witaponda (519,70 km²). BPS Kabupaten Morowali Tahun 2025, Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km², sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan hanya seluas 127,65 km². Kecamatan memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Bungku Selatan yakni 23 desa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Witaponda yakni memiliki 9 desa.

Jika ditinjau dari jarak masing-masing ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten (Kelurahan Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah), maka kecamatan terjauh adalah Kecamatan Menui Kepulauan dengan jarak 160 mil laut yang berarti untuk menjangkau ibukota kecamatan tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, sementara kecamatan yang terdekat adalah Bungku Timur dengan jarak 18 km dan Bungku Barat dengan jarak 27 km ditempuh dengan menggunakan transportasi darat terutama roda empat dan roda dua.

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali dapat ditempuh dengan akses moda transportasi darat dan laut dari ibukota Kabupaten menuju ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali dengan menggunakan kendaraan roda empat, roda dua dan kapal laut. Masih ada sebagian besar di Kecamatan Bungku Selatan, Sombori Kepulauan, dan Menui Kepulauan, dimana desa-desa tersebut berada di wilayah kepulauan yang ditempuh dengan hanya berjalan kaki atau pun menggunakan kendaraan roda dua atau jalur laut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2025

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Morowali, Tahun 2024



Secara singkat, profil singkat 10 (sepuluh) kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali diuraikan sebagai berikut.

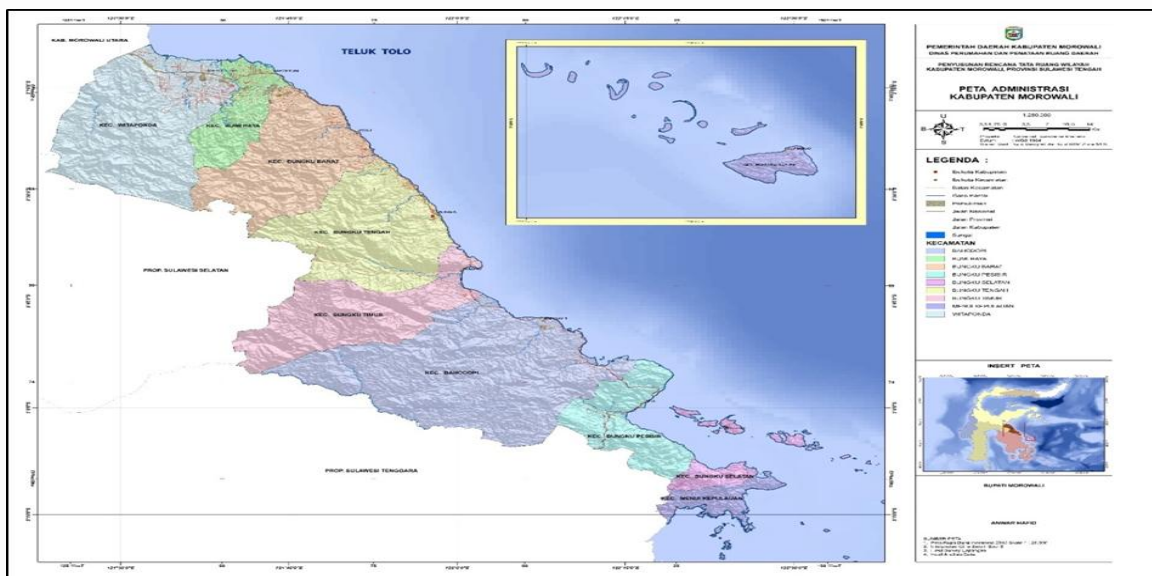
- Sombori
Kepulaun** : Merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah sebesar 267,78 km² atau 4,89 persen dari total wilayah Kabupaten yang berjarak 98 (mil laut) dari Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Tanjung Harapan;
- Menui
Kepulauan** : Merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil dengan luas sebesar 127,65 km² atau 2,33 persen dari total wilayah Kabupaten yang berjarak 160 (mil laut) dari Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Ulunambo;
- Bungku
Selatan** : Luas wilayah 232,1 km² atau 4,24 persen dari total wilayah Kabupaten yang berjarak 64 (mil laut) dari Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Kaleroang;
- Bahodopi** : Merupakan kecamatan pemekaran pertama dari Kecamatan Bungku Selatan, merupakan wilayah kepulauan dan memiliki luas wilayah Kecamatan Bahodopi seluas 1080,98 km² adalah kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di kabupaten. Persen-tase luas wilayah sebesar 19,75 persen dari total wilayah kabupaaten, berjarak kurang lebih 41 km dari Ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan di Desa Bahodopi, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.
- Bungku
Pesisir** : Merupakan juga kecamatan pemekaran kedua dari Kecamatan Bungku Selatan dan berada di wilayah daratan utama Sulawesi, memiliki luas wilayah 867,29 km² atau 15,85 persen dari total luas wilayah ka-bupaten yang berjarak 75 km dari ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan di Lafeu, memiliki ketinggian tempat 4 m dpl.
- Bungku
Tengah** : Merupakan ibu kota kabupaten dengan luas wilayah 725,57 km² atau 13,26 persen dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 0 km dari ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan di Marsaoleh, memiliki 6 kelurahan, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.
- Bungku
Timur** : Merupakan kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Bungku Tengah, Desa Kolono adalah ibukota Kecama-tan Bungku Timur dengan luas wilayah 387,23 km² atau 7,08 persen dari total luas wilayah yang jarak 18 km dari Ibukota Kabupaten Morowali, memiliki ketinggian tempat 7 m dpl.
- Bungku
Barat** : Merupakan kecamatan yang berada di wilayah daratan dan sangat dekat dengan ibukota kabupaten, memiliki luas wilayah 758,93 km² atau 13,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali yang berjarak 27 km dari Ibukota Kabupaten, dengan Ibukota Keca-matan di

Wosu, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.

Bumiraya : Merupakan kecamatan pemekaran dari Bungku Tengah bersama kecamatan Bungku Barat dan Witaponda, memiliki luas wilayah 504,77 km² atau 9,22 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali yang berjarak 48 km dari Ibukota, dengan Ibukota Kecamatan di Bahonsuai, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.

Witaponda : Merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara, memiliki jarak 61 km dari Ibukota Kabupaten dengan luas wilayah 519,70 km² atau sebesar 9,50 persen dari total wilayah, dengan Ibukota Kecamatan di Laantula Jaya, memiliki ketinggian tempat 11 m dpl.

Letak, batas dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Morowali selengkapnya terdapat pada gambar berikut ini tentang peta administratif Kabupaten Morowali.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2024

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Morowali

Jika ditinjau dari posisi geografis, Kabupaten Morowali memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Timur merupakan Wilayah Perairan Teluk Tolo.

B. Letak dan Kondisi Geografis

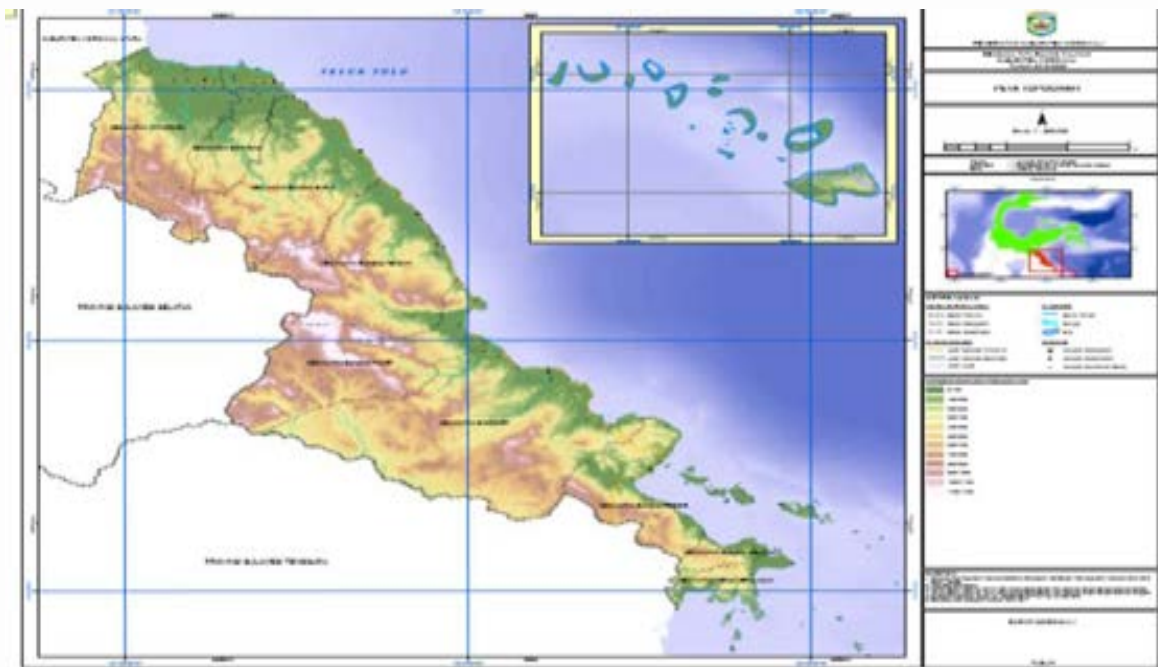
Secara astronomis, Kabupaten Morowali terletak antara $01^{\circ} 31' 12''$ Lintang Selatan dan $03^{\circ} 46' 48''$ Lintang Selatan serta antara $121^{\circ} 02' 24''$ Bujur Timur dan $123^{\circ} 15' 36''$ Bujur Timur. Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil. Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wilayah Kabupaten Morowali yang berada di **daratan utama** Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Witaponda, Bumiraya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat;
- 2) Wilayah Kabupaten Morowali yang berada di **kepulauan** meliputi Kecamatan Menui Kepulauan, Sombori Kepulauan, dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 126 (seratus dua puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 103 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2025). Di antara 103 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di tiga kecamatan yakni Menui Kepulauan, Sombori Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerengan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda.

C. Topografi dan Geologi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Morowali terdiri dari 10 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan dan 126 desa yang tersebar di bagian tenggara Pulau Sulawesi sehingga jika dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl).



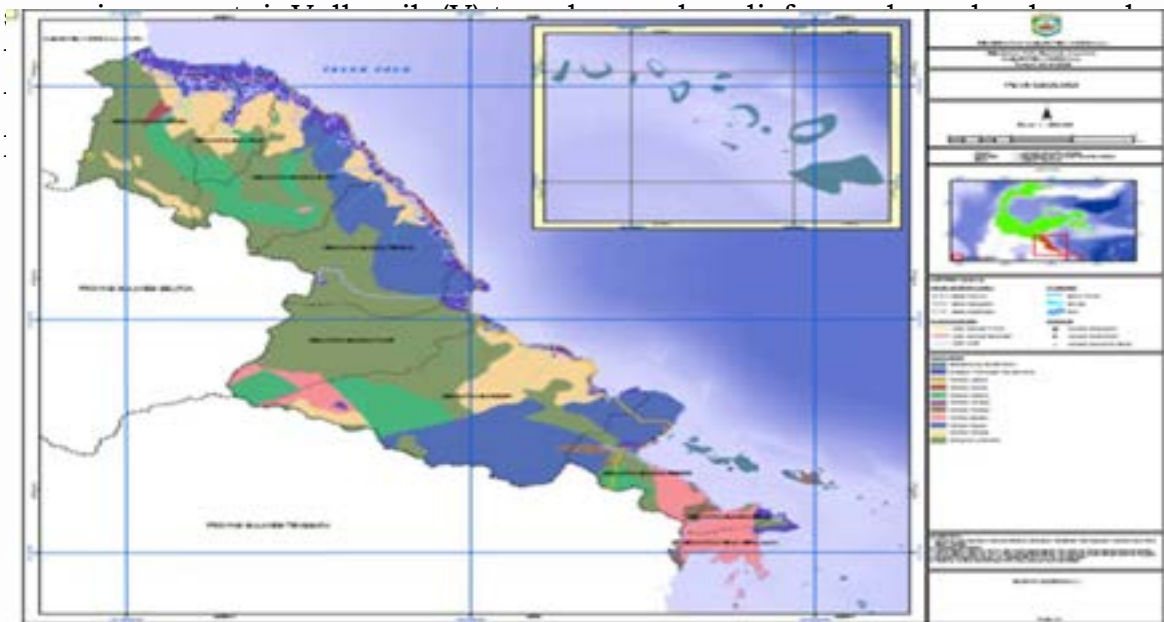
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Morowali

Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen) berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerengannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sangat curam), 11,70 persen luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar) agak landai), 12,56 persen luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 persen dan 23,30 persen luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 persen (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 persen.

Namun, berdasarkan elevasi (ketinggian tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruhnya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar.

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), di sekitar sungai besar; Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

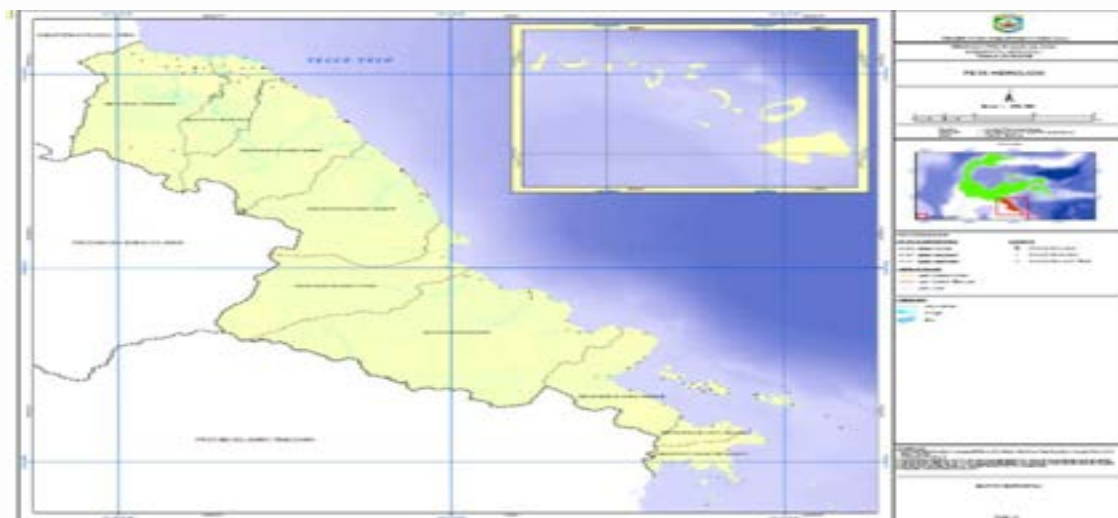
Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Morowali

Kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak survey dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan eksplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun keberadaan sumberdaya nikel umumnya terdapat di wilayah Morowali sampai ke wilayah perbatasan Sulawesi Selatan (Soroako atau Luwu Timur) dan Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Selatan). Saat ini kegiatan penambangan dan pengolahan nikel berskala besar telah dan sedang berlangsung bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan.

Konversi lahan permukiman dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang baik untuk kawasan industri maupun sebagai lokasi sumber barang tambang nikel (orc) sebagaimana umumnya terjadi di wilayah Kecamatan Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir dan Kecamatan Sombori Kepulauan.

D. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Witaponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional. Adapun DAS tersebut adalah wilayah sungai yang berada di DAS Morowali, dan DAS Bahodopi seluas 246,87Ha. Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Peta Hidrologi Kabupaten Morowali terdapat pada gambar sebagai berikut.

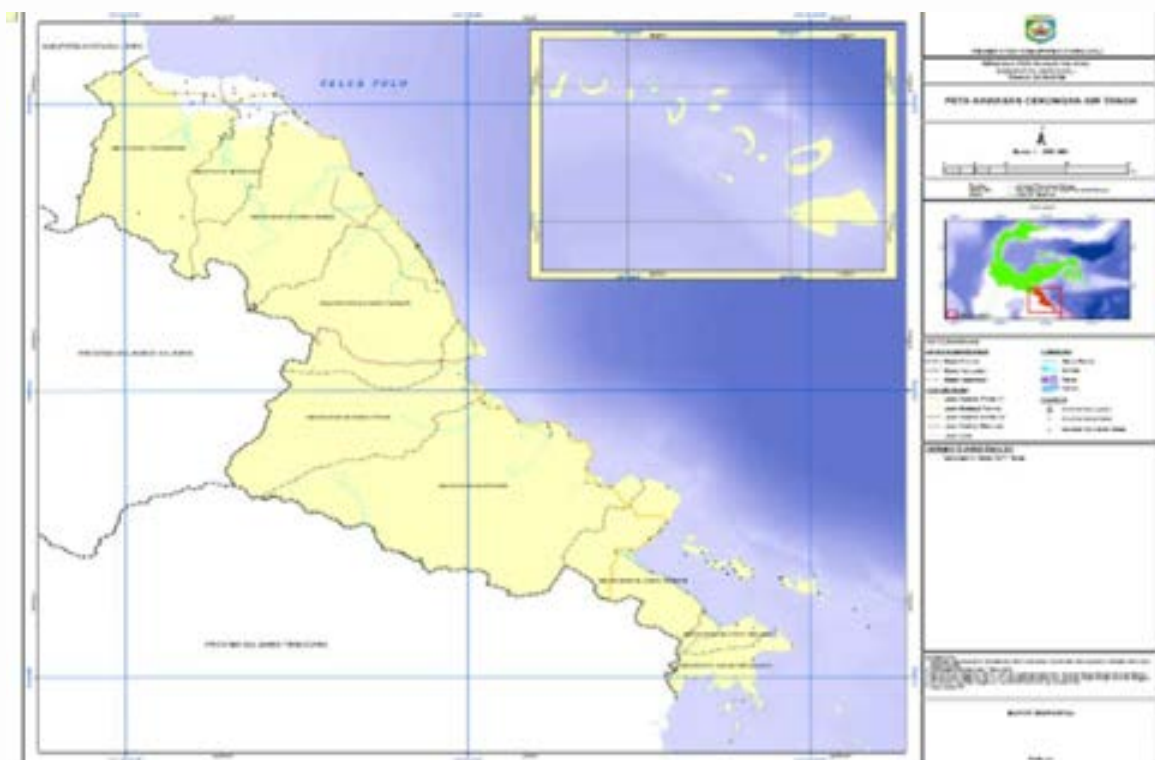


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kabupaten Morowali

Berdasarkan peta potensi penyebaran hidrologi yang merujuk kepada peta Geologi Regional menunjukkan bahwa sekitar 40 persen wilayah Kabupaten Morowali termasuk dalam zona akuifer produktif dengan penyebaran luas artinya memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Sisanya 60 persen lagi termasuk dalam zona akuifer dengan produktivitas kecil yang berarti memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah rendah tetapi dalam pemanfaatannya dapat diusahakan melalui teknologi geolistrik dan pemboran dengan diameter besar

Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali pada gambar sebagai berikut.

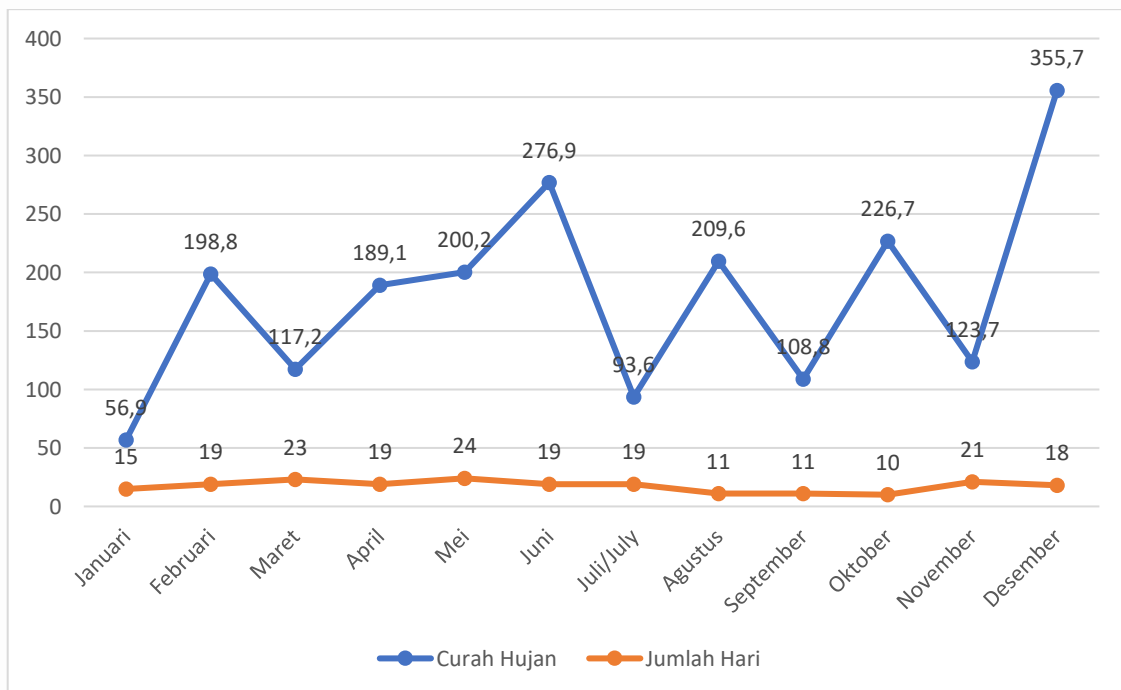


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.6
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali

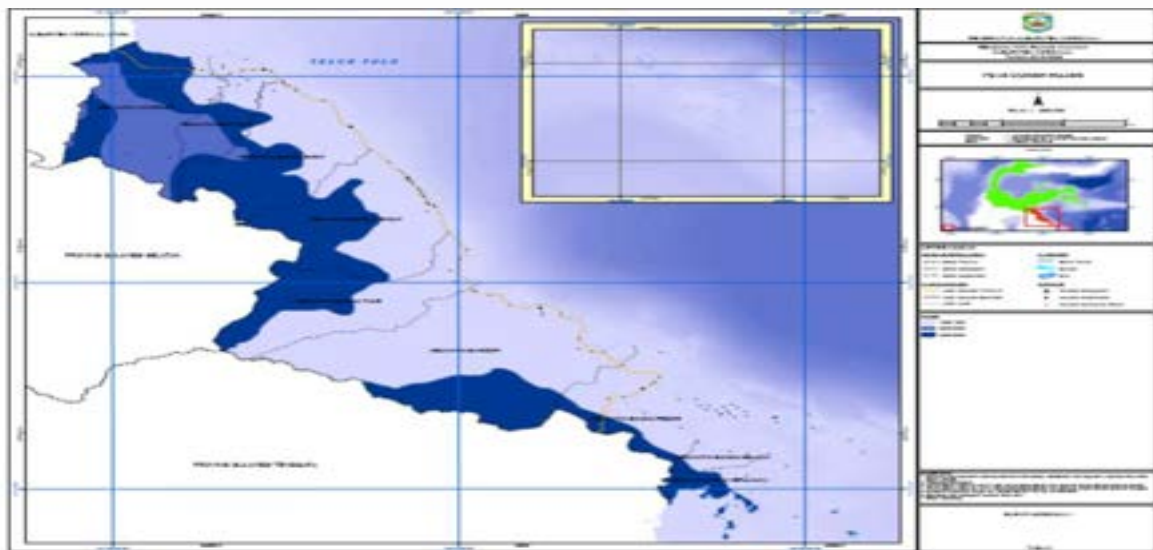
E. Klimatologi

Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di dimanfaatkan untuk pengairan. Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (*run off*) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (*catchment area*), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2024 (diolah kembali)

Gambar 2.7
Kondisi Iklim Kabupaten Morowali Tahun 2024



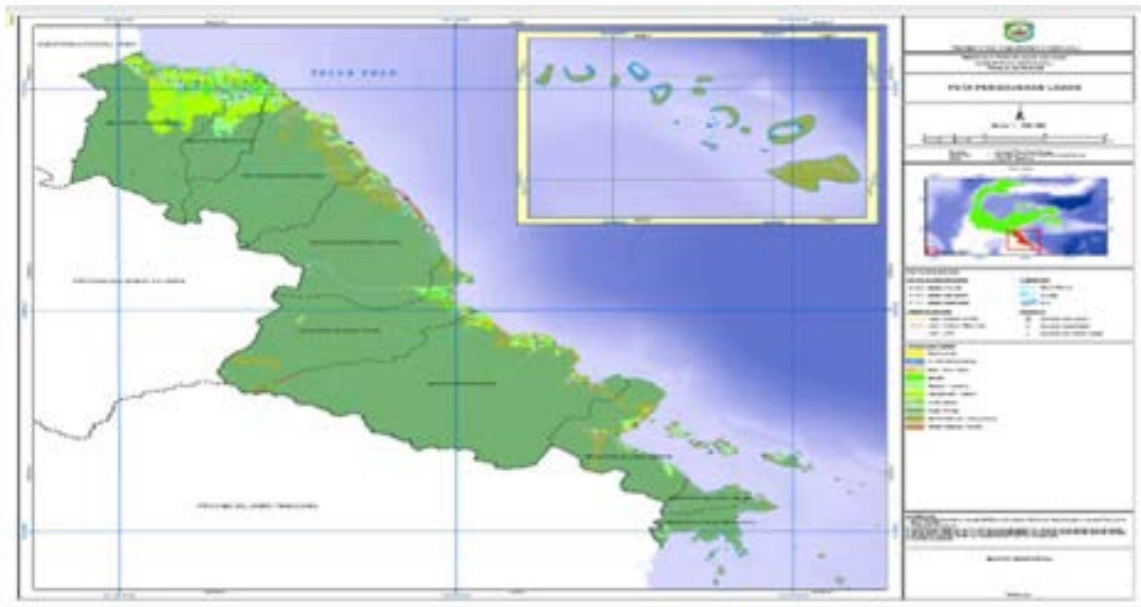
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.8
Peta Curah Hujan Kabupaten Morowali

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Curah hujan tertinggi pada bulan Desember dengan Curah Hujan 355 mm³ dengan selama 18 hari hujan, Selanjutnya diikuti dengan Bulan Juni dengan Curah Hujan 279 mm³ selama 19 hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan Agustus dengan Curah Hujan 56 mm³ selama 15 hari hujan, disusul pada bulan Juli dengan Curah Hujan 93 mm³ selama 18 hari hujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram dibawah ini.

F. Penggunaan dan Peruntukan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah untuk sawah, sementara lahan kering untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi lahan Kehutanan, Lahan Pertanian dan Perkebunan dan Peta Penggunaan Lahan terdapat pada gambar berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Morowali

Peruntukan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung Kabupaten Morowali berdasarkan Kepmen KKP 52 tahun 2019 adalah 252.127.04 Ha, yang terdiri atas hutan lindung, kawasan lindung lainnya, sempadan sungai, sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 yang diuraikan sebagai berikut.

- Kawasan lindung terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan.



- Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan, Sombori Kepulauan dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbuhan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Wita-ponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.
- Kawasan cagar budaya terdiri atas: a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budidaya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut.

- Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan;
- Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan di setiap Kecamatan;



- Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
- Kawasan peternakan terdiri atas : (a). kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; (b). rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; (c). rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat; (d). rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan; (e). rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, (f). rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; (g). pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (h). rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir;
- Kawasan perikanan tangkap (a). seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; (b). Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan (c). rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;
- Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas: (a). perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; (b). rencana pengembangan perikanan budidaya kera-mba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan (c). perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: (a). tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan (b). kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi;



- Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi;
- Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: (a). pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bungku Barat; (b). Pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (c). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (d). rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan (e). Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi;
- Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Sombori Kepulauan;
- Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: (a). pertambangan batuan terdapat di Witaponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan (b). Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali di setiap kecamatan, Batu gunung di setiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah;
- Kawasan industri besar terdiri atas: (a) Kawasan Industri Logam; (b) Kawasan Industri perkebunan; (c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; (d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39 hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; (e) pengembangan kawasan industri



- pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan (f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Sombori Kepulauan;
- Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas: (a). industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (b). industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas: (a). industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan (b). rencana industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya;
 - Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas: (a). industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan (b). rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah;
 - Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas: (a). Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda, Sombori Kepulauan;
 - Kawasan pariwisata alam pegunungan/ hutan terdiri atas: (a). Wisata Goa terdiri atas: 1) Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Witaponda; 2). Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3) Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4) Goa Berlian, Goa Alo di Kecamatan Sombori Kepulauan, (b). Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas: 1). Puncak Fafobaho di Kecamatan Bungku Tengah; 2). Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3). Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Sombori Kepulauan, (c). Wisata air terjun terdiri atas: 1). Kecamatan Bungku Barat Air Terjun Batu Kapal; 2). Kecamatan Bungku Tengah: Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan; 3). Kecamatan Bungku Timur Permandian Lofi; 4). Kecamatan Bahodopi, Air Terjun Bahoumumpa; 5). Kecamatan Bungku Pesisir Air terjun Buleleng; dan 6). Kecamatan Sombori Kepulauan untuk Air kiri Sombori, (d). Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
 - Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: (a). wisata alam Bentang Laut meliputi: 1). Ekowisata Tracking Mangrove di Kecamatan Bungku Tengah; dan 2). Ekowisata Mangrove Nambo-Laroue di Kecamatan Bungku Timur. (b). Wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-

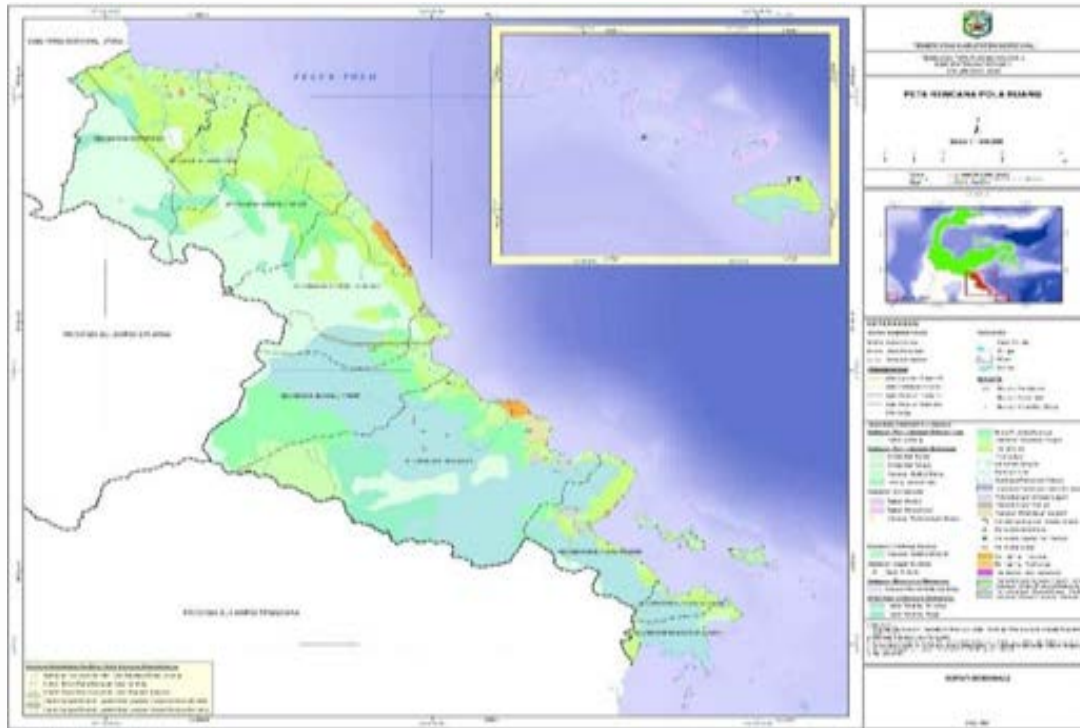
pulau kecil meliputi: 1). Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2). Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3). Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente, Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5). Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6). Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7). Pulau Dua Laut, Pulau Umbele kecamatan Bungku Selatan; dan 8). Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Sombori Kepulauan (c). Wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Sombori Kepulauan.

- Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: (a). Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; (b). Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah; (c). Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan (d). Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
- Kawasan pariwisata buatan antara lain: (a). Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan (b). Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah;

Rencana kawasan potensi pariwisata lainnya di setiap kecamatan;

- Kawasan permukiman terdiri atas: (a). kawasan permukiman perkotaan terdiri atas: 1). kawasan perkotaan bungku Tengah; 2). permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; 3). Permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; 4). rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Tengah; dan 5). rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; (b). kawasan permukiman perdesaan terdiri atas: 1). permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan; 2). kawasan permukiman Transmigrasi terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; 3). rencana kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di Kecamatan Bungku Selatan, Sombori, dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan 4). rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda.

- Data Pola Ruang secara lebih jelas dan lengkap terdapat pada pada gambar di bawah ini tentang Peta sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.10

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Morowali

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sub sektor pertanian terdiri dari Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.

A. Pertanian Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Morowali meliputi tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Lahan untuk tanaman padi umumnya beririgasi, dan juga terdapat lahan non irigasi (sawah tadah hujan dan padi ladang), umumnya berada di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda.



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Morowali, 2024

Gambar 2.11

**Potensi Persawahan di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda
di Kabupaten Morowali**

Kawasan dan potensi usaha tani untuk padi ladang hanya terdapat di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bahodopi. Potensi lahan untuk tanaman pangan lain selain untuk tanaman padi juga terdapat di kecamatan lain seperti di Bungku Timur dengan kondisi topografi landai sampai bergunung. Berdasarkan data BPS Tahun 2024, potensi lahan tegalan di Kabupaten Morowali seluas 16.685,70 Ha (terluas di Bungku Pesisir 1549 Ha), lahan huma/ladang mencapai 1900 Ha yang terluas di Kecamatan Bungku Barat seluas 871Ha, dan tidak digunakan seluas 27.875 Ha yang terluas juga berada di Bungku Barat seluas 3.977 Ha. Luas panen tanaman pa-ngan di Kabupaten Morowali Tahun 2022 seperti tanaman padi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 9.343 Ha. Luas jagung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data perkembangan luas panen tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

**Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha)
di Kabupaten Morowali, Tahun 2020-2024**

Jenis Tanaman	Tahun (Hektar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	9.225,00	9.343,00	8.650,00	5.498,06	5.498,06
Jagung	1.180,00	1.040,10	1.040,10	167,00	103
Ubi Kayu	144,00	190,00	190,00	143,97	80,50
Ubi Jalar	38,00	69,90	69,90	50,00	41
Kacang Tanah	52,00	224,50	224,50	42,52	31,00
Kacang Kedelai	61,00	87,00	87,00	32,00	4,00
Kacang Hijau	61,00	57,50	57,50	41,50	31

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Merujuk pada tabel di atas, luas lahan panen tanaman pangan di Kabupaten Morowali yang terbesar di Tahun 2024 adalah lahan tanaman pangan padi sebesar 5.498,06 Ha, kemudian yang terluas kedua yakni tanaman pangan jagung sebesar 1.040 Ha. Sedangkan yang terendah adalah tanaman pangan Kacang Hijau dengan luas panen 57,5 Ha. Dari total luas lahan, perkembangan berfluktuatif kurun Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2020, total luas panen tanaman pangan seluas 11.431,90 Ha, kemudian menurun pada Tahun 2021 seluas 10.605 Ha, meningkat pada Tahun 2022 seluas 10.761 Ha dan terus meningkat Tahun 2023 menjadi 11.012 seluas Ha. Namun, menurun kembali Tahun 2024 menjadi hanya seluas 10.319 Ha.

Tabel 2.3
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton)
Kabupaten Morowali, Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	42.068,22	45.434,34	39.507,32	26.940,49	26.940,49
Jagung	1.865,00	1.865,00	1.865,00	684,70	406,59
Ubi Kayu	4.186,00	4.186,00	4.186,00	3.677,57	1.763,04
Ubi Jalar	775,00	775,00	775,00	684,70	531,93
Kacang Tanah	56,00	56,00	56,00	45,07	32,09
Kacang Kedelai	127,00	127,00	127,00	35,27	5,20
Kacang Hijau	4,00	4,00	4,00	41,50	31,00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Berdasarkan data pada Tabel 2.3, produksi tanaman padi sawah selama periode Tahun 2020-2024 penurunan dari 42.068,22 Ton menjadi 26.940,49 Ton tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh terjadinya panas berkepanjangan pada tahun 2023 dan penurunan luas panen, serta adanya konversi lahan sawah. Penurunan produksi juga terjadi pada tanaman jagung dari 1.865 tahun 2020 menjadi 406,59 ton pada tahun 2024.

Sementara produksi jenis tanaman pangan lokal lainnya di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024, secara keseluruhan mengalami penurunan produksi seperti Tanaman Ubi Kayu, ubi jalar, dan kacang tanah, kecuali produksi kacang hijau. Penurunan produksi ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan kondisi Kabupaten Morowali sebagai daerah industri tambang yang padat penduduk dan tenaga kerja dari berbagai daerah, sehingga kebutuhan akan ketersediaan pangan juga meningkat. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali. Perhatian lebih dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan terutama dalam menekan adanya konversi lahan melalui penegakan PERDA RTRW, dan peningkatan penggunaan teknologi pertanian (intensifikasi).



B. Pertanian Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan jenis tanaman yang terkait keperluan bahan pangan dan kebutuhan keindahan atau seni. Dilihat dari segi umur, tanaman hortikultura umumnya tergolong tanaman semusim dan ada juga yang berumur jangka panjang. Tanaman hortikultura digolongkan dalam tiga kelompok tanaman yakni tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan hias. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu Tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu Tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan Tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman Tahunan. Tanaman sayuran Tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu Tahun.

Tanaman biofarmaka merupakan jenis tanaman yang memiliki khasiat untuk obat-obatan, kosmetik, dan menjaga kesehatan. Bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang), maupun akar sering dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau diolah sebagai bahan ramuan tradisional maupun modern. Tanaman ini banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis tinggi serta peran penting dalam pengobatan alami dan pengembangan produk herbal. Sementara itu, tanaman hias adalah tanaman yang memiliki daya tarik visual, baik dari bentuk, warna daun, tajuk, maupun bunganya. Tanaman ini biasa digunakan untuk mempercantik pekarangan rumah, taman, atau ruang publik. Selain memberikan nilai estetika, kehadiran tanaman hias juga dapat menciptakan suasana sejuk dan menyegarkan lingkungan sekitar. Luas lahan dan produksi tanaman hortikultura terutama sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Morowali disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4

**Produksi Beberapa Jenis Tanaman Buah-Buahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024**

No	Kecamatan	Produksi (Kuintal) Tanaman Buah						
		Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Rambutan	Langsat
1	Menui Kepulauan	20	5	4	150	20	-	-
2	Bungku Selatan	-	-	-	10	15	-	-
3	Bahodopi	16	-	23	1.686	1.100	-	-



No	Kecamatan	Produksi (Kuintal) Tanaman Buah						
		Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Rambutan	Langsat
4	Bungku Pesisir	30	5	1	3	4	3	-
5	Bungku Tengah	40	-	-	-	-	-	-
6	Bungku Timur	5	40	-	110	-	-	-
7	Bungku Barat	216	90	-	3.345	900	1.020	490
8	Bumi Raya	565	-	-	620	195	-	-
9	Witaponda	-	-	300	-	-	-	120
	Morowali	892	140	328	5.924	2.234	1.023	610

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Mengutip data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa jenis komoditi buah-buahan yang memiliki produksi yang tinggi adalah tanaman pisang dan diusahakan oleh hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Morowali atau tersebar di sembilan kecamatan. Secara umum, tanaman pepaya juga merupakan tanaman kedua yang banyak ditanam oleh masyarakat di Sulawesi Tengah selain tanaman nenas. Produksi tanaman buah terbesar yakni pisang sebesar 5.924 kuintal, meningkat dari tahun sebelumnya, kemudian pepaya sebesar 2.234 kuintal dan rambutan sebesar 1.023 kuintal, mangga sebesar 892 kuintal. Sedangkan yang terkecil adalah Durian sebesar 140 kuintal.

C. Potensi Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan merupakan jenis tanaman yang berumur Tahunan atau jangka panjang. Penghitungan luas tanaman perkebunan besar adalah pada keadaan akhir Tahun dan tidak termasuk yang luasnya kurang dari 5 hektar. Bentuk produksi perkebunan adalah; karet kering (karet), daun kering (the dan tembakau), biji kering (kopi dan coklat), kulit kering (kayu manis dan kina), serat kering (rami), bunga kering (cengkeh), refined sugar (tebu dari perkebunan besar), gula mangkok (tebu dari perkebunan rakyat), ekivalen kopra (kopra), biji dan bunga (pala) serta minyak daun (sereh). Jenis tanaman perkebunan yang umumnya ditanam petani di Kabupaten Morowali adalah kelapa, kakao, kelapa sawit, cengkeh, kopi, lada, karet, dan pala. Produksi dan luas lahan tanaman perkebunan di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024

No	Kecamatan	Produksi (ton) Tanaman Perkebunan			
		Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao
1	Menui Kepulauan	130.200	-	-	-
2	Bungku Selatan	125.000	-	-	-
3	Bahodopi	148.500	33.250	2.880	10.350
4	Bungku Pesisir	66.650	134.000	14.355	20.250
5	Bungku Tengah	607.000	29.700	-	493.536

No	Kecamatan	Produksi (ton) Tanaman Perkebunan			
		Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao
6	Bungku Timur	199.000	36.000	-	32.700
7	Bungku Barat	81.600	19.250.000	855	110.000
8	Bumi Raya	70.000	18.000.000	-	62.000
9	Witaponda	52.000	10.440.000	1.465	91.980
	Morowali	1.479.950	47.922.950	19.555	820.816

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Tabel di atas menunjukkan produksi tertinggi tanaman perkebunan di Kabupaten Morowali adalah tanaman kelapa sawit (47.922.950 Ton), dan produksi terendah adalah tanaman Kopi (19.555 Ton). Tanaman kelapa sawit umumnya terkonsentrasi di Bungku Barat, Bumi Raya dan Witaponda. Produksi tanaman Kelapa adalah yang terbesar kedua dan usaha ini dilakukan masyarakat di hampir seluruh kecamatan, selain Menui Kepulauan, Bungku Selatan dan Bungku Timur. Selanjutnya Sedangkan, untuk produksi tanaman Kakao pada tahun 2024 sebesar 820.816 ton, produksi tanaman kakao tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali kecuali Menui Kepulauan. Produksi tanaman Kakao terbesar berada di Kecamatan Witaponda, Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat.

Tabel 2.6

**Luas Lahan Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024**

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha) Tanaman Perkebunan			
		Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao
1	Menui Kepulauan	147	-	-	-
2	Bungku Selatan	203	-	-	-
3	Bahodopi	120	20	6	90
4	Bungku Pesisir	71	72	101	37
5	Bungku Tengah	1.816	32	-	1.695
6	Bungku Timur	298	9	-	154
7	Bungku Barat	69	5.930	1	340
8	Bumi Raya	60	2.695	-	90
9	Witaponda	50	4.085	4	309
	Morowali	2.834	12.843	112	2.705

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Tabel di atas menunjukkan jenis tanaman perkebunan yang memiliki lahan terluas adalah tanaman kelapa sawit. Tanaman ini diusahakan masyarakat dan perusahaan perkebunan di 7 (tujuh) kecamatan. Tanaman terluas di Kecamatan Bungku Barat mencapai luas 5.930 ha dan terkecil di Kecamatan Bungku Timur sebesar 9 ha. Meski, mengalami penurunan produksi akibat serangan hama, tanaman kakao masih menempati urutan kedua terluas di Kabupaten Morowali.

D. Peternakan

Jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Morowali Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 diklasifikasikan ke dalam tiga bagian yaitu: a) Ternak besar yang meliputi: sapi kuda dan kerbau b) Ternak kecil antara lain: kambing, domba dan babi; dan c) Ternak unggas yang meliputi: ayam kampung, ayam petelur dan itik. Ternak besar jenis sapi merupakan ternak yang mendominasi di Kabupaten Morowali dan umumnya tersebar di Kecamatan Bungku Barat, Bahodopi, Bungku Timur dan Bungku Tengah. Populasi ternak besar pada Tahun 2024 sebanyak 3.602 ekor sapi, ternak kerbau sebanyak 23 ekor dan kuda 4 ekor. Data populasi ternak besar di Kabupaten Morowali terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil
Kabupaten Morowali, Tahun 2020-2024

Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ternak Besar					
- Kerbau	336	99	65	34	23
- Sapi	7.931	9.019	10.325	12.223	3.602
- Kuda	8	4	4	4	4
Ternak Kecil					
- Kambing	16.608	13.608	16.512	20.620	1.790
- Domba	-	-	-	-	-
- Babi	4.162	1.812	2.189	2.430	1.601

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Populasi ternak kecil (kambing, domba, dan babi) di Kabupaten Morowali cenderung mengalami penurunan. Populasi ternak kecil seperti kambing mengalami penurunan populasinya dari 20.620 ekor di Tahun 2023 menurun menjadi 1.790 ekor pada Tahun 2024. Sementara itu populasi ternak kecil jenis babi di Tahun 2023 sebanyak 2.430 ekor mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi sebesar 1.601 ekor.

Populasi unggas yang diternak masyarakat Kabupaten Morowali terdiri dari Ayam Kampung, Ayam Pedaging, Ayam Petelur dan Itik. Dari 4 (empat) jenis unggas yang diternak masyarakat di Kabupaten Morowali dalam 2 (dua) Tahun terakhir didominasi unggas ayam kampung. Data populasi unggas di Kabupaten Morowali pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Jumlah Unggas Menurut Jenisnya
di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Jenis Unggas	Tahun (Ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ayam Kampung	101.926	114.158	141.754	152.552	53.246
Ayam Petelur	31.918	65.044	37.249	7.309	22.978
Itik	41.532	10.781	14.914	19.920	3.049

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Seperti yang di tampilkan pada tabel di atas, jumlah populasi ternak unggas jenis ayam kampung di Kabupaten Morowali pada Tahun 2020 sebanyak 101.926 ekor lalu terus mengalami peningkatan menjadi sebanyak 152.552 ekor tahun 2023, namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan jumlah menjadi 53.246 ekor. Untuk populasi ternak unggas ayam petelur berfluktuatif selama 4 tahun belakang dimana tahun 2020 sebesar 31.918 ekor dan hingga Tahun 2021 meningkat dengan sangat signifikan menjadi 65.044 ekor. Ayam petelur mengalami penurunan jumlah pada tahun 2022 menjadi sebanyak 37.249 dan di tahun 2023 hanya menyisahkan sebanyak 7.309 ekor. Tahun 2024 jumlah populasi ternak kembali meningkat menjadi 22.978 ekor. Sementara populasi ternak itik Tahun 2020 sebanyak 41.532 ekor menurun menjadi 10.781 ekor pada Tahun 2021 dan kembali meningkan di tahun 2022 dan 2023 masing masing sebanyak 14.914 ekor dan 19.920 ekor serta pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 3.049 ekor.

E. Perikanan

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, Garis pantai Kabupaten Morowali kurang lebih 800 km, dengan luas perairan laut sekitar 29.962,88 km² memiliki potensi biotik yang jenis dan jumlahnya cukup banyak, terdiri dari berbagai jenis ikan, kepiting, cumi-cumi, gurita, dan kerang mutiara. Sedangkan untuk perikanan budidaya antara lain tambak dan kolam dengan jenis potensi udang windu, bandeng, rumput laut, ikan mas, nila, dan udang galah. Selama ini jenis ikan pelagis ekonomis rendah seperti kembung, teri, dan layang yang banyak ditangkap nelayan. Potensi perikanan terdiri atas sumberdaya perikanan dan sumberdaya manusia (nelayan dan pembudidaya). Sumberdaya perika-nan dikelola melalui dua kegiatan/usaha perikanan yakni perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Sumberdaya manusia pada sub sektor perikanan dilakukan secara bersama-sama oleh satu keluarga yang disebut dengan Rumah Tangga Perikanan (RTP). Adapun data Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan data Produksi Perikanan Laut (Tangkap dan Budidaya Laut) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Perkembangan Rumah Tangga Perikanan RTP per Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Menui Kepulauan	2.237	2237	2.170	2.789	2.785
Bungku Selatan	3.043	3049	3.312	3.450	3.405
Bahodopi	141	125	219	242	229
Bungku Pesisir	313	331	357	369	364
Bungku Tengah	526	526	649	649	616
Bungku Timur	265	293	392	398	396
Bungku Barat	270	270	227	276	280
Bumi Raya	241	241	201	303	293
Witaponda	142	192	258	261	249
Kabupaten Morowali	7.178	7.264	8.535	8.710	8.617

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Morowali mencapai 7.178 RTP pada Tahun 2020 lalu meningkat menjadi 7.264 RTP pada Tahun 2021, hingga Tahun 2023 meningkat sebanyak 8.710 RTP, namun ditahun 2024 menurun dengan jumlah RTP perikanan sebesar 8.617.

Tabel 2.10
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya selama Empat Tahun Terakhir dan Persentase Produksi per Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Kecamatan	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Menui Kepulauan	5.532,00	8.675,70	8.526,90	8.914,90	7.646,30
Bungku Selatan	16.821,20	14.309,30	14.761,80	17.533,00	16.432,00
Bahodopi	182,40	307,20	382,60	422,70	333,70
Bungku Pesisir	1.158,60	1.558,80	1.472,00	1.447,10	1.415,30
Bungku Tengah	5.135,10	3.373,30	2.602,20	2.860,90	2.378,00
Bungku Timur	573,70	1.169,0	1.074,20	1.254,40	1.253,80
Bungku Barat	1.015,30	705,40	963,90	570,20	504,50
Bumi Raya	417,40	611,50	612,90	583,40	619,20
Witaponda	1.367,50	2.599,40	3.023,30	2.840,10	2.454,10
Kabupaten Morowali	32.203,20	33.309,30	33.420,80	36.414,70	33.036,90

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Produksi perikanan pada kurun waktu 2020-2023 mengalami peningkatan, dimana produksi perikanan tahun 2020 sebesar 32.203,20 ton dan di tahun 2023 sebesar 36.414,70 ton. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan produksi perikanan pada tahun 2023 yakni sebesar 33.036,90 ton. Salah satu penyebab penurunan produksi perikanan di Kabupaten Morowali adalah degradasi lingkungan oleh aktifitas industri pertambangan.

F. Sumberdaya Hutan

Sebelum dilakukan pemekaran Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar. Berdasarkan data Publikasi BPS Tahun 2025, Tercatat pada Tahun 2024 Kabupaten Morowali memiliki hutan seluas 303.306,97 Ha, terdiri dari Hutan Produksi terbatas sebesar 114.200,51 Ha, hutan Produksi tetap sebesar 37.416,69 Ha, Hutan Produksi dapat di Konversi sebesar 41.340,71 Ha, kemudian terdapat hutan lindung seluas 114.122,01 Ha.

Tabel 2.11

**Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali (Hektar), Tahun 2024**

Kecamatan	Hutan Produksi			Hutan Lindung	Suaka Alam & Pelestarian Alam	Jumlah Luas Hutan
	Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi			
Sombori Kepulauan	-	-	-	-	-	-
Menui Kepulauan	10.911,42	-	-	388,99	-	11.300,41
Bungku Selatan	5.182,67	-	-	-	-	5.182,67
Bahodopi	47.299,26	23.976,06	10.578,41	10.820,43	-	92.674,16
Bungku Pesisir	19.237,36	847,59	1.011,04	1.441,26	-	22.537,25
Bungku Tengah	7.867,65	538,75	2.977,02	31.970,62	-	43.354,04
Bungku Timur	23.702,15	-	23.001,29	913,82	-	47.617,26
Bungku Barat	-	1.991,37	3.474,73	20.353,16	-	22.344,53
Bumi Raya	-	1.485,40	298,22	502,43	-	1.987,83
Witaponda	-	8.577,52	-	47.731,30	-	56.308,82
Morowali	114.200,51	37.416,69	41.340,71	114.122	-	303.306,97

Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Selanjutnya berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 pada pasal 128 Kawasan hutan produksi di Kabupaten Morowali terdiri atas:

- Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 (seratus dua ribu enam ratus enam puluh lima koma dua tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;

- Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 (dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas seluas 40.207,91 (empat puluh ribu dua ratus tujuh koma sembilan satu) hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;

Pada tahun 2024, Kabupaten Morowali kehilangan 4,61 kha hutan alam, bagian dari tren deforestasi di Sulawesi Tengah yang sebagian besar dipicu oleh ekspansi tambang, perkebunan, dan infrastruktur terkait (Global Forest Watch, 2025). Nickel mining concession (IUP) memicu deforestasi signifikan, analisis nasional mencatat bahwa kelebihan izin tambang mencakup lebih dari sepertiga kawasan hutan di Sulawesi, termasuk Morowali.

G. Potensi Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan, Kabupaten Morowali menyimpan deposit tambang yang cukup besar, seperti minyak bumi, nikel, besi, dan chromit. Potensi Nikel di Kabupaten Morowali memiliki luas areal hampir 150.000 Ha, lokasinya menyebar hampir di sebagian wilayah Morowali dengan cadangan diperkirakan akan sampai 8 juta WMT. Untuk chromit yang merupakan bahan galian yang banyak digunakan dalam industri baja dan industri bahan kimia, cadangannya diperkirakan mencapai 1 juta ton terdapat di Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Barat. Begitu juga dengan batu gamping yang cadangannya mencapai 30 juta meter kubik dengan luas area 25 Ha yang berada di Kecamatan Bungku Selatan.

Adapun luas pemanfaatan areal tambang di Kabupaten Morowali di sajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.12
Potensi dan Luas Areal Pertambangan dan Energi
di Kabupaten Morowali

Jenis Areal	Luas Area (Ha)	Keterangan
Kawasan Industri IMIP	4.000	Kawasan industri terintegrasi termasuk smelter dan pelabuhan
Konsesi PT Sulawesi Mining Investment (SMI)	47.000	Izin Usaha Pertambangan aktif di bawah IMIP

Total IUP (seluruh perusahaan aktif)	118.139	Seluruh IUP aktif dari ±53 perusahaan
Total IUP historis (termasuk tumpang tindih & lama)	600.089	Akumulasi izin termasuk IUP lama dan tumpang tindih

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Morowali dan Dinas ESDM Sulawesi Tengah, 2025.

Berdasarkan data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi Nikel di Kabupaten Morowali memiliki luas areal 99.980,76 Ha, lokasinya tersebar di 9 kecamatan wilayah Kab. Morowali dengan cadangan diperkirakan akan sampai 8 juta WMT. Untuk chromit yang merupakan bahan galian yang banyak digunakan dalam industri baja dan industri bahan kimia, cadangannya diperkirakan mencapai 1 juta ton terdapat di Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Barat. Begitu juga dengan batu gamping yang cadangannya mencapai 30 juta meter kubik dengan luas area 25 Ha yang berada di Kecamatan Bungku Selatan.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Status Daya Dukung Air

Ketersediaan air di Kabupaten Morowali dihitung menggunakan data debit air baku permukaan material aliran sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Morowali. Dengan asumsi material air sungai yang melintas di Kabupaten Morowali dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal. Debit air sungai yang bersumber dari KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan selanjutnya didistribusikan ke dalam sistem grid berdasarkan indeks jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Morowali, dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai indeks di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan di wilayah tersebut.

Tabel 2.13
Status Daya Dukung Air Kabupaten Morowali Tahun 2025

Kecamatan	KETERSEDIAAN AIR (m ³ /Tahun)	KEBUTUHAN AIR UNTUK LAHAN (m ³ /Tahun)	KEBUTUHAN AIR UNTUK DOMESTIK (m ³ /Tahun)	KEBUTUHAN AIR TOTAL (m ³ /Tahun)	SELISIH	AMBANG BATAS PENDUDUK (Jiwa)	SELISIH AMBANG BATAS (Jiwa)	STATUS
Bahodopi	1.460.746.788	114.843.081	36.485.820	151.328.901	1.309.417.887	1.636.772	1.591.165	Belum Terlampaui
Bumi Raya	313.108.480	138.205.543	13.312.410	151.517.953	161.590.527	201.988	185.348	Belum Terlampaui
Bungku Barat	705.044.120	136.515.220	12.176.389	148.691.610	556.352.511	695.441	680.220	Belum Terlampaui
Bungku Pesisir	392.440.810	32.241.261	6.775.505	39.016.765	353.424.045	441.780	433.311	Belum Terlampaui
Bungku Selatan	157.325.078	10.828.453	12.043.221	22.871.674	134.453.404	168.067	153.013	Belum Terlampaui
Bungku Tengah	817.156.291	109.376.449	26.825.974	136.202.423	680.953.868	851.192	817.660	Belum Terlampaui
Bungku Timur	701.086.112	50.105.525	12.093.587	62.199.112	638.887.000	798.609	783.492	Belum Terlampaui
Menai Kepulauan	513.966.874	20.337.715	11.294.093	31.631.808	482.335.066	602.919	588.801	Belum Terlampaui
Witaponda	767.557.680	370.188.255	18.259.768	388.448.024	379.109.656	473.887	451.062	Belum Terlampaui
Total Morowali	5.828.432.233	982.641.502	149.268.766	1.131.908.269	4.696.523.964	5.870.655	5.684.071	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Morowali 2025-2029.

Ketersediaan Air dalam system grid sebesar 5.828.432.233,20 m³/tahun yang dianggap tetap sampai tahun 2029. Adanya pertambahan penduduk dari tahun 2025 sampai dengan 2029 yakni sebesar 36.670,73 jiwa. Sementara dengan adanya pertambahan penduduk tersebut, ambang batas penduduk dalam penyedia air Kabupaten Morowali masih belum terlampaui. Hasil estimasi status penyediaan air pada tahun 2025 pada status belum terlampaui sebesar 89,72% dan periode tahun 2029 sebesar 86,58%, adanya penurunan sebesar 3,14%. Dengan hasil tersebut maka secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyedia Air kabupaten Morowali Belum Terlampaui.

B. Status Daya Dukung Pangan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari Neraca Bahan Makanan Kabupaten Morowali Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Morowali, diperoleh angka ketersediaan potensi bahan pangan sebesar 62.808.536.932,91 Kkal per tahun. Nilai tersebut dihitung dari total produksi berbagai jenis komoditas pangan yang telah dikonversi ke dalam satuan energi (Kkal).

Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Morowali diperkirakan sebesar 14.084 Kkal per orang per hari, yang kemudian dikonversi menjadi kebutuhan tahunan per kapita. Untuk mendistribusikan sebaran potensi ketersediaan pangan tersebut secara spasial, digunakan sistem grid yang mempertimbangkan indeks jasa lingkungan penyedia pangan. Dalam sistem ini, diasumsikan bahwa wilayah dengan nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan penyediaan pangan yang lebih besar, sehingga alokasi potensi ketersediaannya juga lebih tinggi. Berikut ini tersaji Status Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Morowali.

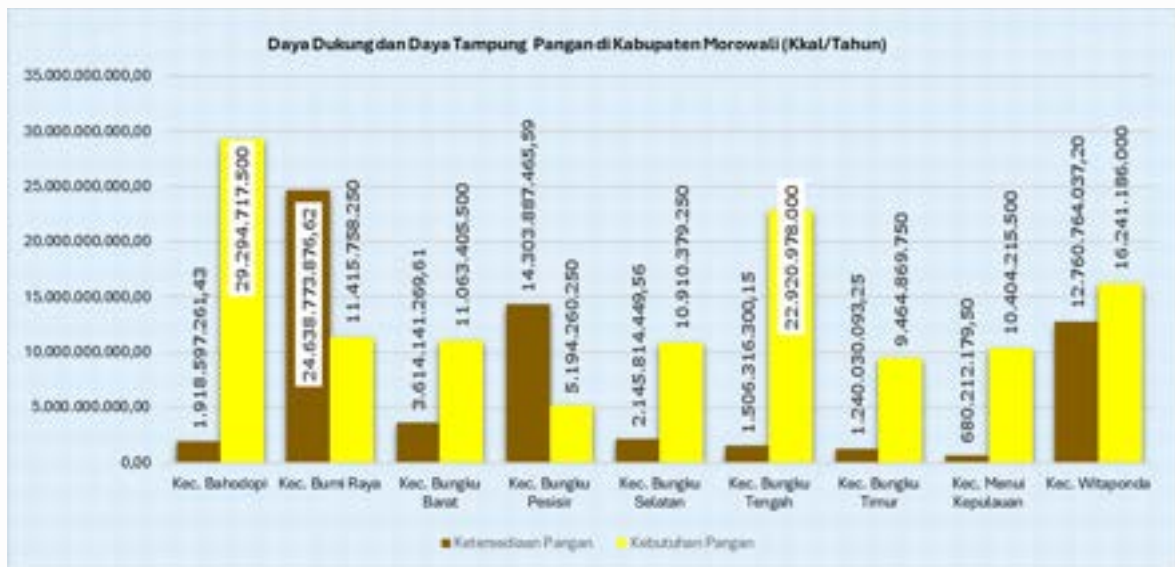
Tabel 2.14
Status Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan
Kabupaten Morowali

KECAMATAN	KETERSEDIAAN PANGAN (Kkal/Tahun)	KEBUTUHAN PANGAN (Kkal/Tahun)	SELISIH (Kkal/Tahun)	AMBAH BATAS PENDUDUK (Jiwa)	SELISIH AMBAH BATAS (Jiwa)	KETERANGAN
Bahodopi	1.918.597.261,43	29.294.717.500	-27.376.120.238,57	7	-37.323	TERLAMPAUI
Burni Raya	24.638.773.876,62	11.415.758.250	13.223.015.626,62	31.314	16.767	BELUM TERLAMPAUI
Bungku Barat	3.614.141.269,61	11.063.405.500	-7.449.264.230,39	5.506	-8.592	TERLAMPAUI
Bungku Pesisir	14.303.887.465,59	5.194.260.250	9.109.627.215,59	18.368	11.749	BELUM TERLAMPAUI
Bungku Selatan	2.145.814.449,56	10.910.379.250	-8.764.564.800,45	2.704	-11.199	TERLAMPAUI
Bungku Tengah	1.506.316.300,15	22.920.978.000	-21.414.661.699,85	2.965	-26.243	TERLAMPAUI
Bungku Timur	1.240.030.093,25	9.464.869.750	-8.224.839.656,75	2.794	-9.267	TERLAMPAUI
Menai Kepulauan	680.212.179,50	10.404.215.500	-9.724.003.320,50	504	-12.754	TERLAMPAUI
Witaponda	12.760.764.037,20	16.241.186.000	-3.480.421.962,80	15.784	-4.912	TERLAMPAUI
Total Morowali	62.808.536.932,91	126.909.770.000	-64.101.233.067,10	79.946	-81.774	TERLAMPAUI

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Morowali 2025-2029.

Kebutuhan bahan pangan dengan jumlah penduduk eksisting dengan metode pendekatan *system grid* yang digunakan adalah sebesar 62.808.536.933 kkal/tahun. Dengan jumlah penduduk dalam system grid yaitu 161.727 jiwa dikalikan dengan Standar Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu 14.084 /orang/hari yang kemudian dikonversi dalam setahun (Neraca Bahan Makanan Kabupaten Morowali Tahun 2021, oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Morowali). Berdasarkan data DDTLH Kabupaten Morowali ketersediaan pangan sebesar 62.808.536.932,91 Kkal/tahun dan dengan jumlah populasi penduduk dalam system grid sebesar 161.727 jiwa maka ambang batas penduduk dalam penyediaan pangan Kabupaten Morowali sebesar 79.946 jiwa, terdapat selisih (minus) jumlah penduduk sebesar -81.774 jiwa.

Hasil sebaran peta, secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyediaan pangan di kabupaten Morowali sudah Terlampaui, untuk melihat secara terinci daya dukung dan daya tampung penyedia pangan disajikan pada gambar berikut.



Sumber: D3TLH tahun 2024 dalam KLHS RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029

Gambar 2.12 Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Morowali

Secara umum status daya dukung daya tampung penyedia pangan Kabupaten Morowali Telah Terlampaui, kecuali kecamatan Bumi Raya dan kecamatan Bungku Pesisir belum terlampaui.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air, dan pangan adalah kemampuan suatu negara atau daerah untuk memenuhi kebutuhan energi, air, dan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Ini berarti tidak bergantung pada impor dan memiliki sistem produksi, distribusi, dan pengelolaan yang efisien dan

lestari. Ketiga aspek ini saling terkait dan penting untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Morowali telah memprogramkan ketahanan energi terutama kelistrikan dan air di wilayah kepulauan. menjamin kelancaran penyediaan listrik dan telah melakukan koordinasi dengan PLN untuk mempercepat penyaluran listrik ke daerah-daerah yang belum terlayani. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp17 miliar untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kecamatan Bahodopi, termasuk yang terkait dengan penyaluran listrik. Selain itu, melakukan mediasi dengan PT BTIG/PT IHIP terkait tuntutan masyarakat, termasuk tuntutan terkait penyediaan air bersih dan listrik murah, pada tahun 2025 ini penyelesaian masalah kelistrikan di beberapa kecamatan, seperti Witaponda, Bumi Raya, dan Bungku Barat.

Ketahanan air, secara aktif menangani keluhan masyarakat terkait listrik dan air bersih, termasuk menjamin adanya layanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar ISPA akibat pencemaran lingkungan.

Dari sisi ketahanan pangan, salah satu proyek penting adalah kolaborasi antara PT Vale Indonesia dan TNI dalam program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (PSRLB), yang mengembangkan pertanian organik untuk memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123 juga berperan penting dalam membuka lahan ketahanan pangan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Upaya ini mencerminkan sinergi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Morowali.

A. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan sebagai salah satu alat ukur untuk menilai sejauhmana suatu wilayah dapat menyediakan pangan yang cukup, akses masyarakat untuk menjamin pangan dapat tercukupi serta menjaga stabilitas/kontinuitas.

Tabel 2.15
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	82,44	81,98	81,51	82,36	81,44

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024.

Berdasarkan data capaian indeks ketahanan pangan di Kabupaten Morowali tahun 2024 menunjukkan angka 81,44 lebih rendah dari tahun 2023 yaitu 82,36. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh penurunan produksi pangan akibat kekeringan atau banjir, krisis pupuk dan benih, dan harga pangan mengalami peningkatan serta alih fungsi lahan pertanian ke industri.

B. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan persentase penduduk yang asupan energi kalorinya lebih rendah dari kebutuhan minimum harian untuk hidup sehat dan produktif.

Tabel 2.16

**Prvalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

NO	INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	4,97	7,03	6,69	7,90	4,14

Sumber : BPS Sulawesi Tengah, 2025

Data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Morowali tahun 2024 menunjukkan angka 4,14 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yaitu 7,90. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tidak cukup makan (dari segi kalori) menurun. Artinya lebih banyak penduduk yang bisa memenuhi kebutuhan energinya setiap hari, intervensi atau kebijakan pangan terpenuhi seperti bantuan sosial dan subsidi.

C. Konsumsi Listrik Perkapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan indikator yang menggambarkan jumlah rata-rata energi listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya dihitung dalam satuan kilowatt-jam (kWh) per tahun. Indikator ini mencerminkan tingkat pemanfaatan energi listrik oleh masyarakat, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, jasa, maupun aktivitas lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi konsumsi listrik per kapita, umumnya menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi, kualitas hidup, dan akses terhadap teknologi.

Tabel 2.17**Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

NO	INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/kapita)	337,29	411,50	391,41	362,60	335,24

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan data konsumsi listrik perkapita tahun 2024 menunjukkan angka 335,24 kwh/kapita lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 362,60 kwh/kapita. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan target pemerintah yang ditingkatkan untuk pemerataan pembangunan dan kemakmuran masyarakat (daratan dan kepulauan) serta meningkatnya jumlah rumah tangga pengguna listrik yang diakibatkan dari lonjakan penduduk.

D. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum dari segi jumlah dan ketersediaan menjadi kebutuhan dasar untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan.

Tabel 2.18**Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

NO	INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	89,64	93,17	91,91	90,97	88,92

Sumber : BPS Sulawesi Tengah, 2025

Berdasarkan data akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Morowali, tercatat mengalami penurunan dari 90,97 (tahun 2023) menjadi 88,92 (tahun 2024). Penurunan akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum disebabkan oleh penambahan penduduk secara signifikan akibat dari urbanisasi penduduk pencari kerja di Kabupaten Morowali.

E. Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku merupakan volume dan laju aliran sumber air mentah yang dapat diolah untuk menjadi air konsumsi, irigasi atau kebutuhan industri. Kapasitas air baku menjadi penting untuk memastikan kecukupan ketersediaan dalam skala Kawasan (industry dan pemukiman) dan ketercukupan air dalam menghadapi pertumbuhan penduduk.



Tabel 2.19
Kapasitas Air Baku Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas Air Baku	60.613,80	60.613,80	60.613,80	60.613,80	66.563,60

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali 2024

Kapasitas air baku di Kabupaten Morowali tahun 2024 mengalami peningkatan sejumlah 66.563,60 di bandingkan tahun 2023 sejumlah 60.613,80. Terjadinya peningkatan kapasitas air baku disebabkan oleh terjadinya pengembangan Kawasan dalam luasan yang besar dan berimplikasi terhadap kebutuhan air dalam jumlah besar, sehingga kenaikan kapasitas air baku sebagai Upaya menjaga ketersediaan dan keberlanjutan air bersih dalam perubahan iklim dan urbanisasi.

F. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan umumnya masih berasal dari penggunaan sumur, galon, mata air terlindung dalam pemenuhannya, karena itu diperlukan kebijakan strategis melalui kemitraan, peningkatan investasi PDAM dan pengawasan kualitas jaringan distribusi untuk pemenuhannya.

Tabel 2.20
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	14,71	14,95	15,43	15,5 6	37,30

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali 2024

Berdasarkan data akses rumah tangga siap minum perpipaan di Kabupaten Morowali tahun 2024 sejumlah 37,30 terjadi peningkatan di bandingkan tahun 2023 sejumlah 15,56, faktor utama karena sinergi dalam pembangunan fisik, kebijakan pembangunan, kesadaran masyarakat dan jangkauan sambungan air terus bertambah.



2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas adalah kondisi di mana alam dan ekosistem berada dalam keadaan sehat dan seimbang, mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Kualitas Udara: Udara bersih tanpa polusi yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan.
2. Kualitas Air: Air yang bebas dari kontaminasi dan aman untuk dikonsumsi serta digunakan dalam kegiatan sehari-hari.
3. Pengelolaan Limbah: Sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mencegah pencemaran tanah dan air.
4. Ruang Terbuka Hijau: Area hijau yang cukup untuk rekreasi dan sebagai paru-paru kota, membantu mengurangi efek urbanisasi.

Lingkungan hidup berkualitas juga berarti adanya upaya berkelanjutan untuk menjaga dan memulihkan ekosistem, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Adapun kondisi capaian lingkungan hidup berkualitas disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.21

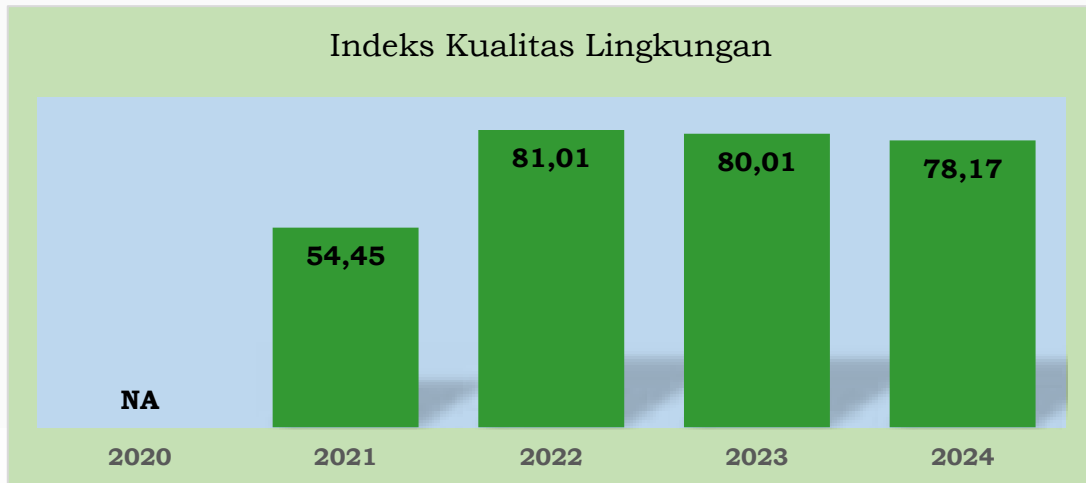
Kondisi Lingkungan Hidup Berkualitas di Kabupaten Morowali

No	Parameter Lingkungan	Nilai Capaian Kualitas Lingkungan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Udara	NA	84,57	86,20	84,46	83,46
2.	Indeks Kualitas Air	NA	NA	68,89	68,30	64,39
3.	Pengelolaan Limbah	0,31	0,54	1,06	1,30	1,68
4.	Ruang Terbuka Hijau (Ha)	NA	12	12	13,39	26,78
5.	Indeks Kualitas Lahan	NA	92,22	92,22	91,88	92,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

A. Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks ini mencakup beberapa komponen utama seperti kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan, yang masing-masing berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Grafik berikut menyajikan perkembangan IKLH Kabupaten Morowali selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Tahun 2024

Gambar 2.13

IKLH Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa IKLH Kabupaten Morowali mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2021 ke 2022, yaitu dari 54,21 menjadi 81,01 atau meningkat hampir 27 poin. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan. Pada tahun 2023, IKLH relatif stabil di angka 80,01, menunjukkan keberlanjutan upaya pengelolaan lingkungan sehingga kualitas lingkungan hidup masih dapat dipertahankan pada kategori baik. Namun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 78,17 yang mengindikasikan adanya tekanan lingkungan akibat peningkatan aktivitas pembangunan, pertumbuhan industri, maupun faktor eksternal lainnya. Meskipun demikian, IKLH Kabupaten Morowali masih berada dalam kategori baik, sehingga tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi pengelolaan lingkungan agar tidak kembali menurun.

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kualitas lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh akses terhadap sarana sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan. Akses sanitasi yang memadai tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan indikator penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Tabel berikut menyajikan data kondisi akses sanitasi di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan kategori seperti sanitasi layak secara individu (layak sendiri), sanitasi bersama, buang air besar (BAB) tertutup dan terbuka, serta klasifikasi sanitasi layak, tidak layak, dan aman di masing-masing kecamatan.

Tabel 2.22

Akses Sanitasi di Kabupaten Morowali Tahun 2024

No.	KECAMATAN	AKSES SANITASI TAHUN 2024						
		LAYAK SENDIRI	LAYAK BERSAMA	BAB TERTUTUP	BAB TERBUKA	SANITASI LAYAK	SANITASI TIDAK LAYAK	SANITASI AMAN
1	WITAPONDA	6.198	0	32	25	6.198	57	0
2	BUMI RAYA	4.568	0	29	0	4.568	29	0
3	BUNGKU BARAT	4.194	7	0	0	4.201	0	0
4	BUNGKU TENGAH	7.280	66	11	4	7.346	15	0
5	BUNGKU TIMUR	4.073	0	0	12	4.073	12	0
6	BAHODOPI	9.530	0	97	28	9.530	125	0
7	BUNGKU PESISIR	1.985	88	103	0	2.073	103	0
8	BUNGKU SELATAN	1.653	359	1.880	258	2.012	2.138	0
9	SOMBORI KEPULAUAN	1.017	210	580	10	1.227	590	0
10	MENUI KEPULAUAN	2.001	176	504	0	2.177	504	0
JUMLAH		42.499	906	3.236	337	43.405	3.573	0

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali 2024

Berdasarkan data akses sanitasi tahun 2024, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Morowali telah memiliki tingkat akses sanitasi layak yang cukup baik, dengan total 43.405 jiwa memiliki akses terhadap sanitasi layak atau 75,16 persen. Kecamatan Bahodopi mencatat jumlah tertinggi penduduk dengan akses sanitasi layak, yaitu 9.530 jiwa, sementara angka terendah berada di Kecamatan Bungku Selatan dan Sombori Kepulauan. Namun demikian, masih terdapat tantangan signifikan, terutama pada aspek sanitasi tidak layak, yang tercatat sebanyak 3.573 jiwa, dengan jumlah tertinggi ditemukan di Kecamatan Bungku Selatan (2.138 jiwa) dan Sombori Kepulauan (590 jiwa).

Selain itu, masih terdapat praktik buang air besar (BAB) terbuka di beberapa kecamatan, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (total 337 kasus), yang menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat. Seluruh kecamatan belum memiliki akses terhadap sanitasi aman, yang menjadi tantangan utama dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) bidang sanitasi.

C. Timbulan Sampah Teroleh di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbunan sampah teroleh merupakan sampah yang telah dikumpulkan dan diproses dengan tujuan untuk mengurangi volume, dampak lingkungan, fasilitas pengolahan sampah berupa tempat pemrosesan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah (TPS-3R), bank sampah maupun fasilitas kompos.

Tabel 2.23

**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	387	716	807	1.216	1.301

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah, 2024

Data timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Morowali tahun 2020 sejumlah 387 mengalami peningkatan pada tahun 2024 sejumlah 1.301 yang artinya jumlah timbulan sampah yang terolah meningkat setiap tahunnya yang mengurangi pencemaran lingkungan, namun secara umum perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk dapat menyelesaikan persoalan timbulan sampah di Kabupaten Morowali yang masih tinggi, yaitu pada tahun 2023 sebesar 32.164,53 ton dan tahun 2024 sebesar 31.107,13 ton, tingginya timbulan sampah disebabkan karena padatnya pemukiman penduduk terutama pada Kawasan industri.

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengelolaan sampah yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang diukur adalah proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah, yaitu rumah tangga yang secara rutin dilayani oleh sistem pengumpulan sampah resmi dari pemerintah atau lembaga pengelola sampah. Tabel berikut menampilkan capaian kinerja Kabupaten Morowali dalam menyediakan layanan pengumpulan sampah kepada rumah tangga selama periode tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.24

**Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024**

NO	INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	60	60	65	65	70

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah, 2024

Data Good Stats tahun 2023, 27,6 persen rumah tangga melaporkan bahwa sampah diambil secara resmi oleh petugas dan terangkut ke TPA, sementara masih terdapat 72 persen Masyarakat mengelola sampahnya sendiri dengan membuang ke TPS, Sungai atau membakarnya. Khusus di Kabupaten Morowali menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah dari tahun 2023 sejumlah 65 mengalami peningkatan pada tahun 2024 sejumlah 70. Terjadinya peningkatan disebabkan oleh telah dilakukan penambahan armada pengangkut sampah, fasilitas TPS-3R serta penguatan TPA dan rute pengangkutan sampah lebih tersebar secara proporsional, serta tren peningkatan partisipasi Masyarakat.

E. Persentase Timbunan Sampah yang Dikelola (daur ulang)

Timbunan sampah yang dikelola merupakan jumlah sampah yang dikumpulkan, diangkut, dan diproses yang difasilitasi pengelolaan sampah yang telah memenuhi standar lingkungan dan Kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negative yang ditimbulkan oleh sampah dan mencemarakannya.

Tabel 2.25

**Persentase Timbunan Sampah yang Dikelola
Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase timbunan sampah yang dikelola (daur ulang)	18,3%	23,1%	25,3%	38,6%	46,2%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah, 2024

Berdasarkan data persentase timbunan sampah yang dikelola di Kabupaten Morowali tahun 2024 sebesar 46,2 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,3 persen. Terjadinya peningkatan dalam persentase menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten telah meningkatkan infrastruktur utama seperti tempat pembuangan sementara, TPS3R serta fasilitas daur ulang. Khusus Kabupaten Morowali perlu untuk penambahan kapasitas bagi wilayah TPA untuk pemenuhan volume sampah yang begitu tinggi pada wilayah Kawasan industri.

F. Proporsi Limbah B3 yang dikelola

Proporsi limbah B3 yang dikelola melalui daur ulang, perawatan, pembakaran atau penimbunan harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan limbah B3 meliputi pemanfaatan kembali seperti bahan kimia atau plastik untuk digunakan Kembali, penimbunan aman yang memenuhi syarat teknis serta pengelolaan sektor hulu dan hilir untuk mengurangi limbah.

Tabel 2.26

**Proporsi Limbah B3 yang dikelola
Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024**

NO	INDIKATOR	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Limbah B3 yang dikelola	31,25	37,5	62,5	81,5	83,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah, 2024

Berdasarkan data proporsi limbah B3 yang dikelola di Kabupaten Morowali tahun 2023 sejumlah 81,5 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan 83,33. Terjadinya peningkatan proporsi limbah B3 yang dikelola disebabkan pengetatan dan pengawasan regulasi (PP 101/2014, Permen LHK No.75/2019), jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 meningkat (incinerator), ketersediaan penyimpanan sementara (TPS B3) serta fasilitas Kesehatan secara persyaratan teknis mulai mematuhi.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim merujuk pada kemampuan suatu sistem, komunitas, atau individu untuk mengantisipasi, merespons, serta pulih dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun perubahan iklim secara efektif dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup perencanaan tata ruang yang adaptif, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap risiko, penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan kebencanaan, serta integrasi data iklim dalam proses pengambilan keputusan. Dengan membangun ketahanan ini, risiko kerugian akibat bencana dapat diminimalkan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang dapat terjaga, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terhadap perubahan lingkungan ekstrem.

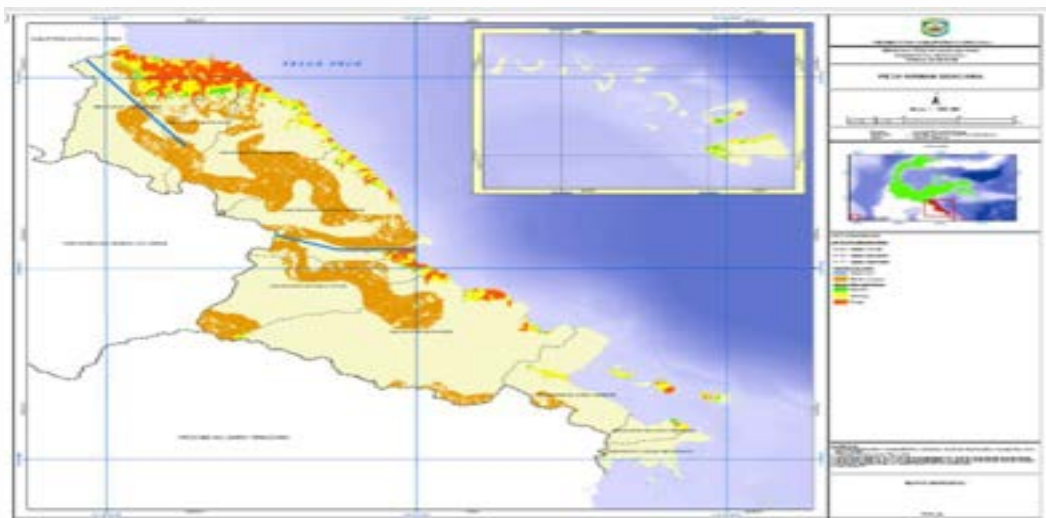
A. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor.

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan.

Beberapa Tahun terakhir terdapat bencana Alam yang melanda Kabupaten Morowali banjir bandang, Gempa Bumi dan Longsor yang terjadi pada kurun Tahun 2019 s/d 2020. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali pada gambar berikut ini.



Gambar 2.14
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Morowali

Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut.

- Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur.

B. Baseline Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

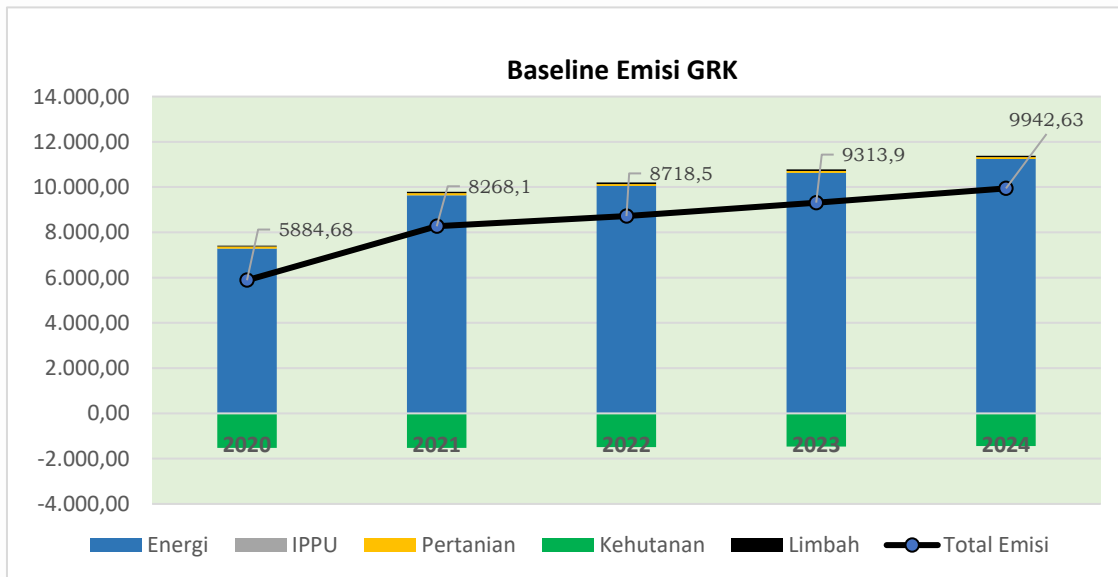
Baseline emisi GRK untuk Kabupaten Morowali dihitung berdasarkan periode tahun dasar 2011–2022 yang digunakan sebagai landasan dalam memproyeksikan tingkat emisi pada tahun 2023 hingga 2045. Tahun dasar dalam konteks ini merujuk pada periode referensi sebelum diterapkannya kebijakan atau intervensi mitigasi, sehingga mencerminkan kondisi emisi yang belum terpengaruh oleh upaya penurunan emisi. Penetapan tahun dasar ini penting untuk memberikan titik acuan yang konsisten dalam analisis tren emisi serta untuk mengevaluasi efektivitas program mitigasi yang direncanakan. Proyeksi *baseline* yang dihasilkan dari periode ini memungkinkan estimasi tingkat emisi di masa depan dengan mempertimbangkan tren historis dan tanpa memasukkan dampak intervensi kebijakan baru, sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan dalam penilaian skenario mitigasi.

Tabel 2.27
Baseline Emisi GRK
Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Tahun	Energi	IPPU	Pertanian	Kehutanan	Limbah	Total
2011	167.48	0.52	127.05	-1685.18	53.10	-1337.03
2012	226.92	0.56	133.35	-1681.41	56.44	-1264.14
2013	248.98	0.45	74.41	-1638.51	48.25	-1266.42
2014	125.53	0.39	66.80	-1652.72	44.22	-1415.78
2015	975.37	0.47	69.34	-1631.03	43.04	-542.81
2016	2,805.10	0.35	81.86	-1594.57	34.55	1327.29
2017	7,269.80	0.42	74.67	-1611.62	39.76	5773.03

2018	7,283.14	0.27	86.18	-1596.82	29.15	5801.92
2019	7,273.17	0.37	81.10	-1589.53	36.52	5801.63
2020	7,280.65	0.35	89.77	-1524.69	38.60	5884.68
2021	9,641.29	0.65	87.55	-1521.98	60.59	8268.10
2022	10,049.69	0.74	86.25	-1484.81	66.63	8718.50
2023	10628.55	0.77	82.06	-1465.66	68.17	9313.90
2024	11240.76	0.80	78.07	-1446.75	69.75	9942.63

Sumber : BPS, Dinas Lingkungan Hidup, SIPSN, IPCC dan Refinement 2019, EHRA 2014, KLHK, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, PLTD Bahoruru, PT. Pertamina Patra Niaga Mor VII, PT Tamaco Graha Krida, PT Bukit Jejer Sukses, 2025 (data diolah)



Sumber : BPS, Dinas Lingkungan Hidup, SIPSN, IPCC dan Refinement 2019, EHRA KLHK, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, PLTD Bahoruru, PT. Pertamina Patra Niaga Mor VII, PT Tamaco Graha Krida, PT Bukit Jejer Sukses, 2025 (data diolah)

Gambar 2.15
Baseline Emisi GRK
Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Dari tabel 2.27 dan grafik 2.15 diatas pada gambar menunjukkan tren peningkatan total emisi GRK di Kabupaten Morowali selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, lonjakan tajam kembali terjadi dengan total emisi mencapai 5884,68 Gg CO₂eq dan pada tahun 2022 total emisi sebesar 8.718,5 GgCO₂eq yang sebagian besar disumbang oleh peningkatan signifikan dari sektor energi. Sementara itu pada tahun 2024 meningkat menjadi 9942,63 GgCO₂eq yang menunjukkan lonjakan tajam kembali terjadi yang sebagian besar disumbang oleh peningkatan signifikan dari sektor energi. Sementara itu, fluktuasi yang terjadi pada sektor IPPU, Pertanian, Kehutanan dan limbah tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan total emisi selama periode tersebut.

C. Indeks Resiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana adalah indikator komprehensif yang digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, maupun bencana non-alam seperti kebakaran atau kegagalan teknologi. Indeks ini dihitung dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu fisik (kondisi infrastruktur dan permukiman), sosial (kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, dan kesiapsiagaan masyarakat), ekonomi (ketahanan ekonomi lokal), serta lingkungan (kondisi ekosistem dan daya dukung lingkungan).

Tabel 2.28
Indeks Resiko Bencana (IRB)
Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

No	Indikator	Skor				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Resiko Bencana (IRB) Kab. Morowali	NA	278,80	278,80	275,20	275,20

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (IRBI), 2021-2024

Berdasarkan data indeks resiko bencana Kabupaten Morowali tahun 2024 masih dalam kategori resiko tinggi, hal ini disebabkan adanya sesar matano, serta tingginya aktivitas pertambangan sehingga indeks resiko bencana pada tahun 2021 yaitu 278,80, namun tahun 2024 mengalami penurunan 275,20 Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan kondisi kebencanaan meskipun skalanya masih relative kecil, untuk itu perlu dilakukan penguatan kapasitas Pembangunan infrastruktur tahan bencana, edukasi dan pengelolaan lingkungan baik pada wilayah non industry, Kawasan industry maupun kepulauan.

D. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu untuk mencegah, merespons dari dampak bencana alam maupun non alam. Semakin tinggi indeks ketahanan daerah maka semakin kuat atau Tangguh suatu daerah terhadap bencana.

Tabel 2.29
Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	NA	NA	NA	0,34	0,34

Berdasarkan data indeks ketahanan daerah kabupaten Morowali tahun 2024 adalah 0,34 yang menunjukkan sangat rentan terhadap bencana. Untuk itu Upaya yang dilakukan adalah memperkuat BPBD di Kabupaten, Menyusun dokumen rencana aksi kebencanaan, penguatan infrastruktur dan tata ruang, Kawasan resiko bencana dan kolaborasi berbagai pihak.

2.1.1.7. Demografi

Istilah kependudukan (*population*) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), perkawinan, perpindahan penduduk (*migration*) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya. Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah- masalah sosial dan ekonomi.

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga

kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (*in migration*) lebih besar dari pada migrasi keluar (*out migration*). Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali antara Tahun 2010 dengan 2024 menurut kecamatan tersaji pada tabel berikut.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Morowali meningkat signifikan dari 102.228 jiwa pada tahun 2010 menjadi 198.968 jiwa pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan rata-rata sebesar 4,87% per tahun. Pertumbuhan ini menunjukkan dinamika kependudukan yang cukup tinggi, seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi dan masuknya investasi di berbagai sektor, khususnya pertambangan dan industri.

Tabel 2.30
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali, Tahun 2010, 2020, 2024

No	Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2010	2020	2024	2010-2024
1	2	3	4	5	6
1	Menui Kepulauan	12.064	13.232	9.636	-1,59
2	Bungku Selatan	17.273	13.914	14.869	-1,06
3	Bahodopi	6.594	37.322	45.434	14,78
4	Bungku Pesisir	-	6.625	8.467	-
5	Bungku Tengah	27.774	29.302	36.385	1,95
6	Bungku Timur	-	12.061	15.341	-
7	Bungku Barat	10.093	14.061	21.064	5,40
8	Bumi Raya	11.488	14.524	17.648	3,11
9	Witaponda	16.942	20.686	23.664	2,42
10	Sombori Kepulauan	NA	NA	6.460	-
	Morowali	102.228	161.727	198.968	4,87

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Ditinjau dari dinamika pertumbuhan per kecamatan, menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam pertumbuhan penduduk, dimana:

- Kecamatan Bahodopi mencatat laju pertumbuhan tertinggi, yakni 14,78% per tahun. Pertumbuhan ini erat kaitannya dengan

- berkembangnya kawasan industri pertambangan nikel yang menjadi pusat daya tarik migrasi penduduk
- Kecamatan Bungku Barat, Bumi Raya, Bungku Tengah, dan Witaponda mengalami pertumbuhan positif yang moderat, berkisar antara 1,95%–5,40% per tahun. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan jumlah penduduk secara bertahap
 - Sebaliknya, Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan mengalami penurunan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan negatif masing-masing -1,59% dan -1,06% per tahun. Faktor migrasi keluar dan keterbatasan peluang ekonomi dapat menjadi penyebab utama penurunan
 - Kecamatan Bungku Pesisir, Bungku Timur, dan Sombori Kepulauan tidak memiliki data awal tahun 2010, namun terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk sejak tahun 2020 hingga 2024 yang cukup signifikan, mengingat 2 (dua) kecamatan pertama juga merupakan daerah industri pertambangan.

Dari sisi perubahan komposisi dan persebaran penduduk, data menunjukkan adanya pergeseran pusat populasi di Kabupaten Morowali. Wilayah dengan pertumbuhan tinggi seperti Bahodopi menjadi magnet migrasi, sehingga semakin padat penduduk dan menghadapi tantangan penyediaan infrastruktur, perumahan, dan layanan publik. Sementara itu, wilayah kepulauan yang mengalami penurunan jumlah penduduk berpotensi menghadapi berkurangnya tenaga kerja lokal, menurunnya kegiatan ekonomi, hingga berkurangnya kualitas layanan dasar

Perbedaan laju pertumbuhan antar kecamatan menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Morowali belum merata. Wilayah dengan pertumbuhan pesat memerlukan perhatian dalam pengendalian urbanisasi dan penyediaan sarana prasarana, sementara wilayah dengan laju negatif memerlukan intervensi untuk meningkatkan daya tarik ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang berimbang perlu dirumuskan agar tidak terjadi kesenjangan wilayah di masa mendatang.

B. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut *jenis* kelamin adalah rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin besar penduduk perempuan, potensi fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi. Secara lengkap informasi mengenai rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31

**Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Morowali Tahun 2024**

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Persentase Jumlah Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan		
Sombori Kepulauan	3.314	3.146	6.460	3,25
Menui Kepulauan	4.782	4.854	9.636	4,84
Bungku Selatan	7.629	7.240	14.869	7,47
Bahodopi	25.900	19.534	45.434	22,83
Bungku Pesisir	4.453	4.014	8.467	4,26
Bungku Tengah	19.081	17.304	36.385	18,29
Bungku Timur	8.037	7.304	15.341	7,71
Bungku Barat	11.767	9.297	21.064	10,59
Bumi Raya	9.246	8.402	17.648	8,87
Witaponda	12.381	11.283	23.664	11,89
Morowali	106.590	92.378	198.968	100

Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Seperti pada tabel di atas, persentase jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bahodopi sebagai dengan persentase sebesar 22,83 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali secara keseluruhan, diikuti oleh Kecamatan Bungku Barat sebesar 10,59 persen dan selanjutnya Witaponda sebesar 11,89 persen, sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bungku Pesisir yang hanya sebesar 8.467 jiwa atau proporsinya mencapai 4,26 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali.

Selanjutnya dilihat dari data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Morowali dengan Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.32

**Perbandingan Jumlah Penduduk (Ribu) Kabupaten Morowali Dengan
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020-2024**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bangkep	120,14	121,68	123,58	123,42	124,58
Banggai	362,28	366,22	370,97	373,69	377,60
Morowali	161,73	167,91	176,24	170,45	173,31
Poso	244,88	248,35	252,65	251,65	254,06
Donggala	300,44	302,97	305,89	308,30	311,00
Toli-Toli	225,15	226,80	228,64	231,71	233,90

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Buol	145,25	146,63	148,25	150,52	152,36
Parigi Moutong	440,02	443,17	446,71	454,70	459,78
Tojo Una-una	163,83	166,34	169,48	169,00	170,82
Sigi	257,59	261,68	266,81	266,66	269,96
Banggai Laut	70,44	70,87	71,35	73,10	74,02
Morowali Utara	120,79	122,24	124,01	126,05	127,87
Palu	373,22	377,03	381,57	387,49	392,51
Sulawesi Tengah	2.985,73	3.021,88	3.066,14	3.086,75	3.121,75

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka 2025

Secara umum, pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus-menerus mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2020, total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2.985,73 jiwa dan mengalami peningkatan menjadi 3.021,88 jiwa pada Tahun 2021, kemudian Tahun 2022 Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3.066,14 juta jiwa dan di tahun 2024 berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS mendata sebanyak 3.121,75 juta jiwa penduduk yang tercatat berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2024, Kabupaten Parigi Moutong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 459,78 ribu jiwa; kemudian diikuti Kota Palu dengan jumlah penduduk sebanyak 392,51 ribu jiwa dan urutan ketiga Kabupaten Banggai sebanyak 377,60 ribu jiwa, terbesar keempat Kabupaten Donggala sebanyak 311,00 ribu jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali menempati urutan ke-delapan dari tiga belas kabupaten/kota pada Tahun 2024 sebanyak 173,31 jiwa, serta Kabupaten Banggai Laut menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk terendah yakni sebanyak 74,02 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor yakni jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi.

C. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Morowali adalah 31 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan dan pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 30.882 mencapai kepadatan penduduk sebanyak 39 jiwa per km².

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 53 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 8 jiwa per km². Data rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Tingkat Kepadatan Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan,
Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan (Org/Km ²)
	Km ²	%	Jumlah	%	
Sombori Kepulauan	267,78	5	6.460	3,25	24,12
Menui Kepulauan	127,65	2	9.636	4,84	75,49
Bungku Selatan	232,1	4	14.869	7,47	64,06
Bahodopi	1.080,98	20	45.434	22,83	42,03
Bungku Pesisir	867,29	16	8.467	4,26	9,76
Bungku Tengah	725,57	13	36.385	18,29	50,15
Bungku Timur	387,23	7	15.341	7,71	39,62
Bungku Barat	758,93	14	21.064	10,59	27,75
Bumi Raya	504,77	9	17.648	8,87	34,96
Witaponda	519,70	10	23.664	11,89	45,53
Morowali	5.472,00	100	198.968	100	36,36

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Menui Kepulauan merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lain, sementara terendah kepadatan penduduknya di Kecamatan Bungku Pesisir. Hal ini disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan lebih sempit dibanding kecamatan lain yakni hanya 2 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali.

D. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "*Sex Ratio*" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu, hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Data terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34

**Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
di Kabupaten Morowali, Tahun 2024**

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Sombori Kepulauan	3.314	3.146	6.460	105
Menui Kepulauan	4.782	4.854	9.636	99
Bungku Selatan	7.629	7.240	14.869	105
Bahodopi	25.900	19.534	45.434	133
Bungku Pesisir	4.453	4.014	8.467	111
Bungku Tengah	19.081	17.304	36.385	110
Bungku Timur	8.037	7.304	15.341	110
Bungku Barat	11.767	9.297	21.064	127
Bumi Raya	9.246	8.402	17.648	110
Witaponda	12.381	11.283	23.664	110
Morowali	106.590	92.378	198.968	115

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Jika dilihat dengan cermat tabel di atas tergambar bahwa Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Morowali pada Tahun 2024 dengan rasio sebesar 133, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Menui Kepulauan dengan rasio sebesar 99.

Secara keseluruhan terlihat *sex rasio* pada tingkat kecamatan di Kabupaten Morowali relatif bervariasi antara 99 sampai 133. Namun secara kumulatif, pada tingkat Kabupaten Morowali dalam Tahun terakhir komposisi penduduk laki-laki dan perempuan telah relatif berbeda (*sex rasio=100*) dengan angka rasio sebesar 133 dan bahkan terdapat kecenderungan *sex rasio* tetap di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

E. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur penduduk Kabupaten Morowali. Pada Tahun 2024 penduduk di bawah usia 15 Tahun mencapai 54.742 jiwa atau sebesar 27,51 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali yang berjumlah 198.968 jiwa. Dengan demikian, Kabupaten Morowali mempunyai penduduk tergolong dalam penduduk *Intermediate*, yakni proporsi penduduk usia di bawah 15 Tahun sekitar 30 persen, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35

**Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali
Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 (ribu/jiwa)**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
0-4	10.243	9.486	19.729
5-9	9.554	9.034	18.588
10-14	8.497	7.928	16.425
15-19	7.372	6.506	13.878
20-24	12.000	9.056	21.056
25-29	13.776	10.479	24.255
30-34	10.357	8.534	18.891
35-39	8.540	7.218	15.758
40-44	7.025	6.183	13.208
45-49	5.389	4.944	10.333
50-54	4.356	3.967	8.323
55-59	3.324	3.095	6.419
60-64	2.362	2.197	4.559
65-69	1.591	1.581	3.172
70-74	1.125	1.028	2.153
75+	1.079	1.142	2.221
Morowali	106,590	92,378	198,968

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Merujuk data pada di atas, komposisi atau struktur umur penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebesar 66,76 persen berada pada kelompok umur 0-34 Tahun. Hal ini menunjukkan penduduk dominan berada pada kelompok penduduk usia muda. Sementara untuk Rasio Ketergantungan Anak (*Child Dependency Ratio*) Tahun 2024 tercatat sebesar 27,51 yang berarti bahwa terdapat sekitar 28 orang anak menjadi beban tanggungan untuk setiap 100 orang penduduk yang berada dalam usia produktif. Di sisi lain, penduduk usia lanjut juga tidak dapat melakukan kegiatan secara produktif, sehingga akan menjadi beban tanggungan bagi penduduk lainnya yang masih produktif. Rasio Ketergantungan Lanjut Usia (*Old Dependency Ratio*) Tahun 2024 di Kabupaten Morowali sebesar 6,08 persen. Bila kedua kelompok usia ketergantungan tersebut digabungkan, maka akan diperoleh angka Rasio Ketergantungan Umum (*Dependency Ratio*) sebesar 54,75 persen. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung kurang lebih 55 orang penduduk yang belum/tidak produktif.



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana individu dan kelompok dalam suatu wilayah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup yang mencakup kesehatan, pendidikan, akses terhadap infrastruktur dasar, serta keterlibatan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama yang harus dicapai melalui perencanaan yang sistematis dan berbasis inklusivitas. Pemerintah, melalui kebijakan strategis yang termuat dalam dokumen RPJMD, mengarahkan pembangunan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang holistik, perlu adanya fokus yang lebih spesifik pada beberapa aspek utama, yaitu kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan berkualitas, perlindungan sosial, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu aspek utama yang menentukan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Morowali. Aspek ini mencakup berbagai indikator laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan beberapa indikator lainnya yang sesuai.

A. Pertumbuhan PDRB

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali dapat dilihat dari gambaran perekonomian makro daerah ini, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta peningkatan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/region. PDRB tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

PDRB sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 menjadi 17 lapangan usaha. Sementara laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada Tahun ke-n terhadap nilai pada Tahun ke n-1 (Tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada Tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan nilai agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2020-2024 Kabupaten Morowali disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024 (Persen)

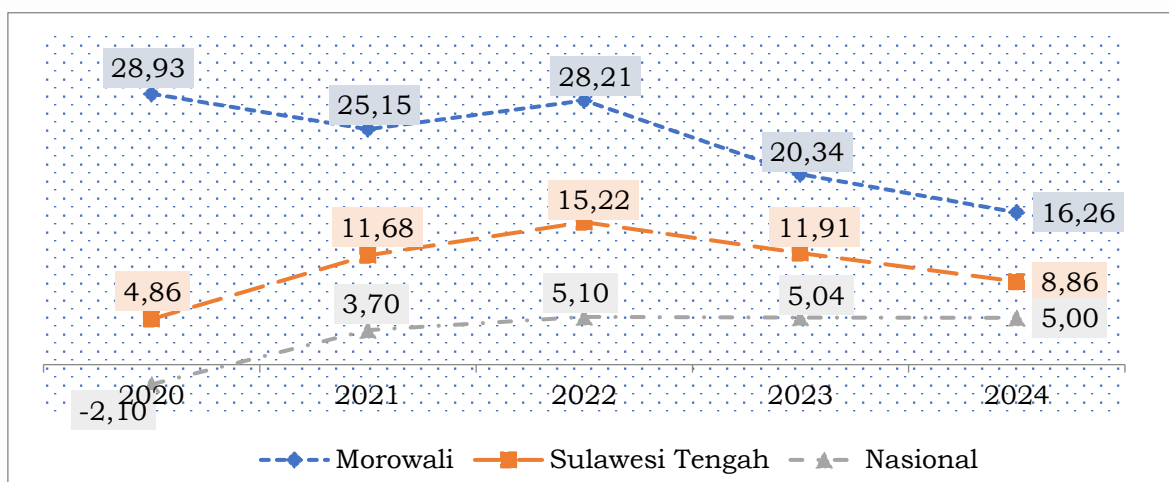
Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(2.76)	3.21	1.81	(0.29)	1.89
B	Pertambangan dan Penggalan	34.40	23.11	17.22	14.08	5.75
C	Industri Pengolahan	35.72	24.53	31.91	25.29	21.01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.47	2.69	11.36	10.10	6.51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	9.06	2.33	1.83	4.53
F	Konstruksi	(14.62)	70.45	34.62	2.36	0.98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(4.98)	9.00	62.22	5.19	12.30
H	Transportasi dan Pergudangan	(28.38)	201.86	151.77	5.86	10.35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	7.09	9.83	23.57	6.70	4.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.23	7.89	5.92	0.29	12.01
L	Real Estat	0.15	3.77	28.73	20.20	15.31
M,N	Jasa Perusahaan	(1.17)	1.27	14.35	10.43	16.26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.06	4.59	(3.00)	2.51	0.96
P	Jasa Pendidikan	(0.18)	0.74	0.48	4.53	6.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.91	4.05	2.22	7.21	6.61
R,S,T,U	Jasa lainnya	(0.44)	14.40	10.05	5.40	11.02
Produk Domestik Regional Bruto		28.93	25.15	28.21	20.34	16.26

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali berdasarkan ADHK 2010 kurun waktu 2020-2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 23.78 persen yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 10.23 persen. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi Tahun 2018 sebesar 112.20 persen. Selanjutnya Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tetap tumbuh positif yakni sebesar 28.93 persen. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Morowali tidak terdampak pandemi Covid-19, yang mana berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali mencapai 25.15 (lebih rendah dari tahun sebelumnya). Selanjutnya data Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali berada dua digit diangka 28.21 persen dan Tahun 2023-2024 menurun menjadi sebesar 20.34 persen dan 16.26 persen.

Terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi, yaitu Industri Pengolahan (21.01 persen), Jasa Perusahaan (16.26 persen), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15.41 persen). Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan rendah yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1.89 persen), Konstruksi (0.98 persen), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0.96 persen).

Sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, mengingat pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan produktivitas di Sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor Pertanian.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.16
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, dalam periode Tahun 2020-2024 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sebesar 28.93 persen, tetap lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 4,86 persen dan rata-rata secara nasional sebesar -2,10 persen. Penyebab pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif, yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali menurun menjadi sebesar 16.26 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional sebesar 5.00 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8.86 persen secara lengkap terdapat pada gambar berikut.

1) Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor ini mencakup Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sub-kategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Perikanan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Sektor ini di sebagian besar daerah Kabupaten/Kota menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam meningkatkan perekonomian daerah setempat. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten Morowali.

Tabel 2.37

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp)					
ADHB	2,023,944.10	2,147,499.60	2,346,565.90	2,444,303.60	2,702,860.00
ADHK 2010	1,397,500.00	1,442,504.70	1,468,633.80	1,464,379.90	1,494,150.00
Kontribusi Sektor (%)					
ADHB	3.26	2.17	1.60	1.55	1.55
ADHK 2010	3.18	2.62	2.08	1.72	1.51

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 mengalami penurunan setiap tahunnya baik berdasarkan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010. Kontribusi sektor

pertanian Tahun 2020 sebesar 3.26 persen untuk PDRB ADHB dan 3.18 persen PDRB ADHK 2010. Terus menurun sampai Tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 1.55 persen untuk ADHB dan 1.51 persen untuk PDRB ADHK 2010. Penurunan ini mencerminkan semakin kecilnya peran sektor pertanian dalam struktur ekonomi Kabupaten Morowali yang semakin didominasi oleh sektor-sektor non-pertanian, seperti sektor industri pengolahan dan pertambangan. Meskipun nilai absolut PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan, pertumbuhannya tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan sektor lainnya, sehingga proporsinya terhadap total PDRB terus menurun. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian dan kebijakan yang mendorong revitalisasi pertanian agar tetap relevan dalam pembangunan ekonomi daerah ke depan antara lain meningkatkan nilai tambah (*value added*), kualitas produksi dan penggunaan teknologi.

2) Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB merupakan ukuran besarnya peran subsektor tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar dalam membentuk total nilai tambah ekonomi suatu daerah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana komoditas palawija berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya di daerah yang berbasis agraris atau memiliki potensi lahan kering dan musim tanam alternatif. Besarnya kontribusi subsektor palawija mencerminkan keberhasilan produktivitas, efisiensi distribusi, dan nilai komersial hasil pertanian, serta kebijakan yang mendukung petani dan agribisnis lokal. Jika kontribusinya meningkat, maka sektor ini dapat menjadi pendorong ketahanan pangan, penyerap tenaga kerja pedesaan, dan penggerak ekonomi lokal.

Tabel 2.38

Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Pertanian/Palawija (Juta Rp)					
ADHB	133,166.15	133,176.10	133,186.05	133,186.05	133,186.05
ADHK 2010	80,704.71	80,710.15	80,715.77	80,715.77	80,715.77
Kontribusi Sektor (%)					
ADHB	0.21	0.13	0.09	0.09	0.09
ADHK 2010	0.18	0.15	0.11	0.11	0.11

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Tren penurunan kontribusi sektor pertanian/palawija terhadap PDRB Kabupaten Morowali selama periode 2020-2024, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK 2010). Pada Tahun 2020, kontribusi sektor palawija sebesar 0.21 persen (ADHB) dan 0.18 persen (ADHK), namun terus mengalami penurunan hingga mencapai 0.11 persen pada Tahun 2022-2024. Meskipun nilai absolut PDRB sektor palawija relatif stabil hingga Tahun 2024, kontribusinya terhadap PDRB total semakin kecil akibat pesatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain, terutama sektor industri dan pertambangan. Semakin menurunnya kontribusi hingga Tahun 2023-2024 mengindikasikan semakin minimnya peran palawija dalam struktur ekonomi daerah, yang berpotensi menunjukkan adanya pengabaian terhadap subsektor ini atau terbatasnya inovasi dan investasi dalam pengembangannya. Hal ini menjadi sinyal perlunya strategi revitalisasi pertanian palawija agar tetap relevan dan berdaya saing dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Morowali.

3) Produksi Sektor Pertanian

Tanaman Ubi Kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau, menurun produksi selama periode Tahun 2019-2024. Penurunan produksi ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan kondisi Kabupaten Morowali sebagai daerah industri tambang yang semakin padat penduduk dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang masuk dari berbagai daerah. Sehingga kebutuhan ketersediaan pangan juga semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang dan kesempatan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali disajikan pada tabel sebagai berikut ini

Tabel 2.39

**Produksi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	42,068.22	45,434.34	39,507.32	39,507.32	39,507.32
Jagung	1,865.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00
Ubi Kayu	4,186.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00
Ubi Jalar	775	775	775	775	775
Kacang Tanah	56	56	56	56	56
Kacang Kedelai	127	127	127	127	127

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Produksi tanaman padi sawah sebesar 42,068.22 ton pada Tahun 2020. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 8 persen jika dibandingkan produksi tanaman padi pada Tahun 2021, yaitu sebesar 45,434.34 ton. Produksi tanaman padi mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 39,507.32 ton sampai Tahun 2024. Pada tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai konstan sepanjang Tahun 2020-2024.

4) Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Subkategori tanaman perkebunan terdiri dari perkebunan semusim dan perkebunan Tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lain sampai kegiatan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan.

Tabel 2.40

Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Perkebunan/Tanaman Keras (Juta Rp)					
ADHB	652,913.58	652,913.35	652,916.52	652,916.52	652,916.52
ADHK 2010	465,020.50	465,019.60	465,019.89	465,019.89	465,019.89
Kontribusi Sektor (%)					
ADHB	1.05	0.66	0.44	0.44	0.44
ADHK 2010	1.06	0.85	0.66	0.66	0.66

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Pada Tahun 2024 Nilai Sektor Perkebunan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp652,916.52 juta, kemudian untuk nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp465,019.89 juta. Sementara itu, untuk kontribusi sektor ini terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Morowali sebesar 0.44 persen menurun dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0.66 persen juga menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya luasan produksi akibat alih fungsi lahan perkebunan menjadi kawasan industri.



5) Produksi Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan yang memiliki jumlah produksi besar yakni Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, dan kakao. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Morowali selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif antar komoditas. Kelapa sawit tetap menjadi komoditas dominan dengan volume produksi tertinggi, meskipun mengalami penurunan dari 80,148.90 ribu ton Tahun 2020 menjadi 47,992.95 ribu ton Tahun 2023-2024. Produksi kelapa sempat menurun hingga titik terendah Tahun 2022 (733.49 ribu ton), namun meningkat menjadi 1,479.95 ribu ton pada 2024. Produksi kopi mengalami penurunan cukup drastis dari 23,447.00 ribu ton Tahun 2020 menjadi 19,555.00 ribu ton Tahun 2024, mengindikasikan penurunan minat atau tantangan produksi.

Kakao juga menunjukkan tren penurunan dari Tahun 2020 sebesar 6,971.70 ribu ton menjadi hanya 820,82 ribu ton dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, produksi karet hanya tercatat pada Tahun 2021–2022. Secara keseluruhan, meskipun beberapa komoditas menunjukkan pemulihan, tren penurunan pada komoditas utama seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao menunjukkan perlunya intervensi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi pasar, dan keberlanjutan usaha perkebunan.

Tabel 2.41

Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN (Ribuan Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	1,163.23	739.35	733.49	1,025.95	1,479.95
Kelapa Sawit	80,148.90	74,092.52	76,096.25	47,992.95	47,992.95
Kopi	23,447.00	35,200.00	33,626.00	20,026.00	19,555.00
Kakao	6,971.70	2,400.00	1,727.75	820.82	820.82
Karet	0	2,400.00	2,400.00	0	0

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

6) Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Sub-kategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Pada Tahun 2024, nilai produksi Sektor Kehutanan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp73,585.14 juta, dan berdasarkan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp55,568.66 juta. Kontribusi sektor terkait terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Morowali tahun 2024 sebesar 0.05

persen menurun dari Tahun 2020 sebesar 0.12 persen. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0.08 persen Tahun 2024 juga menurun dari tahun sebelumnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42

**Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Kehutanan (Juta Rp)					
ADHB	73,573.22	73,579.18	73,585.14	73,585.14	73,585.14
ADHK 2010	55,563.29	55,565.91	55,568.66	55,568.66	55,568.66
Kontribusi Sektor (%)					
ADHB	0.12	0.07	0.05	0.05	0.05
ADHK 2010	0.13	0.10	0.08	0.08	0.08

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

7) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Kategori Pertambangan dan Penggalan dirinci menjadi 4 (empat) subkategori, antara lain: sub-kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, sub-kategori Pertambangan Batubara dan Lignit, subkategori Pertambangan Bijih Logam, dan sub-kategori Pertambangan dan Penggalan lainnya.

Tabel 2.43

**Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Pertambangan (Juta Rp)					
ADHB	11,364,639.80	18,404,883.50	25,313,779.30	28,114,258.80	29,202,530.00
ADHK 2010	10,315,559.60	12,701,490.40	14,888,973.60	16,985,391.50	17,961,630.00
Kontribusi Sektor (%)					
ADHB	18.29	18.61	17.25	17.79	16.80
ADHK 2010	23.50	23.09	21.08	19.99	18.18

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Secara umum, nilai PDRB sektor pertambangan terus meningkat dari Rp11,364,639.80 juta Tahun 2020 menjadi Rp29,202,530.00 juta Tahun 2024 (ADHB), namun kontribusinya terhadap total PDRB justru menunjukkan tren penurunan dari 18.29 persen Tahun 2020 menjadi 16.80 persen Tahun 2024. Sementara ADHK 2010 juga mengalami kontribusi menurun dari 23.50 persen menjadi 18.18 persen dalam periode yang sama. Penurunan kontribusi ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai sektor pertambangan tumbuh, pertumbuhannya tidak secepat sektor-sektor lain dalam struktur ekonomi Kabupaten Morowali. Hal ini mencerminkan adanya diversifikasi ekonomi daerah, namun juga perlu diwaspadai agar sektor unggulan ini tetap dapat memberikan manfaat optimal, baik dari sisi ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan dan sosial.

8) Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Sektor pariwisata Kabupaten Morowali merupakan potensi ekonomi yang strategis berbasis kekayaan alam, budaya lokal, dan keunikan wilayah pesisir serta kepulauan. Wilayah ini memiliki daya tarik wisata yang beragam, mulai dari pantai berpasir putih, terumbu karang, hingga kawasan konservasi laut dan hutan tropis yang masih alami. Selain itu, budaya lokal masyarakat Kabupaten Morowali yang khas dan beragam dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan wisata berbasis kearifan lokal. Pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi kreatif, dan pelestarian lingkungan. Destinasi wisata yang indah dan terkenal adalah Pulau Sombori. Pada Tahun 2024, nilai Sektor Pariwisata berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp89,469.19 juta, dan untuk nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp51,263.20 juta. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB ADHB sebesar 0.06 persen dan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0.07 persen yang diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Juta Rp)					
ADHB	78,771.80	79,752.75	89,469.19	89,469.19	89,469.19
ADHK 2010	53,704.00	46,574.85	51,263.20	51,263.20	51,263.20

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor (%)					
ADHB	0.13	0.08	0.06	0.06	0.06
ADHK 2010	0.12	0.08	0.07	0.07	0.07

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

9) Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Subkategori sektor perikanan dan kelautan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun laun. Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Morowali sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Pada Tahun 2022, nilai subsektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp1,026,025.38 juta, dan berdasarkan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp570,898.91 juta. Kontribusi sektor ini Tahun 2024 terhadap nilai PDRB ADHB sebesar 0.70 persen menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi berdasarkan PDRB ADHK 2010 sebesar 0.81 persen juga lebih rendah dari tahun sebelumnya yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan (Juta Rp)					
ADHB	1,026,002.66	1,026,015.05	1,026,025.38	1,026,025.38	1,026,025.38
ADHK 2010	570,881.76	570,891.88	570,898.91	570,898.91	570,898.91
Kontribusi Sektor (%)					
ADHB	1.65	1.04	0.70	0.70	0.70
ADHK 2010	1.30	1.04	0.81	0.81	0.81

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

10) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang mencakup distribusi dan pertukaran barang dan jasa antar pelaku usaha, konsumen, serta antarwilayah. Sektor ini menjadi penghubung utama antara produsen dan konsumen, serta berperan penting dalam mendorong perputaran

ekonomi daerah. Perdagangan yang berkembang mencerminkan dinamika permintaan, daya beli masyarakat, serta efisiensi logistik dan infrastruktur. Sebagai salah satu sektor strategis, perdagangan turut mendukung pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kategori ini terdiri atas subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.46

**Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rp)					
ADHB	949,451.70	1,065,441.30	1,832,172.10	1,996,082.90	2,419,030.00
ADHK 2010	589,746.00	642,836.10	1,042,806.90	1,096,933.80	1,231,820.00
Kontribusi Sektor (%)					
ADHB	1.53	1.08	1.25	1.26	1.39
ADHK 2010	1.34	1.17	1.48	1.29	1.25

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Morowali selama periode 2020–2024 berdasarkan ADHB dan ADHK 2010 mengalami fluktuasi. Meskipun nilai absolut PDRB sektor perdagangan mengalami peningkatan Tahun 2020-2023, kontribusi terhadap PDRB total justru mengalami penurunan. Tahun 2020, kontribusi sektor perdagangan sebesar 1.53 persen (ADHB) dan 1.34 persen (ADHK), namun terus menurun hingga 1.39 persen (ADHB) dan 1.25 persen (ADHK) Tahun 2024. Penurunan kontribusi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan tidak secepat sektor-sektor lainnya seperti pertambangan atau industri pengolahan yang mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Morowali. Meskipun peran perdagangan tetap penting dalam mendukung perputaran barang dan jasa, kondisi ini mencerminkan perlunya strategi penguatan sektor perdagangan agar tetap kompetitif dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

11) Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori sektor industri terdiri dari subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas; Industri Makanan dan Minuman; Industri Pengolahan Tembakau; Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; Industri Kertas dan

Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Logam Dasar; Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan; Industri Alat Angkutan; Industri Furnitur Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Sektor Industri sebagai sektor dengan nilai dan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Morowali. Aktivitas industri logam dasar yang besar di PT. IMIP menjadi aktivitas sentra dari sektor ini di Kabupaten Morowali.

Tabel 2.47

**Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Industri (Juta Rp)					
ADHB	43,380,744.30	70,456,853.90	107,508,915.00	114,926,064.10	127,964,170.00
ADHK 2010	28,813,486.60	35,981,449.60	47,573,453.00	59,604,084.10	72,129,280.00
Kontribusi Sektor (%)					
ADHB	69.80	71.23	73.25	72.72	73.60
ADHK 2010	65.63	65.42	67.36	70.13	73.00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Sektor industri merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Morowali selama periode 2020–2024, dengan kontribusi yang terus meningkat secara konsisten. Berdasarkan ADHB, kontribusi sektor industri meningkat dari 69.80 persen Tahun 2020 menjadi 73.60 persen Tahun 2024, sementara berdasarkan ADHK 2010, kontribusinya meningkat dari 65.63 persen menjadi 73.00 persen dalam periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri, khususnya industri pengolahan berbasis pertambangan seperti nikel, menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan nilai PDRB sektor industri baik secara nominal maupun riil mencerminkan ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi. Meski berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dominasi sektor ini juga perlu diimbangi dengan penguatan sektor lainnya agar tercipta struktur ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

12) Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri

Keberadaan industri kecil (*small industry*) atau kerajinan rumah tangga (*home industry*) ini menempati peran yang penting dan strategis dalam pembangunan, karena dapat memberikan corak dan warna terhadap usaha-usaha pembangunan pertanian, kepariwisataan, dan tingkat urbanisasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkembangan kontribusi industri rumah tangga terhadap nilai PDRB Sektor industri Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48

Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap Sektor PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)					
ADHB	43,380,744.30	70,456,853.90	107,508,915.00	114,926,064.10	127,964,170.00
ADHK 2010	28,813,486.60	35,981,449.60	47,573,453.00	59,604,084.10	72,129,280.00
Nilai PDRB Sektor Industri Rumah Tangga (Juta Rp)					
ADHB	1,730,361.43	1,887,050.00	2,043,738.56	2,043,738.56	2,043,738.56
ADHK 2010	917,660.15	961,264.43	1,004,868.70	1,004,868.70	1,004,868.70
Kontribusi Sektor (%)					
ADHB	3.99	2.68	1.90	1.90	1.90
ADHK 2010	3.18	2.67	2.11	2.11	2.11

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Merujuk data pada tabel di atas, Tahun 2024 nilai PDRB ADHB sektor Industri Rumah Tangga sebesar Rp2,043,738.56 juta, kemudian nilai PDRB ADHK 2010 Sektor Industri Rumah Tangga sebesar Rp1,004,868.70 juta. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB ADHB sebesar 1.90 persen menurun dari tahun sebelumnya dan untuk kontribusi sektor industri PDRB ADHK 2010 sebesar 2.11 persen.

13) Pertumbuhan Investasi terhadap PDRB

Pertumbuhan produksi pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan (pertumbuhan) faktor-faktor produksinya (modal, tenaga kerja, tanah, dan teknologi). Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi dihubungkan dengan perkembangan faktor-faktor produksi. Salah satu metode yang dikembangkan untuk menghubungkan pertumbuhan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi (output) adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR adalah suatu konsep yang menghubungkan besarnya pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dengan pertambahan PDB atau PDRB. Banyak studi menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi suatu negara erat kaitan dengan tingkat produktivitas penggunaan modal, sehingga penggunaan ICOR untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan faktor produksi modal dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu, ICOR dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal. Semakin rendah ICOR berarti perekonomian tersebut semakin efisien dalam menggunakan barang modal.

ICOR dapat pula menunjukkan kecenderungan penggunaan metode produksi (padat karya atau padat modal) dalam suatu perekonomian. Penggunaan metode produksi padat modal akan cenderung menyebabkan nilai ICOR menjadi tinggi. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi ICOR adalah periode tenggang waktu (*time lag*) antara saat melakukan investasi dengan saat berproduksi. Tenggang waktu yang terlalu lama antara saat investasi dengan saat berproduksi membuat nilai ICOR menjadi tinggi. Data mengenai nilai investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ICOR Kabupaten Morowali selama periode 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Investasi, Pertumbuhan PDRB dan ICOR Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp)	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Perubahan-(Juta Rp)	9,799,545.10	11,098,950.20	15,620,225.00	14,365,774.80	13,821,525.60
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	10,138,620.20	26,837,374.10	37,313,890.00	37,876,610.00	39,511,560.00
ICOR	1.03	2.42	2.39	2.64	2.86

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Pengaruh investasi terhadap perubahan PDRB yang relatif kecil tersebut juga dapat diamati melalui nilai ICOR yang dapat dikatakan sangat baik Tahun 2020 yakni sebesar 1.03 persen dan meningkat sampai Tahun 2024 sebesar 2.86 persen. Kondisi menunjukkan dibutuhkan nilai investasi yang lebih besar untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). ICOR Kabupaten Morowali selama periode Tahun 2020-2024 dapat dikatakan cukup tinggi disebabkan oleh kegiatan penanaman modal di Kabupaten Morowali yang dominan pada sektor pertambangan dengan kebutuhan modal relatif besar bersifat jangka panjang, belum dapat berproduksi secara optimal pada periode awal kegiatan investasi. Namun demikian, di masa depan ketika kegiatan penanaman modal yang dilakukan telah mampu menghasilkan nilai produksi secara optimal, diyakini akan menghasilkan nilai ICOR yang semakin menurun.



B. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan adalah rasio jumlah orang miskin terhadap jumlah penduduk suatu wilayah (negara atau daerah) pada Tahun tertentu. Seseorang dikatakan miskin bila pendapatan berada di bawah ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin adalah setara dengan harga 2.100 kalori bahan makanan ditambah 10 (sepuluh) persen dari padanya untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin tergantung kepada besarnya pendapatan dan pendapatan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat harga bahan makanan utama masyarakat dan tingkat harga barang konsumsi lain. Gambaran kondisi kemiskinan Kabupaten Morowali dijelaskan pada beberapa aspek yaitu: garis kemiskinan, penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), yang dapat dijelaskan pada beberapa bagian berikut ini.

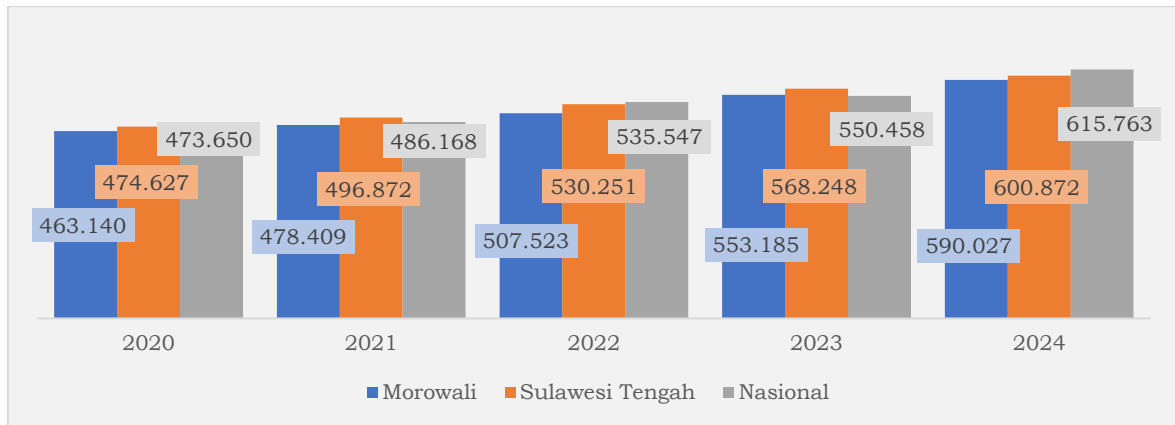
1) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan Kabupaten Morowali periode 2020-2024 mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Rata-rata peningkatan garis kemiskinan Kabupaten Morowali dalam rentan waktu tersebut sebesar 6.26 persen. Pada Tahun 2020 GK sebesar Rp463,140 perkapita/bulan

meningkat menjadi sebesar Rp590,027 perkapita/bulan. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah, Nasional kurun Tahun 2020-2024 secara lengkap terdapat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.17

Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Nasional Tahun 2020-2024

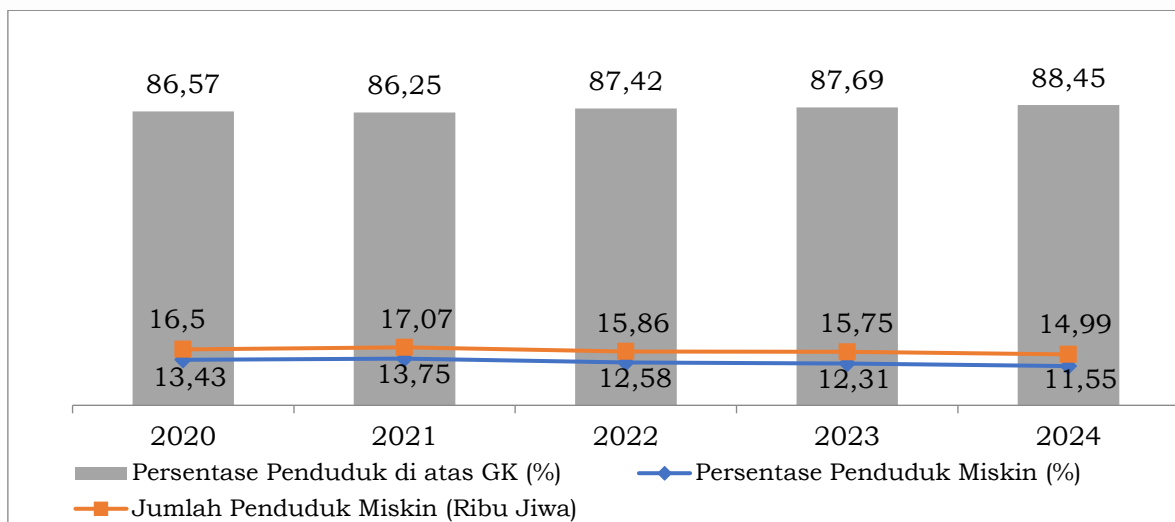
Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan signifikan dari Tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya hidup, terutama akibat inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan standar konsumsi minimum. Faktor lain yang berkontribusi adalah meningkatnya upah tenaga kerja seiring dengan ekspansi industri pertambangan di Kabupaten Morowali, yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 pada Tahun 2020-2021 mempercepat perubahan struktur ekonomi dan meningkatkan ketimpangan pendapatan, sehingga batas minimum garis kemiskinan terus mengalami penyesuaian. Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional, Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Sulawesi tengah dan Nasional dengan capain Tahun 2024 sebesar Rp590.027 perkapita/bulan, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp600.872 perkapita/bulan, dan Nasional sebesar Rp615.763 perkapita/bulan.

2) Persentase Penduduk Miskin (P0)

Penduduk miskin (*poverty people*) merupakan masalah utama yang terjadi di setiap daerah. Sementara itu, pembangunan dimaksudkan sebagai suatu proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata, sehingga masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan. Wujud nyata dari kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup (*basic needs*), yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat

konsumsi masyarakat (*consumption society*). Oleh karena itu, berbagai upaya dan usaha telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, melalui peningkatan kinerja perekonomian daerah, maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemiskinan (*poverty*) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada gambar berikut.



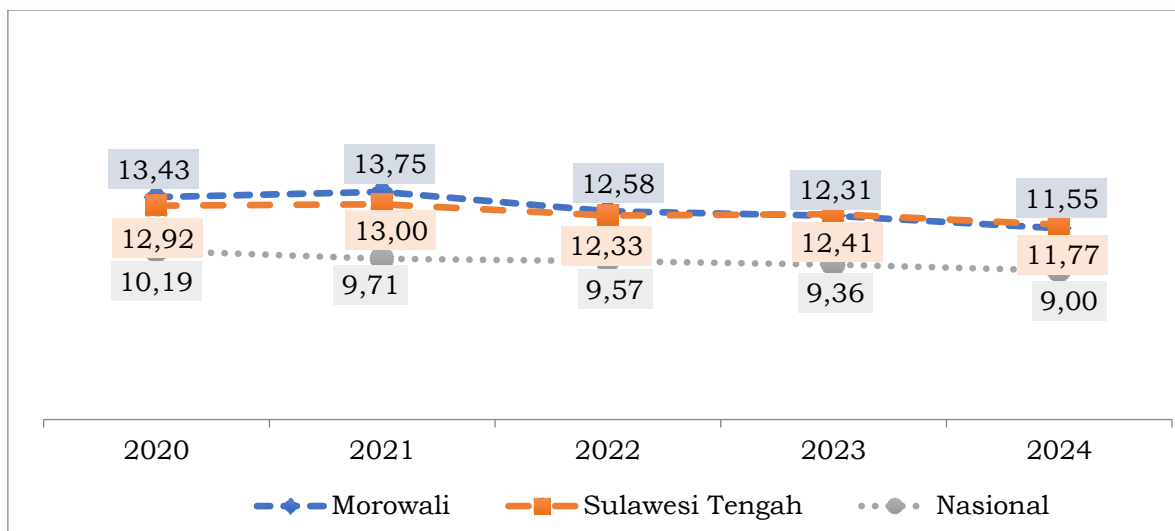
Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.18
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Penduduk di atas
Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali selama periode 2020 hingga 2024. Persentase penduduk miskin turun dari 13.43 persen Tahun 2020 menjadi 11.55 persen Tahun 2024, demikian pula jumlah penduduk miskin menurun dari 16.50 ribu jiwa menjadi 14.99 ribu jiwa. Seiring dengan menurunnya jumlah penduduk miskin, maka persentase penduduk di atas garis kemiskinan juga meningkat dari 86.57 persen Tahun 2020 menjadi 88.45 persen Tahun 2024, menandakan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Morowali dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional masih lebih tinggi di atas rata-rata, menunjukkan adanya tantangan struktural, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, atau ketimpangan hasil pembangunan antarwilayah. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang lebih rendah mencerminkan capaian pembangunan yang lebih baik di wilayah tersebut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

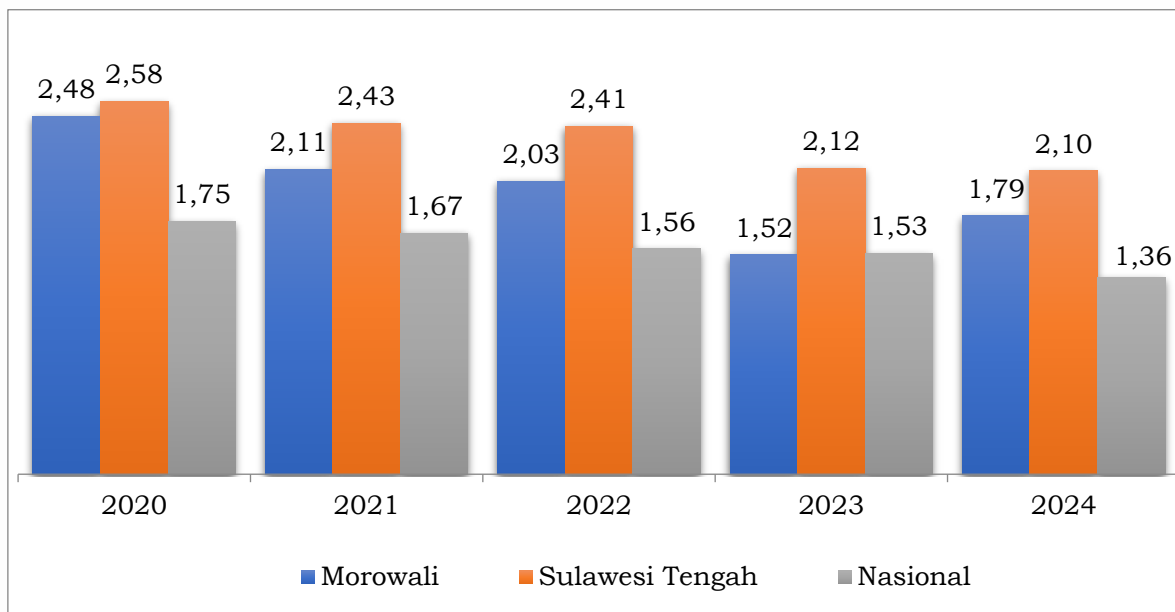
Gambar 2.19

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Morowali selama periode 2020–2024 cenderung menurun, dari 13.43 persen Tahun 2020 menjadi 11.55 persen Tahun 2024. Jika dibandingkan secara nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali masih berada di atas rata-rata nasional, yang terus menurun dari 10.19 persen menjadi 9.00 persen, menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Morowali menunjukkan kemajuan dalam pengurangan kemiskinan, namun masih menghadapi tantangan struktural yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional, yang berada dalam tren positif. Berkaitan dengan penurunan penduduk miskin selama Tahun 2020-2024 yang relevan dengan penurunan di Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berikut diuraikan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

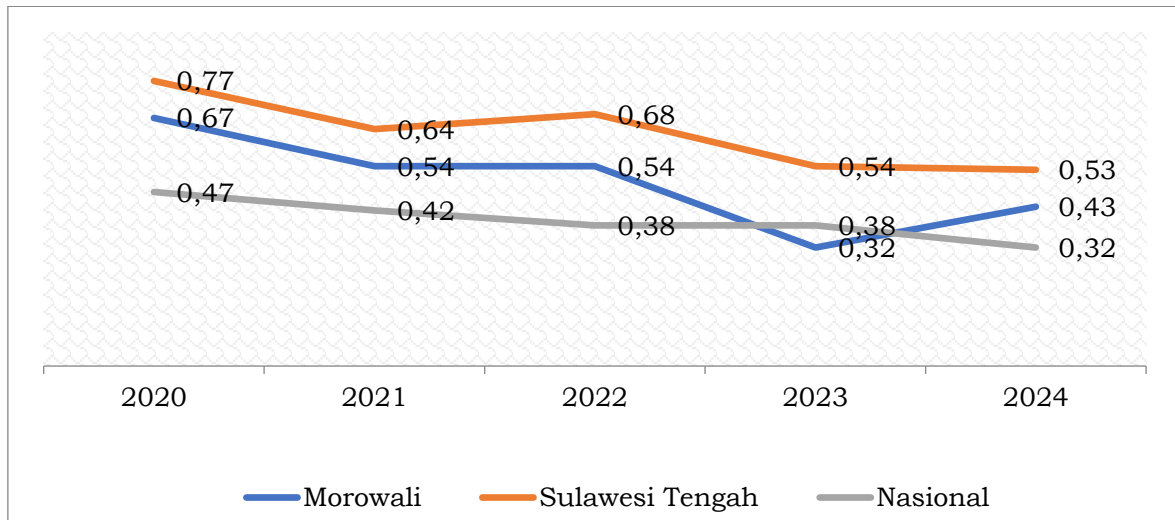
Gambar 2.20

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Nilai Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali cenderung meningkat dan berfluktuatif. Tahun 2020 sebesar 2.48 menurun menjadi 1.79 Tahun 2024. P1 Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih lebih tinggi dari rata-rata Nasional. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk miskin di Kabupaten Morowali Tahun 2024 hanya kekurangan sekitar 1.79 persen dari garis kemiskinan untuk keluar dari status miskin. Meski masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, angka ini menandakan perbaikan kondisi ekonomi penduduk miskin di Kabupaten Morowali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan keberhasilan upaya pengurangan ketimpangan kedalaman kemiskinan.

4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Data indek keparahan kemiskinan Kabupaten Morowali (P2) ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.21

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Morowali berfluktuatif dengan kecendrungan menurun. Hal ini terlihat dari capaian Tahun 2019 sebesar 0.50 menurun menjadi sebesar 0.43 Tahun 2024. Kondisi P2 Kabupaten Morowali, tergolong tinggi berada di atas rata-rata nasional walaupun berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah setempat. Upaya melalui berbagai program dan bantuan sosial yang dikucurkan harus tepat sasaran dan sesuai dengan target. Capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kabupaten Morowali ternyata belum sepenuhnya mampu memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam kemiskinan, dan cenderung melebar jarak pendapatan kemiskinan di antara penduduk miskin.

C. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan indikator yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah yang diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi.

Besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Manfaat menghitung PDRB Perkapita adalah 1) Mengukur Kesejahteraan Ekonomi, semakin tinggi PDRB perkapita, maka semakin besar rata-rata pendapatan yang dapat dinikmati penduduk. 2) Perbandingan Ekonomi Antar Wilayah. Artinya, PDRB perkapita digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antara daerah, baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. 3) Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan, yaitu Pemerintah menggunakan PDRB per kapita untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi dan merancang strategi pembangunan. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50
PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

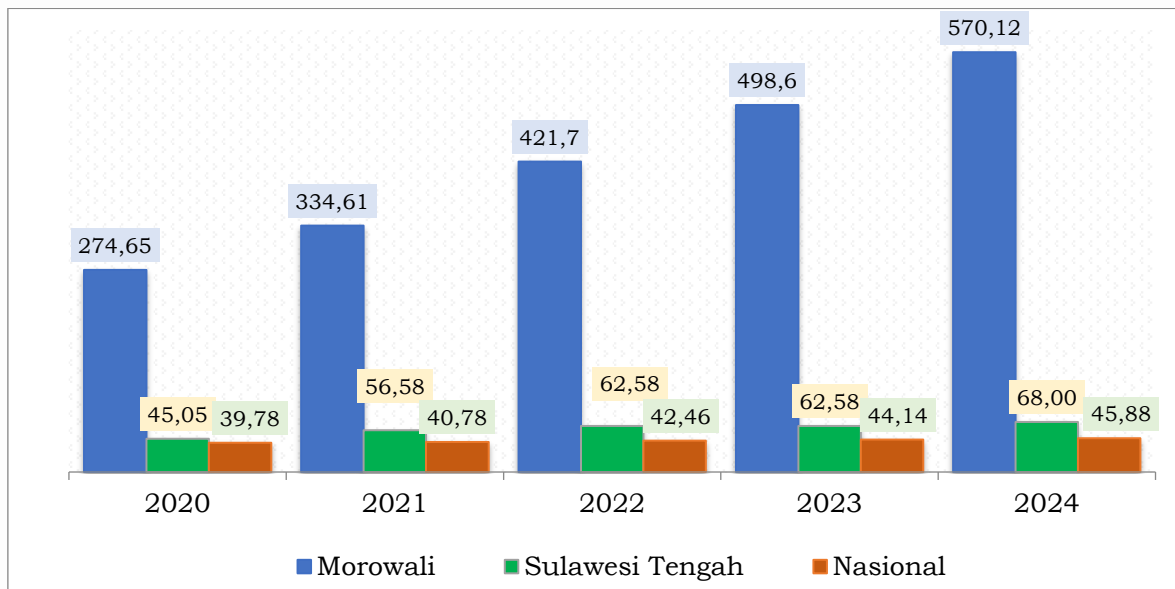
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
ADHB	62,148.34	98,916.81	146,599.32	158,048.73	173,864.99
ADHK 2010	43,902.29	55,001.24	70,515.62	84,989.24	98,808.77
Nilai PDRB Per kapita (juta rupiah)					
ADHB	388.80	601.78	876.42	927.23	1,003.18
ADHK 2010	274.65	334.61	421.70	498.60	570.12
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen)	(2.63)	21.83	26.03	18.24	14.34
Jumlah Penduduk (orang)	161,727	167,910	176,244	170,450	198,968

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah).

Selama periode 2020-2024 PDRB perkapita Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan terus meningkat baik berdasarkan ADHB maupun ADHK 2010. Tahun 2020 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp388.80 juta, mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1,003.18 juta Tahun 2024. Sementara berdasarkan ADHK 2010 Tahun 2020 sebesar Rp274.65 juta dan meningkat menjadi sebesar Rp570.12 juta. Peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Morowali tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dalam kurun waktu tersebut. Secara umum diketahui, pertumbuhan PDRB Morowali didominasi oleh pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan yang *multiplier effect*nya terhadap perekonomian lokal masih

sangat kecil. Latar belakangnya adalah karena pada kedua sektor tersebut keterlibatan faktor produksi lokal (tenaga kerja, capital, dan skill) masih sangat kecil. Kedua sektor tersebut, terutama pada industri feronikel, merupakan *enclave* dalam ekonomi daerah Kabupaten Morowali.

PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sangat jauh di atas capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana pada Tahun 2020 PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp274.65 juta, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp45.05 juta, dan Nasional sebesar Rp39.78 juta. Pada Tahun 2024 PDRB perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp570.12 juta, sangat jauh dari Nasional mencapai sebesar Rp45.88 juta dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp68.00 juta. Data Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional diuraikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.22

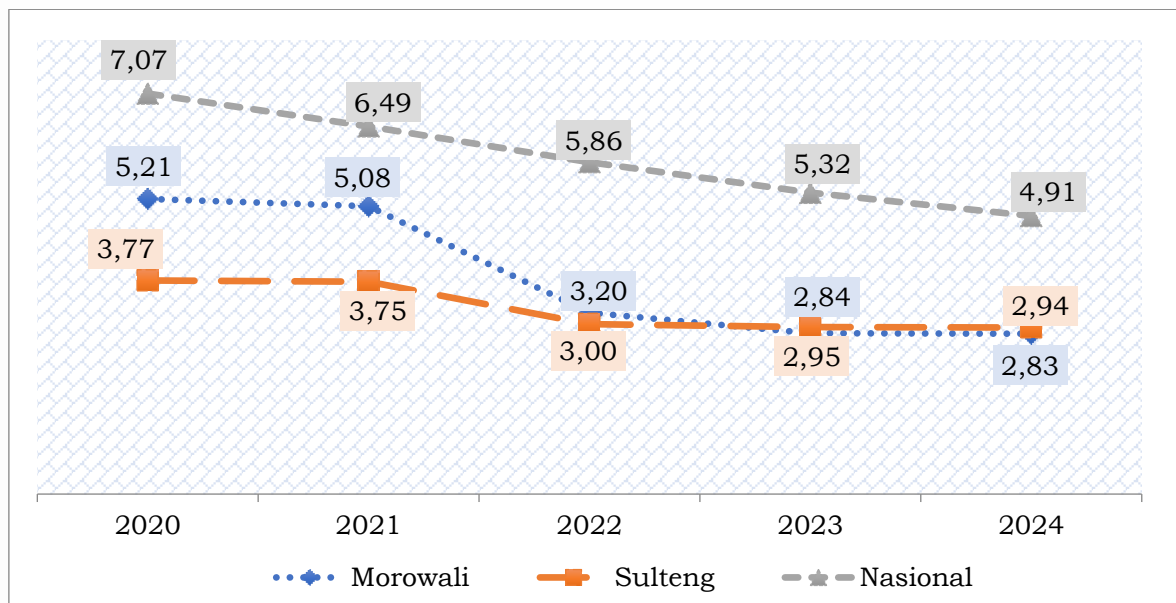
**Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024**

Merujuk pada data gambar di atas, bahwa PDRB perkapita Kabupaten Morowali bukan saja melampaui PDRBn perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan berlipat ganda sebanyak 8.38 kali lipat, atau sebanyak 12.43 kali lipat dari PDB perkapita Indonesia Tahun 2024. Dengan PDRB perkapita yang terus meningkat, diharapkan berdampak positif pula terhadap bidang-bidang yang lain (misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) sehingga tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Morowali akan semakin meningkat.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penganggur (*unemployment*) adalah penduduk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan, karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela), maupun yang tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa).

Sebagai daerah yang kaya Sumber daya Alam (*natural resources*) Kabupaten Morowali ‘negeri tambang’ di Indonesia. Potensi pertambangan ini seharusnya dapat menjadi sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui penciptaan lapangan kerja atau kesempatan kerja. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari data persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang justru menurun dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

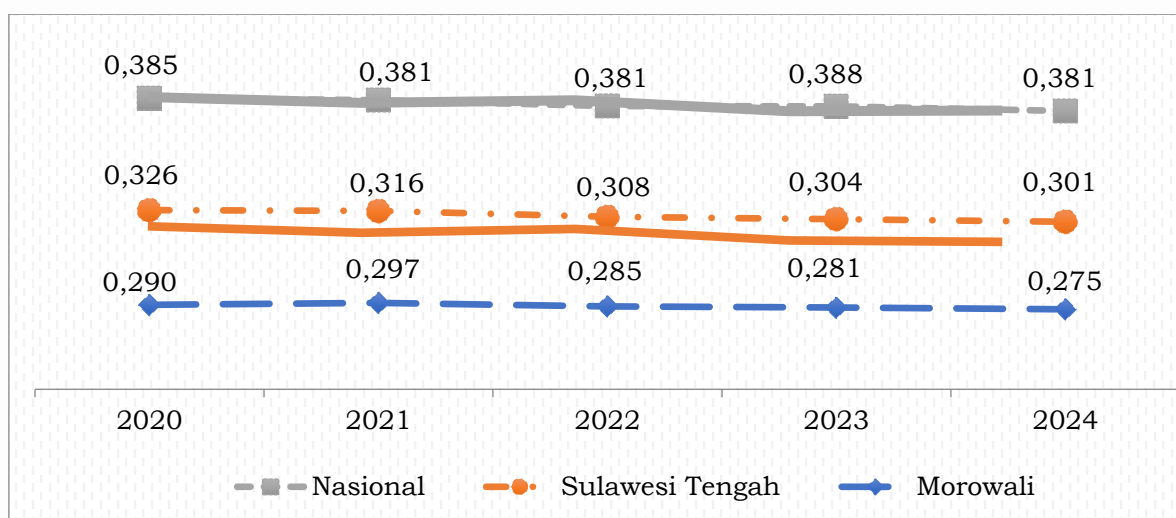
Gambar 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Secara umum, TPT Kabupaten Morowali menunjukkan penurunan sampai Tahun 2024 sebesar 2.83 persen. TPT tertinggi Tahun 2020-2021 sebesar 5,21 persen. Pada Tahun 2020, bencana non-alam Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut berdampak sangat buruk pada kondisi perekonomian nasional, salah satunya dengan meningkatnya jumlah penganggur termasuk di Kabupaten Morowali.

Namun secara umum, TPT Kabupaten Morowali Tahun 2024 berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Morowali mulai membaik dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih optimal, meskipun masih terdapat tantangan fluktuatif pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tren ini berlanjut, Kabupaten Morowali berpotensi menjadi daerah dengan ketenagakerjaan yang lebih stabil dan inklusif dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sulawesi Tengah.

E. Indeks Gini

Koefisien Gini atau indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk menghitung kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat. Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika indeks Gini memiliki angka 1. Hal ini menunjukkan semua pendapatan di wilayah tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Dimana, indeks Gini dengan angka nol atau satu adalah hampir tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian hingga saat ini. Sehubungan dengan besarnya angka indeks Gini yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut : jika indeks Gini berada pada: 1). 0 sampai dengan 0.3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2). di atas 0.3 sampai dengan 0.4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3). lebih besar dari 0.4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Data perkembangan indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.24
Indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Selama kurun waktu 2020-2024 indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2020 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0.290 mengalami penurunan Tahun 2024 menjadi sebesar 0.275. Pada Tahun 2024 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0.301 dan rata-rata Nasional sebesar 0.381. Dengan besaran angka-angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0.284, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

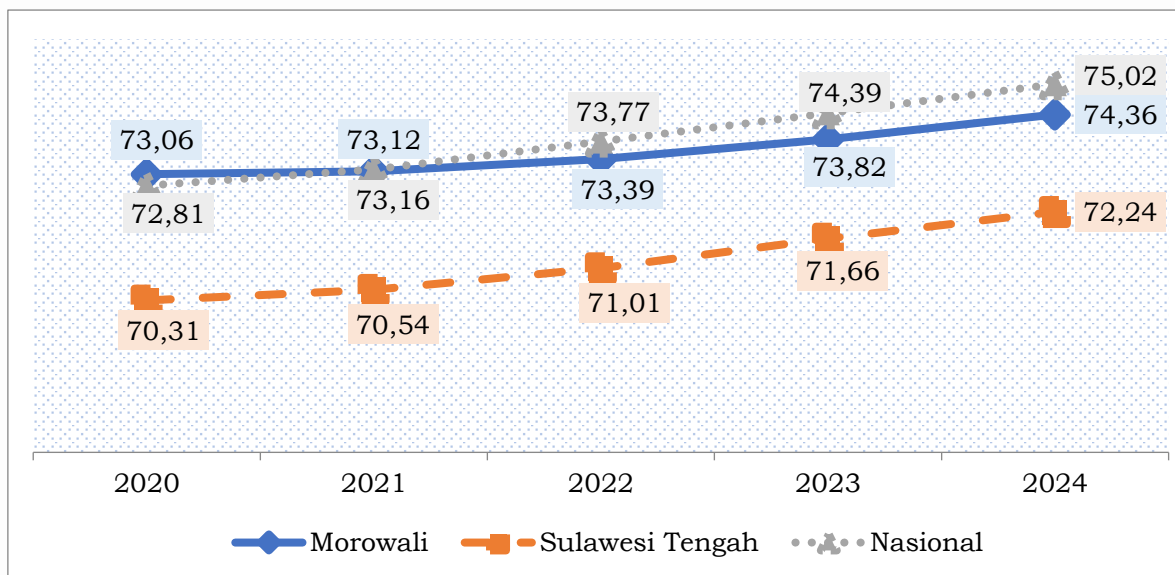
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh antara lain pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh UNDP Tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi Tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru Tahun 2014 dan melakukan backcasting Tahun 2010. Selanjutnya, IPM merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat menggambarkan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

RLS adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Perkembangan IPM Kabupaten Morowali selama Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yakni Tahun 2020 sebesar 72.81 meningkat menjadi sebesar 74.36 Tahun 2024. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2024 masuk kategori tinggi menunjukkan perbaikan di aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 75.02, namun lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 72.24. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Morowali sudah relatif baik. Peningkatan IPM ini juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan sektor industri dan investasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Gambaran perkembangan IPM Kabupaten Morowali diuraikan pada grafik berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.25
IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional
Tahun 2020-2024

Gambaran kategori IPM berdasarkan peta IPM kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.26

Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

Peta IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya Kota Palu dengan status IPM Sangat Tinggi, kemudian disusul Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli pada kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, kabupaten Tojo Una-Una pada kategori IPM sedang.

G. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal menunjukkan persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal dibandingkan dengan total angkatan kerja yang terserap. Konsep ini menekankan pentingnya kualitas penyerapan tenaga kerja, di mana sektor formal identik dengan perlindungan ketenagakerjaan, kepastian hukum, jaminan sosial, dan upah yang lebih stabil. Peningkatan proporsi ini menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, karena memperlihatkan pergeseran dari pekerjaan informal yang rentan menuju pekerjaan yang lebih produktif dan terstandar.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51

**Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

No.	Pekerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bekerja (Orang)	52,455	54,998	54,359	70,978	75,839
2	Pekerja Formal (Orang)	21,846	24,967	22,631	34,139	37,176
Proporsi Lapangan Kerja Formal (Persen)		42.00	45.00	42.00	48.00	49.00

Sumber: BPS Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara keseluruhan. Pada Tahun 2020, proporsi pekerja formal terhadap total pekerja tercatat sebesar 42 persen, kemudian meningkat menjadi 45 persen Tahun 2021. Namun, pada Tahun 2022 proporsi ini menurun menjadi 42 persen, mengindikasikan adanya relokasi tenaga kerja ke sektor informal atau penurunan sementara kapasitas serapan sektor formal. Tahun 2023 dan 2024, proporsi meningkat menjadi 48 persen dan 49 persen, sejalan dengan tren peningkatan jumlah pekerja formal. Peningkatan ini dipengaruhi oleh ekspansi kawasan industri Morowali (PT. IMIP) yang terus menyerap tenaga kerja dalam skala besar, khususnya di sektor pengolahan dan jasa industri pendukung. Meskipun belum mencapai dominasi sektor formal secara penuh, kenaikan proporsi ini menunjukkan arah pembangunan ketenagakerjaan yang makin terstruktur dan formal, dalam mendukung perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

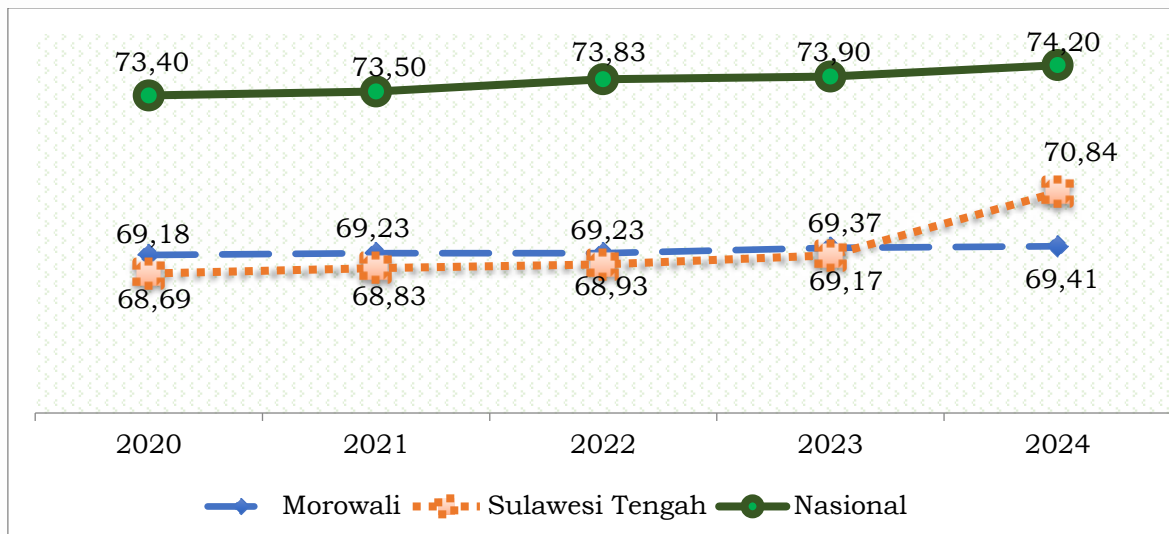
2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

A. Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan UHH dari suatu negara. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui berbagai fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas, meningkatnya kema-mpuan daya beli masyarakat akan berimplikasi dengan makin mening-katkan akses

terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. UHH pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. UHH sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka UHH rendah di suatu daerah menunjukkan capaian pembangunan kesehatan, kecukupan gizi dan kalori.



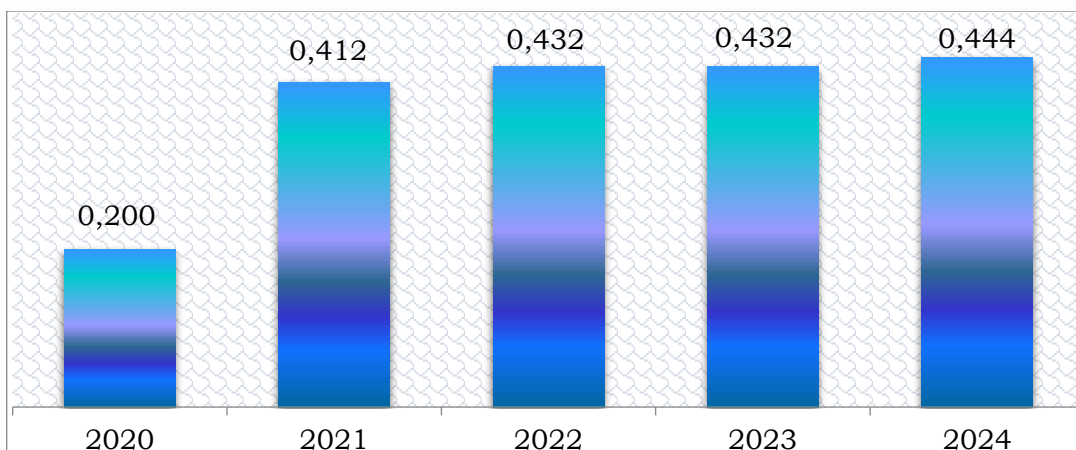
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.27
Angka UHH Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
dan Nasional Tahun 2020-2024

Grafik usia harapan hidup Kabupaten Morowali menunjukkan tren yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 69.18 tahun pada Tahun 2019 menjadi hanya sebesar 69.41 tahun pada Tahun 2024. Kenaikan yang terjadi sangat lambat dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang justru mengalami kenaikan signifikan dari 68.69 tahun menjadi 70.84 tahun pada periode yang sama. Bahkan sejak Tahun 2024, usia harapan hidup Kabupaten Morowali mulai berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, yang sebelumnya selalu lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam peningkatan kualitas hidup, seperti layanan kesehatan, gizi, sanitasi, dan lingkungan yang belum merata dan optimal di Kabupaten Morowali. Jika tidak ditangani, stagnasi ini dapat berdampak pada kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh di wilayah tersebut.

B. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) mengukur derajat kesehatan keluarga berdasarkan pemenuhan sejumlah indikator layanan kesehatan esensial. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui pendekatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan mencakup 12 indikator utama seperti imunisasi dasar lengkap, pemantauan pertumbuhan balita, penggunaan air bersih dan jamban sehat, serta kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional. IKS memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan suatu keluarga, yang kemudian dapat dijadikan dasar perencanaan intervensi kesehatan berbasis wilayah dan rumah tangga. Semakin tinggi nilai IKS, semakin tinggi pula proporsi keluarga yang memenuhi standar indikator kesehatan, yang mencerminkan akses, kesadaran, dan perilaku hidup sehat masyarakat dalam suatu daerah. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

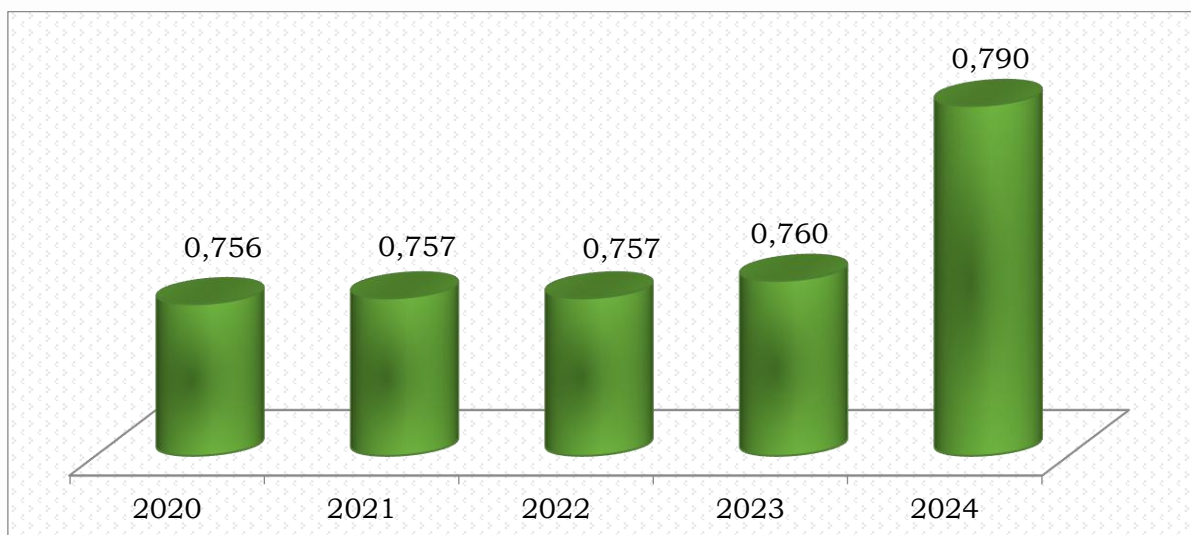
Gambar 2.28

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Grafik Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kualitas kesehatan keluarga. Pada Tahun 2020, IKS berada pada angka yang cukup rendah, yaitu 0.200, namun pada Tahun 2021-2024 meningkat drastis menjadi 0.444. Kenaikan ini menunjukkan adanya intervensi awal yang efektif terhadap pemenuhan indikator-indikator kesehatan keluarga, seperti akses terhadap layanan dasar, sanitasi, imunisasi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penanganan penyakit tidak menular. Secara keseluruhan, bahwa Kabupaten Morowali telah berhasil membangun fondasi kesehatan keluarga yang kuat, namun untuk mencapai indeks yang lebih tinggi diperlukan integrasi lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas yang lebih intensif.

C. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan menggambarkan tingkat capaian pembangunan di bidang kesehatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks ini umumnya disusun berdasarkan sejumlah indikator kunci, seperti angka harapan hidup, status gizi, cakupan imunisasi, akses terhadap layanan kesehatan dasar, ketersediaan sarana dan tenaga medis, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan utama dari indeks kesehatan adalah memberikan gambaran kuantitatif yang dapat dibandingkan antarwilayah maupun antarwaktu, sehingga memudahkan dalam evaluasi dan perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti. Semakin tinggi nilai indeks kesehatan, semakin baik pula kondisi kesehatan masyarakat secara umum, dan efektivitas intervensi serta kinerja sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali. Indeks Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Gambar 2.29

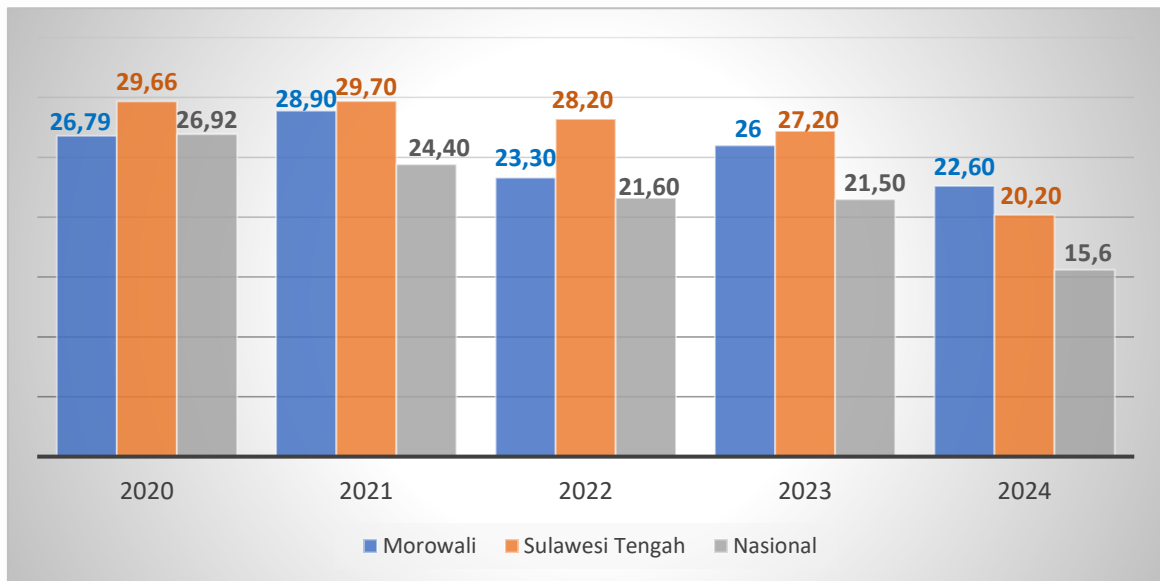
Indeks Kesehatan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Perkembangan grafik indeks kesehatan Kabupaten Morowali menunjukkan tren stabil Tahun 2020-2023, yang menunjukkan konsistensi capaian pembangunan kesehatan dasar. Layanan kesehatan, status gizi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan berada pada tingkat yang relatif baik. Peningkatan indeks pada Tahun 2024, menandakan adanya peningkatan infrastruktur kesehatan, penguatan program promotif dan preventif, serta kolaborasi lintas sektor. Secara keseluruhan bahwa peningkatan indeks kesehatan Kabupaten Morowali menunjukkan kemajuan dalam upaya memperbaiki derajat kesehatan masyarakat secara komprehensif.

D. Prevalensi Stunting

Istilah *underweight* sendiri merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil penimbangan berat badan berdasarkan umur antara gizi buruk dan gizi kurang ($BB/U < -2$ SD) stunting merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil pengukuran tinggi/panjang badan berdasarkan umur antara sangat pendek dan pendek ($TB/U < -2$ SD) sedangkan wasting merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil penimbangan berat badan dibandingkan hasil pengukuran tinggi/panjang badan antara sangat kurus dan kurus ($BB/TB < -2$ SD). Risiko yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka pendek diantaranya meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian, gangguan perkembangan (kognitif, motorik, bicara), meningkatnya beban ekonomi untuk biaya perawatan dan pengobatan anak yang sakit. Jangka panjang menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, konsentrasi belajar dan rendahnya produktivitas kerja.

Penanganan stunting di Kabupaten Morowali menunjukan perkembangan relatif baik. Berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting meningkat dari 26,79 persen tahun 2020 menjadi 28,90 persen tahun 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi 23,30 Persen tahun 2022 mencerminkan keberhasilan program intervensi gizi, peningkatan kesadaran orang tua, dan perbaikan layanan kesehatan dasar. Namun, stunting tahun 2023 kembali meningkat menjadi 26 persen di Tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tantangan baru atau penurunan efektivitas program intervensi yang perlu segera dievaluasi. Tahun 2024 angka stunting menurun menjadi 22,60 persen. Beragam intervensi yang dilakukan mulai dari alokasi dana APBD dan pemanfaatan dana desa dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Morowali.



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

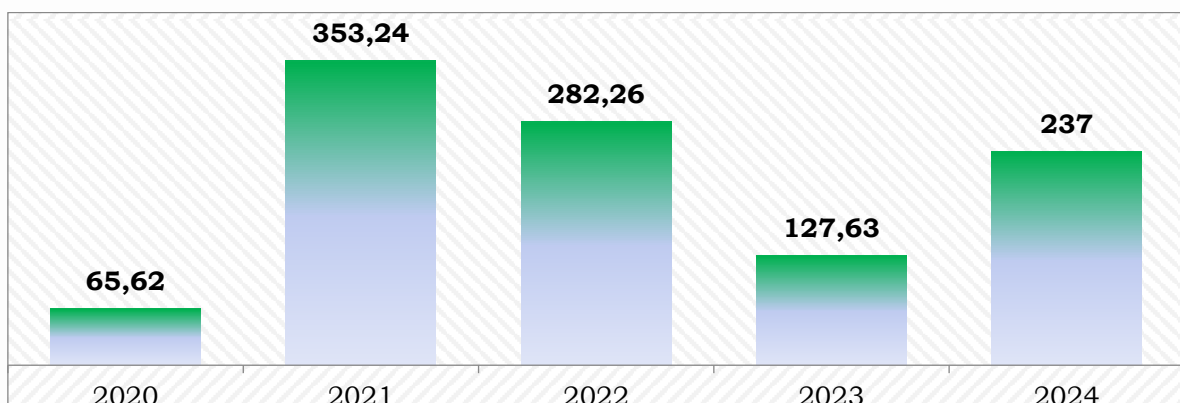
Gambar 2.30

**Angka Stunting Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Nasional
Tahun 2020-2024**

Secara umum prevalensi stunting di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional relatif, namun angka prevalensi stunting Kabupaten Morowali lebih rendah dibandingkan prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah maupun nasional. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya konsisten dari berbagai tingkatan pemerintahan dalam mendorong perbaikan gizi dan intervensi sensitif terhadap anak balita. Capaian Kabupaten Morowali yang jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan efektivitas kebijakan lokal dan sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Secara umum di Provinsi Sulawesi Tengah masalah gizi yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Pemberian makanan tambahan bagi anak dengan gizi kurang tidak dipantau sehingga pemberian tidak tepat sasaran dan tidak sesuai petunjuk teknis yang diberikan. 2. Masih ada tenaga pengelola gizi yang bukan berlatar belakang ilmu gizi (nutrisionis) 3. Kurangnya edukasi soal asupan gizi saat hamil 4. Kondisi sanitasi, kebersihan lingkungan, dan akses air bersih yang buruk bisa meningkatkan potensi terjadinya infeksi penyakit. Seperti diare dan malaria. 5. Infeksi Penyakit seperti diare, penyakit pernapasan seperti pneumonia, dan cacingan, bisa memengaruhi pertumbuhan anak.

E. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup merupakan indikator utama untuk menilai derajat kesehatan ibu di suatu wilayah. AKI mengukur jumlah ibu yang meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan), dari setiap 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI biasanya disebabkan oleh faktor seperti perdarahan, eklampsia, infeksi, dan keterlambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Angka ini juga mencerminkan aksesibilitas dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan ibu, termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis terlatih, serta kualitas perawatan prenatal dan persalinan. Penurunan AKI memerlukan pendekatan lintas sektor, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi, pemantauan kehamilan yang lebih intensif, hingga peningkatan infrastruktur kesehatan, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Angka kematian ibu di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, data diolah

Gambar 2.31

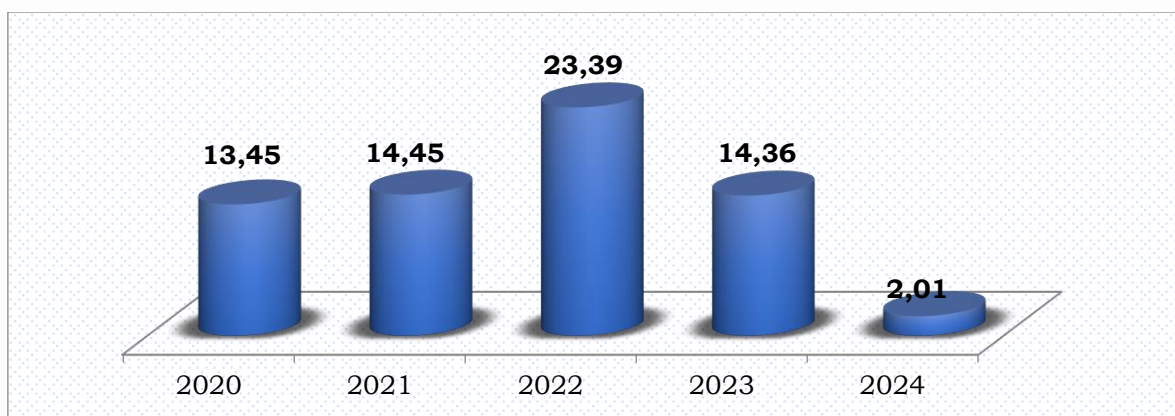
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

AKI per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan tren fluktuatif dengan peningkatan tertinggi Tahun 2021 sebesar 353.24 per 100.000 kelahiran hidup. Kenaikan Tahun 2021 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya layanan kesehatan ibu, termasuk keterbatasan akses terhadap pemeriksaan kehamilan, persalinan aman, dan layanan pasca persalinan. Meskipun terjadi penurunan Tahun 2024, angka AKI masih tergolong tinggi, menandakan pentingnya kesinambungan program intervensi, seperti peningkatan kualitas layanan antenatal, penyediaan bidan di setiap desa, serta penguatan sistem rujukan darurat obstetri untuk menurunkan risiko kematian ibu secara berkelanjutan.

F. Angka Kematian Anak

1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kualitas pelayanan kesehatan suatu wilayah. AKB dihitung sebagai jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu periode tertentu. Tingginya AKB sering dikaitkan dengan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk, sanitasi yang tidak memadai, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan perawatan bayi. Oleh karena itu, penurunan AKB menjadi fokus penting dalam agenda pembangunan kesehatan, yang dapat dicapai melalui peningkatan cakupan imunisasi, layanan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, serta program intervensi gizi dan edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui. Di Kabupaten Morowali, upaya ini harus pula disesuaikan dengan kondisi geografis dan keterjangkauan fasilitas kesehatan sehingga pemerataan pelayanan kesehatan dasar terlaksana secara menyeluruh. Angka kematian bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, data diolah

Gambar 2.32

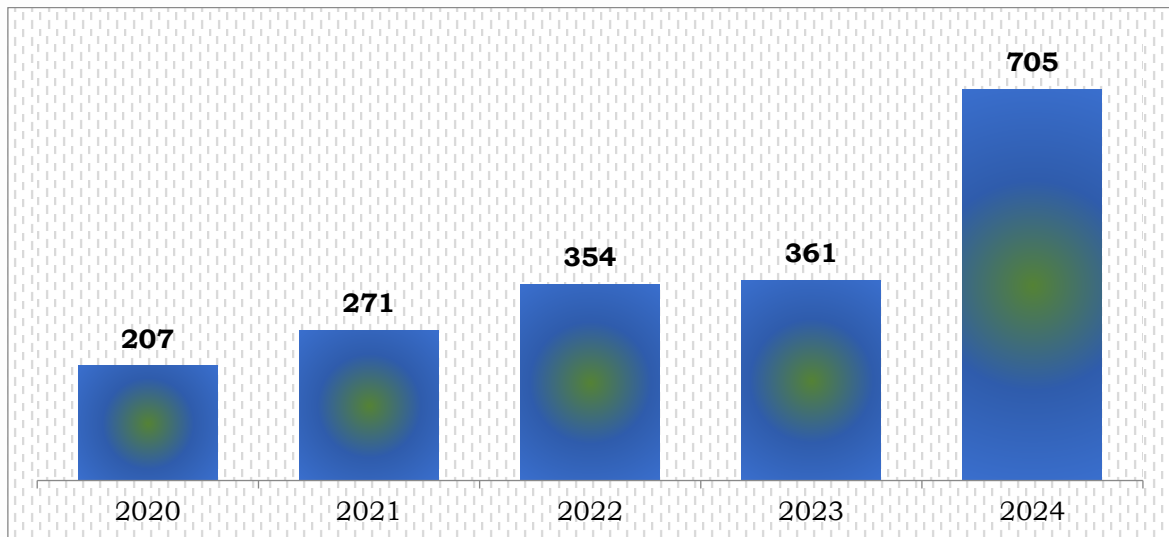
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

AKB per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Morowali menunjukkan fluktuasi selama Tahun 2020-2024. Peningkatan AKB tertinggi terjadi Tahun 2022 mencapai 23.39 per 1.000 kelahiran hidup, yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko kematian bayi pada tahun tersebut. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti BBLR dan Prematuritas, Asfiksia, kelainan kongenital, infeksi serta penyakit penyerta yang paling banyak diderita oleh seorang bayi antara lain pneumonia, kelainan kardiovaskuler dan respiratori, Diare dan lainnya. Masa kehamilan dan pertolongan persalinan pada bayi baru lahir menjadi

masalah utama tingginya kematian pada bayi baru lahir, selain itu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang kurang memadai, tenaga yang belum berkompeten, penyakit bawaan serta sanitasi lingkungan yang kurang memadai juga menjadi penyebab tingginya kematian yang terjadi pada bayi. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB, yaitu dengan peningkatan layanan kesehatan dasar dan intervensi kesehatan seperti imunisasi, layanan antenatal, dan perbaikan gizi anak maupun ibu terutama pada masa kehamilan serta penambahan petugas kesehatan.

G. Cakupan Penemuan Kasus TB (Treatment Coverage)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Basil Tahan Asam) merupakan indikator penting dalam pengendalian tuberkulosis, khususnya untuk mengetahui seberapa besar kemampuan sistem kesehatan dalam mendeteksi kasus aktif dan memberikan pengobatan yang sesuai. TBC BTA positif merupakan bentuk TBC yang paling menular, sehingga penemuan dini dan penanganan yang cepat menjadi sangat krusial dalam memutus rantai penularan di masyarakat. Tingginya cakupan penemuan kasus menandakan keberhasilan skrining aktif, kampanye kesadaran masyarakat, dan efektivitas layanan laboratorium di fasilitas kesehatan primer. Sementara itu, cakupan penanganan menggambarkan kesiapan layanan kesehatan dalam memberikan terapi sesuai standar, termasuk pengawasan minum obat (PMO). Di Kabupaten Morowali, cakupan ini menjadi bagian dari strategi pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan ketahanan terhadap penyakit menular melalui penguatan layanan promotif, preventif, dan kuratif. Jumlah kasus penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Gambar 2.33

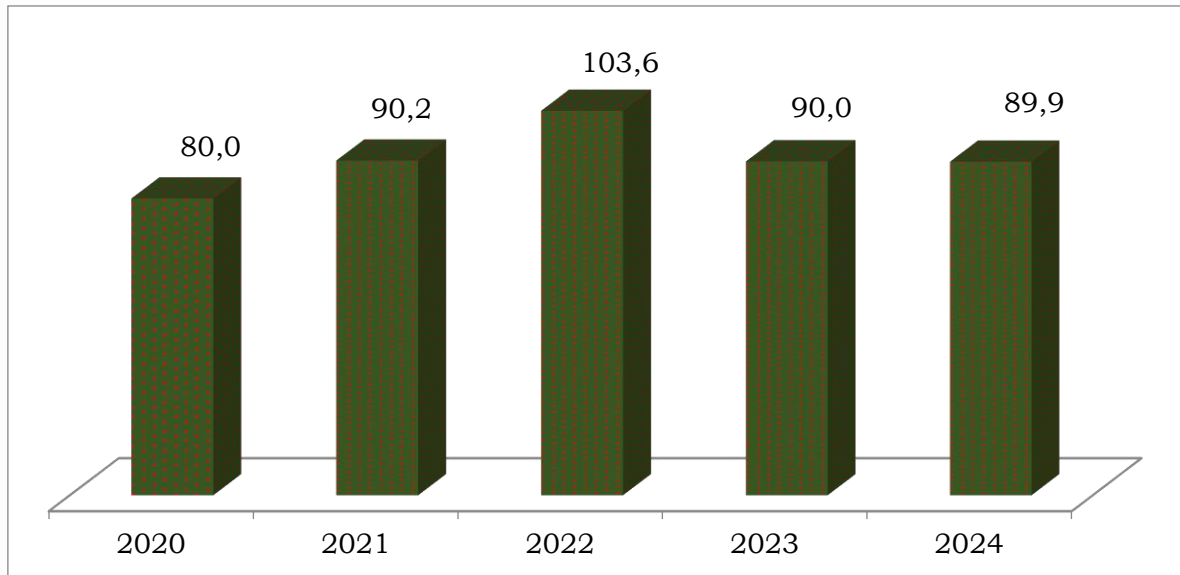
**Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024**

Perkembangan jumlah kasus penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Morowali dari Tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan dari 207 kasus Tahun 2020 menjadi 705 kasus Tahun 2024. Kenaikan bertahap dari tahun ke tahun mencerminkan upaya intensifikasi penemuan kasus aktif melalui skrining dan pelacakan kontak yang semakin efektif. Lonjakan tinggi Tahun 2024 menunjukkan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus TBC, yang disebabkan oleh peningkatan pelaporan dan pencatatan kasus. Meskipun angka kasus terus meningkat, mengindikasikan perbaikan sistem surveilans dan cakupan layanan penanganan TBC yang semakin baik, namun juga menuntut penguatan strategi pencegahan dan edukasi masyarakat agar penularan dapat ditekan secara berkelanjutan.

H. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Success Rate)

Angka keberhasilan pengobatan TB (*Treatment Success Rate*) adalah indikator dalam program penanggulangan tuberkulosis yang mengukur persentase pasien TB yang berhasil menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan dinyatakan sembuh dari total pasien yang memulai terapi dalam periode tertentu. Indikator ini mengukur efektivitas sistem pelayanan kesehatan, ketersediaan obat, kepatuhan pasien, serta kualitas pemantauan dan pendampingan selama proses pengobatan. Keberhasilan pengobatan TB dapat mencegah resistensi obat, memutus rantai penularan, dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB.

WHO menetapkan target minimal keberhasilan pengobatan sebesar 85 persen, jika tercapai menunjukkan sistem kesehatan daerah memiliki kapasitas yang baik dalam menangani TB secara tuntas dan berkelanjutan. Angka keberhasilan pengobatan TB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Gambar 2.34

Angka keberhasilan pengobatan TB (*Treatment Success Rate*) Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Perkembangan angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif baik dan berada di atas standar minimum WHO sebesar 85 persen, kecuali pada Tahun 2020 yang tercatat sebesar 80 persen. Capaian kinerja meningkat Tahun 2021-2024 dengan capaian tertinggi Tahun 2022 dengan angka 103.6 persen, yang menunjukkan penyempurnaan sistem pelaporan, pendampingan pasien yang intensif, atau pelacakan kasus yang lebih efektif. Selain itu, sistem pelayanan kesehatan TB di Kabupaten Morowali berjalan cukup optimal. Secara keseluruhan, tren angka keberhasilan pengobatan TB menggambarkan efektivitas intervensi program pengendalian TB.

I. Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Morowali mengukur sejauh mana masyarakat telah terlindungi oleh sistem asuransi kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Tingginya tingkat kepesertaan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses terhadap layanan kesehatan

yang adil, merata, dan terjangkau, sekaligus menekan beban pembiayaan pribadi (*out of pocket*). Dalam konteks Kabupaten Morowali yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi dan industri yang pesat, serta memiliki tantangan geografis dan persebaran layanan kesehatan yang belum sepenuhnya merata, cakupan JKN menjadi fondasi penting untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk, baik pekerja formal, informal, maupun kelompok rentan. Peningkatan cakupan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki komitmen nyata dalam mendukung tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) dan memperkuat sistem kesehatan daerah secara berkelanjutan. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.52

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)						
1	PBI APBN	50,944	52,434	57,930	55,332	54,870
2	PBI APBD	30,110	34,208	26,652	33,355	40,675
SUB JUMLAH PBI		81,054	86,642	84,582	88,687	95,545
NON PBI						
1	PEKERJA PENERIMA UPAH (PPU)	55,100	59,889	65,641	75,077	103,107
2	PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBP)/MANDIRI	12,516	13,308	12,837	13,143	14,982
3	BUKAN PEKERJA (BP)	555	595	540	1.313	1.293
SUB JUMLAH NON PBI		68,171	73,792	79,018	89,533	119,382
JUMLAH		149,225	160,434	163,600	178,220	214,927

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan, baik pada kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non-PBI. Jumlah total peserta meningkat dari 149,225 orang Tahun 2020 menjadi 214,927 orang Tahun 2024, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan. Kelompok Non-PBI, terutama segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), mengalami peningkatan

tertinggi, dari 55,100 orang Tahun 2020 menjadi 103,107 orang Tahun 2024, sejalan dengan pertumbuhan sektor industri dan formal di wilayah Kabupaten Morowali. Di sisi lain, kelompok PBI juga meningkat, terutama dari sumber APBD, yang menandakan upaya daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat rentan. Kenaikan ini memperlihatkan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan perluasan perlindungan sosial, serta mendekatkan Kabupaten Morowali pada pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC).

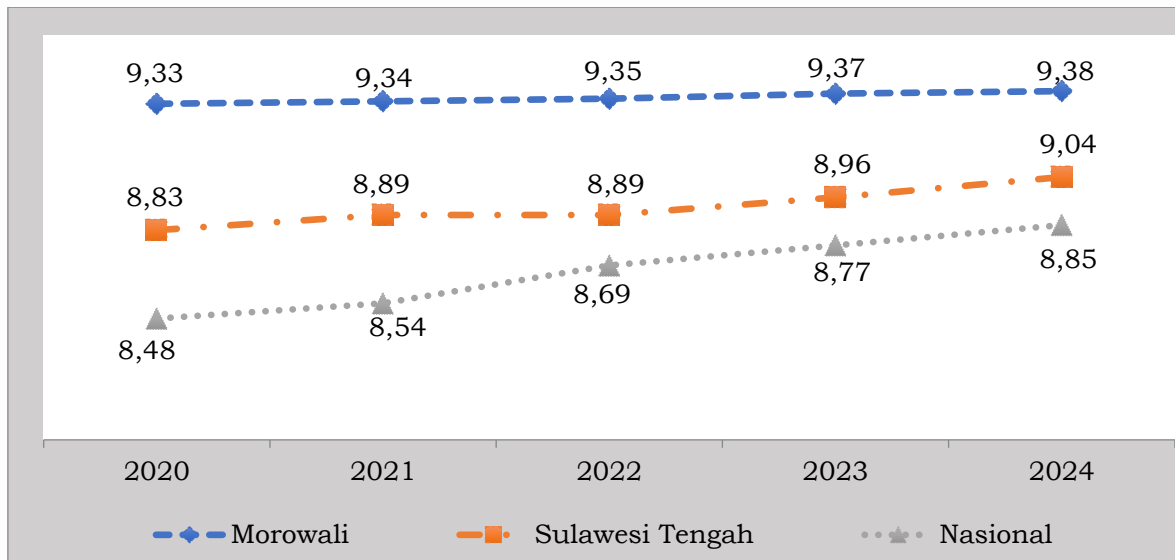
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Konsep ini menekankan pentingnya akses yang adil terhadap pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, maupun budaya. Pendidikan yang merata berfokus pada pemerataan fasilitas dan tenaga pendidik. Dengan menjamin kualitas pendidikan yang merata, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antarwilayah atau antarsektor dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas (daya saing) seseorang. RLS merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah Tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali.

Berdasarkan RLS dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Dimana angka RLS adalah rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau years of schooling dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal, seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Data mengenai perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

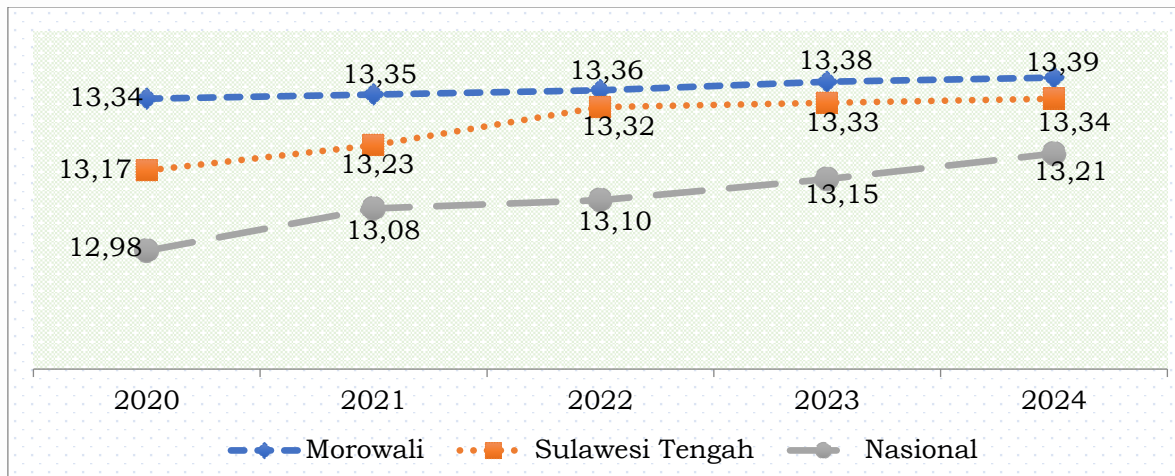
Gambar 2.35

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2020 selama 9.33 tahun, meningkat hingga Tahun 2024 menjadi selama 9.38 tahun. Artinya secara umum penduduk Kabupaten Morowali Usia 25 Tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas 3). Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal manusia (*human capital*) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Morowali. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2024 lebih baik dari rata-rata capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah masing-masing selama 8.85 tahun dan 9.04 tahun. Dalam periode Tahun 2020-2024, angka RLS Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Harapan Lama Sekolah

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 (tujuh) Tahun ke atas, karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Data perbandingan HLS Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional disajikan pada tabel berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.36

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Selama kurun Tahun 2020-2024, HLS Kabupaten Morowali selalu meningkat setiap Tahun. Pada Tahun 2020 yakni selama 13.34 tahun, hingga Tahun 2024 meningkat hingga selama 13.39 tahun. Meningkatnya angka HLS menjadi signal positif, bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. HLS Tahun 2024 menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus diploma satu (D1). Capaian HLS Kabupaten Morowali Tahun 2024 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah selama 13.34 Tahun maupun rata-rata secara Nasional selama 13.21 Tahun.

C. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi di Kabupaten Morowali menggambarkan tingkat kemampuan dasar masyarakat, khususnya peserta didik, dalam memahami bacaan serta menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan literasi dan numerasi menjadi penting agar SDM lokal mampu beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks. Indikator ini juga mencerminkan efektivitas sistem pendidikan di wilayah tersebut, khususnya dalam pelaksanaan Asesmen Nasional yang menilai kompetensi mendasar siswa. Capaian literasi dan numerasi yang tinggi tidak hanya berperan dalam peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan sosial dan ekonomi, di mana masyarakat mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berbasis informasi. Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53

Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

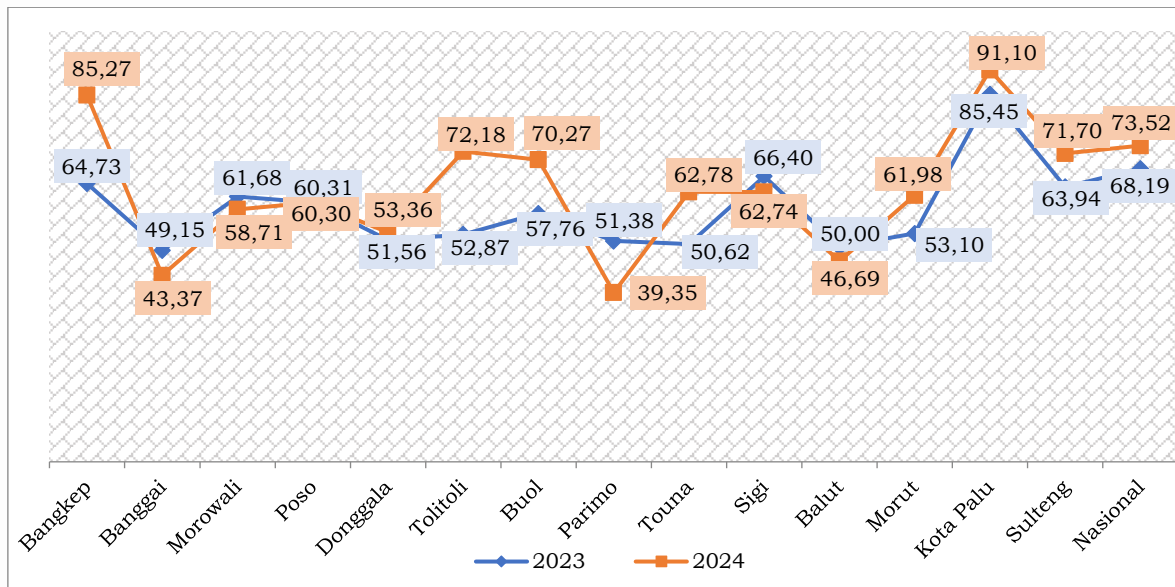
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
LITERASI					
- SD	Na	42.86	47.44	52.05	56.92
- SMP	Na	54.89	58.65	62.01	64.84
NUMERASI					
- SD	Na	31.87	35.83	40.98	50.19
- SMP	Na	54.89	58.65	56.33	58.44

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Data angka literasi dan numerasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang SD, capaian literasi meningkat dari 42.86 persen Tahun 2021 menjadi 56.92 persen Tahun 2024, sementara numerasi meningkat dari 31.87 persen menjadi 50.19 persen pada periode yang sama. Pada jenjang SMP, angka literasi tumbuh dari 54.89 persen menjadi 64.84 persen, sedangkan numerasi fluktuatif namun tetap mengalami peningkatan secara keseluruhan dari 54.89 persen menjadi 58.44 persen. Peningkatan ini menggambarkan perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah, dampak pelaksanaan Asesmen Nasional, serta efektivitas program peningkatan kompetensi dasar siswa. Meski demikian, capaian pada jenjang SD, khususnya numerasi, masih berada di bawah 60 persen, yang menandakan perlunya penguatan strategi pembelajaran berbasis literasi dan numerasi sejak dini untuk menjamin fondasi pendidikan yang kuat di masa depan.

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mengukur tingkat perkembangan literasi masyarakat di suatu daerah secara menyeluruh. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kemampuan baca tulis, akses terhadap bahan bacaan, ketersediaan dan pemanfaatan sarana literasi seperti perpustakaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi. IPLM tidak hanya menilai kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga sejauh mana masyarakat mampu memahami, mengelola, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Nilai IPLM yang tinggi mencerminkan masyarakat yang literat, kritis, dan berdaya saing, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan akses, infrastruktur, dan budaya literasi. Dengan demikian, IPLM menjadi alat penting dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan nonformal di tingkat lokal maupun nasional.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.37

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kab. Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2023-2024

Secara umum, tren nilai IPLM di sebagian besar wilayah meningkat Tahun 2024 dibanding Tahun 2023. Kota Palu tetap menjadi daerah dengan indeks tertinggi, meningkat dari 85.45 menjadi 91.10, menunjukkan kemajuan pesat dalam pengembangan literasi. Sementara itu, Kabupaten Banggai mengalami penurunan dari 49.15 menjadi 43.37. Begitu juga dengan beberapa daerah seperti Kabupaten Sigi dan Kabupaten Banggai Laut juga mengalami penurunan, mengindikasikan perlunya penguatan kembali ekosistem literasi di wilayah tersebut. Kabupaten Morowali mencatat menurun dari 61.68 menjadi 58.71, mencerminkan stagnasi yang perlu segera diatasi dengan peningkatan akses dan kualitas layanan literasi masyarakat. Dibandingkan rata-rata nasional 73.52 dan provinsi 71.70, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih berada di bawah standar rata-rata, sehingga dibutuhkan perhatian serius dalam penguatan literasi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

E. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital di Kabupaten Morowali mengukur tingkat kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, memanfaatkan, dan berperilaku bijak dalam menggunakan teknologi digital dan informasi. Indeks ini menggabungkan empat pilar utama, yaitu kecakapan digital (*digital skills*), etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Di Kabupaten Morowali yang tengah mengalami transformasi ekonomi berbasis industri dan teknologi, peningkatan literasi digital menjadi

penting sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi juga mampu berpartisipasi secara produktif dan aman dalam ekosistem digital. Indeks ini menilai kesiapan sumber daya manusia menghadapi tantangan era digital, serta dasar pengambilan kebijakan dalam pengembangan pendidikan digital, inklusi teknologi, dan tata kelola informasi publik yang cerdas dan adaptif.

F. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA

Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA di Kabupaten Morowali menggambarkan tingkat keberlangsungan pendidikan peserta didik serta efektivitas sistem pendidikan dasar dan menengah di daerah tersebut. Tingginya angka putus sekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, pernikahan usia dini, keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur sekolah, hingga kurangnya motivasi belajar atau dukungan lingkungan. Kabupaten Morowali sebagai kawasan industri, tantangan seperti migrasi penduduk dan ketimpangan antarwilayah juga turut memengaruhi keberlanjutan pendidikan. Oleh karena itu, penurunan angka putus sekolah memerlukan pendekatan holistik melalui sinergi antar sektor, penyediaan program afirmatif seperti beasiswa, pendidikan alternatif, serta penguatan peran sekolah dan masyarakat dalam menjaga anak tetap berada di jalur pendidikan hingga jenjang menengah atas. Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54

Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Putus Sekolah					
- SD	0.00	0.38	0.29	0.16	0.12
- SMP	0.00	0.20	0.18	0.38	0.32
- SMA	0.44	0.45	0.48	5.10	0.00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Angka putus sekolah di Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif antar jenjang pendidikan, dengan capaian pada jenjang SD menurun dari 0.38 persen Tahun 2021 menjadi 0.12 persen Tahun 2024, menandakan keberhasilan intervensi pada pendidikan dasar. Jenjang SMP mengalami fluktuasi, dengan peningkatan tertinggi Tahun 2023 menjadi 0.38 persen. Sementara itu, jenjang SMA mencapai 5.10 persen Tahun 2023, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan

ekonomi keluarga, pernikahan usia dini, atau transisi ke dunia kerja. Secara keseluruhan, APS Kabupaten Morowali menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah mulai menunjukkan hasil positif, khususnya melalui penguatan layanan pendidikan menengah atas dan program dukungan keberlanjutan sekolah.

G. Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Morowali menggambarkan kualitas SDM dan kesiapan daerah dalam menghadapi transformasi ekonomi berbasis industri dan teknologi. Semakin tinggi proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi, semakin besar pula potensi partisipasi penduduk dalam sektor formal, posisi strategis di dunia kerja, dan peran aktif dalam proses inovasi serta pembangunan daerah. Di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Morowali, keberadaan penduduk dengan jenjang pendidikan diploma, sarjana, maupun pascasarjana menjadi kunci dalam memperkuat daya saing lokal, mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja luar daerah, serta meningkatkan kapasitas tata kelola dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan proporsi ini perlu didorong melalui akses pendidikan tinggi yang merata, program beasiswa, serta kemitraan antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.55

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	NA	NA	NA	NA	11.50

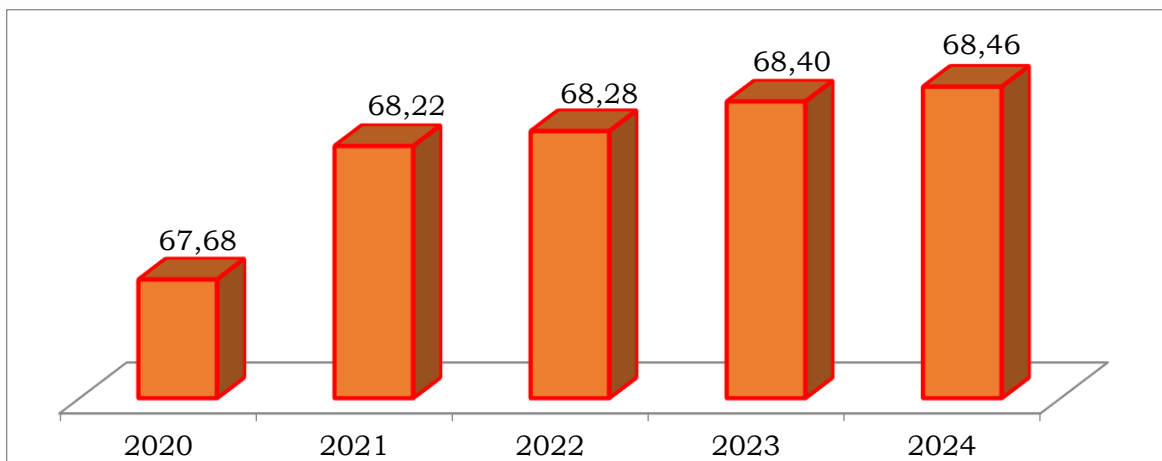
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Data proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Morowali pada Tahun 2024 sebesar 11.50 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan tinggi di kalangan penduduk usia produktif, meskipun Kabupaten Morowali tengah mengalami pertumbuhan

pesat sebagai kawasan industri nasional. Angka tersebut dapat menjadi titik awal untuk mendorong strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal melalui perluasan akses pendidikan tinggi, penyediaan beasiswa, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

H. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan di Kabupaten Morowali merupakan capaian pembangunan di sektor pendidikan, khususnya dalam hal rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pencapaian akses serta kualitas pendidikan. Indeks pendidikan menjadi cerminan sejauh mana sumber daya manusia lokal mampu mengejar ketertinggalan pendidikan dan beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja modern. Indeks ini juga berperan dalam menilai pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk tantangan geografis dan sosial budaya yang memengaruhi partisipasi sekolah. Peningkatan indeks pendidikan menandakan keberhasilan dalam perluasan akses, peningkatan mutu guru, penyediaan sarana prasarana, dan efektivitas program afirmatif seperti bantuan pendidikan dan beasiswa. Oleh karena itu, penguatan indeks pendidikan menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi Kabupaten Morowali yang berkelanjutan dan berbasis keunggulan sumber daya manusia. Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Gambar 2.38
Indeks Pendidikan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Nilai indeks pendidikan Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan dari 67.68 Tahun 2020 menjadi 68.46 Tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan adanya perbaikan bertahap dalam aspek-aspek pendidikan seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan akses terhadap pendidikan formal. Meskipun peningkatannya masih lambat, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus melakukan upaya perbaikan di sektor pendidikan, baik dari sisi sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, maupun program afirmatif untuk kelompok rentan. Perlambatan laju peningkatan juga mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih terfokus dan inovatif, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil dan meningkatkan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi. Indeks ini menjadi dasar penting dalam mengevaluasi arah kebijakan pendidikan di Kabupaten Morowali untuk mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia di tengah perkembangan industri yang pesat.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif adalah pendekatan strategis dalam sistem perlindungan sosial yang dirancang untuk merespons secara cepat dan fleksibel terhadap berbagai risiko dan guncangan, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi. Konsep ini menggabungkan program perlindungan sosial yang ada seperti bantuan tunai, subsidi, dan jaminan sosial dengan mekanisme pemantauan risiko dan sistem data yang dinamis, sehingga mampu menyesuaikan cakupan, intensitas, dan jenis bantuan sesuai kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat maupun dalam kondisi perubahan jangka panjang, seperti perubahan iklim atau transformasi digital. Tujuannya adalah agar kelompok rentan tetap terlindungi dan sistem sosial tetap tangguh dalam menghadapi ketidakpastian.

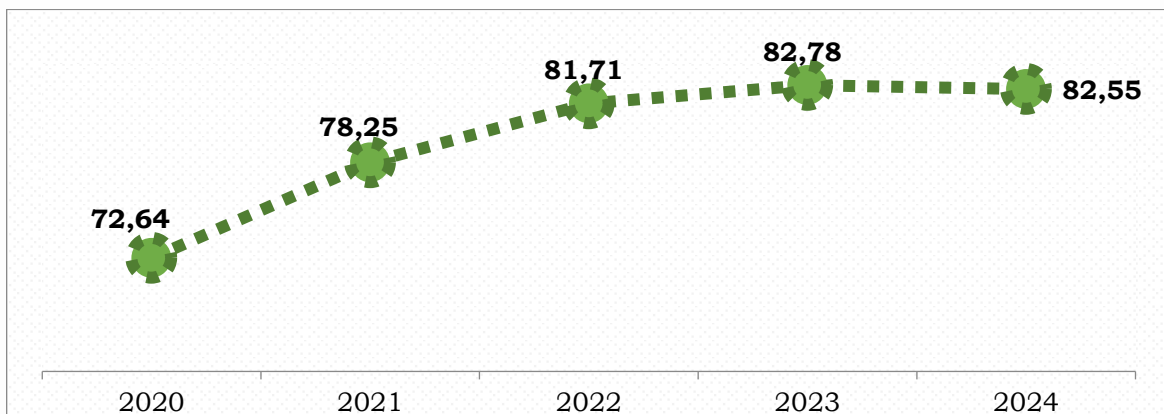
A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Morowali menggambarkan tingkat perlindungan sosial bagi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal, terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, maupun hari tua. Sebagai daerah yang tumbuh pesat melalui sektor industri dan pertambangan, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi aspek penting dalam menciptakan iklim kerja yang aman, adil, dan berkelanjutan. Tingginya cakupan kepesertaan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam melindungi hak-hak dasar pekerja dan mendukung kesejahteraan tenaga

kerja lokal. Sebaliknya, rendahnya cakupan mengindikasikan perlunya penguatan regulasi, pengawasan ketenagakerjaan, serta sosialisasi intensif terhadap manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi sektor informal dan usaha mikro.

B. Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni menggambarkan perbandingan antara jumlah rumah yang memenuhi kriteria kelayakan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Rumah layak huni atau rumah sederhana sehat adalah hunian yang dibangun dengan bahan dan konstruksi sederhana, namun tetap memenuhi standar minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Rumah jenis ini mempertimbangkan potensi lokal, baik dari sisi fisik seperti bahan bangunan, kondisi geologis, dan iklim, maupun aspek sosial budaya seperti arsitektur lokal dan gaya hidup masyarakat. Rasio ini tidak hanya menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga keberhasilan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal yang layak. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Gambar 2.39

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Rasio rumah layak huni menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2020-2024. Secara umum, peningkatan ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Kedepan, diupayakan target pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dapat tercapai secara merata.

C. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak

Penduduk yang berakses sanitasi layak di Kabupaten Morowali yang mencerminkan derajat kesejahteraan dan kesehatan lingkungan masyarakat. Sanitasi layak mencakup akses terhadap fasilitas buang air besar yang aman, tertutup, dan terhubung ke sistem pengolahan limbah atau *septic tank* yang memenuhi standar kesehatan. Peningkatan akses sanitasi layak menjadi tantangan sekaligus prioritas, terutama untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan seperti diare, stunting, dan infeksi saluran pencernaan. Tingginya cakupan sanitasi layak tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, penguatan intervensi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan perluasan program sanitasi berbasis komunitas menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan sehat dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Morowali. Perkembangan persentase Penduduk yang Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Persentase Penduduk Yang Berakses Sanitasi Layak di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

No.	KECAMATAN	AKSES SANITASI TAHUN 2024						
		LAYAK SENDIRI	LAYAK BERSAMA	BAB TERTUTUP	BAB TERBUKA	SANITASI LAYAK	SANITASI TIDAK LAYAK	SANITASI AMAN
1	WITAPONDA	6,198	0	32	25	6,198	57	0
2	BUMI RAYA	4,568	0	29	0	4,568	29	0
3	BUNGKU BARAT	4,194	7	0	0	4,201	0	0
4	BUNGKU TENGAH	7,280	66	11	4	7,346	15	0
5	BUNGKU TIMUR	4,073	0	0	12	4,073	12	0
6	BAHODOPI	9,530	0	97	28	9,530	125	0
7	BUNGKU PESISIR	1,985	88	103	0	2,073	103	0
8	BUNGKU SELATAN	1,653	359	1,880	258	2,012	2,138	0
9	SOMBORI KEPULAUAN	1,017	210	580	10	1,227	590	0
10	MENUI KEPULAUAN	2,001	176	504	0	2,177	504	0
JUMLAH		42,499	906	3,236	337	43,405	3,573	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Akses sanitasi Kabupaten Morowali Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total penduduk yang tercatat 198,968 jiwa, sebanyak 43,405 jiwa (92.4 persen) telah memiliki akses terhadap sanitasi layak, dengan sebagian besar berupa sanitasi layak sendiri (42,499 jiwa) dan sisanya sanitasi layak bersama (906 jiwa). Namun, masih terdapat 3,573 jiwa (7.6 persen) yang

hidup dalam kondisi sanitasi tidak layak, yang tersebar paling banyak di Kecamatan Bungku Selatan (2,138 jiwa), Sombori Kepulauan (590 jiwa), dan Menui Kepulauan (504 jiwa), menunjukkan ketimpangan akses antara wilayah daratan dan kepulauan. Sementara itu, tidak ada satu pun wilayah yang memiliki kategori sanitasi aman, yang berarti belum ada sistem pengolahan limbah yang sepenuhnya memenuhi standar keberlanjutan. Selain itu, praktik buang air besar (BAB) terbuka masih terjadi di beberapa kecamatan seperti Bungku Selatan (258 jiwa) dan Bahodopi (28 jiwa), yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Secara keseluruhan, capaian sanitasi layak di Kabupaten Morowali cukup tinggi, namun masih diperlukan intervensi khusus di wilayah kepulauan dan pinggiran untuk meningkatkan pemerataan dan mendorong tercapainya akses sanitasi aman secara berkelanjutan.

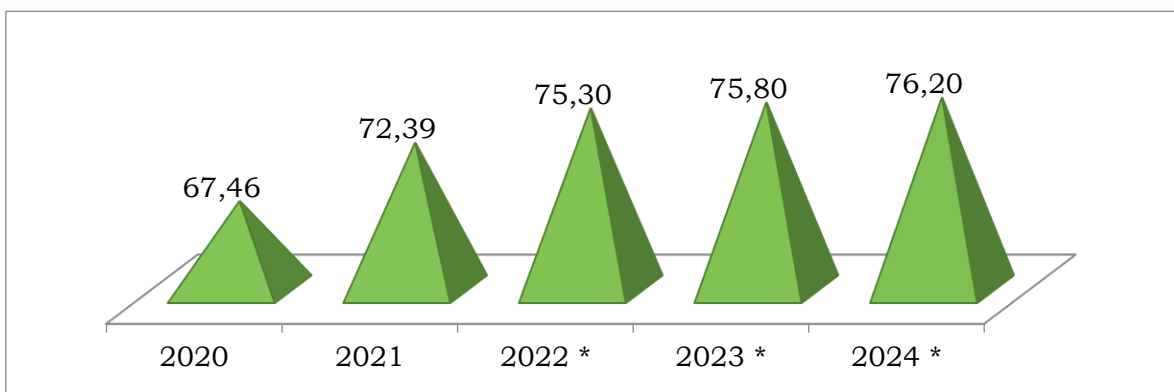
2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Di Kabupaten Morowali, konsep beragama Maslahat dan berkebudayaan maju mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Beragama Maslahat menekankan pentingnya agama sebagai sumber kebaikan bersama, yang tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi komunitas dan lingkungan. Sementara itu, Berkebudayaan Maju mengacu pada pengembangan budaya yang progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman, yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang toleran, dinamis, dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang nasional. Beragama Maslahat adalah konsep yang menekankan pentingnya agama sebagai sumber kebaikan yang luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan. Konsep ini muncul dalam UU Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Tujuan utama dari Beragama Maslahat adalah untuk menggali nilai-nilai agama yang dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas, seperti meningkatkan toleransi, kerukunan, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini juga berupaya menghindari pengaruh ekstremisme dan radikalisme dalam beragama, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berkebudayaan Maju di Kabupaten Morowali mencerminkan upaya untuk mengembangkan budaya yang progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Konsep ini menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam mempertahankan dan mengembangkan tradisi lokal, sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global yang positif. Berkebudayaan Maju juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan budaya, pendidikan, dan ekonomi, sehingga menciptakan lingkungan yang dinamis dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, masyarakat Morowali dapat membangun identitas yang kuat dan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Morowali menggambarkan tingkat keharmonisan hubungan antarumat beragama, yang diukur melalui dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerja sama dalam kehidupan sosial. Sebagai daerah multikultural dengan dinamika migrasi penduduk akibat perkembangan industri, menjaga kerukunan antarumat beragama menjadi aspek krusial dalam menciptakan stabilitas sosial dan kohesi masyarakat. Indeks ini juga mencerminkan peran aktif pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun ruang dialog, mencegah konflik horizontal, serta mempromosikan nilai-nilai saling menghargai dalam keberagaman. Tingginya indeks kerukunan akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial di tengah perubahan sosial ekonomi yang cepat di Kabupaten Morowali. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber : Kemenag Sulteng (*) Angka Sementara

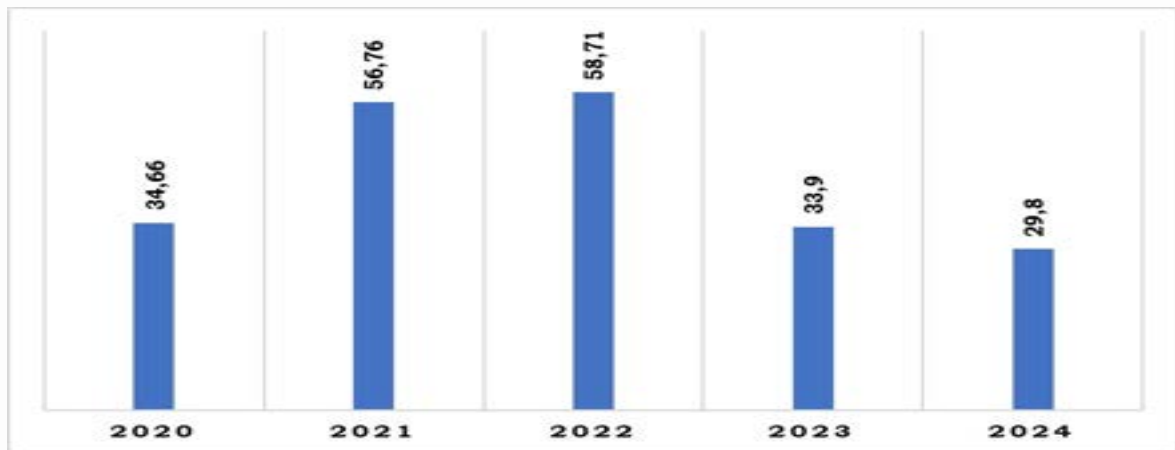
Gambar 2.40

Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan positif Tahun 2020–2024, dari angka 67.46 Tahun 2020 menjadi 76.20 Tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan membaiknya hubungan antarumat beragama di tengah dinamika sosial masyarakat yang majemuk, terutama dalam konteks pertumbuhan industri dan mobilitas penduduk yang tinggi. Capaian yang terus meningkat ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga harmonisasi, mendorong dialog lintas iman, serta menciptakan ruang sosial yang toleran. Stabilitas indeks di atas 75 dalam tiga tahun terakhir juga mengindikasikan bahwa nilai-nilai toleransi dan kerja sama telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Morowali. Meskipun demikian, penguatan kapasitas kelembagaan dan edukasi lintas budaya tetap perlu dilanjutkan untuk menjaga keberlanjutan kerukunan di masa depan.

B. Persentase Jalan Kondisi Mantap

Jalan dengan kondisi mantap di Kabupaten Morowali menggambarkan kualitas infrastruktur transportasi darat dalam mendukung konektivitas antarwilayah, distribusi logistik, dan mobilitas penduduk. Jalan yang masuk kategori mantap, yaitu dalam kondisi baik atau sedang menurut penilaian teknis, memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di kawasan industri, pertambangan, dan wilayah pesisir yang membutuhkan aksesibilitas tinggi. Peningkatan proporsi jalan mantap bertujuan dalam menjamin kelancaran aktivitas produksi, distribusi hasil bumi, serta akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Keberadaan jalan mantap juga berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik, meningkatkan keselamatan berkendara, dan mempercepat pemerataan pembangunan antar kecamatan. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin dan pembangunan jalan baru secara berkelanjutan perlu didorong untuk menjaga daya dukung infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali. Persentase Jalan Kondisi Mantap dan Tidak Mantap Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada grafik berikut.

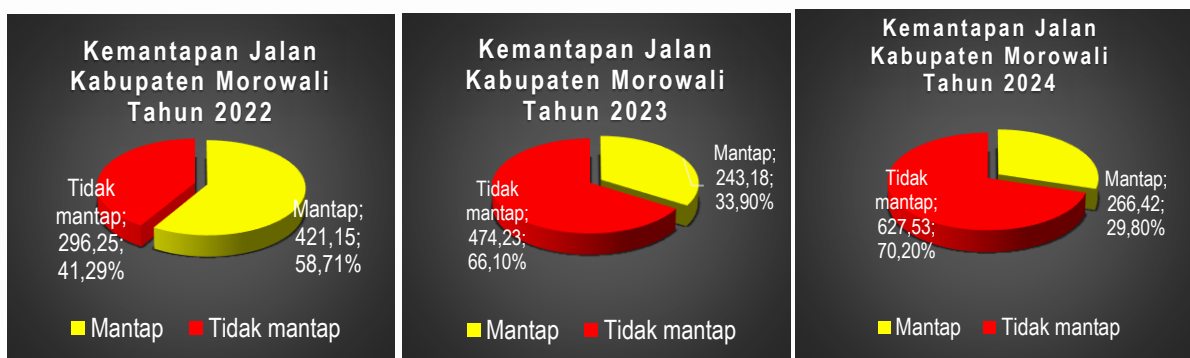


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Gambar 2.41

Persentase Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Persentase jalan kondisi mantap di Kabupaten Morowali tahun 2020 sebesar 34,66 persen menunjukkan tren kenaikan dari Tahun 2021 dan mencapai puncaknya ditahun 2022 yakni dari 58.71 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 33.90 persen Tahun 2023, dan terus menurun pada tahhun 2024 sebesar 29,80 persen. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya kualitas infrastruktur jalan, yang dapat disebabkan oleh peningkatan beban kendaraan akibat aktivitas industri berat, kurangnya anggaran pemeliharaan rutin, atau belum optimalnya pengawasan terhadap pembangunan jalan. Kondisi ini berpotensi menghambat konektivitas antarwilayah, memperbesar biaya logistik, dan menurunkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Dibutuhkan upaya strategis dan berkelanjutan dalam rehabilitasi dan peningkatan jalan, khususnya pada jalur distribusi utama dan akses ke kawasan industri serta desa terpencil di Kabupaten Morowali.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Gambar 2.42

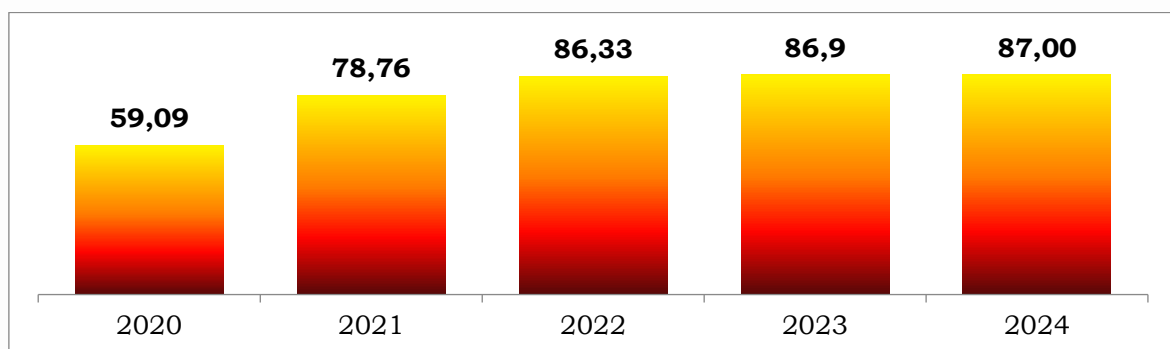
Persentase Jalan Kondisi Mantap dan Tidak Mantap Kab. Morowali Tahun 2020-2024

Grafik kemantapan jalan Kabupaten Morowali Tahun 2022–2024 menunjukkan penurunan kualitas infrastruktur jalan. Pada Tahun 2022, kondisi jalan mantap masih mendominasi dengan persentase 58.71 persen (421,15 km), namun menurun drastis pada Tahun 2023 menjadi hanya 33.90 persen (243,18 km), sementara jalan tidak mantap meningkat menjadi 66,10 persen (474.23 km). Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana persentase jalan mantap kembali menurun menjadi 29,80% (266,42 km), kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, yang berdampak langsung terhadap konektivitas wilayah, distribusi logistik, dan keselamatan transportasi. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan anggaran yang terfokus, peningkatan kualitas pekerjaan jalan, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memperbaiki dan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap secara berkelanjutan.

C. Persentase Akses Jaringan Internet

1) Akses Jaringan Komunikasi

Akses jaringan komunikasi di Kabupaten Morowali merupakan elemen penting dalam mendukung konektivitas digital, pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan seluler, internet, dan layanan data menjadi indikator kemajuan wilayah, terutama dalam memperkecil kesenjangan informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Semakin luas dan stabil cakupan jaringan komunikasi, semakin tinggi pula potensi partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital, akses terhadap layanan daring, serta percepatan pembangunan berbasis teknologi. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi (%) di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Gambar 2.43

Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi di Kabupaten Morowali selama periode 2020 hingga 2024 mencapai 87.00 persen wilayah yang terjangkau jaringan komunikasi. Akses jaringan informasi di Kabupaten Morowali masih menghadapi berbagai kendala, seperti infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan provider telekomunikasi dan internet, serta bencana alam yang sering terjadi di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan sulitnya akses telepon dan data di beberapa wilayah di Kabupaten Morowali. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah daerah, provider telekomunikasi dan internet, serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan informasi di Kabupaten Morowali.

2) Data Jaringan Tower

Jaringan tower telekomunikasi berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal komunikasi, menjadi tulang punggung utama dalam mendukung layanan jaringan seluler dan internet. Keberadaan tower sangat vital untuk memastikan cakupan sinyal yang luas dan stabil, terutama di wilayah terpencil atau geografis yang menantang seperti pegunungan dan kepulauan. Jumlah dan distribusi tower yang merata memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan digital secara optimal, termasuk komunikasi suara, data, dan layanan daring lainnya. Oleh karena itu, pembangunan jaringan tower merupakan bagian strategis dalam memperkuat sistem telekomunikasi nasional, mempercepat transformasi digital, serta mendukung pemerataan pembangunan berbasis teknologi di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Morowali. Data jaringan tower di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57

Data Jaringan Tower Kabupaten Morowali Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Jenis Jaringan		
			2G	3G	4G
1	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
2	Bungku Tengah	Ipi	Ya	Ya	Ya
3	Bungku Tengah	Marsaoleh	Ya	Ya	Ya
4	Bumi Raya	Parilangke	Ya	Ya	Ya
5	Wita Ponda	Lantula Jaya	Ya	Ya	Ya
6	Bungku Barat	Wosu	Ya	Ya	Ya
7	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	Ya
8	Bumi Raya	Pebatae	Ya	Ya	Ya
9	Wita Ponda	Ungkaya	Ya	Ya	Ya
10	Bungku Tengah	Bente	Ya	Ya	Ya



No	Kecamatan	Desa	Jenis Jaringan		
			2G	3G	4G
11	Bumi Raya	Limbo Makmur	Ya	Ya	Ya
12	Bungku Tengah	Bente	Ya	Ya	Ya
13	Menui Kepulauan	Ulunambo	Ya	-	Ya
14	Bumi Raya	Samarenda	Ya	-	Ya
15	Bungku Tengah	Lanona	Ya	Ya	Ya
16	Bungku Tengah	Matansala	Ya	Ya	Ya
17	Bungku Tengah	Tofuti	Ya	Ya	Ya
18	Bungku Tengah	Bahomoleo	Ya	Ya	Ya
19	Bungku Timur	Kapala	Ya	-	Ya
20	Bungku Timur	Bahomoteffe	Ya	Ya	Ya
21	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
22	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
23	Bahodopi	Bahomakmur	Ya	Ya	Ya
24	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	Ya
25	Wita Ponda	Solonsa Jaya	Ya	-	Ya
26	Bungku Barat	Tofogaro	Ya	Ya	Ya
27	Bungku Selatan	Kaleroang	Ya	-	Ya
28	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
29	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
30	Bungku Pesisir	Laroenai	Ya	Ya	Ya
31	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
32	Bungku Tengah	Bahomohoni	Ya	Ya	Ya
33	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
34	Bungku Tengah	Bungi	Ya	Ya	Ya
35	Bumi Raya	Umbele	Ya	Ya	Ya
36	Bungku Tengah	Bahomohoni	Ya	Ya	Ya
37	Bungku Timur	Bahomoteffe	Ya	Ya	Ya
38	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya

No	Kecamatan	Desa	Jenis Jaringan		
			2G	3G	4G
39	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
40	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
41	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
42	Wita Ponda	Moahino	Ya	Ya	Ya
43	Wita Ponda	Moahino	Ya	Ya	Ya
44	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	Ya
45	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
46	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
47	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
48	Bungku Pesisir	Bete-Bete	Ya	-	Ya
49	Bungku Pesisir	Tangofa	Ya	-	Ya

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2025

Data jaringan tower di Kabupaten Morowali seluruh telah tersedia di Semua kecamatan di Kabupaten Morowali, namun jenis jaringan 4G masih mengalami kendala pada saat tertentu dan belum merata pada semua desa di setiap kecamatan sehingga mengalami gangguan dan kesulitan untuk jaringan internet, diantaranya Desa Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga Berkualitas menekankan pentingnya keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang mendukung perkembangan anak dan kesejahteraan anggota keluarga. Kesenjangan Gender berfokus pada pemberian hak dan kesempatan yang sama bagi semua gender, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Masyarakat Inklusif mengacu pada lingkungan sosial yang menghargai keberagaman dan memastikan semua individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan. Ketiga konsep ini saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang nasional.

Kesenjangan Gender adalah konsep yang menekankan kesamaan hak, kesempatan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Ini mencakup kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, politik, dan akses terhadap sumber daya. Kesenjangan gender bertujuan

untuk menghapus diskriminasi berbasis gender dan memastikan bahwa semua individu dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat tanpa hambatan. Masyarakat Inklusif adalah masyarakat yang menghargai dan menerima keberagaman dalam segala bentuknya, termasuk perbedaan ras, agama, gender, kemampuan, dan latar belakang sosial. Masyarakat inklusif berupaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan diskriminasi dengan menyediakan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik bagi semua anggotanya. Ini juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua individu, sehingga setiap orang merasa diterima dan dihargai.

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Morowali menggambarkan sejauh mana hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, partisipasi, maupun lingkungan yang aman dan ramah anak. Sebagai wilayah yang berkembang pesat secara ekonomi dan demografis, tantangan perlindungan anak di Kabupaten Morowali tidak hanya mencakup isu kekerasan, eksploitasi, dan pekerja anak, tetapi juga keterpaparan terhadap risiko sosial baru akibat urbanisasi dan industrialisasi. Indeks ini menjadi alat ukur bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas kebijakan, program layanan dasar, serta sistem pelaporan dan penanganan kasus yang melibatkan anak. Semakin tinggi indeks ini, semakin menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki sistem perlindungan yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan bagi tumbuh kembang anak. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58

Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak	NA	81.14	78.84	81.07	83.37

Sumber: Dinas P2KB Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024 menunjukkan capaian yang cukup tinggi dengan nilai berkisar antara 81.14 persen hingga 83.37 persen. Fluktuasi pada Tahun 2022 mengindikasikan adanya dinamika dalam efektivitas kebijakan perlindungan anak, namun secara keseluruhan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak anak melalui pelayanan dasar, penguatan kelembagaan perlindungan anak, dan peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan. Kenaikan indeks pada Tahun 2024 menunjukkan perbaikan dalam sistem perlindungan anak, serta

keberhasilan program-program afirmatif di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak-anak di Kabupaten Morowali.

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Morowali mengukur tingkat kesejahteraan, ketangguhan, dan fungsi keluarga dalam mendukung pembangunan manusia secara berkelanjutan. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti ketahanan ekonomi keluarga, kesehatan dan gizi, pendidikan, kelekatan antaranggota keluarga, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Indeks ini juga menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis keluarga, seperti pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan anak, pengasuhan positif, dan pendidikan nilai keluarga. Peningkatan indeks ini mencerminkan keberhasilan program lintas sektor dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, mandiri, dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis. Indeks Pembangunan Kualitas Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembanguna Kualitas Keluarga	NA	50.54	57.72	66.33	66.60

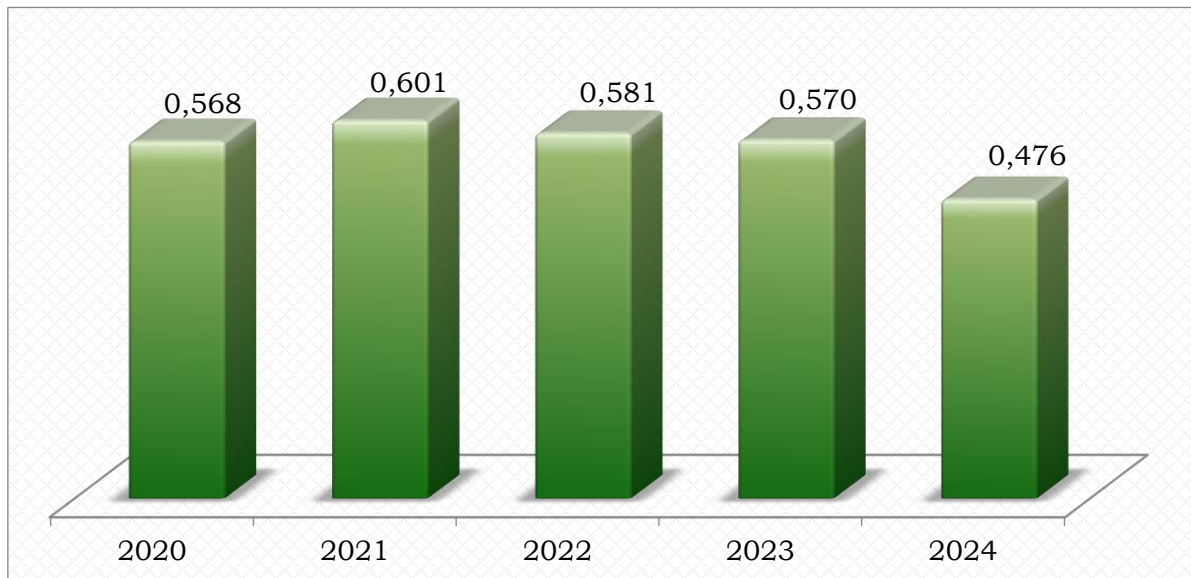
Sumber : BKKBN (sistem peringatan dini pengendalian penduduk)

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2021-2024 dengan capaian akhir 66.60 pada 2024. Kenaikan ini menggambarkan perbaikan dalam aspek-aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, dan lingkungan sosial yang mendukung. Keberhasilan pelaksanaan program-program pemberdayaan keluarga, intervensi perlindungan sosial, dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan keluarga sebagai unit terkecil pembangunan.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Morowali mengukur sejauh mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Nilai indeks yang rendah mencerminkan tingkat ketimpangan yang tinggi, sedangkan nilai yang semakin mendekati nol

menunjukkan kesetaraan yang lebih baik. Di Kabupaten Morowali, penguatan peran perempuan di sektor formal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan reproduksi, serta keterwakilan dalam lembaga pengambilan kebijakan menjadi kunci dalam menekan ketimpangan gender. Oleh karena itu, indeks ini tidak hanya menggambarkan kondisi sosial, tetapi juga menjadi instrumen evaluatif dalam merancang kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Gambar 2.44

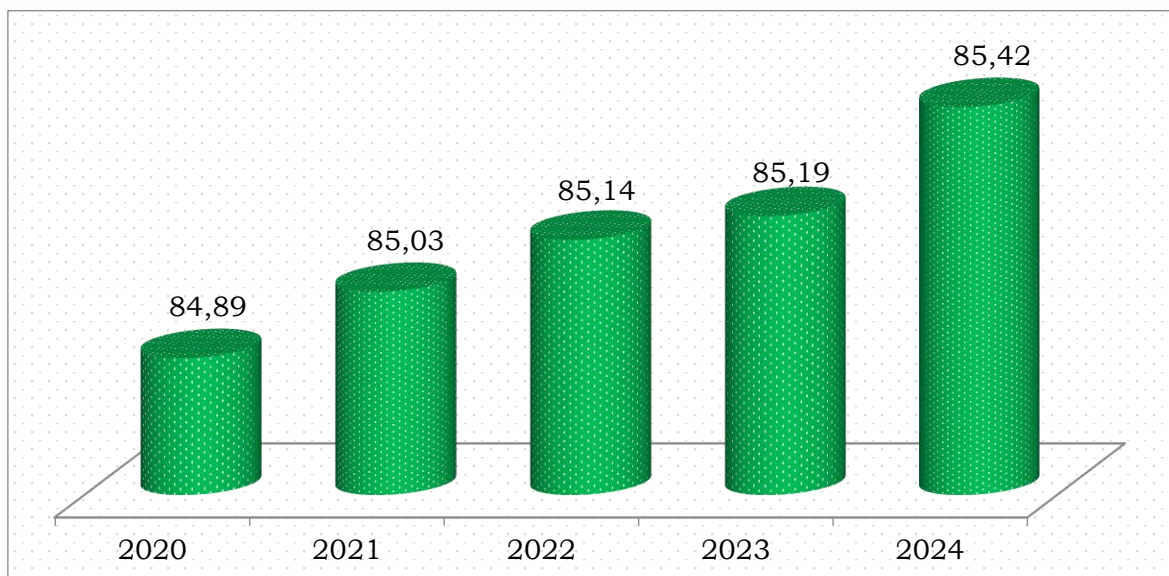
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Morowali menunjukkan penurunan dari 0.568 Tahun 2020 menurun menjadi 0.476 Tahun 2024. Menunjukkan bahwa semakin menurunnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan politik. Penurunan indeks ini mengindikasikan efektivitas program-program pemberdayaan perempuan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender. Capaian Tahun 2024 yang berada di bawah angka 0.5 menunjukkan bahwa upaya kesetaraan mulai memberikan dampak nyata, meskipun tetap diperlukan penguatan kelembagaan dan intervensi afirmatif, khususnya untuk memperluas peran perempuan di sektor formal dan pengambilan keputusan publik.

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Morowali menggambarkan sejauh mana pembangunan manusia yang dicapai telah merata antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks ini membandingkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara kedua kelompok gender untuk mengukur kesetaraan akses dan peluang dalam pembangunan. IPG menilai apakah perempuan turut memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Nilai IPG yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang relatif setara dalam mengakses pendidikan, mendapatkan pekerjaan layak, dan mencapai umur harapan hidup yang sama. Oleh karena itu, peningkatan IPG tidak hanya mencerminkan keadilan gender, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesetaraan hak setiap warga. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

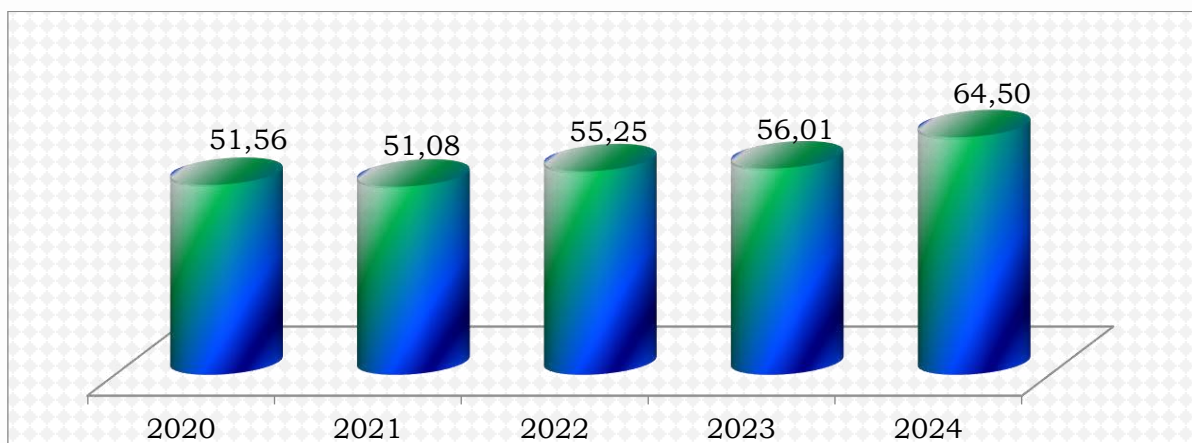
Gambar 2.45

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan dengan capaian dari 84.89 Tahun 2020 menjadi 85.42 Tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kesetaraan yang semakin baik antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Meskipun laju kenaikannya relatif kecil setiap tahun, mengindikasikan keberlanjutan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan manusia. Capaian IPG yang cukup tinggi menandakan bahwa perempuan di Kabupaten Morowali mulai memperoleh manfaat pembangunan yang setara, yang menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

E. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Morowali menggambarkan sejauh mana perempuan berperan aktif dalam pengambilan keputusan, keterlibatan di sektor ekonomi formal, serta partisipasi dalam lembaga legislatif dan birokrasi. Indeks ini mencerminkan tingkat kesetaraan gender dalam aspek kepemimpinan dan pemberdayaan, serta mengukur kemampuan perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam pembangunan daerah. IDG menjadi penting bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku utama dalam proses transformasi sosial dan ekonomi. Semakin tinggi nilai IDG, semakin besar peluang perempuan dalam mengakses sumber daya, menduduki posisi strategis, dan berdaya secara ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

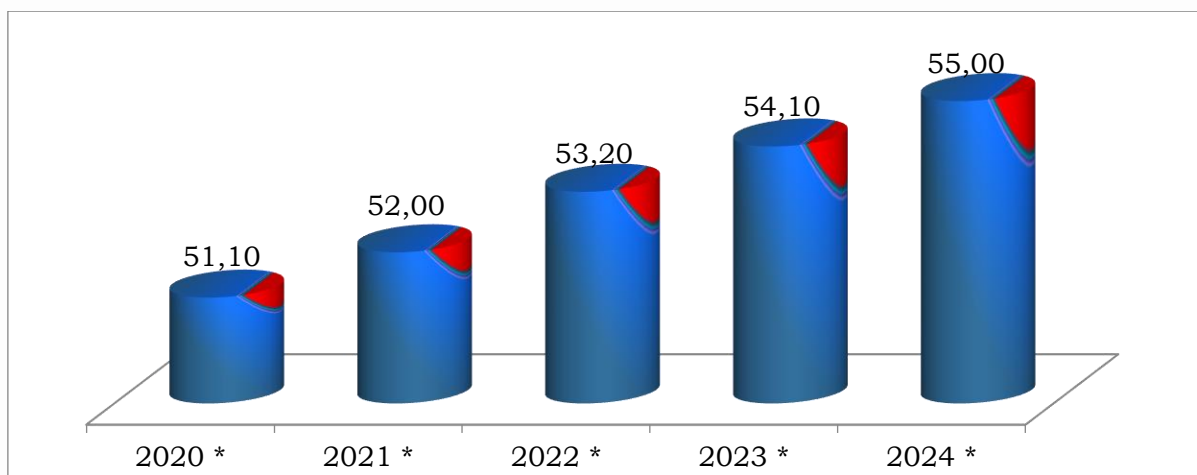
Gambar 2.46

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Morowali meningkat dari 51.56 Tahun 2020 menjadi 64.50 Tahun 2024, menggambarkan peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi formal, politik, dan pengambilan keputusan publik. Capaian ini menandakan bahwa perempuan di Kabupaten Morowali mulai memperoleh akses dan kesempatan yang lebih luas untuk berdaya secara sosial dan ekonomi, seiring dengan dukungan kebijakan afirmatif dan penguatan kapasitas kelembagaan. Kenaikan ini juga menunjukkan bahwa pembangunan daerah mulai mengarah pada prinsip inklusivitas dan kesetaraan gender, serta menjadi fondasi penting bagi perempuan berperan aktif sebagai subjek pembangunan yang setara dan berdaya.

F. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Morowali merefleksikan sejauh mana kualitas hidup dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah melalui lima domain utama: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan peluang kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. Peningkatan IPP menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan kepemudaan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasional, serta pelibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menguatkan pembangunan pemuda secara terintegrasi, Kabupaten Morowali dapat mendorong terciptanya generasi produktif yang inovatif, berdaya saing, dan memiliki kepedulian sosial tinggi dalam membangun masa depan daerah. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: Dispora Provinsi Sulawesi Tengah, 2025. (*) Estimasi IPP berdasarkan capaian Propinsi Sulawesi Tengah

Gambar 2.47

Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Morowali meningkat dari 51.10 Tahun 2020 menjadi 55.00 Tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap dalam aspek pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan peluang kerja bagi pemuda di daerah ini. Meskipun pertumbuhannya tergolong stabil dan positif, nilai IPP masih berada di kisaran menengah, artinya potensi pemuda Kabupaten Morowali belum sepenuhnya terakselerasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih terarah, seperti perluasan akses pendidikan vokasi, pembinaan kewirausahaan, dan ruang partisipasi dalam pengambilan kebijakan, agar IPP ke depan dapat tumbuh dan berdampak langsung terhadap daya saing daerah.

G. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Morowali menggambarkan kualitas kesejahteraan keluarga dari aspek keutuhan, kemandirian, dan kebahagiaan. Peningkatan indeks ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong keluarga sebagai unit terkecil pembangunan yang produktif. Upaya penguatan pembangunan keluarga dilakukan melalui berbagai intervensi, seperti peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, konseling pranikah dan pascapernikahan, penyuluhan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Dengan penguatan pada dimensi ketahanan sosial dan ekonomi keluarga, pembangunan keluarga di Kabupaten Morowali diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60

Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembanguna Kualitas Keluarga	NA	50.54	57.72	66.33	66.60

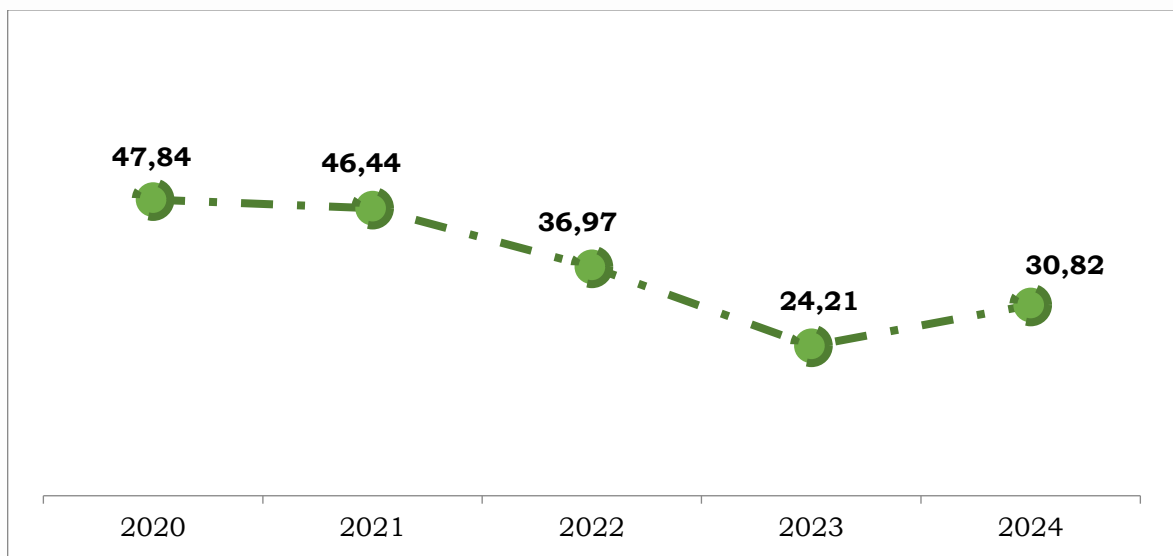
Sumber : BKKBN (sistem peringatan dini pengendalian penduduk)

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Morowali dari Tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan peningkatan bahwa berbagai upaya pembangunan di bidang keluarga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, fungsi pengasuhan, dan ketahanan keluarga. Perkembangan tersebut juga mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses terhadap pelayanan dasar yang mendukung kehidupan keluarga, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

H. TPAK Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan mengukur keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan. Tingginya partisipasi ini mencerminkan akses yang lebih setara terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan keterampilan, serta kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong kemandirian finansial. Sehingga, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan perlu didukung dengan kebijakan inklusif, lingkungan kerja yang ramah gender, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan.

Grafik partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Morowali menunjukkan tren menurun dari tahun 2020 hingga 2024 dengan angka terendah Tahun 2023 sebesar 24.21 persen yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya kesempatan kerja, tanggung jawab domestik yang lebih besar, atau dampak sosial ekonomi pascapandemi. Peningkatan di tahun 2024 memberi sinyal positif, namun tetap perlu intervensi kebijakan inklusif dan program pemberdayaan perempuan agar partisipasi tenaga kerja perempuan dapat terus didorong. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Gambar 2.48
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Morowali
Tahun 2020–2024

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

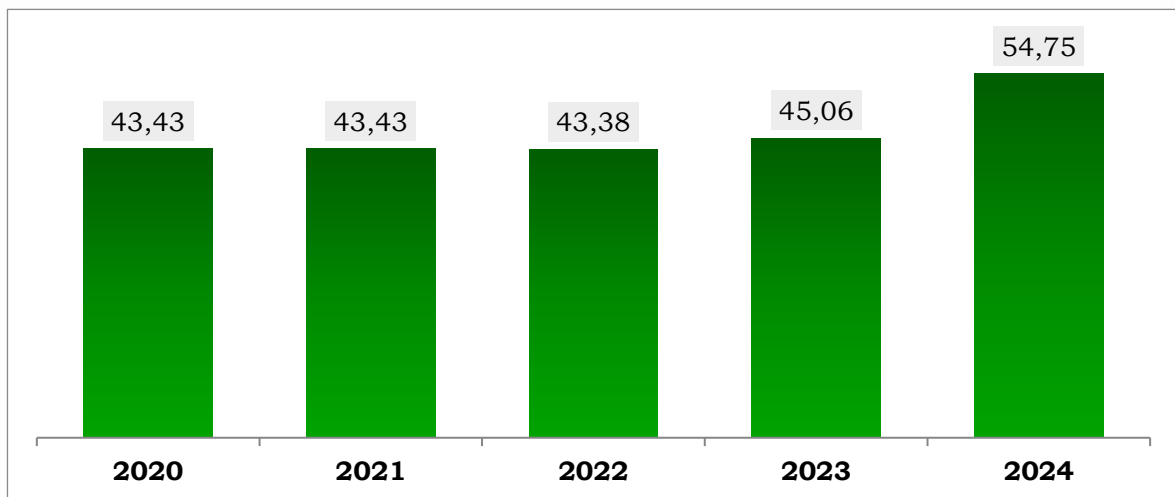
Daya saing suatu daerah merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan daerah tersebut untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Aspek daya saing mencakup kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator angka ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

A. Angka Ketergantungan

Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Tahun 2025, (data diolah)

Gambar 2.49

Rasio Ketergantungan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun Kabupaten Morowali, Tahun 2020-2024

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Pada kurun waktu 2020, 2021, 2022 dan 2023, Rasio Ketergantungan di Kabupaten Morowali di bawah 50 persen dan pada Tahun 2024 di atas 50 persen. Pada Tahun 2024, rasio ketergantungan 54,75 yang berarti 54,75 persen dari jumlah penduduk adalah tidak produktif ditanggung 45,25 persen penduduk yang produktif, angka ini makin kecil makin baik.

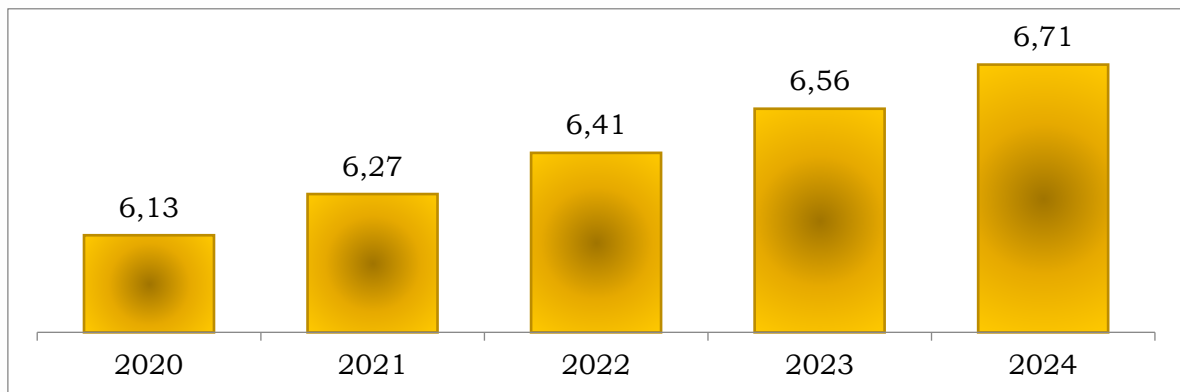
Sedangkan jika dilihat dari sisi rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua, untuk kasus Kabupaten Morowali kurun waktu 2020-2024 lebih besar angka ketergantungan muda dari pada angka ketergantungan tua. Hal ini dapat berimplikasi kepada kebijakan pemerintah tentang penyediaan fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana olah raga. Sangat diharapkan sarana dan prasarana digunakan sebagai saluran minat dan bakat generasi muda serta mengoptimalkan kualitas diri generasi penerus di Kabupaten Morowali dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan semangat untuk survive dalam menyambut era keterbukaan ekonomi.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Di Kabupaten Morowali, peran Iptek dan inovasi perlu diarahkan untuk mendukung penguatan sektor-sektor unggulan lokal, seperti industri pengolahan, pertanian terpadu, dan energi terbarukan. Pemanfaatan teknologi tepat guna, digitalisasi UMKM, serta pengembangan ekosistem riset dan kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat menjadi pendorong utama peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Selain itu, dukungan kelembagaan dan kebijakan yang berpihak pada pengembangan kapasitas SDM lokal dan transfer teknologi turut memperkuat daya saing ekonomi daerah secara menyeluruh.

A. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Morowali menggambarkan kemampuan wilayah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja lokal dan membuka peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan PDRB, tetapi juga pada perluasan akses terhadap pekerjaan yang layak, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan peningkatan peran pelaku ekonomi kecil serta rumah tangga. Penguatan sektor-sektor produktif seperti industri pengolahan dan pertanian, didukung oleh kebijakan redistribusi sumber daya dan peningkatan akses layanan dasar, diharapkan dapat mendorong pemerataan hasil pembangunan ekonomi secara lebih luas dan adil di seluruh kecamatan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



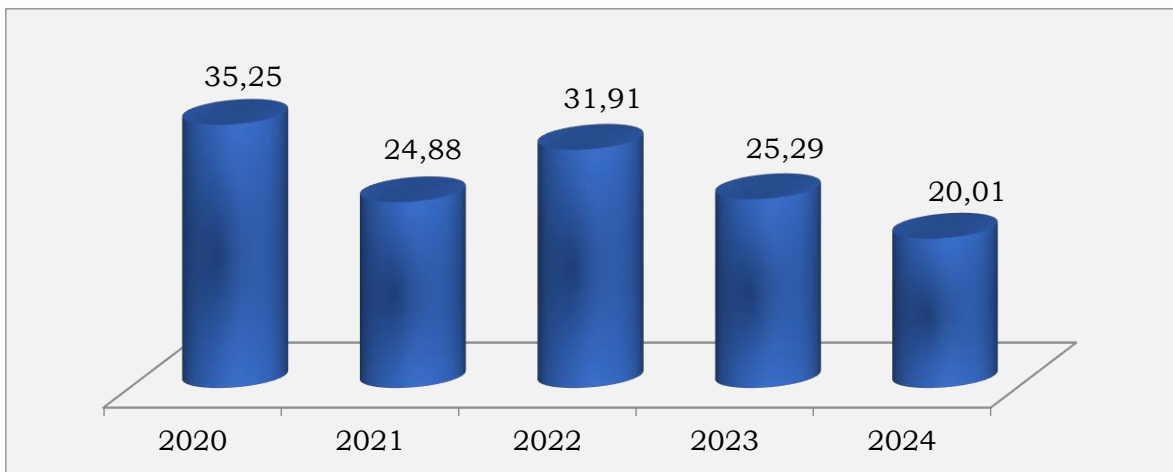
Sumber : Bappenas Tahun 2025

Gambar 2.50
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024

Grafik Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan dari 6.13 Tahun 2020 menjadi 6.71 Tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan adanya perbaikan dalam distribusi manfaat pembangunan ekonomi yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pertumbuhan ini dapat mencerminkan peningkatan partisipasi sektor ekonomi lokal, penguatan UMKM, serta akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih terbuka di wilayah Kabupaten Morowali.

B. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total perekonomian daerah. Di Kabupaten Morowali, sektor ini menjadi penggerak utama perekonomian karena didukung oleh keberadaan kawasan industri berbasis nikel dan logam lainnya. Rasio yang tinggi mencerminkan dominasi aktivitas hilirisasi industri terhadap struktur PDRB, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan sektor lain secara tidak langsung. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap industri ekstraktif dan pengolahan primer perlu diimbangi dengan penguatan industri turunan dan peningkatan kapasitas SDM lokal, agar manfaat ekonomi dapat lebih tersebar luas di masyarakat. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

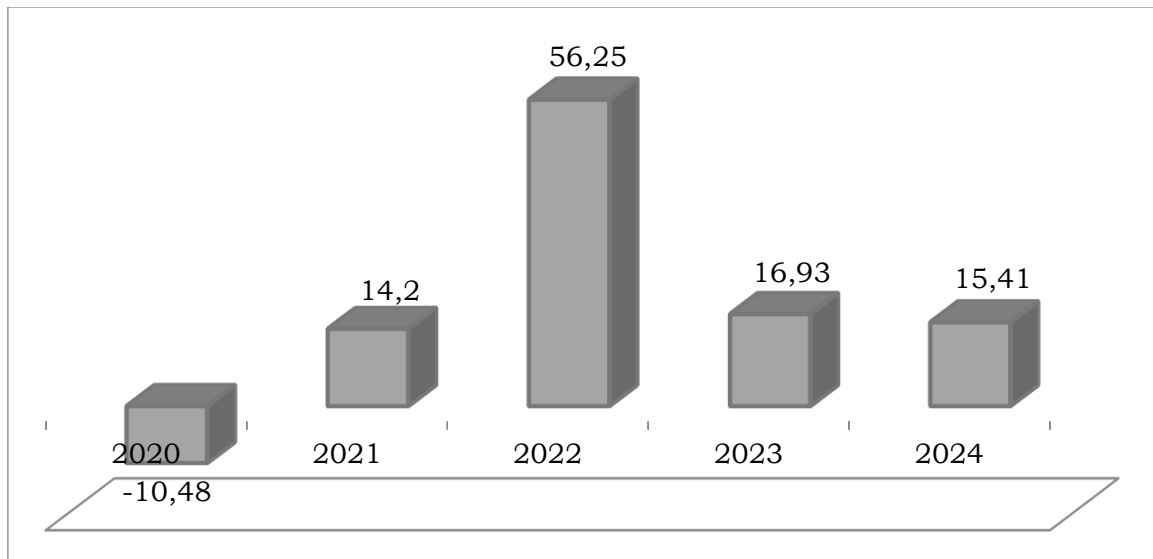
Gambar 2.51

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Grafik rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Morowali selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang menurun dengan rasio tertinggi Tahun 2022 sebesar 35.25. Penurunan rasio ini mengindikasikan terjadinya penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Morowali, baik karena menurunnya produktivitas industri, perubahan struktur ekonomi daerah, maupun meningkatnya kontribusi sektor-sektor lain. Penurunan rasio ini menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengembangan industri agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan mampu mempertahankan daya saing sektor pengolahan sebagai penopang utama perekonomian daerah Kabupaten Morowali.

C. Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum di Kabupaten Morowali menggambarkan kontribusi sektor pariwisata dan pelayanan konsumsi terhadap total PDRB daerah. Sektor ini mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan penduduk, mobilitas tenaga kerja, aktivitas industri, serta arus masuk pengunjung atau pendatang. Rasio ini mengukur perkembangan ekonomi berbasis jasa dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung sektor informal dan pelaku ekonomi lokal. Peningkatan rasio ini menunjukkan adanya penguatan ekonomi domestik yang dapat mendorong diversifikasi struktur ekonomi di luar sektor utama seperti pertambangan dan pengolahan. Rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Gambar 2.52

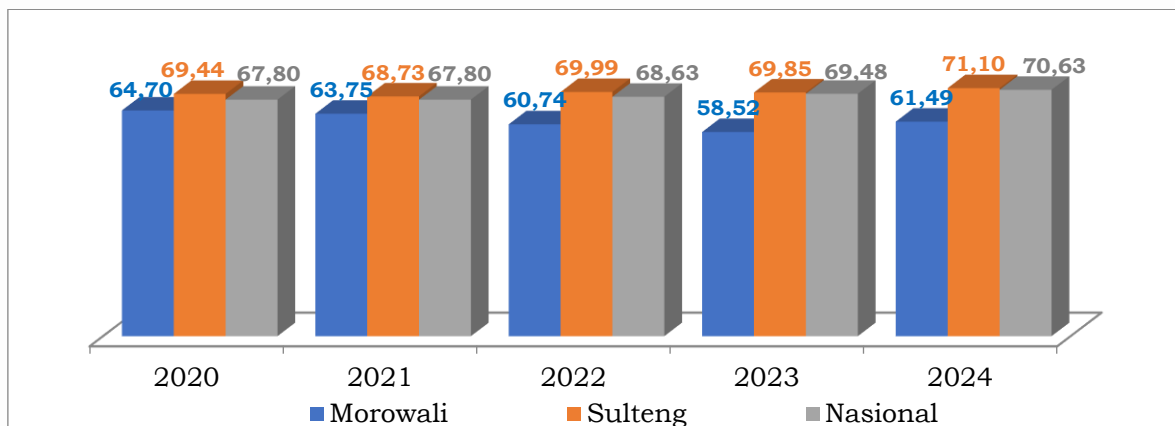
**Rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

Nilai rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum di Kabupaten Morowali menunjukkan dinamika yang bervariasi selama Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2020, sektor ini mencapai rasio negatif sebesar -10.48, dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor pariwisata dan pelayanan langsung. Tahun 2021 rasio naik ke angka 14.20 dan meningkat Tahun 2022 menjadi 56.25, menandai masa pemulihan penuh dan tingginya mobilitas masyarakat. Namun, Tahun 2023 dan 2024 rasio kembali menurun menjadi 16.93 dan 15.41. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sektor Akomodasi, Makan, dan Minum masih sangat rentan terhadap faktor eksternal, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan diversifikasi layanan agar sektor ini dapat tumbuh lebih stabil dan memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Morowali.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yaitu yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, terhadap total penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan sejauh mana penduduk suatu wilayah terlibat dalam aktivitas produktif dan menjadi ukuran penting dalam menilai dinamika pasar tenaga kerja serta kapasitas daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusianya. Semakin tinggi TPAK, semakin besar kontribusi penduduk terhadap perekonomian.

Grafik tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Morowali selama periode 2020–2024 secara umum berfluktuasi dan berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Morowali sempat menurun drastis Tahun 2023 yang dipengaruhi oleh dinamika ketenagakerjaan, pergeseran struktur ekonomi, atau dampak kebijakan pascapandemi.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Gambar 2.53

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Kesenjangan yang cukup besar antara TPAK Kabupaten Morowali dan rata-rata provinsi maupun nasional juga mencerminkan perlunya strategi peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal agar dapat mengimbangi potensi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, TPAK Kabupaten Morowali adalah terendah pertama, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	72.97	71.98	74.63	72.76	73.48
Banggai	69.79	71.80	73.84	71.70	71.70
Morowali	64.70	63.75	60.74	58.52	61.49
Poso	74.78	73.54	72.41	71.07	68.65
Donggala	63.93	67.47	72.03	66.57	68.42
Tolitoli	65.95	64.04	64.70	68.80	68.91
Buol	69.75	67.52	69.18	69.43	70.50
Parigi Moutong	72.50	68.82	74.05	73.30	74.68
Tojo Una-Una	75.33	74.86	68.47	75.06	75.08



Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sigi	69.24	70.76	72.69	70.94	75.92
Banggai Laut	67.20	61.42	58.37	59.17	68.98
Morowali Utara	69.85	68.47	69.93	70.33	70.35
Kota Palu	66.46	65.07	64.68	69.28	70.50
Sulawesi Tengah	69.44	68.73	69.99	69.85	71.10
Nasional	67.80	67.80	68.63	69.48	70.63

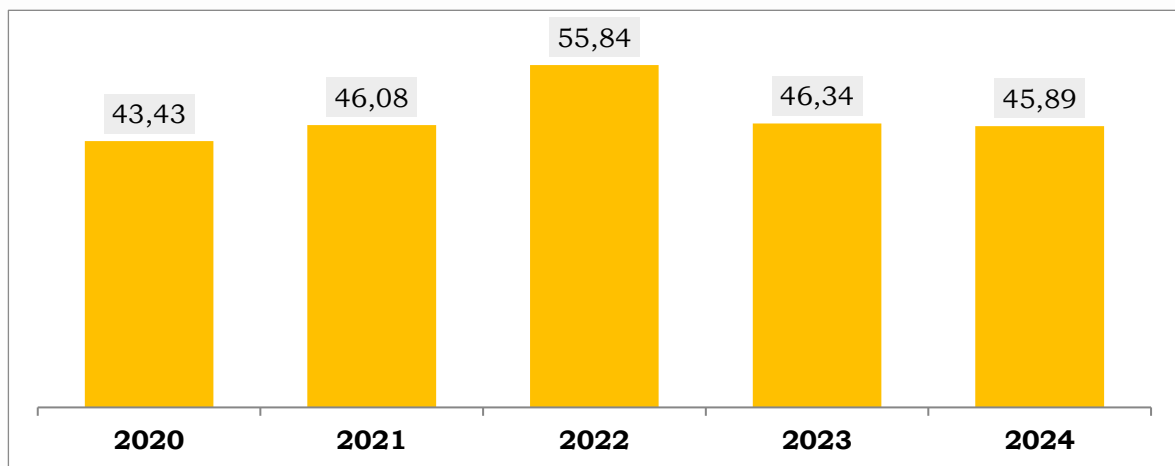
Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, TPAK Kabupaten Morowali selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan daerah lain, sehingga menempatkan Kabupaten Morowali sebagai kabupaten dengan TPAK terendah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Kabupaten dengan TPAK tertinggi adalah Kabupaten Sigi sebesar 75.92 persen, Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 75.08 persen dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 74.68 persen serta berada diatas rata-rata provinsi (71.10 persen) dan nasional (70.63 persen) yang menunjukkan partisipasi tenaga kerja yang tinggi. Kinerja TPAK Kabupaten Morowali yang rendah ini tidak sebanding dengan potensi ekonominya, dan menunjukkan adanya tantangan struktural dalam penyerapan tenaga kerja lokal atau partisipasi kerja perempuan, pemuda, dan sektor informal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

E. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menyebarkan inovasi. Inovasi di sini mencakup berbagai aspek seperti teknologi, kebijakan, serta praktik terbaik dalam sektor publik dan swasta. Kemampuan inovatif suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, indeks inovasi daerah tercatat sebesar 43,43 kemudian meningkat pada Tahun 2022 menjadi 46,08. Angka ini mengalami peningkatan cukup tajam pada tahun 2022, mencapai 55,84, yang menunjukkan adanya perbaikan dan upaya inovatif yang berhasil diimplementasikan pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2024, indeks inovasi kembali turun menjadi 45,89.



Sumber : Manual Book Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 (Data Diolah)

Gambar 2.54

Indeks Inovasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Peningkatan indeks inovasi pada tahun 2022 mencerminkan berbagai inisiatif dan program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali untuk mendorong inovasi. Ini bisa termasuk peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, penguatan infrastruktur teknologi dan komunikasi, serta kebijakan yang mendukung inovasi dan kewirausahaan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi mungkin juga meningkat pada periode ini, mendorong pertumbuhan inovasi yang signifikan.

Namun, penurunan indeks pada tahun 2023 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa keberlanjutan upaya inovatif tersebut mungkin menghadapi tantangan. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan penurunan ini termasuk berkurangnya investasi dalam R&D, masalah dalam implementasi kebijakan, atau kurangnya dukungan yang berkelanjutan untuk program inovasi. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, diperlukan pendekatan yang lebih konsisten dan terstruktur untuk memastikan pertumbuhan inovasi yang berkelanjutan.

Selanjutnya data Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan dalam kemampuan inovatif masing-masing daerah. Kota Palu mencatat indeks tertinggi dengan 51,05 dalam kategori "Inovatif," menunjukkan kemampuan yang baik dalam menciptakan dan mengadopsi inovasi. Di sisi lain, Kabupaten Donggala mencatat indeks terendah sebesar 5,1 dan masuk dalam kategori "Kurang Inovatif," menunjukkan tantangan besar dalam aspek inovasi.

Tabel 2.62

**Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Kabupaten/Kota	Skor Indeks	Predikat
Bangkep	33,84	Inovatif
Banggai	59,81	Inovatif
Morowali	45,89	Inovatif
Poso	26,16	Kurang Inovatif
Donggala	6,10	Kurang Inovatif
Tolitoli	39,81	Inovatif
Buol	34,55	Inovatif
Parimo	49,39	Inovatif
Touna	50,47	Inovatif
Sigi	38,14	Inovatif
Balut	40,89	Inovatif
Morut	39,99	Inovatif
Kota Palu	55,91	Inovatif
Sulteng	55,22	Inovatif

Sumber : Manual Book Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024

Kabupaten Morowali, dengan indeks inovasi 45,89, juga masuk dalam kategori "Inovatif." Meskipun tidak setinggi Kota Palu (55,91) atau Banggai (59,81), angka ini menunjukkan bahwa Morowali memiliki potensi yang signifikan dalam bidang inovasi. Dibandingkan dengan kabupaten lain yang masuk dalam kategori "Kurang Inovatif" seperti Banggai Poso (26,16) dan Donggala (6,10), Morowali menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal inovasi. Indeks ini mencerminkan adanya upaya dan program yang telah berhasil meningkatkan kapasitas inovasi di Morowali, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan, peningkatan infrastruktur teknologi, dan kebijakan yang mendukung inovasi.

F. Persentase UMKM Yang Naik Kelas

UMKM yang naik kelas di Kabupaten Morowali merupakan wujud keberhasilan pembinaan dan penguatan kapasitas usaha kecil dalam meningkatkan skala usaha, daya saing, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Kenaikan kelas UMKM ditandai dengan peningkatan omzet, perluasan pasar, akses terhadap pembiayaan formal, penggunaan teknologi, hingga legalitas usaha yang lebih lengkap. Di tengah pertumbuhan industri yang pesat, UMKM Kabupaten Morowali memiliki peluang besar untuk tumbuh melalui kemitraan dengan sektor formal, digitalisasi pemasaran, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Peran aktif pelatihan kewirausahaan, penyediaan infrastruktur usaha, dan

pendampingan teknis menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi UMKM dari usaha subsisten menjadi unit usaha yang produktif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Persentase UMKM yang naik kelas Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Persentase UMKM Yang Naik Kelas di Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase UMKM Yang Naik Kelas	NA	NA	2.06	4.05	5.18

Sumber : Dinas UMKM Kabupaten Morowali, 2025

Data persentase UMKM yang naik kelas di Kabupaten Morowali menunjukkan tren pertumbuhan positif selama Tahun 2022-2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan iklim usaha lokal, termasuk akses terhadap pelatihan, pembiayaan, serta pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Namun demikian, angka yang masih relatif rendah mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan pemberdayaan UMKM secara lebih terstruktur, termasuk melalui kemitraan usaha, digitalisasi, dan dukungan infrastruktur pendukung agar lebih banyak UMKM yang mampu berkembang dari skala mikro ke kecil dan menengah.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Indeks Ekonomi Hijau

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.



B. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indonesia Blue Economy Index (IBEI) bertujuan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja ekonomi biru di berbagai daerah di Indonesia. Ekonomi biru merupakan pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia, yang menciptakan nilai tambah pada rantai suplai (langsung dan tidak langsung) sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Indeks Ekonomi Biru di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64

Indeks Ekonomi Biru di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ekonomi Biru	NA	NA	NA	49.09	39.20

Sumber : BPS Indonesia, 2025

Indeks Ekonomi Biru di Kabupaten Morowali mulai terukur pada Tahun 2023 dengan capaian sebesar 49.09 dan mengalami penurunan menjadi 39.20 Tahun 2024. Indeks ini mencerminkan tingkat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis laut. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi kelautan dengan keberlanjutan ekosistem laut, seperti tekanan eksploitasi, pencemaran, atau lemahnya pengawasan dan kelembagaan pesisir. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu dalam penguatan tata kelola pesisir, pengembangan ekonomi maritim ramah lingkungan, dan pemberdayaan nelayan lokal sebagai pelaku utama ekonomi biru.

C. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer memainkan peran penting dalam upaya transisi energi menuju sistem yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Peningkatan kontribusi EBT seperti tenaga surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, serta mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan peningkatan porsi EBT dalam bauran energi nasional, yakni sebesar 17-19 persen pada tahun 2025.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses perubahan mendasar dalam tata kelola, pelayanan, dan aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh. Di era modern, transformasi ini menjadi landasan utama dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses layanan publik, serta mendorong inovasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pemerintahan. Di tingkat daerah, transformasi digital mendorong adopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), digitalisasi UMKM, serta optimalisasi platform daring untuk pelayanan sosial dan administrasi. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, literasi masyarakat, dan sinergi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Morowali merupakan cerminan kemajuan daerah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Indeks ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu akses terhadap infrastruktur TIK (seperti jaringan internet dan perangkat), penggunaan TIK oleh masyarakat dan institusi, serta keterampilan digital yang memungkinkan penduduk memanfaatkan teknologi secara optimal. Pembangunan TIK di Kabupaten Morowali menjadi dasar untuk mempercepat digitalisasi layanan, memperluas konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan penguatan kebijakan dan investasi di sektor TIK, Kabupaten Morowali memiliki peluang untuk memperkecil kesenjangan digital dan mewujudkan tata kelola pemerintahan serta aktivitas ekonomi yang adaptif terhadap perubahan zaman.

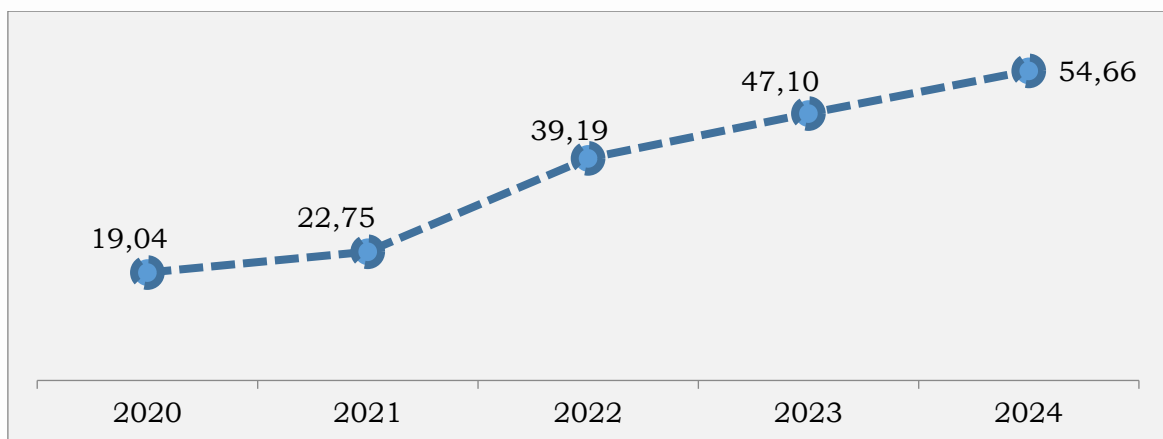
2.1.3.5 Integritas Ekonomi Domestik dan Global

Integritas ekonomi domestik dan global merujuk pada keterpaduan dan keandalan sistem ekonomi suatu wilayah dalam menjaga stabilitas internal sekaligus mampu berinteraksi secara sehat dan berdaya saing dalam tatanan ekonomi internasional. Di tingkat domestik, integritas ekonomi tercermin dari efisiensi kebijakan fiskal dan moneter, transparansi transaksi, kepastian hukum, serta keberlanjutan kegiatan produksi dan konsumsi. Sementara di level global, integritas ditunjukkan melalui kemampuan daerah atau negara dalam menjalin perdagangan yang

adil, menjaga standar kualitas produk, serta mematuhi prinsip-prinsip ekonomi internasional seperti perlindungan lingkungan dan etika bisnis. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Morowali yang terhubung dengan rantai nilai global melalui sektor industri pengolahan dan ekspor mineral, menjaga integritas ekonomi berarti bahwa pertumbuhan tidak hanya menguntungkan secara jangka pendek, tetapi juga mendukung kepercayaan mitra internasional dan kesejahteraan masyarakat lokal secara berimbang.

A. PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum ADHB (Milyar Rupiah)

PDRB berdasarkan nilai tambah sektor Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) di Kabupaten Morowali mencerminkan kontribusi riil sektor jasa pelayanan konsumsi terhadap total nilai ekonomi daerah dalam satu tahun tertentu. Di tengah pertumbuhan industri dan meningkatnya mobilitas penduduk serta pekerja migran, sektor ini menjadi salah satu penopang penting bagi perekonomian lokal, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan usaha mikro dan menengah. Nilai tambah yang dihasilkan mencerminkan permintaan aktual terhadap layanan penginapan, restoran, rumah makan, dan warung lokal yang tumbuh seiring dengan aktivitas industri dan urbanisasi. Peningkatan PDRB sektor ini secara konsisten mengindikasikan dinamika konsumsi domestik yang menguat serta adanya perputaran ekonomi berbasis lokal yang semakin besar. PDRB nilai tambah sektor Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

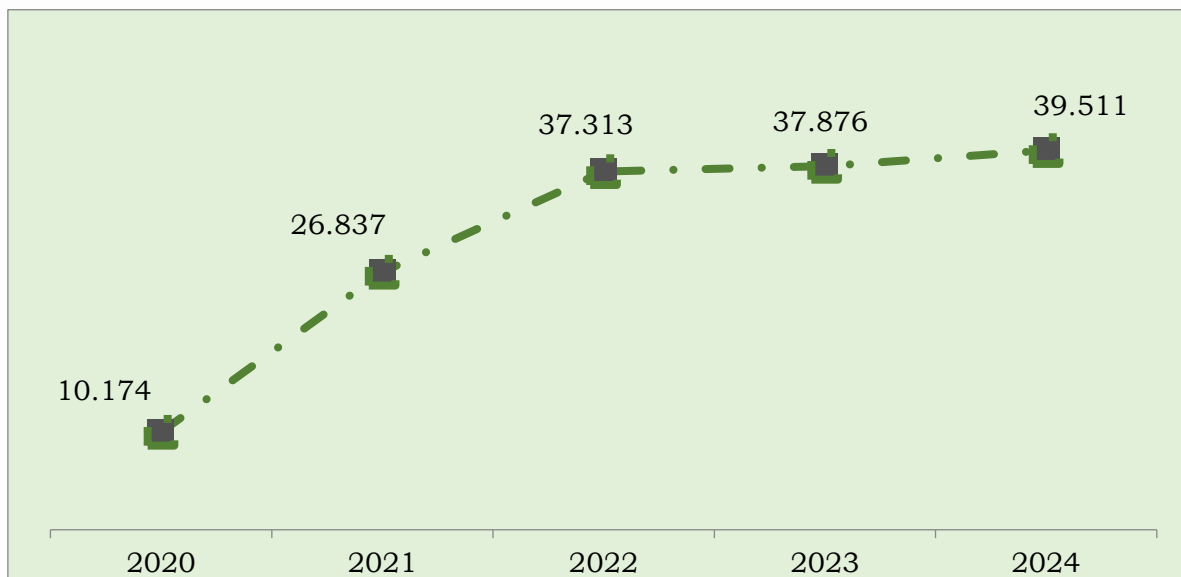
Gambar 2.55

**PDRB Nilai Tambah Sektor Akomodasi dan Makan Minum (ADHB)
(Milyar Rp) Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024**

PDRB Nilai Tambah Sektor Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan dari Rp19.04 miliar Tahun 2020 menjadi Rp54.66 miliar Tahun 2024. Kenaikan dipengaruhi oleh pulihnya mobilitas masyarakat pasca pandemi dan meningkatnya aktivitas industri yang mendorong permintaan layanan konsumsi. Selain itu, dipengaruhi juga dengan meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian daerah serta potensi sektor pariwisata dan ekonomi konsumtif yang terus berkembang di Kabupaten Morowali.

B. Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga konstan (ADHK) di Kabupaten Morowali mengukur investasi riil dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, mesin, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk mendukung aktivitas produksi jangka panjang. Nilai PMTB mencerminkan tingkat akumulasi kapital yang terjadi dan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi daerah. PMTB yang tinggi menunjukkan besarnya investasi dalam pembangunan fisik seperti kawasan industri, pelabuhan, fasilitas pendukung logistik, serta perumahan pekerja. Perkembangan PMTB akan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang serta meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga konstan (ADHK) di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

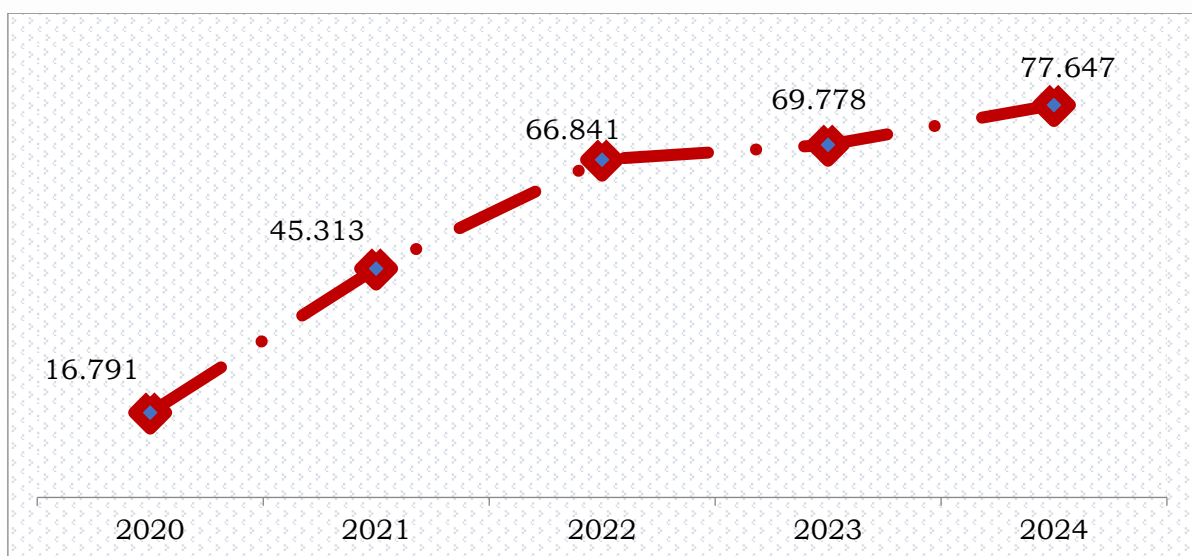
Gambar 2.56

PMTB ADHK (Milyar Rp) Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Nilai PMTB ADHK Kabupaten Morowali memperlihatkan tren pertumbuhan yang meningkat dari Tahun 2020 sebesar Rp10,174 miliar menjadi Rp39,511 miliar Tahun 2024. Terjadi peningkatan investasi fisik dalam bentuk infrastruktur, mesin, dan bangunan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah semakin bertumpu pada pembentukan aset tetap jangka panjang, terutama peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang di Kabupaten Morowali.

C. Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Morowali menggambarkan total nilai investasi aktual yang dikeluarkan untuk pengadaan aset tetap baru dalam satu periode tertentu, termasuk pembangunan infrastruktur, pengadaan mesin, peralatan, dan sarana produksi lainnya. Sebagai salah satu komponen penting dalam PDRB, PMTB ADHB menunjukkan aktivitas ekonomi yang berlangsung secara nyata tanpa memperhitungkan inflasi, sehingga memberikan gambaran tentang besarnya arus dana investasi yang masuk. Peningkatan nilai PMTB ADHB mencerminkan tingginya dinamika pembangunan fisik, terutama di sektor industri pengolahan dan pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki daya tarik investasi yang kuat dan sedang mengalami proses transformasi struktural menuju basis ekonomi berbasis modal dan infrastruktur. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada grafik berikut.



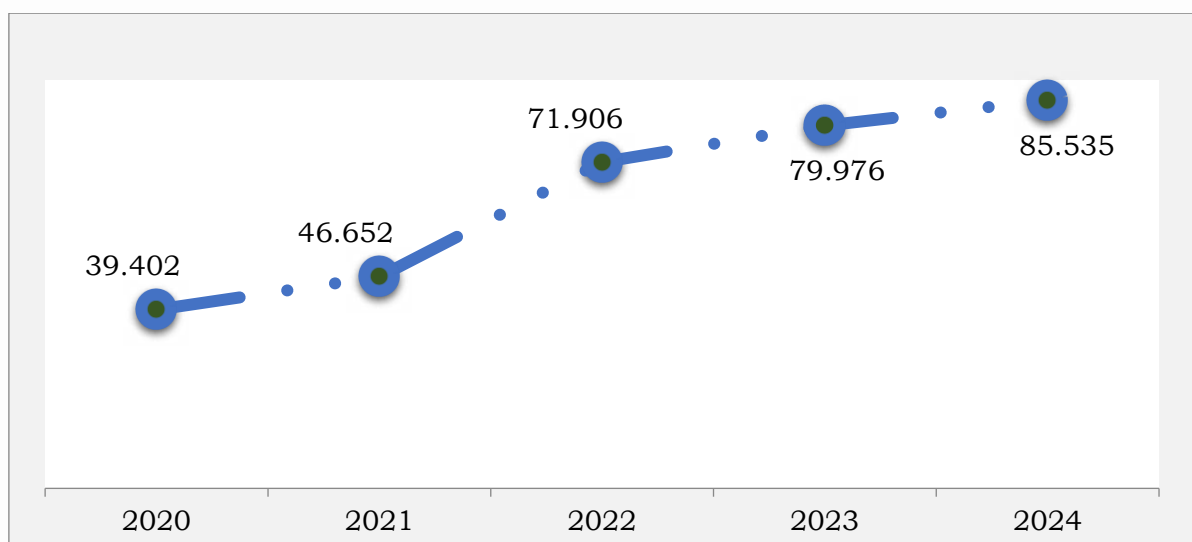
Sumber: BPS Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Gambar 2.57
PMTB ADHB (Milyar Rp) Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Nilai PMTB ADHB Kabupaten Morowali menunjukkan peningkatan dari Rp16,791 miliar Tahun 2020 menjadi Rp77,647 miliar Tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh peningkatan investasi riil dalam pembangunan infrastruktur, peralatan produksi, serta sarana ekonomi lainnya. Pola ini memperlihatkan penguatan struktur pembentukan aset tetap di Kabupaten Morowali sebagai motor penggerak pertumbuhan sektor produktif dan perluasan kapasitas ekonomi wilayah.

D. Ekspor Barang dan Jasa

Nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Morowali menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan produk dan layanan yang dapat bersaing di pasar luar wilayah, baik domestik maupun internasional. Sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam, terutama nikel dan hasil pengolahan mineral lainnya, Kabupaten Morowali memiliki peran dalam rantai pasok global. Peningkatan nilai ekspor menunjukkan produktivitas sektor industri dan pengolahan yang tinggi serta konektivitas logistik yang semakin membaik. Selain itu, ekspor jasa seperti transportasi, konstruksi, dan pelayanan pendukung industri juga turut menyumbang nilai ekonomi, menandakan adanya pertumbuhan sektor tersier dalam aktivitas ekspor barang. Nilai ekspor yang terus tumbuh menjadi daya saing dan kontribusi Kabupaten Morowali dalam mendukung perekonomian nasional. Nilai Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Gambar 2.58
Nilai Ekspor Barang dan Jasa (Milyar Rp) Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024

Perkembangan nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Morowali memperlihatkan tren peningkatan dari Tahun 2020 sebesar Rp39,402 miliar menjadi sebesar Rp85,535 miliar Tahun 2024. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa kapasitas produksi dan daya saing ekspor daerah mengalami pertumbuhan, seiring dengan meningkatnya kontribusi sektor unggulan dari industri pengolahan dan pertambangan serta meningkatnya konektivitas perdagangan luar negeri. Peningkatan ekspor ini memperkuat struktur ekonomi daerah serta memperluas cakupan pasar produk lokal ke global.

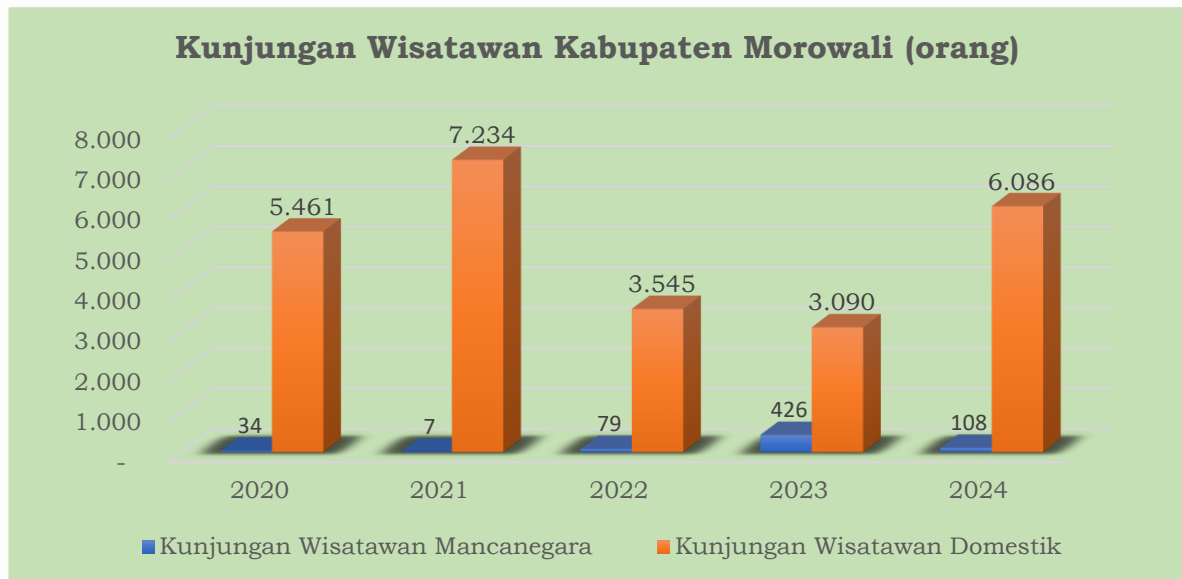
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis di Kabupaten Morowali. Wilayah perkotaan berfungsi sebagai simpul distribusi, pusat layanan, serta tempat berkumpulnya industri dan jasa modern, sementara wilayah perdesaan menopang aktivitas ekonomi melalui sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Keterhubungan antara keduanya melalui infrastruktur, logistik, dan pasar tenaga kerja menciptakan jaringan ekonomi yang memperkuat rantai pasok lokal. Melalui strategi pembangunan yang terarah, penguatan ekonomi perdesaan dapat mendorong munculnya sentra produksi baru, sedangkan pengembangan wilayah perkotaan mendorong tersedianya akses pasar, teknologi, dan layanan publik yang menunjang daya saing. Pendekatan terpadu ini menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh di wilayah Kabupaten Morowali.

A. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Morowali

Kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik menggambarkan aktivitas pariwisata yang mulai tumbuh di wilayah Kabupaten Morowali. Kehadiran wisatawan tidak hanya berdampak pada tingkat hunian hotel, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di sektor terkait seperti kuliner, transportasi, kerajinan lokal, penginapan, hotel, serta jasa pemandu wisata. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dalam mendukung upaya promosi pariwisata, menciptakan citra destinasi yang menarik, dan meningkatkan devisa, dan pendapatan daerah melalui sektor jasa pariwisata.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Morowali, 2025

Gambar 2.59

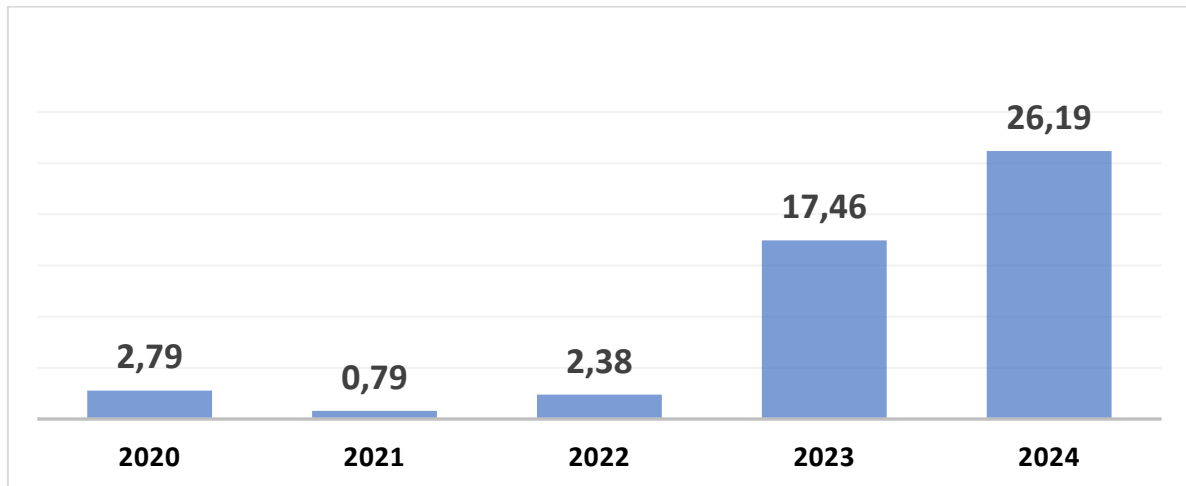
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Morowali berfluktuasi selama Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2020, tercatat sebanyak 34 orang wisatawan mancanegara dan 5.461 orang kunjungan wisatawan domestik, sementara wisatawan mancanegara menurun menjadi 7 orang Tahun 2021 disebabkan adanya pembatasan perjalanan internasional selama pandemi COVID-19 turut mempengaruhi penurunan jumlah tamu. Tahun 2023 kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 426 orang sedangkan kunjungan wisatawan domestik 3.090 orang. Di Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 108 orang untuk kunjungan wisatawan mancanegara dan 6.086 orang kunjungan wisatawan domestik. Tren ini menunjukkan bahwa daya tarik bagi wisatawan asing dan keberlangsungan kunjungan sangat bergantung pada stabilitas global dan kesiapan lokal dalam menyambut wisatawan, termasuk dalam promosi, fasilitas, dan integrasi dengan destinasi regional.

B. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri di Kabupaten Morowali menggambarkan kemajuan desa yang telah memiliki kapasitas kuat dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada bantuan eksternal. Status ini menunjukkan bahwa desa telah memiliki infrastruktur yang memadai, layanan pendidikan dan kesehatan yang baik, tingkat kemiskinan yang

rendah, serta aktivitas ekonomi lokal yang berkembang. Di tengah pertumbuhan industri dan urbanisasi di Kabupaten Morowali, keberadaan desa mandiri sebagai penyeimbang pembangunan wilayah, sekaligus menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dana desa yang tepat sasaran, serta kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun kemandirian yang berkelanjutan. Persentase Desa mandiri di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Morowali, 2025

Gambar 2.60

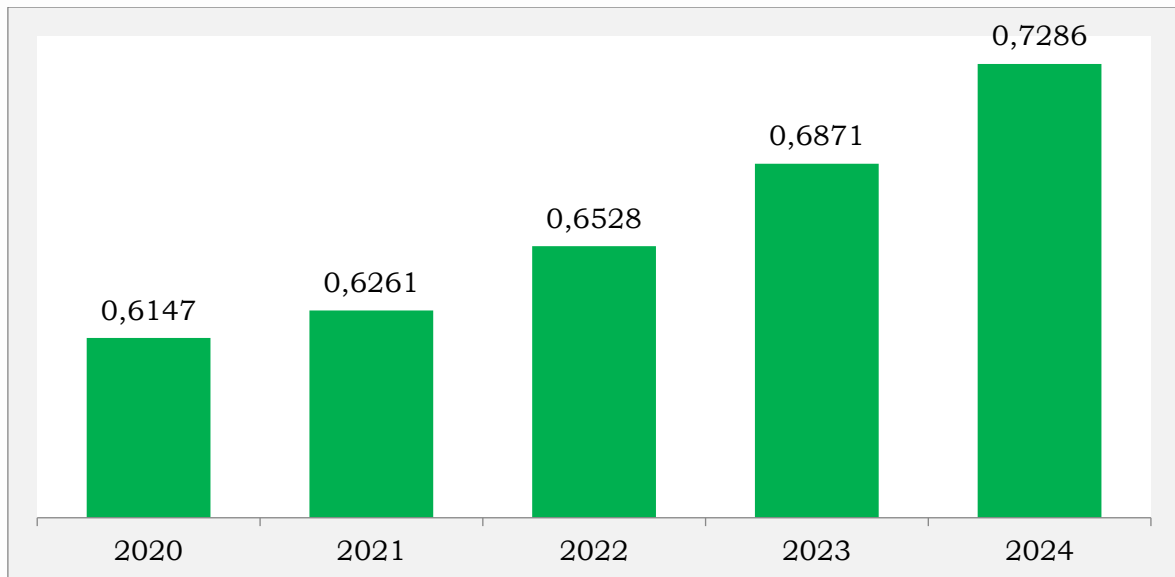
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Persentase desa mandiri di Kabupaten Morowali menunjukkan penurunan dari angka 2,79 persen Tahun 2020 menjadi 0,79 persen Tahun 2021 menandakan keterbatasan kemajuan kapasitas desa dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, pada Tahun 2022 terjadi peningkatan dari 2,38 persen menjadi 26,19 persen Tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan kapasitas desa, dukungan infrastruktur, serta program pembangunan berbasis desa mulai menunjukkan kemajuan dalam mendorong kemandirian desa serta transformasi pembangunan pedesaan di Kabupaten Morowali.

C. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Morowali merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kemandirian desa berdasarkan tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. IDM mencerminkan kemampuan desa dalam menyediakan layanan dasar, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta mengelola sumber daya secara berdaya guna. Di Kabupaten Morowali, peningkatan IDM menjadi indikator dalam memantau efektivitas program pembangunan desa, termasuk pemanfaatan

dana desa, partisipasi masyarakat, dan inovasi tata kelola pemerintahan desa. Semakin tinggi nilai IDM, semakin menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Morowali mengalami kemajuan yang menyeluruh dan mampu bertransformasi menjadi entitas yang produktif, tangguh, dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Morowali, 2025

Gambar 2.61

Indeks Desa Membangun di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Morowali menunjukkan peningkatan dari angka 0.6147 Tahun 2020 menjadi 0.7286 Tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan desa dari aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kenaikan tersebut sebagai hasil dari penguatan kapasitas tata kelola desa, optimalisasi dana desa, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur. Semakin tinggi nilai IDM menunjukkan bahwa upaya pembangunan desa di Kabupaten Morowali semakin terarah dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

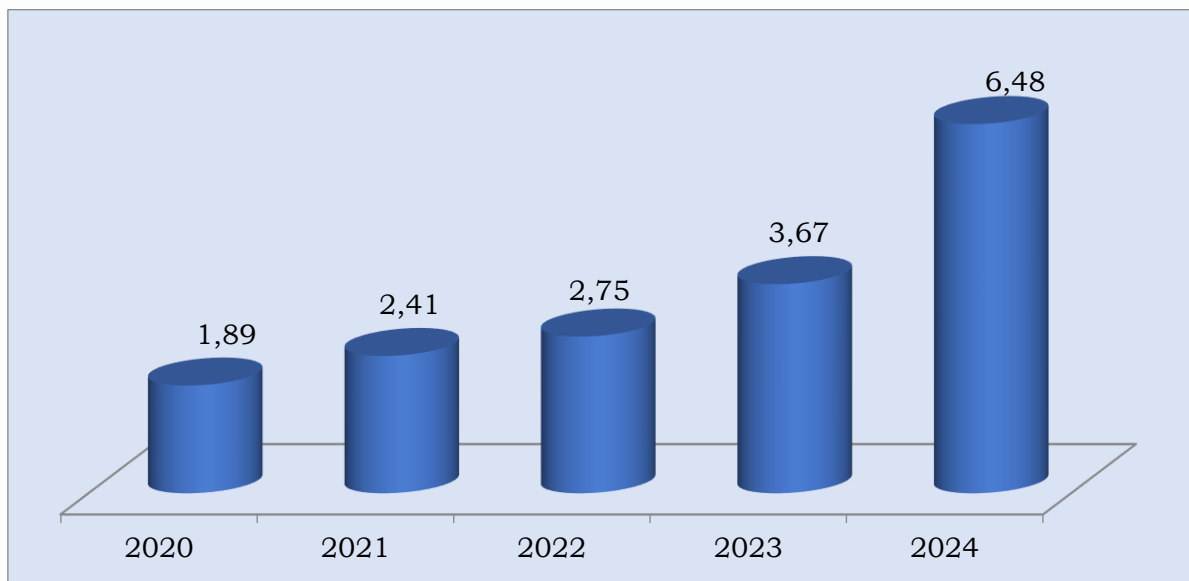
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro mencerminkan kondisi perekonomian suatu wilayah yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan neraca transaksi berjalan secara terkendali. Stabilitas ini menjadi fondasi utama dalam menopang iklim investasi, ketahanan fiskal daerah, serta daya beli masyarakat. Pencapaian stabilitas makro ditandai dengan pengendalian harga kebutuhan pokok, fluktuasi PDRB, serta kemampuan daerah dalam

merespons dinamika ekonomi global maupun domestik tanpa menciptakan guncangan terhadap struktur ekonomi lokal.

A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Morowali menggambarkan sejauh mana kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah bruto yang dihasilkan dalam perekonomian daerah. Rasio ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Selain itu, rasio ini juga menilai apakah aktivitas ekonomi telah berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor-sektor seperti pajak mineral bukan logam, PBB-P2, dan pajak restoran. Rasio yang rendah dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar nilai tambah ekonomi tidak terserap secara optimal dalam bentuk penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang lebih efektif agar potensi fiskal daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: LRA dan BPS Kabupaten Morowali, 2025 (Data diolah kembali)

Gambar 2.62

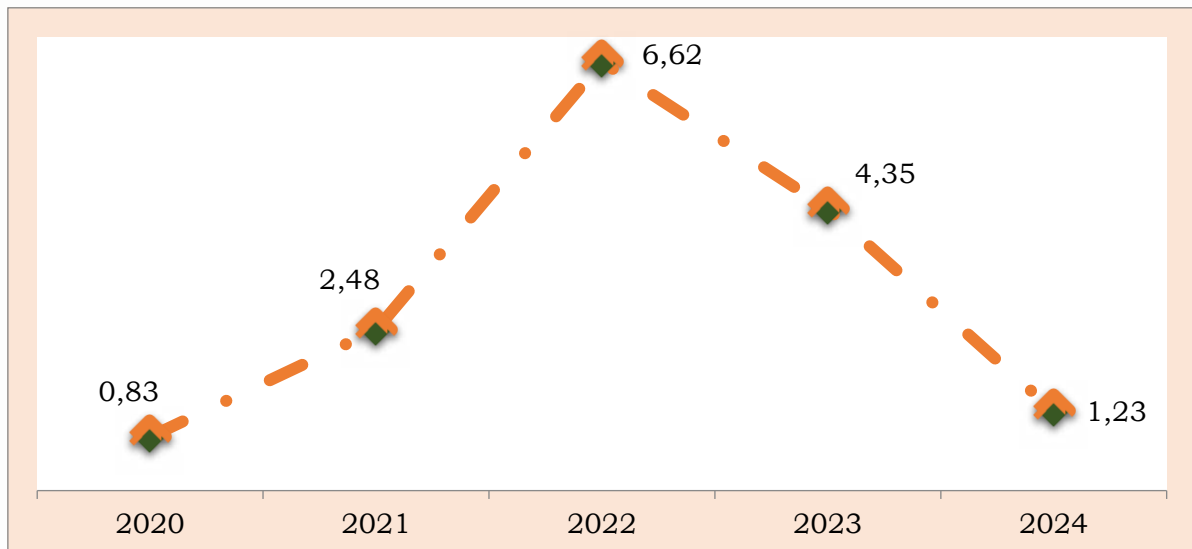
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Nilai rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Morowali menunjukkan tren pertumbuhan meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Rasio ini meningkat dari 1.89 persen Tahun 2020 menjadi 6.48 persen Tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan perbaikan dalam kapasitas fiskal daerah, baik melalui peningkatan PAD maupun optimalisasi sistem pemungutan

pajak. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2024, menandakan adanya dorongan kebijakan atau perluasan basis pajak. Meningkatnya rasio ini juga menjadi indikator positif dalam kontribusi sektor perpajakan terhadap perekonomian daerah, yang mendukung pembiayaan pembangunan tanpa ketergantungan berlebih pada transfer pusat.

B. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi berupa kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi yang relatif tinggi berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi di suatu daerah perlu dikendalikan, sehingga diharapkan tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025 (Data diolah kembali)

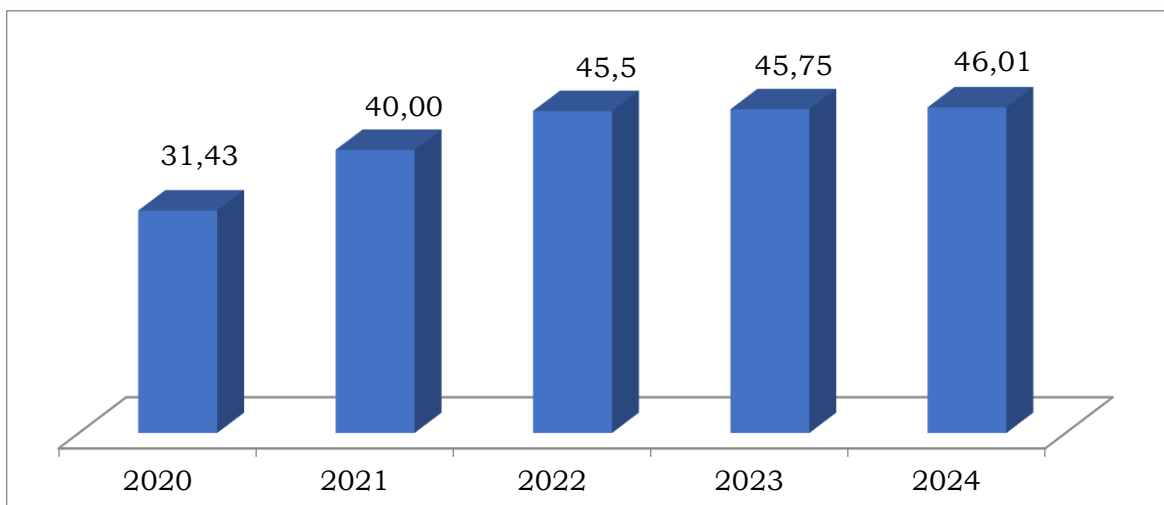
Gambar 2.63

Tingkat Inflasi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Morowali menunjukkan dinamika yang berfluktuasi selama periode 2020–2024. Pada Tahun 2020, inflasi tercatat rendah sebesar 0.83 persen, lalu mengalami peningkatan hingga mencapai 6.62 persen Tahun 2022, yang dipengaruhi oleh tekanan harga bahan pokok, energi, atau gangguan rantai pasok. Setelah itu, inflasi mulai menurun menjadi 4.35 persen Tahun 2023 sampai 1.23 persen Tahun 2024. Tren ini menunjukkan upaya pengendalian harga yang berkaitan dengan stabilitas harga pangan dan perbaikan distribusi barang.

C. Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi

Kontribusi PDRB Kabupaten Morowali terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah didominasi sektor industri pengolahan berbasis tambang dan aktivitas ekspor yang intensif. Seiring dengan berkembangnya kawasan industri di wilayah Kabupaten Morowali, terutama di sektor hilirisasi nikel, Kabupaten Morowali telah menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan output sektor-sektor utama di Kabupaten Morowali memberikan dampak langsung terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus memperlihatkan pergeseran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah pesisir dan industri. Namun demikian, penting untuk terus mendorong pemerataan manfaat pembangunan antarwilayah serta memperkuat sinergi antara pusat-pusat produksi dan daerah hinterland agar pertumbuhan yang terjadi tidak bersifat sektoral, melainkan mendorong peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi PDRB Kabupaten Morowali terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025 (Data diolah kembali)

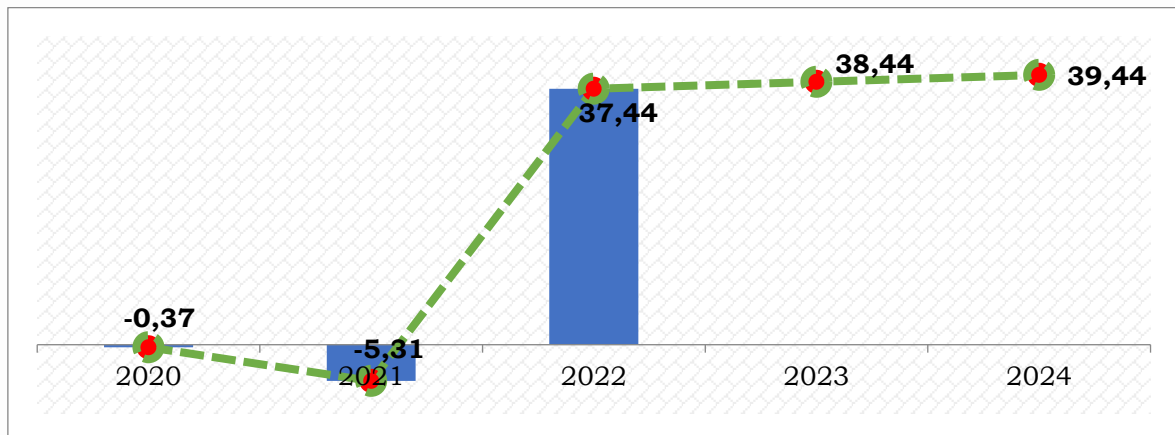
Gambar 2.64
Kontribusi PDRB Kabupaten Morowali Terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Nilai kontribusi PDRB Kabupaten Morowali terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan kontribusi sebesar 31.43 persen Tahun 2020 meningkat menjadi 46.01 persen Tahun 2024. Peningkatan kontribusi ini mengindikasikan semakin kuatnya peran Kabupaten Morowali dalam mendorong perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dipengaruhi oleh ekspansi kawasan industri berbasis

tambang dan pengolahan. Dominasi ini mencerminkan transformasi struktur ekonomi daerah yang semakin terintegrasi ke dalam sistem produksi nasional maupun global, menjadikan Kabupaten Morowali sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Sulawesi Tengah.

D. Pertumbuhan Industri

Kabupaten Morowali telah berubah menjadi *Sulawesi Mining Industry* di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah selama beberapa tahun terakhir telah menjadi kawasan pertambangan bouksit dan nikel terbesar keenam di dunia (menurut US Geological Survey). Para pakar pertambangan memperkirakan Kabupaten Morowali mempunyai prospek kegiatan industri yang luar biasa besar karena di bawah tanahnya tersedia materi lithium 40 persen dari produksi lithium dunia. Pertumbuhan industri diukur dari jumlah industri setiap tahun di Kabupaten Morowali.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah) (Tahun 2023*-2024* : Angka Sementara)

Gambar 2.65
Pertumbuhan Industri Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Merujuk pada data yang dipublikasi oleh BPS, diketahui pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali cenderung naik dan berfluktuatif. Tahun 2020 pertumbuhan Industri sebesar -0.37 persen, kemudian pada Tahun 2021 pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar -5.31 persen. Tahun 2022 industri di Kabupaten Morowali meningkat sebesar 37.44 persen sampai tahun 2024 sebesar 39.44 persen. Meski, pertumbuhan jumlah industri tidak stabil, namun nilai produksi dan kontribusi Sektor Industri di Kabupaten morowali selalu meningkat setiap Tahun. Hal ini dikarenakan industri yang terdapat di Kabupaten Morowali adalah industri besar yang tetap beroperasi.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek layanan umum merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang terbagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta penunjang pemerintahan. Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Morowali. Layanan umum mencakup penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur dasar, transportasi, air bersih, dan energi, yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Indikator kinerja pelaksanaan pembangunan pada aspek ini selama periode 2019–2024 menjadi tolok ukur penting untuk menilai efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan umum yang merata, inklusif, dan berkualitas menjadi fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menciptakan sistem pemerintahan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai akuntabilitas. Integritas dalam regulasi menekankan bahwa kebijakan dibuat secara transparan dan adil, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, adaptivitas memungkinkan aturan dan mekanisme tata kelola untuk terus diperbarui sesuai dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang. Pendekatan ini mendorong lahirnya kebijakan yang relevan, responsif, dan efisien, yang mampu mengakomodasi kepentingan publik secara luas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Morowali merupakan ukuran tingkat kemajuan daerah dalam memperbaiki sistem hukum, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Indeks ini mencakup aspek pembentukan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah, penyederhanaan birokrasi hukum, serta peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum dan lembaga terkait. Reformasi hukum di Kabupaten Morowali menjadi berperan dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat, mendukung investasi, serta melindungi hak-hak warga. Upaya pembaruan hukum ini diarahkan agar

regulasi daerah menjadi lebih sinkron dengan kebijakan nasional dan mampu menjawab kompleksitas persoalan di lapangan secara lebih cepat dan tepat. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

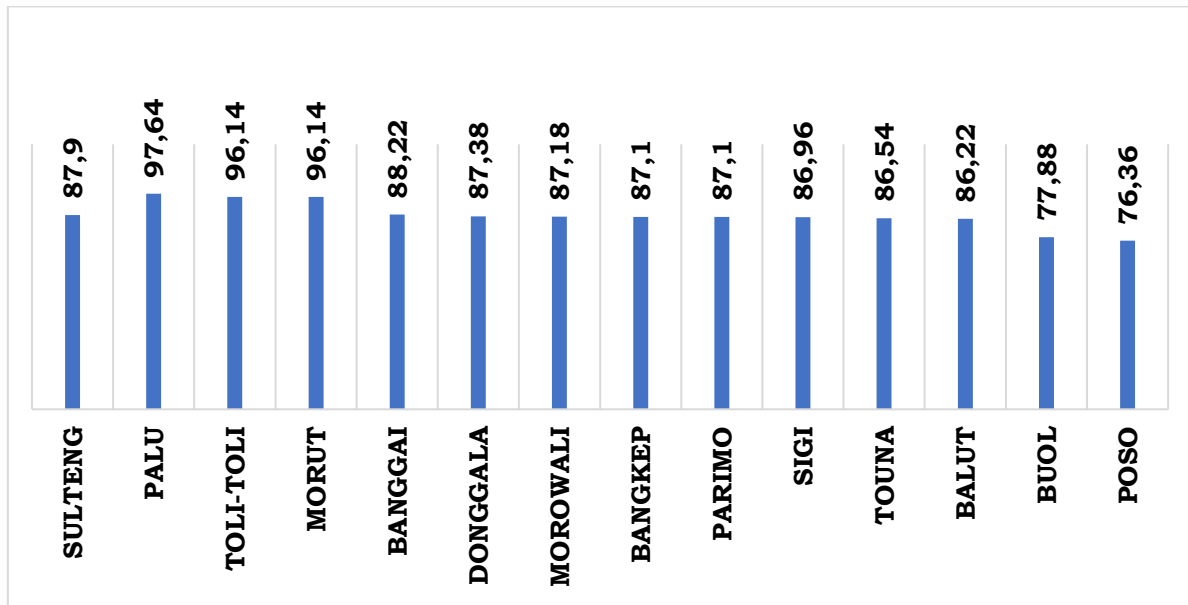
Tabel 2.65

Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum (IRH)	NA	NA	NA	45.10	87.18

Sumber: Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Morowali menunjukkan perkembangan yang meningkat dalam dua tahun terakhir. Capaian indeks Tahun 2023 dengan nilai 45.10 menjadi 87.18 Tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya percepatan dalam pembenahan aspek regulasi, peningkatan kualitas pelayanan hukum, serta penguatan kelembagaan yang mendukung tata kelola hukum di tingkat daerah. Kenaikan ini juga dapat diasosiasikan dengan meningkatnya komitmen daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagai landasan pembangunan yang sehat.



Sumber: Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

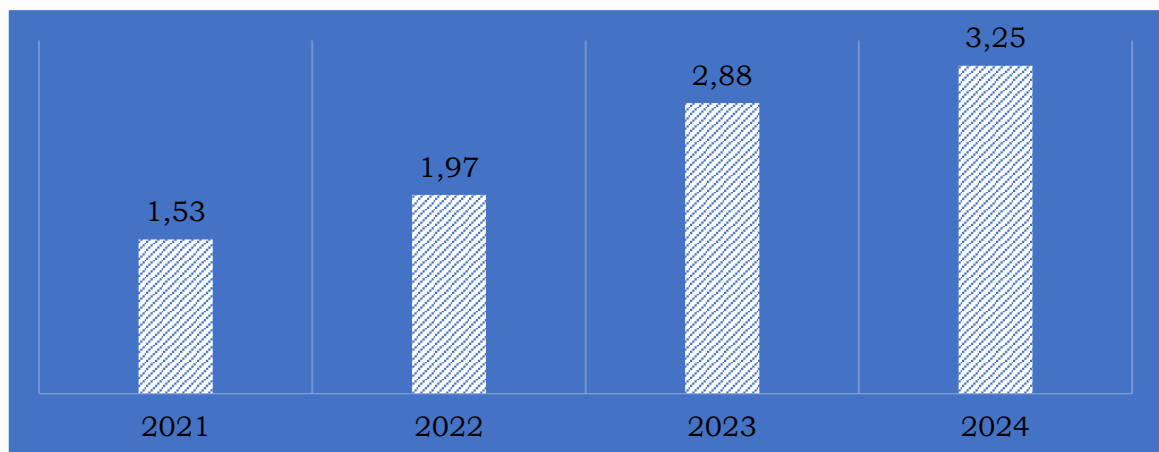
Gambar 2.66

**Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali memperoleh nilai 87.18 berada di bawah rata-rata provinsi (87.9). Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Morowali masih berada di posisi menengah ke bawah. Kota Palu menempati posisi tertinggi dengan nilai 97.64, diikuti oleh Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Morowali Utara dengan nilai 96.14. Sementara itu, Kabupaten Morowali berada di bawah Kabupaten Donggala (87.38) dan Kabupaten Banggai (88.22) menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek reformasi hukum, khususnya pada penguatan regulasi, efektivitas penegakan hukum, dan tata kelola kelembagaan.

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Morowali menggambarkan tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Indeks ini mengukur berbagai aspek, mulai dari kebijakan, tata kelola, manajemen layanan, hingga penerapan aplikasi digital antarperangkat daerah. Peningkatan nilai SPBE menggambarkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem yang lebih efisien, transparan, dan terkoordinasi, sekaligus mempercepat transformasi digital birokrasi. Dalam kerangka pembangunan daerah, SPBE menjadi pendorong utama dalam memperluas akses pelayanan, menekan praktik non-prosedural, dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Nilai SPBE Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024 diuraikan pada gambar berikut.



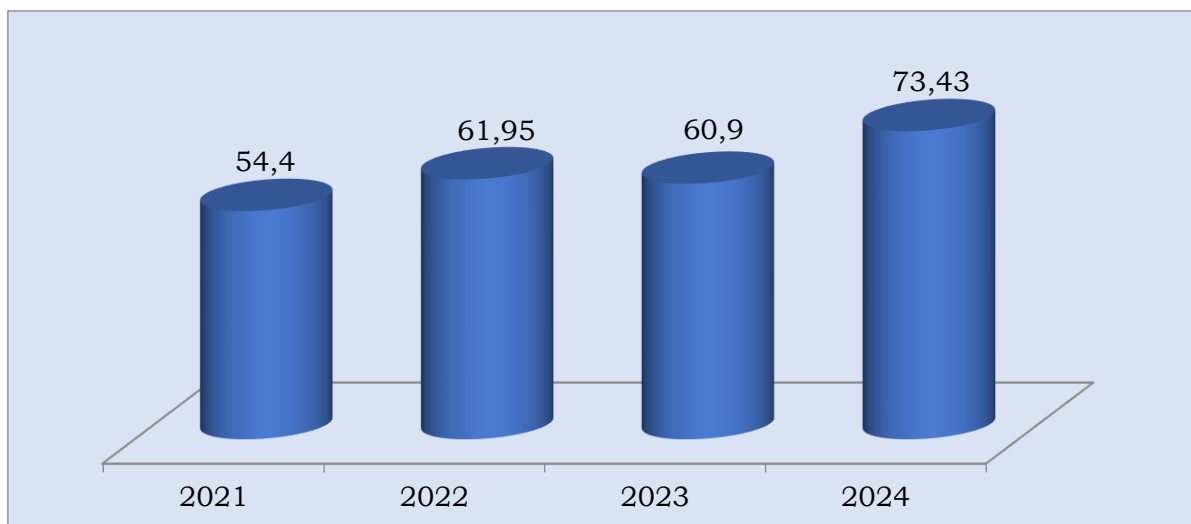
Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Morowali, 2025

Gambar 2.67
Nilai SPBE Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024

Nilai SPBE Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 1.53 menjadi 3.25 Tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya kemajuan dalam implementasi tata kelola pemerintahan digital, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Capaian ini memperlihatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mewujudkan birokrasi modern yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan arah transformasi digital nasional.

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Morowali merepresentasikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, baik dari segi kecepatan, kemudahan, kepastian, maupun kepuasan penerima layanan. Indeks ini dihitung berdasarkan penilaian terhadap unit layanan seperti perizinan, kependudukan, kesehatan, dan sektor-sektor pelayanan dasar lainnya. Peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa proses layanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta lebih akuntabel dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, nilai yang rendah dapat menjadi alarm untuk perbaikan tata kelola dan peningkatan kapasitas aparatur. Selain itu, menjadi pendorong terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih berkualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024 diuraikan pada gambar berikut.



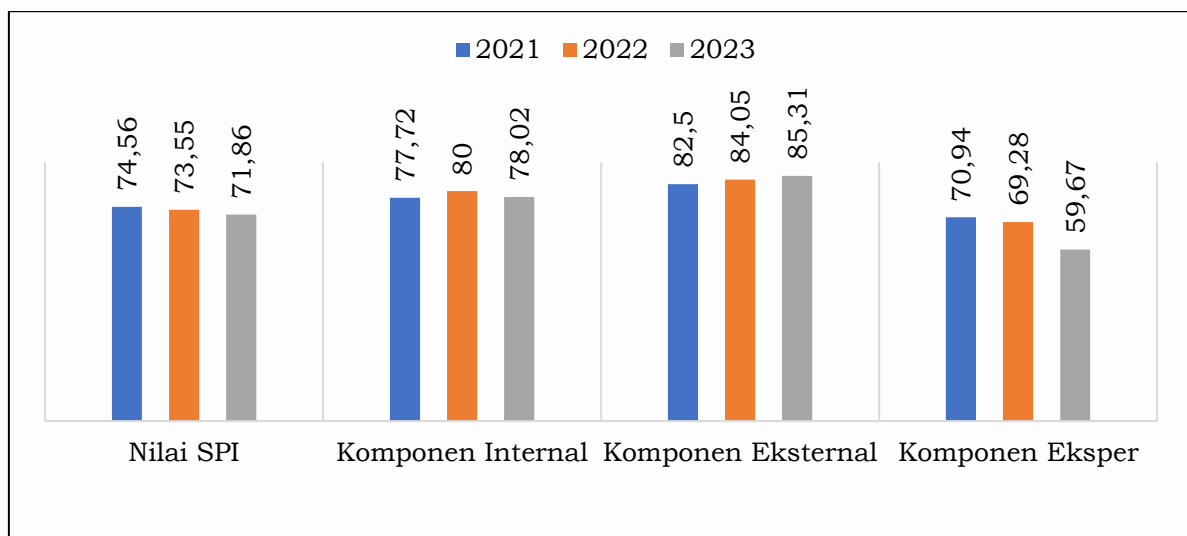
Sumber: OMBUDSMAN RI Tahun 2025

Gambar 2.68
**Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024**

Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan secara umum dengan capaian Tahun 2024 sebesar 73.43 yang menandakan adanya perbaikan substansial dalam kualitas pelayanan publik, komitmen terhadap pemenuhan standar pelayanan, serta penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas birokrasi daerah. Peningkatan ini menjadi indikator positif atas reformasi pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prinsip *good governance*.

D. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Morowali merepresentasikan sejauh mana prinsip-prinsip integritas seperti transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi telah terimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks ini mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan. Di tengah dinamika pembangunan daerah yang pesat, integritas menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik dan mendorong iklim investasi yang sehat. Oleh karena itu, peningkatan nilai IIN di Kabupaten Morowali menunjukkan kemajuan dalam membangun sistem birokrasi yang beretika, patuh hukum, serta adaptif terhadap reformasi regulasi nasional dan daerah, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Morowali sebagai wilayah strategis yang mendukung pembangunan nasional berlandaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber : JAGA.ID (Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia) Tahun 2024

Gambar 2.69
Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

Nilai SPI Kabupaten Morowali menunjukkan dinamika yang cukup stabil dari Tahun 2021-2023 dengan skor tinggi di atas 78 untuk ketiga dimensi utama: individu, organisasi, dan lingkungan. Pada Tahun 2021 dan 2022, nilai SPI untuk ketiga kategori berada pada level yang hampir seimbang, menggambarkan konsistensi persepsi integritas baik dari sisi personal maupun kelembagaan. Tahun 2023 mengalami peningkatan nilai pada seluruh kategori, menandakan adanya penguatan sistem pengendalian internal serta kesadaran integritas di lingkungan kerja. Namun, pada Tahun 2024 terlihat adanya penurunan nilai terutama pada kategori lingkungan, sehingga Kabupaten Morowali berada pada kategori rentan yang mengindikasikan potensi tantangan dari faktor eksternal seperti interaksi pihak ketiga, tekanan publik, atau dinamika politik lokal yang dapat memengaruhi persepsi dan praktik integritas.

E. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali mencerminkan komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kinerja aparatur, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan pengawasan internal, Pemerintah Kabupaten Morowali berupaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Capaian indeks ini juga merupakan hasil sinergi antarperangkat daerah dalam mendorong budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan serta penggunaan teknologi informasi secara lebih luas. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66

Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun							
	2021		2022		2023		2024	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi	45.33	C	52.45	CC	55.56	CC	69.30	B

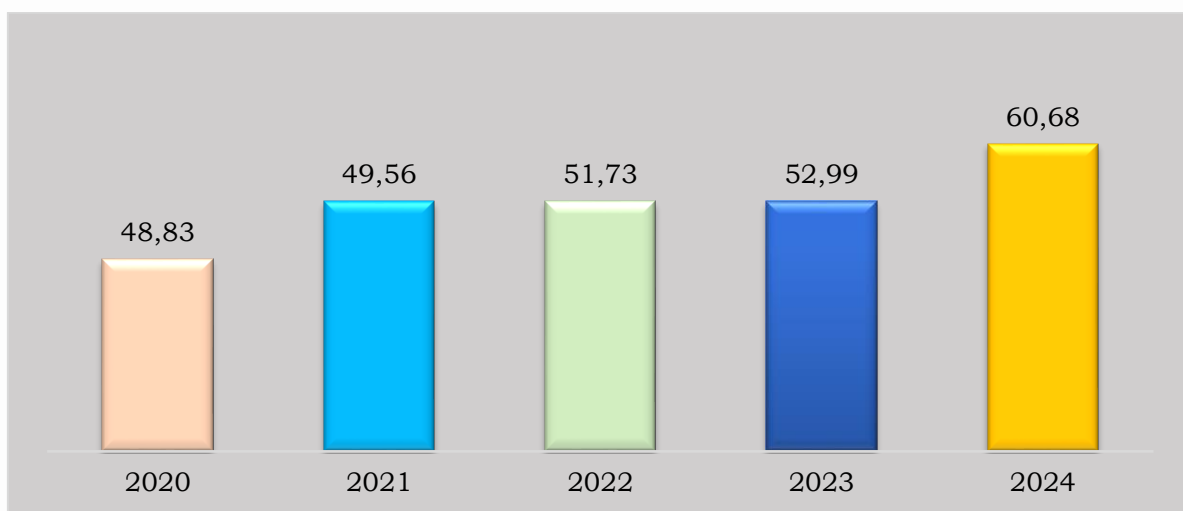
Sumber: KemenPanRB, 2025

Data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Tahun 2021 berada pada skor 45.33 dengan kategori C, menunjukkan masih banyak aspek birokrasi yang perlu diperbaiki. Namun, pada Tahun 2022-2023, skor meningkat menjadi 52.45 dan 55.56, yang masing-masing masuk dalam kategori CC, mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem

birokrasi dan pengelolaan pelayanan publik. Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan skor menjadi 69.30 masuk dalam kategori B, menandakan bahwa reformasi birokrasi mendekati level birokrasi yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

F. Nilai SAKIP

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Morowali mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome). SAKIP menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan yang selaras dengan tujuan pembangunan, melaksanakan kegiatan secara terukur, serta mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya secara transparan. Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan adanya kemajuan dalam budaya kinerja birokrasi yang berfokus pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya serapan anggaran. Oleh karena itu, penguatan SAKIP di Kabupaten Morowali tidak hanya menjadi bagian dari reformasi birokrasi, tetapi juga merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Nilai SAKIP Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber : Kementerian PAN RB Tahun 2024

Gambar 2.70
Nilai SAKIP Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Berdasarkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pada Tahun 2020, nilai SAKIP berada di angka 48,83 dan meningkat menjadi 60,68 Tahun 2024, mencerminkan perbaikan nyata dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan ini menandakan bahwa Kabupaten Morowali semakin mampu menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan program dan anggaran, serta menunjukkan keberhasilan reformasi birokrasi dalam mendorong kinerja yang berorientasi pada hasil.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

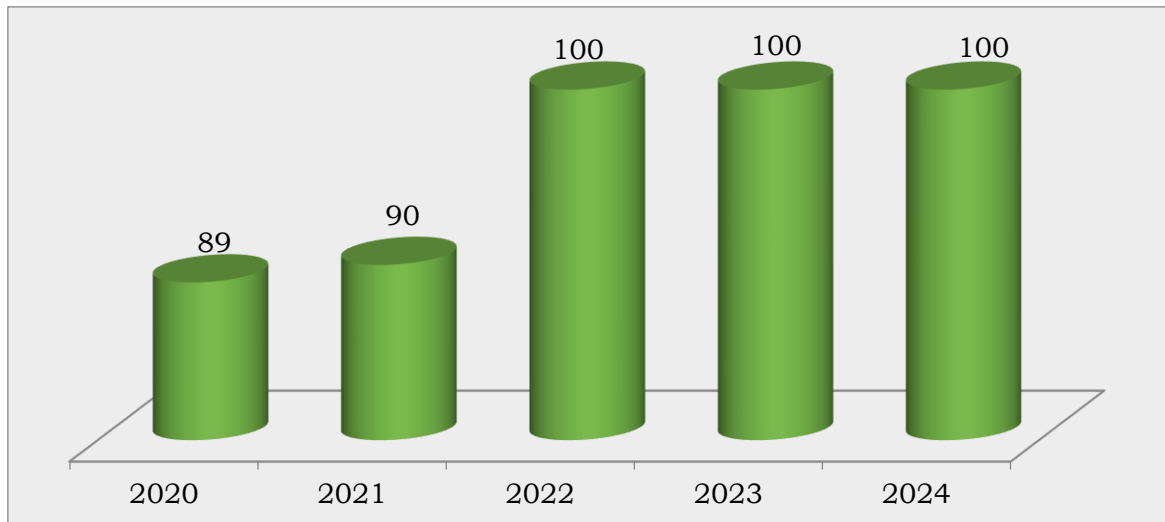
Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan tiga pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Hukum berkeadilan menuntut sistem peradilan yang transparan, tidak diskriminatif, serta mampu melindungi hak-hak seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Di sisi lain, keamanan nasional yang tangguh mencakup ketahanan terhadap ancaman fisik, digital, dan ideologis, yang dikembangkan melalui sinergi antara aparatur negara dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, demokrasi substansial tidak hanya menekankan prosedur elektoral, tetapi juga menjamin adanya partisipasi aktif warga, perlindungan terhadap kebebasan sipil, dan penguatan lembaga-lembaga demokratis. Ketiganya saling menguatkan untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan berdaya secara politik.

A. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Morowali merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban, mendukung pembangunan daerah, dan memperkuat otonomi lokal. Sebagai implementasi dari kewenangan desentralisasi, penegakan Perda tidak hanya menuntut keberadaan regulasi yang jelas dan aplikatif, tetapi juga didukung oleh aparatur yang profesional, koordinasi lintas sektor yang solid, serta partisipasi aktif masyarakat. Penegakan Perda harus adaptif terhadap kebutuhan lokal, terutama dalam mengatur ketertiban umum, tata ruang, lingkungan hidup, serta pengelolaan potensi daerah.

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Morowali selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang meningkat sampai 100 persen Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi lokal secara optimal, didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, koordinasi

antar-instansi yang solid, serta kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Persentase Penegakan Perda Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: SatpolPP Kabupaten Morowali Tahun 2025

Gambar 2.71

Persentase Penegakan Perda Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

B. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan pilar penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif. Untuk mengetahui capaian pembangunan di bidang ini, terdapat lima indikator utama yang dapat diukur sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67

Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 di Kabupaten Morowali

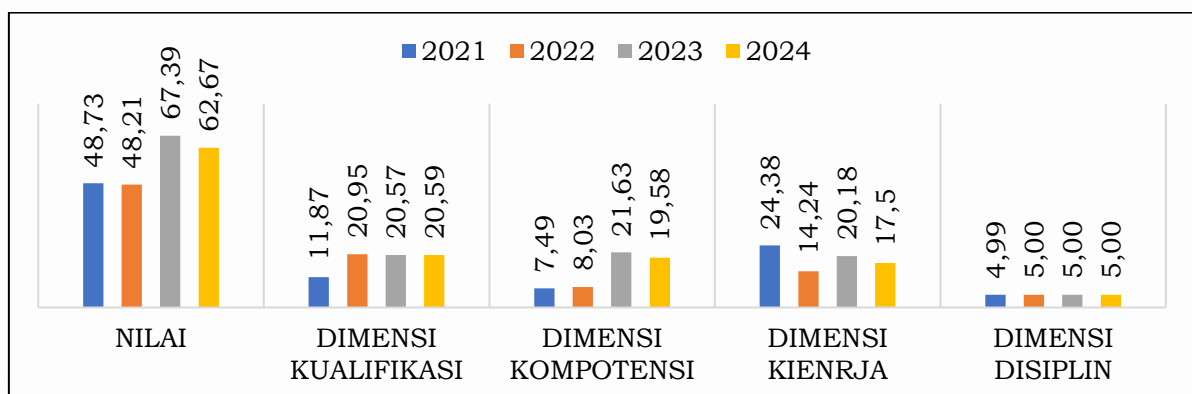
No	Ketentruman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	975	975	825	825	825
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentruman, keindahan)	8.00	8.00	5.00	14.00	14.00
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7.00	7.00	7.00	14.00	14.00

Sumber: SIPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

Berdasarkan tabel ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama Tahun 2020-2024, terlihat bahwa jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami penurunan, begitupula tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan) mengalami peningkatan. Hal serupa terjadi pada cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota yang stabil pada angka 7 layanan selama 2020–2022, dan meningkat menjadi 14 layanan Tahun 2023-2024. Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek penanganan ketertiban dan kedaruratan, meskipun diiringi dengan berkurangnya jumlah petugas Linmas yang berdampak pada efektivitas jangka panjang.

C. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Morowali mencerminkan sejauh mana kualitas, kompetensi, integritas, dan kinerja ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif. Indeks ini mengukur upaya pembinaan sumber daya manusia aparatur yang berorientasi pada meritokrasi dan pelayanan prima. Di Kabupaten Morowali, peningkatan profesionalitas ASN didorong melalui reformasi birokrasi, pelatihan berkelanjutan, serta penerapan sistem manajemen kinerja berbasis elektronik. Penguatan nilai-nilai dasar ASN, seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti-korupsi, menjadi fokus utama dalam menciptakan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah. Peningkatan indeks ini berkontribusi langsung terhadap efektivitas kelembagaan dan percepatan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Morowali yang bersih, melayani, dan berdaya saing. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber : SI-ASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) Tahun 2025

Gambar 2.72

Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kabupaten Morowali Tahun 2021-2024

Berdasarkan grafik Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Morowali, terlihat bahwa mayoritas ASN berada pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ASN Kabupaten Morowali telah memenuhi standar kompetensi dasar dalam aspek kualifikasi, kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, dan integritas, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai level profesional yang lebih tinggi. Diperlukan upaya peningkatan melalui pelatihan, penataan manajemen SDM berbasis merit, dan penguatan budaya kerja aparatur.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar kawasan merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan nasional, stabilitas regional, dan eksistensi Indonesia di kancah global. Diplomasi harus mampu memainkan peran aktif dalam membangun aliansi strategis, memperkuat posisi tawar Indonesia di berbagai forum internasional, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan nasional. Sementara itu, pertahanan yang tangguh mencakup modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan kapasitas sumber daya manusia militer, dan penguatan sistem pertahanan berlapis yang adaptif terhadap ancaman multidimensi, baik konvensional maupun non-konvensional. Integrasi antara diplomasi yang cerdas dan pertahanan yang kuat akan menciptakan efek gentar (*deterrent effect*) yang dapat meredam potensi ancaman, serta menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat yang mampu menjaga kepentingannya di tengah dinamika geopolitik dan geostrategis kawasan.

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali mencerminkan kapasitas wilayah dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal yang dimilikinya. Sebagai salah satu daerah dengan keunggulan di sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis nikel, Kabupaten Morowali menunjukkan daya saing yang kuat terutama dalam aspek ekonomi makro dan efisiensi pasar tenaga kerja. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan, perlu penguatan pada pilar-pilar lain seperti kualitas infrastruktur, inovasi, tata kelola pemerintahan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuatif dengan capaian Tahun 2022 sebesar 3.13 menunjukkan terbangunnya fondasi daya saing yang kuat, terutama dari sektor unggulan seperti industri pengolahan nikel dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun 2023, nilai indeks mengalami penurunan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesiapan infrastruktur atau sumber daya manusia. Tahun 2024 sebesar 2.99, menunjukkan adanya penguatan kapasitas daya saing daerah yang lebih adaptif. Fluktuasi ini mengisyaratkan perlunya konsistensi kebijakan dan investasi lintas sektor untuk menjaga dan meningkatkan daya saing Kabupaten Morowali secara berkelanjutan. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 sajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.68**Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	0	0	3.13	2.66	2.99

Sumber : BRIN Tahun 2025

B. Nilai Maturitas SPIP

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Morowali menilai efektivitas tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, serta pengendalian dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Peningkatan level maturitas SPIP mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Di Kabupaten Morowali, penguatan SPIP menjadi bagian dari upaya reformasi tata kelola keuangan daerah dan integritas institusional, guna meminimalisir potensi penyimpangan, mendorong efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan setiap aktivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Maturitas SPIP Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.69**Nilai Level Maturitas SPIP Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,000)	Level 3 (2,939)	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,191)	Level 3 (3,153)

Sumber : BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Morowali secara keseluruhan berada pada Level 3 dari Tahun 2020-2024. Pencapaian Level 3 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah telah berada pada kategori "terdefinisi", artinya sistem telah dibangun dan diterapkan secara cukup baik dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Upaya untuk mendorong perbaikan ke level yang lebih tinggi, dibutuhkan penguatan sistem evaluasi berkelanjutan, peningkatan kompetensi aparatur, serta komitmen pimpinan dalam menginternalisasi budaya pengendalian di seluruh satuan kerja perangkat daerah.

C. Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Morowali merepresentasikan sejauh mana fungsi pengawasan internal dijalankan secara efektif, independen, dan mampu memberikan nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan. Peningkatan kapabilitas APIP dalam mendukung penguatan sistem pengendalian intern, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di Kabupaten Morowali, pengembangan APIP diarahkan agar mampu menjalankan peran *assurance* dan *consulting* secara profesional, berbasis risiko, serta selaras dengan tujuan strategis pembangunan daerah.

Nilai kapabilitas ini mencerminkan sejauh mana kapasitas fiskal, disiplin anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan secara sistematis dan terukur. Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.70

Nilai Level Kapabilitas APIP Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)

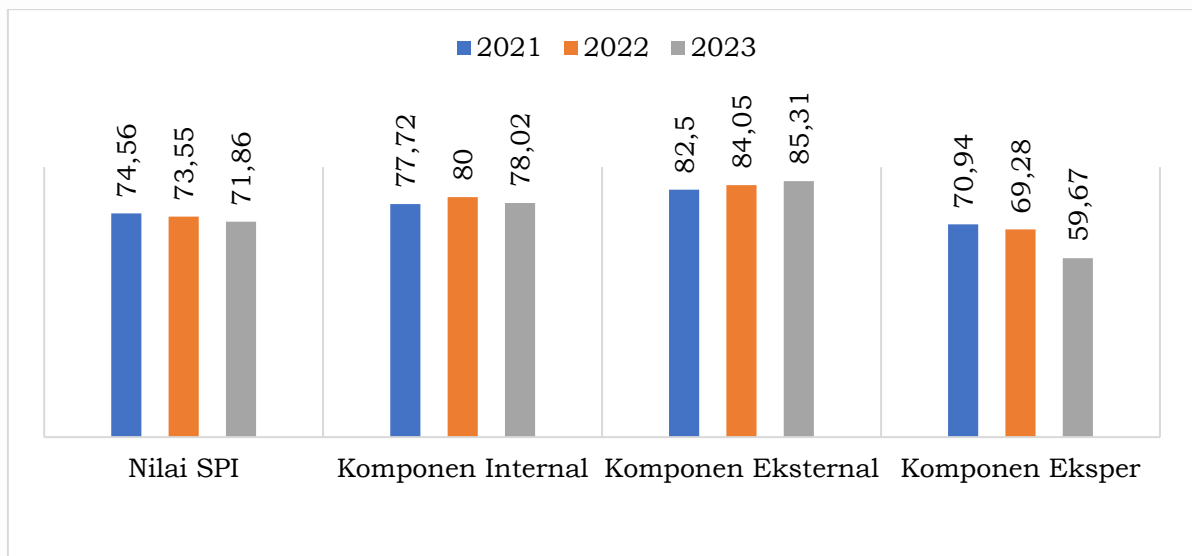
Sumber : BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Morowali berada pada Level 3 dari tahun 2020 hingga 2024. Level 3 ini menandakan bahwa fungsi pengawasan intern telah berada pada kategori "terintegrasi", yang berarti APIP mampu memberikan layanan audit internal secara efektif, mendukung manajemen risiko, serta memiliki peran strategis dalam proses tata kelola pemerintahan. Capaian ini mencerminkan adanya sistem pengawasan yang cukup mapan dan

terstruktur dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah. Kedepan Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta peran strategis APIP agar dapat meningkat ke Level 4 (Managed) di mana APIP diharapkan berperan sebagai deteksi dini (early warning system) dan penggerak tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi hasil.

D. Survey Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Morowali mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap praktik integritas dan potensi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPI memberikan gambaran mengenai tingkat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas upaya pencegahan korupsi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Morowali, pelaksanaan SPI menjadi refleksi atas komitmen membangun tata kelola yang bersih dan responsif, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perbaikan sistem pengawasan dan pelayanan publik. Hasil survei digunakan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang kredibel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Survey Penilaian Integritas Kabupaten Morowali Tahun 2021-2023 diuraikan pada gambar berikut.



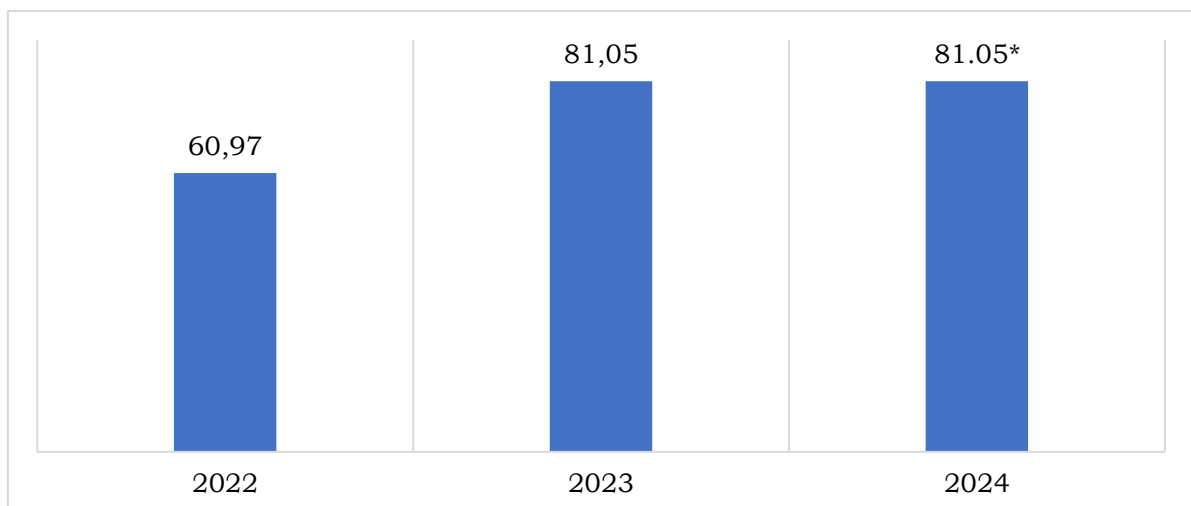
Sumber: https://www.jaga.id/jendela_pencegahan/spi?vnk=ae068786

Gambar 2.73
Nilai SPI dan Komponen Perhitungan di Kabupaten Morowali
Tahun 2021-2023

Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Morowali Tahun 2021–2023, mengalami tren penurunan dari 74.56 Tahun 2021 menjadi 71.86 Tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh fluktuasi pada masing-masing komponen perhitungan. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya persepsi atau penilaian dari kalangan ahli atau profesional terhadap integritas birokrasi di Kabupaten Morowali, sehingga perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan sistem pengendalian dan transparansi yang lebih baik.

E. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali mengukur kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana kapasitas fiskal, disiplin anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan secara sistematis dan terukur. Di Kabupaten Morowali, keberadaan indeks ini menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas kebijakan fiskal daerah serta kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk mendukung pembangunan daerah. Nilai indeks yang baik menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola dana publik secara efisien dan bertanggung jawab, serta menjadi landasan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber : BSDKN Kemendagri (* Data Sementara) Tahun 2025

Gambar 2.74
Nilai IPKD Kabupaten Morowali Tahun 2022-2024



Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali menunjukkan peningkatan dari Tahun 2022 ke 2024, yakni dari nilai 60.97 menjadi 81.05. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan substansial dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah. Dibuuthkan upaya penguatan tata kelola keuangan yang berkelanjutan sehingga mencapai standar kinerja yang relatif tinggi. Hal ini penting untuk menciptakan akuntabilitas fiskal dan mendukung efektivitas pembangunan daerah.



Tabel 2.71

Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1,1	Ketahanan Energi,Air dan Kemandirian Pangan										
1	Indeks Ketahanan Pangan		√	√		82,44	81,98	81,51	82,36	81,44	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan		√	√		4,97	7,03	6,69	7,90	4,14	
3	Konsumsi Listrik Perkapita		√	√		337,29	411,5	391,41	362,6	335,24	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum		√			89,64	93,17	91,91	90,97	88,92	
5	Kapasitas Air Baku			√		60.613,80	60.613,80	60.613,80	60.613,80	66.563,6	
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan			√		14,71	14,95	15,43	15,56	37,30	



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
1,2	Kualitas Lingkungan Hidup										
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		√	√		0	0	0	0	0	
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		√	√		387	716	807	1.216	1.301	
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanna Penuh Pengumpulan Sampah		√	√		60	60	65	65	70	
4	Persentase timbulan sampah yang dikelola (daur ulang)			√		18,3	21,1	25,3	38,6	46,2	
5	Persentase Limbah B3 yang dikelola			√		31,25	37,5	62,5	81,5	83,33	
1,3	Resilensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim										
1	Penurunan Emisi GRK		√	√		0	0	0	0	0	
2	Indeks Resiko Bencana (IRB)		√	√		NA	278,80	278,80	275,20	275,20	



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		√			NA	NA	NA	0,34	0,34	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		√	√		NA	54,45	81,01	80,01	78,17	
1,4	Demografi										
1	Rasio Penduduk		√			122,9	122,53	122,15	122,35	115	
2	Kepadatan Penduduk		√			29,55	30,69	32,21	31	36,36	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk		√			0,95	4,54	2,01	1,93	8,16	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
2,1	Kesejahteraan Ekonomi										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		√	√		28.93	25.15	28.21	20.34	16.26	
2	Tingkat Kemiskinan	√	√	√		13,43	13,75	12,58	12,31	11,55	



NO	INDIKATOR	Permend agri 86	INMEN No 2	RPJPD	Perme ndagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan					2,48	2,11	2,03	1,52	1,79	
4	Indeks Keparahan Kemiskinan					0,67	0,54	0,54	0,32	0,43	
5	Garis Kemiskinan					463.140	478.409	507.523	553.185	590.027	
6	Persentase Penduduk Miskin					13,43	13,75	12,58	12,31	11,55	
7	Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota					3604	7740	6646	7268	5078	
8	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					16,50	17,07	15,86	15,75	14,99	
9	PDRB Perkapita (ADHK)	√	√	√		274.653,6 9	334.608,6 7	421.701,28	498.616,86	570.117,47	
10	PDRB Perkapita (ADHB)					388.801,3 7	601.782,5 8	876.420,98	927.230,48	1.003.184,9 3	
11	Tingkat Pengangguran Terbuka		√	√		5,21	5,08	3,20	2,84	2,84	
12	Indeks Gini	√	√	√		0,290	0,297	0,285	0,281	0,275	



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
13	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal			√		42	45	42	48	49	
14	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	√	√	√		72.81	73.16	73.39	73.82	74.36	
2,2	Kesehatan untuk Semua										
1	Usia Harapan Hidup	√	√	√		69,18	69,23	69,23	69,37	70,84	
2	Prevalensi Stunting		√	√		26,79	28,90	23,30	26,00	22,60	
3	Angka Kematian Ibu	√		√		65,62	353,24	282,26	127,63	237	
4	Angka Kematian Anak	√		√							
*	Angka Kematian Bayi	√		√		13.45	14.45	23.39	14.36	2,01	
*	Angka Kematian Balita	√		√		14.44	15.90	25.81	15.95	3.60	
5	Cakupan penemuan kasus TB (treatment coverage)					207	271	354	361	705	



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
6	Angka Keberhasilan pengobatan TB (treatment success rate)					80	90.2	103.6	90	89.9	
7	Cakupan kepersertaan jaminan kesehatan nasional		√			149.225	160.434	163.600	178.220	214.927	
8	Indeks Keluarga Sehat		√			0.2	0.412	0.432	0.432	0.444	
9	Indeks Kesehatan					0,756	0,757	0,757	0,760	0,790	
2,3	Pendidikan Berkualitas yang Merata										
1	Rata-rata Lama Sekolah	√	√	√		9,33	9,34	9,35	9,37	9,38	
2	Harapan Lama Sekolah	√	√	√		13,34	13,35	13,36	13,38	13,39	
3	Angka Literasi/Numerasi :		√								
4	Literasi Membaca SD					NA	42,86	47,44	52,05	56,92	
5	Literasi Membaca SLTP					NA	54,89	58,65	62,01	64,84	



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
6	Numerasi SD					NA	31,87	35,83	40,98	50,19	
7	Numerasi SLTP					NA	54,89	58,65	56,33	58,44	
8	APS PAUD					0,00	0,38	0,29	0,16	0,12	
9	APS SD/SMP	√				0,00	0,20	0,18	0,38	0,32	
10	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi			√		NA	NA	NA	NA	11,50	
11	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		√	√		NA	NA	NA	61,68	58,71	
12	Indeks Literasi Digital		√			NA	NA	40,77	45,97	44,98	
13	Indeks Pendidikan					67,68	68,22	68,28	68,40	68,46	
2,4	Perlindungan Sosial yang Adaptif										



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	√		√		64,54*	71,35*	80,21	82,93*	89,25	
2	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak			√		82,80	78,34	71,80	65,22	75,16	RPJPD
2,5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju										
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama					67,46	72,39	75,30 *	75,80 *	76,2 *	
2	Persentase Jalan Kondisi Mantap			√		56,76	58,71	33,90	29,80	32,46	RPJPD
3	Persentase Akses Jaringan Internet			√		59,09	78,76	86,33	86,90	87,00	RPJPD
2,6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, Masyarakat Inklusif										
1	Indeks Perlindungan Anak		√			NA	81,14	78,84	81,07	83,37	
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		√	√		NA	50,54	57,72	66,33	66,60	RPJPD



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
3	Indeks Pembangunan Keluarga					NA	50,54	57,72	66,33	66,60	
4	Indeks Ketimpangan Gender		√	√		0,568	0,601	0,581	0,570	0,476	RPJPD
5	Indeks Pemberdayaan Gender					51,56	51,08	55,25	56,01	64,50	
6	TPAK Perempuan			√		47,84	46,44	36,97	24,21	30,82	RPJPD
7	Indeks Pembangunan Gender		√			84,89	85,03	85,14	85,19	85,42	
8	Indeks Pembangunan Pemuda		√			51,10	52,00	53,20	54,10	55,00	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
3,1	Daya Saing Sumber Daya Manusia										
1	Angka Ketergantungan		√			43,43	43,43	43,38	45,06	54,75	



NO	INDIKATOR	Permend agri 86	INMEN No 2	RPJPD	Perme ndagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
3,2	Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi										
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			√		6,13	6,27	NA	NA	NA	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan		√	√		35,25	24,88	31,91	25,29	20,01	
3	Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum		√	√		-10,48	14,2	56,25	16,93	15,41	
4	Rasio Kewirausahaan					40,69	42,9	43,22	40,52	39,44	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	√	√			64,7	63,75	60,74	58,52	61,49	
6	Indeks Inovasi Daerah		√	√		0	46,08	55,84	46,34	45,89	
7	Persentase UMKM yang naik kelas					NA	NA	2,06%	4,05%	5,18%	
3,3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru										



NO	INDIKATOR	Permend agri 86	INMEN No 2	RPJPD	Perme ndagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Ekonomi Biru Indonesia		√	√		NA	NA	NA	49,09	39,20	
3,4	Transformasi Digital										
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		√	√		NA	NA	NA	NA	NA	
3,5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global										
1	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)			√		19,04	22,75	39,19	47,1	54,66	
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)			√		10.174	26.837	37.313	37.876	39.511	
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)			√		16.791	45.313	66.841	69.778	77.647	
4	Net Ekspor Barang dan Jasa (ADHK)					30,229.00	39,453.40	37,654.87	52,683.40	53,552.96	
5	Net Ekspor Barang dan Jasa (ADHB)			√		39.402	46.652	71.906	79.976	85.535	



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
3,6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi										
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)			√		34	7	79	426	108	
2	Presentase Desa Mandiri		√	√		2,79	0,79	2,38	17,46	26,19	
3	Indeks Desa Membangun					0,6147	0,6261	0,6528	0,6871	0,7286	
3,7	Stabilitas Ekonomi Makro										
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		√	√		1,89	2,41	2,75	3,67	6,48	
2	Tingkat Inflasi		√	√		0,83	2,48	6,62	4,35	1,23	
3	Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi			√		31,43	40	45,5	45,75	46,01	RPJPD



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
4	Pertumbuhan Industri	√				-0,37	-5,31	37,44	38,44	39,44	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM										
4,1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif										
1	Indeks Reformasi Hukum		√	√		NA	NA	NA	45,1	87,18	
2	Indeks Reformasi Birokrasi			√		NA	C	CC	CC	B	
3	Indeks Pelayanan Publik		√	√		NA	54,4	61,95	60,9	73,43	
4	Indeks Integritas Nasional		√	√		NA	74,56	73,55	71,86	NA	
5	Nilai LPPD					NA	66,76	97,5	92,15	NA	
6	Indeks Kematangan Organisasi					79,79	79,79	79,79	83,69	83,69	
7	Nilai SAKIP					C	C	C	CC	B	



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
4,2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial										
1	Persentase Penegakan Perda		√	√		89%	90%	100%	100%	100%	
2	Indeks Profesionalitas ASN			√		NA	48,73	48,21	67,39	62,67	
4,3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya melalui Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel										
1	Indeks Daya Saing Daerah		√	√		0	0	3,13	2,26	2,99	
2	Nilai Maturitas SPIP			√		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3	Nilai Kapabilitas APIP			√		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
4	Survei Penilaian Integritas			√		NA	74,56	73,55	71,86	NA	



NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	Permendagri 18	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			√		NA	NA	60,97	81,05	81,05*	

2.1.4.4. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2.72

Evaluasi Indikator Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020 s/d 2024

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah						
A	Urusan Pemerintahan Wajib						
1	Wajib Pelayanan Dasar						
1.1	Pendidikan						
1	Skor Literasi/Numerasi SD/SMP*						



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Skor Literasi SD	NA	42,86	47,44	52,05	56,92	
-	Skor Literasi SMP	NA	54,89	58,65	62,01	65,94	
-	Numerasi SD	NA	31,87	35,83	40,98	50,19	
-	Numerasi SMP	NA	54,89	58,65	56,33	58,44	
2	Skor Literasi/Numerasi PAUD *						
-	Harapan Lama Sekolah	13,34	13,35	13,36	13,38	13,39	
-	Rata-Rata Lama Sekolah	9,33	9,34	9,35	9,37	9,38	
3	Indeks Pendidikan	67,68	68,22	68,28	68,4	68,46	
4	Angka Putus Sekolah						
*	APS SD	0,00	0,38	0,29	0,16	0,12	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
*	APS SMP	0,00	0,20	0,18	0,38	0,32	
*	APS SMA	0,44	0,45	0,48	5,10	0,00	
5	Angka Melek Huruf	98,76	98,65	99,14	98,91	99,25	
6	Akreditasi Sekolah di Kabupaten Morowali						
*	Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD)	NA	NA	NA	20,33	NA	
	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	NA	NA	NA	84,97	NA	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	NA	NA	NA	97,3	NA	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	NA	NA	NA	88,89	NA	
7	Angka Partisipasi Kasar						
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	108.95	109.42	109.40	96.86	107.45	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	103.84	102.31	99.41	95.01	103.78	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	81,03	83,39	98,22	89,15	96,68	
8	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	100	100	100	100	100	
9	Angka Partisipasi Murni						
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	94,72	95,07	93,67	93,68	92,34	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	73,49	73,23	73,13	74,53	78,18	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	67,54	69,71	70,62	79,34	70,45	
11	Angka Kelulusan						
*	SD	100	100	100	100	100	
*	SMP	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
*	SMA	100	100	100	100	100	
12	Angka Yang Melanjutkan						
*	SD	100	100	100	98,4	98,53	
*	SMP	100	98,90	99,71	99,03	99,12	
*	SMA	73,18	76,80	76,41	79,00	NA	
13	Fasilitas Pendidikan						
14	Rasio Ketersediaan Sekolah						
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	0:13	0:12	0:11	0:11	0:11	
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	0:15	0:15	0:16	0:16	0:16	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	0:22	0:23	0:23	0:18	0:18	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Rasio Guru/Murid Sekolah						
*	Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	10,2	11,55	11,39	11,46	11,09	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	12,29	11,81	12,73	13,15	12,53	
16	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah						
*	Pendiidkan Anak Usia Dini (SD/MI)	1:22	1:23	1:23	1:17	1:13	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	1:14	1:14	1:14	1:12	1:12	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 19	1 : 19	
17	Tingkat partisipasi usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS)	NA	85,70	79,00	63,21	77,99	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Tingkat partisipasi usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,84	97,06	97,78	97,04	98,77	
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	88,53	69	80,12	93,58	99,42	
20	Tingkat partisipasi usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	NA	22,97	24,40	35,13	41,91	
21	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	N/A	54,55	51,11	55,7	57,69	
22	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	N/A	32,58	33,46	55,7	41,24	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Iklim keamanan SD	N/A	66,75	66,49	70,49	74,68	
24	Iklim keamanan SMP	N/A	66,75	65,23	69,43	70,41	
25	Iklim kebhinekaan SD	N/A	66,75	66,49	70,49	71,98	
26	Iklim kebhinekaan SD	N/A	59,03	65,37	73,93	71,7	
27	Iklim inklusivitas SD	N/A	53,47	55,47	53,01	60,32	
28	Iklim inklusivitas SMP	N/a	53,47	54,84	56,6	56,27	
1.2	Kesehatan						
1	Umur Harapan Hidup	69,18	69,23	69,23	69,37	69,41	
2	Prevalensi Stunting	26,79	28,9	23,3	26	22,6	
3	Indeks Kesehatan	0,756	0,757	0,757	0,76	0,79	
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	13,45	14,5	23,39	14,36	2,01	
5	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	3,6	15,1	9,5	16,1	12,2	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	10,8	12,5	11,3	11,9	8,1	
7	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	65,62	353,2	282,26	127,63	237	
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	149.225	160.434	163.600	178.220	214.927	
9	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	1,22	1,48	0,8	1,0	1,1	
10	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,254	0,268	0,261	0,257	0,221	
11	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,012	0,012	0,011	0,017	0,015	
12	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,396	0,506	0,448	0,53	0,533	
13	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	4.198	4.425	5.963	7.640	9.243	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	
16	Persentase Balita Yang Pernah di Imunisasi Campak	145	140,9	155,5	119,9	125,7	
17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	207	271	354	361	705	
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	127.99	161.40	200.86	201.46	354.33	
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	77	59	176	183	394	
20	Penderita Diare Yang Ditangani	1,795	2,304	2,911	2,865	3,167	
21	Angka Kejadian Malaria	6,18	5,96	10,78	5,58	6,38	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	0,007	0,003	0,020	0,035	0,040	
23	Cakupan Puskesmas	80	80	80	80	80	
24	Cakupan Pembantu Puskesmas	19,55	18,57	18,57	18,57	19,29	
25	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	80,49	78,33	82,18	74,09	77,24	
26	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	4,74	NA	1,82	2,13	2,21	
27	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	50	50	50	100	100	
28	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94,25	100	100	100	74,93	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	
30	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	
31	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	70,96	100	100	100	100	
32	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,94	62,29	100	100	99,89	
33	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,65	100	100	100	75,46	
34	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,32	94,3	100	100	83,19	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42,43	100	100	100	86,72	
36	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40,70	100	100	100	91,92	
37	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	89,22	
38	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	83,67	100	100	100	90,56	
39	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99,40	100	100	100	100	
40	Total Fertility (TFR)	2,1	2,1	2,2	2,04	2,04	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	50	55	60	70	82	
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,15	0,19	0,18	0,24	0,25	
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0,0059	0,0057	0,0054	0,0053	0,0074	
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	19,98	20,08	24,3	31,79	25,28	
5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	17	25	38	38	42	
6	Rasio Jaringan Irigasi	0,231	0,236	0,246	0,260	0,268	
7	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	89,64	93,17	91,91	90,97	88,92	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk	1,90	1,98	2,04	2,11	2,17	
9	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	32,60	46,42	46,7	51,35	53,95	
10	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	53,32	53,66	54,01	56,60	59,82	
11	rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69,38	65,46	46,14	68,26	87,00	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	74,83	84,85	52,29	61,52	65,00	
13	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,48	68,97	71,48	78,28	78,50	
14	rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	0,47	1,10	2,05	3,86	4,27	
15	tingkat kemantapan jalan	30,03	60,81	64,62	45,05	38,68	
16	rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	12,8	29,6	53,6	79,9	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100	
1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	34	36	38	40	42	
3	Rasio Rumah Layak Huni	32	34	36	38	40	
4	capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	0	0	0	
6	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	NA	NA	3,5	3,9	5	
7	penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,13	12,56	21,37	28,41	37,67	
8	Persentase PSU Kawasan Permukiman	50	55	60	65	68	
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
	Pol PP						
1	Angka Kriminalitas	28,00	19,42	19,42	9,21	9,21	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	975	975	825	825	825	
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	8	8	5	14	14	
4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	75	100	100	
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90	75	50	92,86	95	
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	
9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	68,57	100	100	78,57	100	
10	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	50	5	13	38	
11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7,00	7,00	7,00	14,00	14,00	
	Penanggulangan Bencana						
1	Indeks Resiko Bencana	173,80	174,82	174,82	173,25	275,20	
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	NA	NA	NA	0,34	0,34	
3	Indeks Resiko Bencana Banjir	12,00	12,00	12,00	11,48	11,26	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi	32,40	32,40	32,40	31,00	30,41	
5	Indeks Resiko Bencana Tsunami	19,20	17,97	19,20	18,37	18,02	
6	Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	24,00	24,00	24,00	22,97	22,53	
7	Indeks Resiko bencana Tanah Longsor	24,00	24,00	24,00	22,97	22,53	
8	Indeks Resiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	36,00	36,00	36,00	34,45	33,79	
9	Indeks Resiko bencana Kekeringan	16,00	16,00	16,00	15,31	15,02	
10	Indeks Resiko Bencana Cuaca Ekstrem	13,60	13,60	13,60	13,01	12,76	
1.6	Sosial						



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	50.330	50.680	51.030	52.411	53.411	
2	Persentase PMKS yang tertangani	99	107,67	116,34	89,03	89,04	
3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	1	1	0	0	
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100	100	100	100	100	
5	Korban bencana alam (Jiwa/KK)	605	0	2.850	414	394	
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	8	0	0	0	0	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	9,36	17,55	23,74	39,2	43,73	
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2.7	Tenaga Kerja						
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	NA	69,78	187,55	94,53	175,67	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,21	5,08	3,20	2,84	2,83	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,7	63,75	60,74	58,52	61,49	
4	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang)	28	32	35	38	41	
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	50	83,33	100	26,67	50	
6	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,004	3,51	5,2	5,85	14,87	
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100	100	55,55	100	62,5	
8	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	71,89	39,99	24,49	59,99	40,22	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,89	85,03	85,14	85,19	85,42	
2	Indek Ketimpangan Gender (IKG)	0,568	0,601	0,581	0,57	0,476	
3	Indeks Pemberdayaan Gender	51,56	51,08	55,25	56,01	64,5	
4	Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintahan dan swasta	8,59	9,99	11,74	10,59	21,21	
5	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	4	4	4	4	4	
6	Rasio KDRT	0,21	0,15	0,15	0,21	0,21	
7	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,84	46,44	36,97	24,21	30,82	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	1,03	1,03	1,06	1,03	1,07	
9	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	0,93	0,93	0,87	1,03	0,92	
10	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	1,09	1,09	1,01	1,18	1,1	
11	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	NA	32,42	7,01	6,89	32,49	
12	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	
13	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,015	0,018	0,016	0,020	0,021	
2.9	Pangan						
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,44	81,98	81,51	82,36	81,44	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ketersediaan Pangan Utama	152,75	158,9	132,32	235,63	249,85	
3	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita						
	Energi (Kilo Kal)	2.268,83	2.153,32	2.040,88	2.256,01	2.067,61	
	Protein Perkaapita (Gram)	65,42	64,35	61,15	68,42	64,10	
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	151,96	NA	540,02	50,85	76,93	
2,1	Pertanahan						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100	
2	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	40	45	50	55	60	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	NA	100	100	NA	
4	persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	100	100	100	100	
5	persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	100	100	100	100	100	
2.11	Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	82,33	81,01	80,01	78,17	
2	Indeks Kualitas Air	NA	15,75	68,89	67,33	64,39	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	NA	38,36	92,22	92,26	83,46	
4	Indeks Kualitas Udara	NA	28,47	86,2	83,33	83,45	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ruang Terbuka Hijau (Ha)	NA	12	12	13,39	26,78	
	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	0	0	0	0	0	
5	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Morowali	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
9	Penetapan Hak MHA	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
11	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	19,47	15,88	15,13	14,19	18,15	
12	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	75	60	33,33	9,71	
2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	NA	1	0,99	1	0,99	
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	NA	0,18	0,25	0,13	0,06	
3	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
5	Perekaman KTP elektronik	100	100	99,02	100	99,58	
6	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	58,03	18,46	31,82	61,56	45,59	
7	Kepemilikan akta kelahiran	100	89,03	97,68	97,17	97,62	
8	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	34,29	17,95	18,92	100	100	
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6147	0,6261	0,6528	0,6871	0,7286	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	100	100	100	100	100	
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	143	143	143	143	144	
4	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	
5	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	
6	Persentase pengentasan desa tertinggal	43,55	39,68	34,13	19,05	0	
7	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	37,5	0,79	2,38	17,46	26,19	
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	NA	50,54	57,72	66,33	66,60	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Angka Stunting (SSGI)	NA	28,9	23,3	26	22,6	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	NA	28,9	23,3	26	22,6	
4	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	33.33	3.82	4.96	1,67	11.04	
5	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	80.08	88.54	87.34	85.99	88.69	
6	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	85.09	57.14	68.71	99.75	59.37	
7	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	39.16	15.90	17.54	25.41	16.70	
8	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,1	2,1	2,2	2,04	2,04	
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	0	NA	0.911	02.04	1.81	
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,93	8,0	6,92	8,81	6,81	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2,2	Perhubungan						
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	17.145,00	18.241,00	18.851,00	32.400,00		
2	Rasio Ijin Trayek	20	10	12	36	NA	
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	3	3	3	NA	
4	Pemasangan Rambu-Rambu	310	45	57	189	NA	
5	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1:5	1:7	1:9	01:11	NA	
6	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun						
	Angkutan Laut						
	Jumlah Penumpang Turun	8.726,00	9.556,72	9.676,72	11.604,00	NA	
	Jumlah Penumpang Naik	8.726,00	9.194,62	9.718,62	10.692,00	NA	
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	8.419,00	210.788,55	214.033,55	6.684,00	NA	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah barang muat (ton)	200.751,00	470.110,20	500.409,20	5.964,00	NA	
	Angkutan Udara						
	Jumlah Penumpang Datang	32.301,00	31.271,00	31.271,00	56.092,00	NA	
	Jumlah Penumpang Berangkat	58.447,00	21.973,00	21.973,00	50.431,00	NA	
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	15.247,00	270.442,00	244.256,00	450.705,00	NA	
	Jumlah barang muat (ton)	122.089,00	100.059,00	99.202,00	280.291,00	NA	
7	rasio konektivitas Kabupaten/Kota	100	NA	0,49	0.51	0.51	
8	kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0	17	0,87	0	0,34	
2,2	Komunikasi dan Informatika						
1	Indeks SPBE Kabupaten Morowali	NA	1,35	1,97	2,88	3,25	
2	Akses Jaringan Komunikasi	59,09	78,76	86,33	86,90	87,00	
3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	81.56	84.05	79.09	77.88	81.71	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	39.05	55.63	61.03	61.22	68.48	
5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	12.25	8.47	60.04	6.5	8.69	
6	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	75	100	75.68	76.32	74.36	
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	90	34,86	97,3	100	
8	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7,08	100	57,44	68,36	100	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2,2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase Koperasi Aktif	36,36	36,36	39,1	40,12	43,2	
2	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	8,39	7,33	21,31	21,54	21,92	
3	persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	5,46	12,76	1,9	4,05	7,95	
2,2	Penanaman Modal						
1	Realisasi Investasi	22.648.666.350.000	28.778.945.480.000	96.602.530.000.000	91.786.100.000.000	117.577.986.923.142	
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	NA	400	700	1.200	2000	
3	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	-12,43	27,07	235,67	4,99	28,10	
2,2	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	51,10	52,00	53,20	54,10	55,00	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,54	0,81	1,83	2,21	2,14	
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,69	2,02	78,73	62,2	21,5	
4	Peningkatan Prestasi Olahraga	5	1	171	15	1	
2,2	Statistik						
1	Presentase Perangkat daerah yang Menyelenggarakan Statistik Sektoral	NA	NA	NA	100	100	
2,2	Persandian						
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Pola Hubungan Sandi	NA	NA	NA	100	100	
2,2	Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	5,77	68,18	90,62	90,22	80	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2,2	Perpustakaan						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,80	6,4	70,63	27,81	156,14	
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	2286	2628	2508	5105	5105	
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100	39,43	56,86	61,28	60,53	
2,2	Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	NA	42,64	15,13	27,51	27,28	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	56,67	100	100	100	100	
3	Urusan Pemerintahan Pilihan						
3,3	Kelautan dan Perikanan						
1	Nilai Tukar Nelayan	NA	NA	NA	104,40	93,22	
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	NA	NA	NA	114,76	91,42	
3	Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	3.18	2.62	2.08	1.72	1.51	
4	Produksi Perikanan (ton)						



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Produksi Perikanan Laut	32.203,2	33.309,3	33.420,8	37.775	33.449	
	Produksi Perikanan Darat	618,9	2993	2981	3463	NA	
5	Produksi Perikanan Budidaya	18.260	58.414	2.220,32	34.292	9.505,24	
6	Angka Konsumsi Ikan	51	56,41	57,3	52,33	64,16	
3,3	Pariwisata						
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi , Makan, Minum	-10,48	14,2	56,25	16,93	15,41	
2	Jumlah Kunjungan Wisata	5461	7234	3545	3090	6086	
3	Lama Kunjungan Wisata	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	-84,80	-0,79	10,29	4,39	1,63	
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	9,84	17,36	-51,00	-12,83	96,96	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota						
6	Tingkat hunian akomodasi	NA	18,03	100	28,61	23,51	
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,13	0,08	0,06	0,06	0,06	
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
3.27	Pertanian						
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	NA	NA	NA	101,83	117,69	
2	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	3.18	2.62	02.08	1.72	1.51	
3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar						
	Padi	4,56	5,111	4,567	4,9	4,015	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jagung	1,581	1,581	1,581	4,1	NA	
	Ubi Jalar	20,395	20,395	20,395	12,974	NA	
	Ubi Kayu	29,069	29,069	29,069	25,544	NA	
	Kacang Tanah	1,077	1,077	1,077	1,06	NA	
	Kacang Kedelai	20.82	20.82	20.82	11.10	NA	
	Kacang Hijau	0.66	0.66	0.66	1.00	NA	
4	Produksi Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar						
	Padi	44.915,00	46.221,00	42.583,00	26.940,00	NA	
	Jagung	8.010,58	4.368,42	4.937,22	684,7	NA	
	Ubi Jalar	1.091,51	1.378,25	778,44	648,7	NA	
	Ubi Kayu	4.823,76	6.259,73	5.070,48	3.677,57	NA	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kacang Tanah	59,47	78,43	55,12	45,07	NA	
	Kacang Kedelai	303,88	190	267,3	352	NA	
	Kacang Hijau	57,986	45,43	34,37	41,5	NA	
5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	113,10	-74.93	-25.61	48.37	41,87	
3,3	Perdagangan						
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	1.53	01.08	1.25	1.26	1.39	
2	Net Ekspor Barang Dan Jasa (ADHK)	30,229.00	39,453.40	37,654.87	52,683.40	53,552.96	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	NA	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	NA	100	100	100	100	
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	NA	100	100	100	100	
3,3	Perindustrian						
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	65.63	65.42	67.36	70.13	73.00	
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	NA	5,43	7,68	5,63	17,6	
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	NA	NA	NA	NA	NA	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	95,45	100	100	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	95,45	100	100	100	100	
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	95,45	100	100	100	100	
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	NA	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
3,3	Transmigrasi						
1	Persentase penduduk miskin di Kawasan transmigrasi yang di Bina	NA	NA	NA	NA	NA	
4	Unsur Pendukung						
4,1	Sekretariat Daerah						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	C (45,33)	CC (52,45)	CC (55,56)	B (69,30)	
2	Nilai Sakip	C (48,83)	C (49,56)	C (51,73)	CC (52,99)	B (60,68)	
3	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	NA	NA	NA	NA	NA	
4,2	Sekretariat DPRD						
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	NA	NA	NA	NA	NA	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Unsur Penunjang						
5,1	Perencanaan						
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5,2	Keuangan						
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	46,69	60,565	81,057	81,12*	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	5,16	13,44	22,37	14,55	30,41	
3	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	49,93	14,6	16,04	13,69	14,96	
5,3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
1	Indeks Profesionalitas ASN	NA	48,73	48,21	67,39	62,67	
2	Presentase disiplin ASN	NA	NA	NA	NA	NA	
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35,01	45,56	62,10	63,63	62,10	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	66,73	67,62	20,92	19,36	23,68	
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,28	5,68	10,34	8,88	23,32	
5.5	Penelitian dan Pengembangan						
1	Indeks Inovasi Daerah	0	46,08	55,84	46,34	45,89	
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	0	20	20	20	20	
6	Unsur Pengawasan						
6,1	Inspektorat						
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3 (2,939)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,191)	Level 3 (3,153)	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	



NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	NA	74,56	73,55	73,55	70,80	
8	Unsur Pemerintahan Umum						
8,1	Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	67,46	72,39	75,30	75,80	76,2	



2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas utama dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Morowali selama periode 2019-2023 mencerminkan peran APBD sebagai instrumen utama dalam pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan. Evaluasi pelaksanaan APBD periode tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah memberikan kontribusi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya. Gambaran ini menjadi dasar bagi perencanaan keuangan yang lebih terarah dan strategis untuk lima tahun ke depan.

2.2.1.1. Kinerja APBD

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset yang menjadi milik daerah. Pengelolaan keuangan daerah berfokus pada optimalisasi penerimaan serta mobilisasi sumber daya untuk mendukung program prioritas pembangunan melalui belanja daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah terus diupayakan agar pengelolaan keuangan mampu mendukung pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Morowali mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. APBD sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja (otorisasi), pedoman dalam perencanaan kegiatan (perencanaan), alat pengawasan terhadap realisasi anggaran (pengawasan), serta instrumen dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Selain itu, APBD juga memiliki fungsi alokasi dalam menciptakan lapangan kerja dan mencegah pemborosan sumber daya serta fungsi distribusi dalam menjaga keadilan sosial dalam kebijakan fiskal daerah.



Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 menunjukkan peran penting APBD sebagai alat pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah dan efisiensi belanja menjadi aspek utama dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya. Struktur belanja daerah menunjukkan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal, dengan alokasi anggaran yang diarahkan untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Penguatan strategi fiskal diperlukan agar pendapatan daerah semakin optimal, belanja semakin efisien, dan pembiayaan tetap terkendali. Ke depan, pengelolaan APBD harus lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi dan kebutuhan pembangunan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Morowali.

Secara umum, realisasi dan pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut ini.





Tabel 2.73

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	310,035,234,830.19	342,477,281,405.69	365,423,439,486.41	604,842,155,981.29	1,040,860,702,662.41
	B. Pendapatan Transfer	950,310,721,772.00	1,163,244,070,798.00	1,241,778,035,961.00	1,377,057,801,292.00	1,916,472,936,378.00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32,256,371,064.58	27,944,689,550.00	9,846,525,000.00	0.00	9,032,755,284.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,292,602,327,666.77	1,533,666,041,753.69	1,617,048,000,447.41	1,981,899,957,273.29	2,966,366,394,324.41
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	746,071,783,487.80	877,397,367,922.96	984,016,324,566.05	1,250,162,885,130.07	1,469,106,582,399.76
	B. Belanja Modal	281,977,622,416.40	265,271,692,859.15	270,600,055,246.44	543,928,058,678.00	669,791,931,658.06
	C. Belanja Tak Terduga	29,559,824,590.00	17,114,835,478.93	1,220,318,225.00	912,948,000.00	0.00
	D. Belanja Transfer	176,651,080,091.50	231,245,919,731.67	190,008,112,349.35	226,812,984,830.00	264,734,252,890.00
	JUMLAH BELANJA	1,234,260,310,585.70	1,391,029,815,992.71	1,445,844,810,386.84	2,021,816,876,638.07	2,403,632,766,947.82
	SURPLUS /(DEFISIT)	58,342,017,081.07	142,636,225,760.98	171,203,190,060.57	(39,916,919,364.78)	562,733,627,376.59
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	10,785,438,665.30	67,849,651,981.51	199,187,411,009.15	355,578,669,400.38	312,648,749,009.60
	B. Pengeluaran Pembiayaan	1,270,966,733.34	11,270,966,733.34	14,770,966,733.34	2,770,966,734.00	2,770,966,733.34
	PEMBIAYAAN NETTO	9,514,471,931.96	56,578,685,248.17	184,416,444,275.81	352,807,702,666.38	309,877,782,276.26
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	43,538,655,500.15	92,728,284,964.19	277,787,157,221.71	312,890,783,301.60	872,611,409,652.85

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024



A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan ini digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengoptimalkan penerimaan ini melalui strategi kebijakan fiskal yang tepat guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator kemandirian fiskal daerah yang berasal dari empat sumber utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan PAD dengan menggali potensi ekonomi daerah secara optimal. Sementara itu, Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), masih menjadi sumber pendapatan terbesar bagi sebagian besar daerah, termasuk Kabupaten Morowali. Meskipun dana transfer membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, daerah perlu meningkatkan efektivitas pemanfaatannya agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan, diperlukan strategi yang berorientasi pada penguatan sektor ekonomi lokal serta penguatan sistem administrasi perpajakan dan retribusi. Pemerintah daerah dapat mendorong investasi di sektor unggulan seperti industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) juga dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani APBD. Dengan pendekatan yang lebih inovatif dan terintegrasi, pendapatan daerah dapat dikelola secara lebih efektif guna mendukung pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing. Secara umum, berdasarkan analisis data realisasi pendapatan daerah pada tabel diatas, dapat dibuat kesimpulan berikut:



1. Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan, pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sebesar Rp1,292,602,327,666.77 menjadi Rp2,966,366,394,324.41 Tahun 2024 dengan tren pertumbuhan positif rata-rata 21.44 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, dengan pertumbuhan tertinggi Tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 39.17 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya upaya optimalisasi pendapatan daerah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD mengalami pertumbuhan tertinggi dengan rata-rata 38.89 persen selama lima tahun terakhir. PAD meningkat dari Rp310,035,234,830.19 Tahun 2020 menjadi Rp1,040,860,702,662.41 Tahun 2024, menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Komponen utama PAD yang berkontribusi signifikan adalah Pajak Daerah yang tumbuh rata-rata 59.18 persen serta Retribusi Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 34.72 persen. Meski demikian, terdapat fluktuasi pada retribusi daerah, terutama Tahun 2021-2022, yang mengalami pertumbuhan negatif dan meningkat kembali Tahun 2023. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil sebesar 22.64 persen, sementara Lain-lain PAD yang Sah tumbuh 17.38 persen.

3. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer masih menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah, dengan rata-rata pertumbuhan 16.40 persen. Nilainya meningkat dari Rp950,310,721,772.00 Tahun 2020 menjadi Rp1,916,472,936,378.00 Tahun 2024. Mayoritas pendapatan transfer berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tumbuh 16.19 persen, dengan Dana Perimbangan sebagai bagian terbesar yang mengalami kenaikan 18.28 persen. Dana Insentif Daerah mengalami pertumbuhan negatif, yakni -40.00 persen, meskipun tidak setiap tahun tersedia dalam jumlah yang konsisten. Dana Desa mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata 8.00 persen, menunjukkan ketidakstabilan dalam alokasi anggaran. Di sisi lain, Pendapatan Transfer Antar Daerah tumbuh cukup signifikan sebesar 25.68 persen, yang mencerminkan peningkatan kerja sama antar daerah dalam pendanaan pembangunan.



4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata yang negatif, yaitu -21.90 persen. Tahun 2019, pendapatan dari kategori ini melonjak drastis dari Rp32,256,371,064.58 Tahun 2020, kemudian menurun drastis Tahun 2024 menjadi sebesar Rp9,032,755,284.00. Komponen utama dalam kategori ini adalah hibah, yang juga mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, pendapatan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengalami lonjakan besar Tahun 2020 dengan perolehan Rp24,084,360,000.00, namun kembali menurun hingga tidak tercatat Tahun 2022 dan 2023 dan kembali meningkat menjadi Rp9,032,755,284.00 Tahun 2024.

PAD menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun Kabupaten Morowali masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, upaya peningkatan dan stabilisasi PAD perlu terus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, terutama dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang lebih efisien. Pajak daerah dalam struktur PAD belum menjadi sumber utama pendapatan daerah, masih rendahnya nilai transaksi ekonomi yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan potensi pajak daerah, terbatasnya wajib pajak dan belum berkembangnya sistem pengelolaan pajak daerah yang moderen. Selain itu, juga disebabkan kurang berkembangnya penerimaan dari retribusi daerah, belum berjalannya retribusi di beberapa sektor, dan belum tersusunnya kerangka regulasi daerah yang berhubungan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, ketidakstabilan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan perlunya strategi yang lebih terencana dalam mengelola hibah dan pendapatan dari ketentuan peraturan perundang-undangan agar tetap menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Tantangan dalam lima tahun kedepan dalam rangka pengembangan inovasi pendanaan daerah adalah 1). Mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi melalui digitalisasi sistem perpajakan serta penguatan kepatuhan wajib pajak. 2). Inovasi pendanaan daerah seperti pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerbitan obligasi daerah, dan skema pendanaan berbasis proyek dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. 3). Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Anggaran dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. 4). Kemitraan dengan Sektor Swasta dalam bentuk program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk membantu pembiayaan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.



B. Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, serta berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Sementara itu, untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 55 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menetapkan belanja diklasifikasikan dalam bentuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD, untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta dilengkapi dengan prinsip keadilan (equity) bagi semua, agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat.



Berdasarkan tabel realisasi dan pertumbuhan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024, komponen Belanja daerah dapat disimpulkan bahwa :

1. Belanja Daerah

Total belanja daerah mengalami tren pertumbuhan yang cukup signifikan dengan rata-rata 16.35 persen selama periode 2020-2024. Belanja daerah meningkat dari Rp1,234,260,310,585.70 Tahun 2020 menjadi Rp2,403,632,766,947.82 Tahun 2024, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi Tahun 2023 sebesar 39.84 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah, yang dipengaruhi oleh ekspansi pembangunan, peningkatan belanja operasional, serta stimulus ekonomi pasca-pandemi. Namun, fluktuasi dalam pertumbuhan tahunan mengindikasikan adanya dinamika dalam kebijakan fiskal daerah yang perlu diperhatikan agar tetap menjaga keseimbangan keuangan daerah.

2. Belanja Operasional

Belanja operasional menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan rata-rata pertumbuhan 16.97 persen. Kenaikan tertinggi terjadi Tahun 2023 sebesar 27.05 persen, yang mencerminkan peningkatan biaya untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta berbagai kebutuhan operasional pemerintahan. Belanja pegawai mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata 7.77 persen, relatif lebih rendah dibandingkan komponen belanja lainnya. Sementara itu, belanja barang dan jasa menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar sebesar 25.35 persen, yang mencerminkan adanya peningkatan dalam pengadaan barang dan jasa guna mendukung kegiatan pemerintahan. Namun, belanja bunga menunjukkan tren negatif dengan rata-rata pertumbuhan -1.58 persen, mengindikasikan kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi beban bunga pinjaman atau mengoptimalkan sumber pembiayaan lainnya.

3. Belanja Modal

Belanja modal, yang mencerminkan investasi daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset tetap, mengalami pertumbuhan rata-rata 24.18 persen selama lima tahun terakhir. Kenaikan signifikan terjadi Tahun 2023 sebesar 101.01 persen, yang menunjukkan adanya kenaikan investasi dalam pembangunan fisik dan proyek strategis daerah. Namun, belanja modal cenderung stagnan, bahkan mengalami kontraksi Tahun 2021 sebesar -5.92 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi ruang fiskal daerah.



4. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga mengalami volatilitas yang sangat tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan ekstrem sebesar 2.299.87 persen. Peningkatan terbesar terjadi Tahun 2020 dampak alokasi dana untuk penanganan pandemi, kemudian mengalami penurunan drastis di tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja tak terduga sangat bergantung pada kondisi darurat dan situasi tertentu yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah.

5. Belanja Transfer

Belanja transfer menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 7.09 persen, dengan penurunan paling rendah Tahun 2020 sebesar -13.69 persen sebelum meningkat di tahun-tahun berikutnya. Ini mencerminkan dinamika dalam alokasi dana transfer ke pemerintah desa atau lembaga terkait, yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan belanja daerah yang tumbuh positif menunjukkan peningkatan aktivitas pembangunan dan pelayanan publik, tetapi fluktuasi dalam berbagai komponen belanja mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pengalokasian belanja yang lebih efisien dan berbasis kinerja perlu diperhatikan agar dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, strategi untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja perlu diperkuat guna menghindari defisit fiskal yang berkelanjutan.

C. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran guna mendukung program pembangunan daerah. Pembiayaan daerah mencakup berbagai sumber pendanaan yang tidak termasuk dalam pendapatan daerah, seperti penerimaan pinjaman, hasil penjualan aset daerah, dana cadangan, serta sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya. Dengan adanya mekanisme pembiayaan, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan secara lebih strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan belanja tetap dapat terpenuhi, terutama dalam kondisi defisit atau ketidakcukupan pendapatan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan sebaiknya mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penggunaan SiLPA dilakukan secara cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan menjaga keberlanjutan pelayanan umum. Selama Tahun 2020-2024, Penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tumbuh rata-rata 171.18 persen selama lima tahun terakhir. SILPA meningkat dari Rp10,785,438,665.30 Tahun 2019 menjadi Rp 312,648,749,009.60 Tahun 2024, menunjukkan adanya surplus anggaran yang semakin besar dari tahun ke tahun. Namun, sumber penerimaan lainnya seperti pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, dan penerimaan pinjaman daerah tidak tercatat selama periode ini, menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memanfaatkan instrumen pembiayaan lainnya secara optimal

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Selama Tahun 2020-2024, Pengeluaran pembiayaan juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan Tahun 2021 dan 2024 dampak penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang.

3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Jika pembiayaan netto bernilai positif, artinya pemerintah daerah membutuhkan tambahan dana untuk menutup defisit. Sebaliknya, jika bernilai negatif, menunjukkan adanya surplus anggaran yang digunakan untuk pelunasan kewajiban atau penguatan kas daerah. Selama tahun 2020-2024, Pembiayaan netto mengalami peningkatan dari Rp9,514,471,931.96 Tahun 2020 menjadi

Rp309,877,782,276.26 Tahun 2024, mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal yang signifikan. Sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan surplus sebesar Rp43,538,655,500.15 Tahun 2020 dan mencapai Rp872,611,409,652.85 Tahun 2024. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien, namun perlu adanya diversifikasi sumber pembiayaan agar tidak hanya bergantung pada SILPA.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Morowali sebaiknya difokuskan pada strategi yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal dan optimalisasi investasi daerah. Pengeluaran pembiayaan perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki prospek bisnis berkelanjutan serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pembayaran cicilan pokok utang harus dikelola secara disiplin agar tidak membebani anggaran di masa depan, dengan menjaga rasio utang tetap dalam batas aman sesuai regulasi keuangan daerah. Pemerintah juga perlu mengalokasikan dana cadangan secara strategis untuk mendukung program prioritas yang bersifat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, pengeluaran pembiayaan yang tidak produktif perlu diminimalkan, sementara investasi yang dapat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Morowali dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan stabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan.

2.2.1.2. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan daerah yang menyajikan informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Dalam neraca daerah, terdapat tiga komponen utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset daerah mencakup seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, termasuk aset lancar seperti kas dan piutang, serta aset tetap seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur. Kewajiban mencerminkan utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, seperti utang jangka pendek dan jangka panjang. Sementara itu, ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban yang mencerminkan kekayaan bersih daerah. Neraca daerah berfungsi sebagai alat evaluasi untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif.



Penyusunan neraca daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel guna memberikan gambaran keuangan yang valid bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, DPRD, serta masyarakat. Dengan adanya neraca daerah yang jelas, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih terukur dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan program, serta kebijakan fiskal. Selain itu, neraca daerah juga menjadi dasar dalam mengevaluasi kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, termasuk dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Salah satu aspek penting dalam neraca daerah adalah pemeliharaan aset daerah agar tidak mengalami penurunan nilai, serta pengelolaan kewajiban agar tidak membebani anggaran daerah di masa mendatang.

Neraca daerah dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang kebijakan investasi dan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan informasi dalam neraca untuk menentukan strategi dalam pengalokasian sumber daya, mengoptimalkan aset yang dimiliki, serta mengelola utang secara lebih bijaksana. Neraca yang sehat akan mencerminkan keseimbangan antara aset dan kewajiban serta menunjukkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung program pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelolaan neraca daerah perlu terus dilakukan agar dapat menjadi instrumen yang mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Morowali menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran, dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca. Kinerja Neraca Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.74
Neraca Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	103,449,836,177.25	255,009,325,644.28	437,657,874,130.01	389,567,356,352.02	1,009,215,956,525.26
	B. Investasi Jangka Panjang	14,849,873,532.95	24,419,567,139.95	37,891,983,341.95	39,152,698,119.95	40,362,843,256.95
	C. Aset Tetap	2,170,826,036,599.44	2,273,090,493,174.24	2,331,091,781,887.37	2,720,076,171,389.52	2,997,118,650,310.96
	D. Aset Lainnya	81,161,252,177.87	69,395,193,223.51	88,853,481,563.84	649,763,389,235.62	201,829,133,425.08
	JUMLAH ASET	2,370,286,998,487.51	2,621,914,579,181.98	2,895,495,120,923.17	3,798,559,615,097.11	4,248,526,583,518.25
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	65,286,821,108.17	27,221,508,067.86	36,015,032,367.92	16,773,598,555.22	30,658,620,983.32
	B. Kewajiban Jangka Panjang	11,438,700,599.96	10,167,733,866.62	8,896,767,133.28	7,625,800,399.28	6,354,833,666.60
	JUMLAH KEWAJIBAN	76,725,521,708.13	37,389,241,934.48	44,911,799,501.20	24,399,398,954.50	37,013,454,649.92
3	EKUITAS					
	Ekuitas	2,293,561,476,779.38	2,584,525,337,247.50	2,850,583,321,421.97	3,774,160,216,142.61	4,211,513,128,868.33
	JUMLAH EKUITAS	2,293,561,476,779.38	2,584,525,337,247.50	2,850,583,321,421.97	3,774,160,216,142.61	4,211,513,128,868.33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,370,286,998,487.51	2,621,914,579,181.98	2,895,495,120,923.17	3,798,559,615,097.11	4,248,526,583,518.25

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Berdasarkan data neraca daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024, dapat dibuat analisis sebagai berikut.

1. Aset Daerah

Aset daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 14.81 persen selama periode 2020-2024, menunjukkan peningkatan dalam kepemilikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah daerah. Aset lancar tumbuh pesat dengan rata-rata 102.44 persen, dipengaruhi oleh kenaikan dalam kas daerah dan piutang transfer antar daerah menunjukkan adanya peningkatan likuiditas dan pengelolaan kas yang lebih optimal. Investasi jangka panjang, khususnya penyertaan modal pemerintah daerah, juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 29.73 persen yang menandakan adanya peningkatan peran investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, aset tetap meningkat rata-rata 8.32 persen, dengan dominasi jalan, irigasi, dan jaringan sebagai komponen terbesar. Peningkatan aset tetap ini menunjukkan adanya fokus pada pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

2. Kewajiban Daerah

Kewajiban daerah mengalami tren penurunan dengan rata-rata -1.08 persen, terutama pada kewajiban jangka panjang yang mengalami penurunan sebesar -12.91 persen menunjukkan adanya upaya pengurangan utang daerah, baik dari pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Kewajiban jangka pendek juga mengalami fluktuasi, dengan kenaikan pada beberapa tahun awal sebelum mengalami penurunan Tahun 2023-2024. Penurunan ini dapat mencerminkan kebijakan daerah dalam mengurangi utang jangka pendek dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban. Namun, beberapa kewajiban seperti utang bunga dan bagian lancar utang jangka panjang masih perlu mendapatkan perhatian untuk menghindari beban fiskal yang berlebihan di masa depan.

3. Ekuitas Daerah

Ekuitas daerah terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 15.33 persen, menunjukkan peningkatan kapasitas keuangan daerah dan semakin besarnya kekayaan bersih yang dimiliki. Peningkatan ekuitas ini mencerminkan adanya surplus dalam pengelolaan anggaran dan keberhasilan dalam mengelola aset serta kewajiban. Dengan pertumbuhan ekuitas yang cukup baik, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat kapasitas fiskalnya guna mendukung pembangunan daerah. Namun, untuk mempertahankan tren positif ini, pemerintah daerah perlu tetap fokus pada strategi optimalisasi aset, efisiensi belanja, serta pengelolaan utang yang lebih terukur guna menjaga stabilitas keuangan daerah di masa mendatang.



Selanjutnya dilakukan analisis keuangan yang terdiri atas Rasio keuangan yang di analisis, yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (leverage). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

4. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini diperoleh dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban jangka pendek.

Tabel 2.75

Perhitungan Rasio Lancar Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Total Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio Lancar
2020	103,449,836,177.25	65,286,821,108.17	1.58
2021	255,009,325,644.28	27,221,508,067.86	9.37
2022	437,657,874,130.01	36,015,032,367.92	12.15
2023	389,567,356,352.02	16,773,598,555.22	23.23
2024	1,009,215,956,525.26	30,658,620,983.32	32.92

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 (Dihitung Kembali)

Nilai rasio lancar Kabupaten Morowali meningkat dari 1.58 Tahun 2020 menjadi 32.92 Tahun 2023, menunjukkan perbaikan likuiditas daerah. Pada Tahun 2020, rasio masih di bawah standar ideal (2.0), mengindikasikan keterbatasan likuiditas dalam menutup kewajiban jangka pendek. Namun, peningkatan drastis Tahun 2021-2024 disebabkan oleh kenaikan kas daerah, aset lancar lainnya, atau penurunan kewajiban jangka pendek. Meski demikian, rasio yang terlalu tinggi seperti Tahun 2024 perlu dicermati karena dapat menunjukkan kurangnya optimalisasi aset lancar dalam investasi atau program pembangunan. Secara keseluruhan, Nilai rasio lancar mengindikasikan bahwa aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali sangat cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan daerah untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.

1. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat merupakan ukuran likuiditas yang lebih ketat dibandingkan rasio lancar karena hanya memperhitungkan aset yang benar-benar dapat digunakan dengan cepat untuk membayar kewajiban jangka pendek. Perhitungannya dilakukan dengan membagi aset likuid (kas,

piutang, dan aset setara kas) dengan kewajiban jangka pendek. Rasio cepat yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aset likuid yang cukup untuk menutup utang jangka pendek tanpa harus menjual persediaan atau aset lainnya.

Tabel 2.76
Perhitungan Rasio Cepat Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Tahun	Aset Likuid (Rp)		Total Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio Cepat
	Aset Lancar (Rp)	Persediaan (Rp)		
2020	103,449,836,177.25	13,609,289,549.01	65,286,821,108.17	1.38
2021	255,009,325,644.28	17,137,278,892.96	27,221,508,067.86	8.74
2022	437,657,874,130.01	32,828,252,024.26	36,015,032,367.92	11.24
2023	389,567,356,352.02	20,915,823,898.81	16,773,598,555.22	21.98
2024	1,009,215,956,525.26	24,691,997,588.12	30,658,620,983.32	32.11

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 (Dihitung Kembali)

Rasio cepat Kabupaten Morowali menunjukkan peningkatan dari 1.38 Tahun 2020 menjadi 32.11 Tahun 2024, mencerminkan peningkatan likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Pada Tahun 2020 (1.38), rasio masih di bawah standar ideal (1.0), yang mengindikasikan keterbatasan aset likuid dalam menutupi kewajiban segera. Namun, meningkat Tahun 2021 (8.74), Tahun 2022 (11.24) hingga 2024 menunjukkan peningkatan kas atau aset likuid lainnya serta penurunan kewajiban jangka pendek. Secara keseluruhan, Rasio Cepat Kabupaten Morowali menggambarkan kemampuan aset lancar dalam menyelesaikan hutang secara cepat cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Selain itu, peningkatan nilai rasio berarti pemerintah Kabupaten Morowali memiliki aset yang cukup untuk membayar utang

2. Rasio Utang terhadap Total Aset (*Total Debt to Total Assets Ratio*)

Rasio ini mengukur sejauh mana total aset daerah dibiayai oleh utang. Dihitung dengan membagi total kewajiban (utang jangka pendek dan panjang) dengan total aset, rasio ini menunjukkan tingkat risiko keuangan daerah. Semakin tinggi rasio utang terhadap total aset, semakin besar ketergantungan daerah pada pinjaman dan semakin tinggi risikonya jika terjadi kesulitan keuangan.

Tabel 2.77

**Perhitungan Rasio Utang Terhadap Aset Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio Utang
2020	76,725,521,708.13	2,370,286,998,487.51	3.24
2021	37,389,241,934.48	2,621,914,579,181.98	1.43
2022	44,911,799,501.20	2,895,495,120,923.17	1.55
2023	24,399,398,954.50	3,798,559,615,097.11	0.64
2024	37,013,454,649.92	4,248,526,583,518.25	0.87

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 (Dihitung Kembali)

Nilai Rasio utang terhadap aset Kabupaten Morowali mengalami penurunan signifikan dari 3.24 Tahun 2020 menjadi 0.87 Tahun 2024, menunjukkan bahwa proporsi utang terhadap total aset semakin kecil. Peningkatan rasio Tahun 2020 sebesar 3.24 dapat mengindikasikan peningkatan utang yang lebih cepat dibanding pertumbuhan aset, namun Tahun 2021-2022 (1.43 dan 1.55) rasio ini mulai menurun. Penurunan ini mencerminkan upaya daerah dalam mengurangi ketergantungan pada utang atau adanya peningkatan aset yang lebih besar dibanding kewajiban. Meskipun tren ini menunjukkan kondisi keuangan yang lebih sehat, rasio yang terlalu rendah seperti Tahun 2023-2024 juga dapat mengindikasikan bahwa daerah kurang memanfaatkan sumber pendanaan eksternal untuk mempercepat pembangunan. Secara keseluruhan, Rasio total hutang terhadap total aset selama periode tersebut menunjukkan nilai yang relatif kecil, sehingga Pemerintah Kabupaten Morowali mempunyai kemampuan untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

3. Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini membandingkan total utang dengan ekuitas daerah untuk mengukur seberapa besar pendanaan daerah berasal dari utang dibandingkan dengan sumber daya sendiri. Perhitungan dilakukan dengan membagi total kewajiban dengan total ekuitas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang untuk membiayai operasional dan investasi, yang dapat meningkatkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, rasio yang terlalu rendah dapat mengindikasikan bahwa daerah kurang memanfaatkan sumber pendanaan eksternal yang berpotensi membantu pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.78**Perhitungan Rasio Utang Terhadap Ekuitas Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024**

Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Ekuitas (Rp)	Rasio Utang
2020	76,725,521,708.13	2,293,561,476,779.38	3.35
2021	37,389,241,934.48	2,584,525,337,247.50	1.45
2022	44,911,799,501.20	2,850,583,321,421.97	1.58
2023	24,399,398,954.50	3,774,160,216,142.61	0.65
2024	37,013,454,649.92	4,211,513,128,868.33	0.88

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 (Dihitung Kembali)

Nilai Rasio utang terhadap ekuitas Kabupaten Morowali mengalami penurunan dari 3.35 Tahun 2020 menjadi 0.88 Tahun 2024, mencerminkan penurunan ketergantungan terhadap utang dalam struktur pendanaannya. Peningkatan Tahun 2020 (3.35) menunjukkan bahwa utang sempat mendominasi ekuitas, namun tren penurunan Tahun 2021 (1.45) mengindikasikan penguatan ekuitas atau penurunan kewajiban. Meskipun ini menunjukkan kondisi keuangan yang lebih stabil, rasio yang terlalu rendah Tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa daerah kurang memanfaatkan pendanaan eksternal untuk mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, keseimbangan antara utang dan ekuitas tetap perlu diperhatikan agar pembiayaan daerah tetap optimal.

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030

Proyeksi pendapatan daerah disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam menghasilkan penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Proyeksi pendapatan daerah harus dibuat dengan pendekatan yang terukur secara rasional, dengan mempertimbangkan tren historis penerimaan, kebijakan fiskal, serta faktor ekonomi yang mempengaruhi potensi pendapatan. Pendapatan daerah sendiri terdiri dari tiga komponen utama, yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam proses perolehannya serta tingkat kestabilannya sebagai sumber penerimaan.

Proyeksi pendapatan Tahun 2025-2030 secara umum didasarkan penerimaan pendapatan selama Tahun 2020-2024, mencerminkan tren pertumbuhan anggaran dalam jangka panjang. Tren ini merefleksikan sejauh mana kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan dari berbagai sumber, serta efektivitas strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, dalam penyusunan anggaran, mengandalkan tren historis semata tidak selalu akurat, terutama karena adanya faktor eksternal yang dapat memengaruhi penerimaan daerah. Sebagai contoh, dana perimbangan yang menjadi sumber utama pendapatan daerah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, sehingga penentuan besarnya tidak dapat sepenuhnya diproyeksikan berdasarkan tren sebelumnya. Oleh karena itu, penyusunan proyeksi pendapatan harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber pendapatan, serta memperhitungkan asumsi-asumsi yang dapat memengaruhi penerimaan di masa mendatang, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan regulasi fiskal, serta kondisi sosial dan politik yang berkembang.

Faktor utama yang memengaruhi proyeksi pendapatan adalah kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah, yang berkorelasi erat dengan kondisi perekonomian lokal. Misalnya, penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas sektor pariwisata dan perhotelan. Selain itu, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga perlu dipertimbangkan guna memperluas basis penerimaan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil proyeksi menggunakan metode Geometrik, Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2025 hingga 2030. Jumlah pendapatan meningkat dari Rp2,573,118,319,556.00 Tahun 2025 menjadi Rp4,342,802,351,433.31 Tahun 2030 dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 7.24 persen. Rata-rata kenaikan pendapatan daerah Kabupaten Morowali yang diproyeksi sekitar Rp353 miliar per tahun dengan asumsi berbasis pada kondisi aktual struktur fiskal daerah. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali relatif tinggi karena ditopang oleh industri nikel dan kawasan PT. IMIP, kapasitas fiskal daerah dibatasi oleh kewenangan yang ditentukan undang-undang dan relatif belum maksimalnya instrumen pemungutan PAD. Proyeksi ini mempertimbangkan pendekatan fiskal dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kredibilitas perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Komponen terbesar pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer yang terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 7.79 persen pertahun, sehingga menggambarkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. PAD menunjukkan peningkatan moderat, yaitu sebesar Rp913,808,302,035.00 Tahun 2025 menjadi Rp1,234,247,027,233.50 Tahun 2030 dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 4.10 persen. Kenaikan PAD Kabupaten Morowali yang diproyeksi didasarkan pada asumsi sepertiga dari nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sebesar 16.26 persen, pertumbuhan konservatif sebesar 5 persen, struktur pendapatan yang terbatas pada pajak dan retribusi lokal, serta minimnya kewenangan daerah atas sektor industri besar. Proyeksi ini juga mempertimbangkan kapasitas kelembagaan fiskal dan efisiensi pemungutan, serta menjaga stabilitas fiskal daerah agar tidak berdampak oleh overestimasi pendapatan. Sumber PAD tertinggi berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp589,684,302,035.00 Tahun 2025 meningkat menjadi Rp773,503,580,420.01 Tahun 2030 dengan rata-rata kenaikan sebesar 3.37 persen pertahun, Retribusi Daerah sebesar Rp255,864,000,000.00 Tahun 2025 meningkat menjadi Rp399,963,028,607.73 Tahun 2030 dengan rata-rata kenaikan sebesar 6.09 persen pertahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp2,400,000,000.00 Tahun 2025 meningkat menjadi Rp9,616,155,302.08 Tahun 2030 dengan rata-rata kenaikan sebesar 25.66 persen pertahun, dan Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp65,860,000,000.00 Tahun 2025 meningkat menjadi Rp112,876,614,265.36 Tahun 2030 dengan rata-rata kenaikan sebesar 3.62 persen pertahun. Sehingga dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber lokal.

Sementara dari struktur Belanja Daerah, tren serupa terlihat di mana total belanja juga meningkat secara progresif, dari Rp3,430,667,110,658.85 Tahun 2025 menjadi Rp4,323,769,051,433.31 Tahun 2030 dengan rata-rata kenaikan pertahun sebesar 11.15 persen. Belanja operasi tetap menjadi komponen dominan yang menyerap sebagian besar anggaran, diikuti oleh belanja modal yang juga mengalami pertumbuhan positif. Peningkatan belanja ini menggambarkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam memperkuat pelayanan publik, infrastruktur, dan respons terhadap kebutuhan tak terduga. Namun, peningkatan belanja harus tetap dijaga efisiensinya agar tidak melampaui kemampuan pendapatan yang ada, meskipun dalam seluruh periode proyeksi masih menunjukkan adanya surplus anggaran.



Pembiayaan daerah menunjukkan bahwa dalam periode proyeksi, pemerintah daerah tidak mencantumkan penerimaan pembiayaan, termasuk dari SiLPA, yang menandakan bahwa seluruh anggaran direncanakan untuk terealisasi secara penuh tanpa menyisakan dana lebih di akhir tahun. Pengeluaran pembiayaan meningkat dari tahun ke tahun, yang menyebabkan pembiayaan netto selalu negatif. Ketiadaan SiLPA dalam proyeksi ini mengindikasikan tidak adanya dana cadangan dari efisiensi atau sisa belanja, sehingga pembiayaan jangka panjang seperti penyertaan modal atau pelunasan kewajiban harus ditutupi murni dari kapasitas anggaran tahun berjalan.



Tabel 2.79

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025-2030 Kabupaten Morowali

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN							
	A. Pendapatan Asli Daerah	1,040,860,702,662.41	913,808,302,035.00	1,066,188,988,000.00	1,119,498,437,400.00	1,175,473,359,270.00	1,234,247,027,233.50	1,295,959,378,595.18
	Pajak Daerah	640.448.738.137,34	589,684,302,035.00	658,914,988,000.00	668,510,267,875.50	698,871,736,233.66	739,428,338,874.21	773,503,580,420.01
	Retribusi Daerah	288.902.380.617,00	255,864,000,000.00	319,624,000,000.00	337,867,675,164.57	359,842,374,870.73	375,515,355,257.86	399,963,028,607.73
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.490.472.491,00	2,400,000,000.00	6,000,000,000.00	6,972,908,633.14	7,569,058,404.53	8,070,031,565.64	9,616,155,302.08
	Lain-Lain PAD yang Sah	107.019.111.417,07	65,860,000,000.00	81,650,000,000.00	106,147,585,726.79	109,190,189,761.08	111,233,301,535.79	112,876,614,265.36
	B. Pendapatan Transfer	1,916,472,936,378.00	1,650,759,458,345.00	2,226,973,943,839.76	2,371,619,428,251.45	2,544,411,461,401.19	2,799,900,210,962.23	3,035,160,789,987.54
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9,032,755,284.00	8,550,559,176.00	9,841,353,445.93	10,272,404,726.86	10,722,336,053.89	11,191,974,373.05	11,682,182,850.59
	JUMLAH PENDAPATAN	2,966,366,394,324.41	2,573,118,319,556.00	3,303,004,285,285.69	3,501,390,270,378.31	3,730,607,156,725.09	4,045,339,212,568.79	4,342,802,351,433.31
2	BELANJA							
	A. Belanja Operasi	1,469,106,582,399.76	2,080,479,950,665.53	1,866,453,818,797.21	1,982,236,635,011.98	2,116,015,207,361.72	2,298,918,338,917.35	2,528,246,572,129.35
	B. Belanja Modal	669,791,931,658.06	1,051,128,912,590.59	990,901,285,585.71	1,050,417,081,113.49	1,119,182,147,017.52	1,213,601,763,770.63	1,250,309,076,384.46
	C. Belanja Tak Terduga	0.00	10,975,325,198.73	10,589,473,518.80	12,581,353,487.69	14,947,906,078.72	19,357,971,861.22	19,357,971,861.22
	D. Belanja Transfer	264,734,252,890.00	288,082,922,204.00	422,059,707,383.98	441,855,200,765.15	464,731,896,267.12	496,158,138,019.57	525,855,431,058.27
	JUMLAH BELANJA	2,403,632,766,947.82	3,430,667,110,658.85	3,290,004,285,285.69	3,487,090,270,378.31	3,714,877,156,725.08	4,028,036,212,568.78	4,323,769,051,433.31
	SURPLUS /(DEFISIT)	562,733,627,376.59	(857,548,791,102.85)	13,000,000,000.00	14,300,000,000.00	15,730,000,000.00	17,303,000,000.00	19,033,300,000.00
3	PEMBIAYAAN							



NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	A. Penerimaan Pembiayaan	312,648,749,009.60	872,611,409,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	2,770,966,733.34	15,062,618,550.00	13,000,000,000.00	14,300,000,000.00	15,730,000,000.00	17,303,000,000.00	19,033,300,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	309,877,782,276.26	857,548,791,102.85	(13,000,000,000.00)	(14,300,000,000.00)	(15,730,000,000.00)	(17,303,000,000.00)	(19,033,300,000.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	872,611,409,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 (Diolah kembali : Proyeksi Menggunakan Metode Geometrik)



Proyeksi APBD Tahun 2025-2030 selain sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga menjadi dasar untuk menghitung kapasitas riil daerah, yakni kemampuan aktual pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Komponen penghitungan kapasitas riil adalah penerimaan daerah, serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah), serta penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan perhitungan perkiraan awal SiLPA). Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk memenuhi ketiga prioritas tersebut. Gambaran Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030, adalah penghitungan kerangka pendanaan yang diproyeksikan ke depan, yang terdapat pada tabel berikut.



Tabel 2.80

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali
Tahun 2026-2030**

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	2,573,118,319,556.00	3,303,004,285,285.69	3,501,390,270,378.31	3,730,607,156,725.09	4,045,339,212,568.79	4,342,802,351,433.31
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Penerimaan	2.573.118.319.556,00	3.303.004.285.285,69	3.501.390.270.378,31	3.730.607.156.725,09	4.045.339.212.568,79	4.342.802.351.433,31
	Dikurangi:						
4	Hibah, Bansos, Transfer dan BTT	1.161.607.249.278,25	1.500.080.810.777,71	1.592.839.108.866,98	1.695.204.976.301,93	1.809.861.356.241,99	1.927.569.932.126,09
5	Pengeluaran Pembiayaan	15.062.618.550,00	13.000.000.000,00	14.300.000.000,00	15.730.000.000,00	17.303.000.000,00	19.033.300.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.396.448.451.727,75	1.789.923.474.507,98	1.894.251.161.511,33	2.019.672.180.423,16	2.218.174.856.326,80	2.396.199.119.307,22

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2025



Berdasarkan rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Morowali, dimana Kapasitas riil Pemerintah Kabupaten Morowali periode Tahun 2026-2030, dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) prioritas sebagai berikut.

- 1) **Prioritas Pertama** : Untuk membiayai belanja wajib berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan Perundang-Undangan, yakni:
 - a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan untuk penggunaan pada belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia;
 - d. Belanja Fungsi Pengawasan, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7236/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diarahkan pengalokasian sebesar 0.75 persen-1 persen.
- 2) **Prioritas Kedua** : Kapasitar riil kemampuan keuangan daerah digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Morowali.
- 3) **Prioritas Ketiga** : Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dialokasikan pada 3 prioritas, yaitu Prioritas 1 sebesar 56 persen yang dipergunakan untuk membiayai 4 (empat) belanja wajib, Prioritas II sebesar 40 persen yang dipergunakan untuk menjalankan visi misi Kepala Daerah, dan Prioritas III sebesar 4 persen dipergunakan untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.



Tabel 2.81

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.789.923.474.507,98	1.894.251.161.511,33	2.019.672.180.423,16	2.218.174.856.326,80	2.396.199.119.307,22
2	Prioritas I	1.002.357.145.724,47	1.060.780.650.446,34	1.131.016.421.036,97	1.242.177.919.543,01	1.341.871.506.812,05
3	Prioritas II	715.969.389.803,19	757.700.464.604,53	807.868.872.169,26	887.269.942.530,72	958.479.647.722,89
4	Prioritas III	71.596.938.980,32	75.770.046.460,45	80.786.887.216,93	88.726.994.253,07	95.847.964.772,29
	Total	1.789.923.474.507,98	1.894.251.161.511,33	2.019.672.180.423,16	2.218.174.856.326,80	2.396.199.119.307,22

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2025

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Sub Bab 2.3 Dokumen Ranwal RPJMD Kabupaten Morowali Periode 2025-2029 berisi tentang hasil identifikasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh daerah serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Permasalahan pembangunan biasanya mencakup kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan, seperti tata kelola pemerintahan yang belum optimal, rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta belum optimalnya pengentasan kemiskinan. Permasalahan pembangunan daerah (*problems of regional development*) ditemukan berdasarkan hasil evaluasi capaian atas kinerja pembangunan daerah periode RPJMD 5 (lima) tahun sebelumnya. Di sisi yang lain, mandatori pembangunan dari level nasional maupun global sebagai tantangan (*threats*) dan peluang (*opportunities*) yang perlu dikelola dengan baik. Dimana, kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di suatu daerah pada masa mendatang disebut sebagai isu-isu strategis daerah (*regional strategic issues*).

Isu strategis, di sisi lain, merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Isu-isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis atas isu-isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif terhadap berbagai kondisi yang tidak ideal, atau permasalahan yang akan dihadapi, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Analisis isu-isu strategis ini menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan Panjang.

Gambaran umum masalah pembangunan Kabupaten Morowali diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam beberapa dokumen laporan hasil. Salah satu dokumen hasil pelaksanaan tersebut yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023, yang mencakup prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah, masalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian kinerja utama dan kinerja daerah serta capaian indikator kinerja program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu permasalahan juga merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) yang tercantum dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029, juga hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam

dokumen penanggulangan kemiskinan (RPKD) periode 2025-2029. Selain diperoleh dari evaluasi pelaksanaan pembangunan pada dokumen hasil evaluasi, permasalahan daerah juga diperoleh dari mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti statistik daerah, survei, dan laporan kinerja. Selain itu identifikasi permasalahan pembangunan daerah juga diperoleh secara bottom up dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan masukan langsung mengenai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan pembangunan juga berasal dari identifikasi isu-isu strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Memastikan bahwa permasalahan yang diidentifikasi selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta daerah. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah secara berturut-turut akan dijelaskan pada bagian berikut.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.1. Permasalahan Pokok Daerah

Permasalahan pokok daerah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali 2025-2029 adalah isu-isu utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini diidentifikasi melalui evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan analisis kondisi terkini. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan atas kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam mengelola dan memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Merujuk pada rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali selama beberapa tahun terakhir yang disajikan di Bab II dokumen RPJMD tahun 2025-2029 ini juga hasil penelaahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 yang telah disusun sebelumnya, maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Morowali selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan: secara spesifik yakni kurangnya pelaksanaan dalam akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
2. Belum Meratanya Kualitas Dan Daya Saing Sumber daya Manusia: Pendidikan yang belum sinkron dengan ketersediaan lapangan kerja,

- dan keterampilan masyarakat yang belum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;
3. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah: Program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang belum efektif;
 4. Menurunnya Peran dan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan dan Pariwisata dalam Perekonomian: Pemanfaatan sumberdaya alam pertanian, perikanan dan pariwisata yang belum optimal dan berkelanjutan;
 5. Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antar Wilayah Kecamatan: Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antar wilayah terutama infrastruktur di wilayah pulau dan daratan utama, serta infrastruktur penghubung antar daratan dan kepulauan;
 6. Tingginya Pelanggaran Penataan Ruang: pemanfaatan ruang untuk sektor-sektor lapangan usaha belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang, dan meningkatnya konversi lahan produktif bagi pertanian, perikanan dan pariwisata untuk industri tambang dan pemukiman;
 7. Kapasitas Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurun: tantangan seperti pencemaran dan degradasi lahan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan yang kurang terkendali.

Beberapa masalah pokok daerah tersebut di atas dapat dipilah berdasarkan masalah-masalah dan akar masalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.82
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;	Tatakelola pemerintahan yang belum efektif dan efisien	1. Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan
			2. Belum optimalnya Penerapan Kerja Aparatur Berbasis Kinerja
			3. Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK
			4. Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN
			5. Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja, tugas, dan fungsi DPRD
		Rendahnya Kinerja Pelayanan Publik	1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
			2. Masih ditemukan adanya keluhan-keluhan pada sektor pelayanan publik
			3. Masih kurangnya sektor layanan publik yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.	Belum Meratanya kualitas dan daya saing SDM	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih rendah Tahun 2024	1. Masih rendahnya minat anak Usia Sekolah untuk melanjutkan pendidikan
			2. Kurangnya jumlah Guru sesuai kompetensi yang dibutuhkan



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		meningkat menjadi 13,39 atau masih melulusakan pendidikan sampai dengan D-1.	3. Belum meratanya distribusi Guru pada seluruh wilayah kecamatan
		Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS)	1. Masih tingginya angka putus sekolah dan meningkat pada jenjang SMA 2. Belum optimalnya bantuan beasiswa pendidikan pemerintah dan CSR untuk antisipasi angka putus sekolah belum optimal
		Sarana Prasarana pendidikan dasar belum memadai	1. Belum memadainya sarana prasarana sekolah masih khususnya wilayah Kepulauan 2. Belum memadainya Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung sekolah yang belum memadai; 3. Masih lemahnya teknologi pembelajaran dan masih terbatasnya jaringan/akses Internet mendukung model/sistem belajar berbasis daring (online) dan pelaksanaan Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 4. Belum berkembangnya ekosistem digital sebagai pembelajaran karena terbatasnya sarana prasarana.
		Kuantitas dan kualitas Guru belum memadai	1. Belum optimalnya pemerataan dan distribusi guru secara geografis maupun secara keahlian berdasarkan mata pelajaran yang belum optimal 2. Belum optimalnya tingkat kesejahteraan guru
		Usia Harapan Hidup (UHH) masih rendah	1. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 2. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit khususnya di wilayah kecamatan Menui Kepulauan, Sombori dan Bungku Selatan 3. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
		Tenaga Medis dan non medis masih minim	1. Terbatasnya jumlah medis dan non medis perawat 2. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter terbatas, khususnya Dokter Spesialis
		Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai	1. Masih terbatasnya sarana prasarana RSUD Morowali (Bungku) 2. Masih sangat terbatasnya sarana Prasarana RSUD Pratama Paku 3. Belum meratanya kualitas sarana



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
3.	Masih Tingginya Angka kemiskinan dan Ketimpangan pembangunan wilayah	Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali masih tinggi	1. Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, Tahun 2021 Rp. 478.409 per orang, meningkat pada tahun 2024 sebanyak Rp.590.027 per orang.
			2. Tingginya harga kebutuhan pokok (basic needs)
			3. Terbatasnya ketersediaan produksi kebutuhan pokok dibandingkan dengan permintaan khususnya kawasan industri.
			4. Rendahnya Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan tahun 2019 : 40,82%, 2020 : 47,84%, 2021 : 46,44% 2022 : 36,97% dan 2023 : 24,21 %
		Bantuan sosial belum semuanya tepat sasaran	1. Belum optimalnya verifikasi dan validasi PKH bagi rumah tangga miskin;
			2. Masih adanya data inclusion error dan exclusion error bagi rumah tangga miskin.
		Kondisi sosial ekonomi dan ketimpangan infrastruktur wilayah	1. Masih rendahnya kondisi pendidikan dan kesehatan keluarga
			2. Masyarakat miskin tidak memiliki asset liability
			3. Masih banyaknya rumah tidak layak huni rumah tangga miskin
			4. Rendahnya akses atas infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin (Air Bersih, Listrik, Sanitasi) khususnya di wilayah Kecamatan Bungku Selatan, Sembori dan Menui Kepulauan
		Kantong Kemiskinan yang sulit diakses	1. Adanya kendala Geografis dan Topografi, dimana kantong-kantong utama kemiskinan terutama berada di Kecamatan Bungku Selatan, Sembori dan Kecamatan Menui Kepulauan
			2. Terdapat status desa berkembang sebanyak 60 desa yang akan ditingkatkan statusnya menjadi desa maju dan desa mandiri
4.	Menurunnya peran dan kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan kelautan dan Pariwisata dalam perekonomian	Menurunnya produksi Pertanian (Padi, Jagung, Ubi dan kacang)	1. Masih rendahnya produktivitas dan Kualitas komoditi pertanian
			2. Terbatasnya Sarana Prasarana Produksi Petani Seperti Modal Usaha, Alsinta, Pupuk/Obat-obatan Terbatas
			3. Menurunnya nilai tambah (value added) produk pertanian
		Pariwisata dan ekonomi kreatif belum berkembang	1. Belum optimalnya Sektor Pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah
			2. Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi kreatif
		Menurunnya hasil	1. Kegagalan budidaya rumput laut
			2. Menurunnya hasil perikanan tangkap
			3. Belum optimalnya pengolahan perikanan



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		tangkapan ikan laut dan menurunnya budidaya ikan air laut dan tawar	4. Kurangnya ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas perikanan
5.	Belum optimalnya pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar antar wilayah Kecamatan dan antara daratan dan kepulauan	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik masih Rendah	1. Proporsi jalan kondisi mantap di Kabupaten Morowali masih rendah, hingga Tahun 2024 sebesar 32,46 persen. Kondisi ini terjadi salah satunya disebabkan adanya penambahan panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.
			2. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) dari 26,82 persen Tahun 2021 menurun menjadi 24,30 persen pada Tahun 2022
			3. Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru khususnya pada wilayah menui kepulauan dan Bungku Selatan.
			4. Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk
		Menurunnya persentase sarana Sanitasi layak	1. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak di Kabupaten Morowali hingga tahun 2024 mencapai 75,16 persen, dan belum terdapat rumah tangga bersanitasi aman.
			2. Rendahnya penyediaan air baku/bersih untuk daerah baru
		Cakupan Layanan Telekomunikasi Belum memadai	1. Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi
			2. Masih adanya wilayah desa blankspot jaringan komunikasi khususnya di wilayah pegunungan dan pulau-pulau.
6.		Ketersediaan Air Bersih terjadi peningkatan namun masih Rendah	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Morowali periode waktu 2020-2024, mengalami perkembangan berfluktuasi sampai Tahun 2024 sebesar 88,92 persen lebih rendah dari capaian tahun 2020.
		Jaringan Irigasi masih rendah	1. Sarana Pengairan yang ada, jumlahnya belum memadai, termasuk pengelolaan yang masih Buruk
			2. Banyaknya irigasi teknis yang mengalami kerusakan.
			1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan,



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Ketaatan dalam pelaksanaan aturan tata ruang	Alih fungsi lahan yang tinggi	permukiman dan niaga 2. Tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) 3. Pola pemanfaatan ruang yang kurang dijalankan 4. Pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan
		Rendahnya produktivitas lahan bekas tambang	Praktek penambangan yang tidak sesuai dengan peraturan
7.	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurun	Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	1. Sering terjadinya Bencana Banjir di beberapa tempat khususnya pada wilayah pertambangan 2. Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang mencemari sungai dan laut 3. Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air 4. Belum tertatanya pengelolaan limbah berbahaya khususnya pada pengolahan hasil tambang. 5. Terbatasnya Prasarana TPA 6. Belum berjalannya mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga 7. Menurunnya kualitas sumber air tanah dan pencemaran air 8. Rendahnya curah hujan tersebut memicu kemarau panjang dan kekeringan serta kerusakan Hidrologi sumber air 9. Pemanasan Global memicu perubahan iklim 10. Pencemaran air laut di kawasan wilayah pertambangan 11. Makin terbatasnya wilayah penangkapan ikan di laut, karena pencemaran ataupun lalu lintas transportasi dari kapal/tongkang perusahaan pertambangan 12. Makin terbatasnya hasil tangkapan nelayan disebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut 13. Indeks kualitas lingkungan hidup yang masih cukup rendah sebesar 80,54, tren terancam semakin menurun akibat aktivitas industri, khususnya pada wilayah Kecamatan Bahodopi sekitarnya dan Kecamatan Bungku Barat.
		Masih tinggi dampak resiko bencana	1. Meningkatnya risiko bencana pasca Tambang 2. Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat eksplorasi SDA dan tatakelola industri yang tidak ramah lingkungan.



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Pemetaan risiko bencana, mitigasi dan sistem informasi kebencanaan rendah
			4. Masih Rendahnya Penanganan Daerah Pasca Bencana
			5. Mitigasi Bencana masih rendah
		Masih banyaknya timbunan sampah yang belum tertangani	1. Kurangnya fasilitas TPST
			2. Kurangnya fasilitas daur ulang
			3. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah

Sumber: Dianalisis berdasarkan hasil konsultasi dan Integrasi Pelingkupan KLHS RPJPD/RPJMD masalah Pokok Tahun 2024.

2.3.1.2. Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan

Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan dalam penyusunan RPJMD merujuk pada isu-isu utama yang dihadapi oleh daerah dalam berbagai bidang atau urusan pemerintahan. Setiap urusan pemerintahan memiliki permasalahan spesifik yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan urusan, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih spesifik dan efektif untuk mengatasi setiap permasalahan tersebut.

Berdasarkan kajian normatif, analisis berbagai dokumen rencana sampai dengan analisis gambaran umum Kabupaten Morowali, sehingga menghasilkan beberapa rumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Morowali. Berkaitan dengan hal tersebut gambaran kondisi Pelayanan umum Kabupaten Morowali yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan serta Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan. Adapun beberapa permasalahan pembangunan tersebut berdasarkan urusan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.83

Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

Kode	Urusan	Permasalahan
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1.01	Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 107,45, jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 103,78 jenjang pendidikan SMU/MA/ SMK sebesar 96,68; 2. Angka Partisipasi Murni (APM)) tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 92,34. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 78,18. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/ SMK sebesar 70,45. Capaian ini menggambarkan penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun belum berhasil dengan baik; 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2024 untuk Tingkat SD/MI sebesar 96,86. Tingkat SMP/MT sebesar 95,00. Tingkat SMU/MA/SMK pada tahun 2023 sebesar 92,49; 4. APS tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,12 relatif kecil, jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 0,32 dan jenjang pendidikan SMU/MA/SMK pada tahun 2023 relatif besar yaitu sebesar 5,10; 5. Rasio Ketersediaan Sekolah tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:95, Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 1:175. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/ SMK sebesar 1:200; 6. Angka Lulusan SMA/SMK/MA sebesar telah mencapai 100 persen pada tahun 2023. Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2023 masih mencapai 79,00 persen, diperlukan usaha dan kerja keras pemerintah, untuk mendorong lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi; 7. Rasio guru/murid per kelas di Kabupaten Morowali Tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,08 Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 0,01. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 0,01.
1.02	Kesehatan	1. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2024 mencapai 10,5; 2. Angka Kematian Neonatal hingga Tahun 2024, mencapai 8,35, angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 1000 bayi yang lahir hidup, 8,35 diantaranya meninggal sebelum mencapai usia 28 hari. Angka ini merupakan indikasi belum optimalnya pelayanan kesehatan pada ibu hamil sampai ke wilayah terpencil, proses kelahiran dan pasca kelahiran; 3. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 mencapai 237, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 237 ibu dari 100.000 kelahiran hidup.



Kode	Urusan	Permasalahan
		Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 7 orang dimana terdiri dari 3 kematian ibu hamil, 2 kematian ibu bersalin, dan 2 kematian ibu nifas. Standar nasional angka kematian ibu adalah 183/100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di kabupaten Morowali sangat tinggi, berada 65 angka di atas standar nasional; 4. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Morowali tahun 2024 mencapai 69,41; 5. Rasio puskesmas pada tahun 2020 sebesar 0,254, mengalami penurunan setiap tahun dan tahun 2024 sebesar 0,221. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding dengan penambahan jumlah puskesmas; 6. Ada ibu hamil yang belum mendapat suplemen bumil, karena tidak melakukan kunjungan bumil K4.
1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Morowali masih rendah, hingga Tahun 2024 sebesar 32,46 persen; 2. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Dari 26,82 persen Tahun 2021 menurun menjadi 24,30 persen pada tahun 2022; 3. Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru khususnya pada wilayah menui kepulauan, Sambori dan Bungku Selatan; 4. Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk. 5. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Morowali dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar 30,9 persen dan pada tahun 2024 sebesar 37,30 persen. Penduduk Kabupaten Morowali belum dapat menjangkau air bersih terutama di wilayah Kepulauan Salabangka Sambori, dan Menui Kepulauan;
1.04	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1. Rasio Rumah Layak Huni (RLH) pada Tahun 2020 sebesar 72,64 persen dan Pada tahun 2024 sebesar 82,55 persen; 2. Konsumsi listrik perkapita pada tahun 2020 sebesar 337,29 kWh/kapita, mengalami perkembangan secara fluktuasi kurun waktu lima tahun terakhir, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 335,24. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan ketersediaan listrik yang tetap;



Kode	Urusan	Permasalahan
1.05	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1. Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat masih menjadi masalah umum di Kabupaten Morowali; 2. Demonstrasi dan tuntutan pekerja terhadap perusahaan meningkat, sehingga mengganggu ketertiban umum; 3. Sarana dan Prasarana pendukung dan operasional Satpol PP dan Damkar belum memadai.
1.06	Sosial	1. Belum optimalnya penanganan permasalahan sosial; 2. Masih rendahnya penanganan korban bencana alam dan non alam.
2	Urusan Tidak Terkait Pelayanan Dasar	
2.07	Tenaga Kerja	1. Tingginya angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang) sebanyak 28 Orang tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 41 Orang; 2. Kompetensi pencari kerja masih rendah; 3. Belum adanya link and match antara pendidikan Tenaga Kerja dan kebutuhan dalam bursa kerja dan industry yang berkembang; 4. Informasi bursa kerja terbatas; 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan belum memadai.
2.08	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta dimana pada tahun 2024 masih berada pada angka 21,21 persen; 2. Masih tingginya kasus KDRT, pada tahun 2022 sebesar 0,15 persen dan pada tahun 2024 meningkat menjadi menjadi 0,21; 3. Kurangnya pemenuhan hak-hak anak; 4. Masyarakat masih melakukan doing gender—tindakan membedakan jenis kelamin, karena belum memahami secara jelas konsep gender.
2.09	Pangan	1. Masih terdapatnya desa rawan pangan; 2. Terjadinya penurunan protein perkapita, pada tahun 2020 sebesar 65,42, mengalami penurunan setiap tahunnya, dan pada tahun 2024 sebesar 64,10; 3. Permintaan kebutuhan pangan yang meningkat seiring pesatnya peningkatan jumlah penduduk akibat masuknya tenaga kerja dari daerah lain; 4. Meningkatnya Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan komersial; 5. Rendahnya penyediaan prasarana irigasi pada wilayah-wilayah baru dan potensial untuk peningkatan ketersediaan pangan terutama padi; 6. Keberlanjutan sistem produksi padi akibat degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan upstream (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS.



Kode	Urusan	Permasalahan
2.10	Pertanahan	1. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal; 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten belum optimal; 3. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> lintas desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten belum optimal.
2.11	Lingkungan Hidup	1. Terjadinya degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan pertambangan yang mencemari air sungai dan laut untuk kegiatan perikanan; 2. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan daratan (terutama hutan) dan ekosistem perairan laut; 3. Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air; 4. Meningkatnya timbunan sampah di wilayah perkotaan dan kawasan cepat tumbuh yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai; 5. Meningkatnya emisi gas rumah kaca; 6. Semakin menurunnya tutupan terumbu karang akibat pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak sesuai anjuran.
2.12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan.
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Masih terdapat desa di Kabupaten Morowali yang belum memiliki legalitas batas desa. Dari 126 desa di Kabupaten Morowali yang telah memiliki Perbup Tapal Batas Desa sebanyak 10 Desa; 2. Masih Terdapat BUMDes yang belum memiliki badan Hukum, pada tahun 2024 terdapat 65 BUMDes yang berbadan Hukum dari 126 BUMDes; 3. Persentase desa Mandiri tahun 2024 sebanyak 33 desa atau 26,19 persen, desa berkembang 60 desa atau 47,62 persen dan desa maju 33 desa atau 26,19 persen.
2.14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali tahun 2020 sebesar 80,08 persen dan Tahun 2024 sebesar 88,69; 2. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2020 sebesar 85,09 persen, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 59,37; 3. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2020 sebesar 39,16



Kode	Urusan	Permasalahan
		persen, dan mengalami penurunan setiap tahun dan pada tahun 2024 hanya mencapai 16,70; 4. Minimnya pemahaman penduduk atas makna program Keluarga Berencana; 5. Terbatasnya Tenaga Penyuluh KB di wilayah terpencil dan kepulauan pada Kecamatan; Bungku Selatan, Sambori dan Menui Kepulauan; 6. Terbatas akses masyarakat miskin dan di wilayah terpencil pada Program KB.
2.15	Perhubungan	1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dan Peralatan Uji KIR; 2. Minimnya fasilitas pelabuhan laut, terminal bus, bandara Morowali; 3. Terbatasnya rambu-rambu lalu-lintas pada daerah rawan Lakalantas; 4. Rasio izin trayek di bawah target yakni mencapai 20 poin di Tahun 2020 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 36 poin; 5. Kuantitas penumpang dan barang yang terangkut terbatas akibat kurangnya angkutan laut antar kecamatan di wilayah kepulauan.
2.16	Komunikasi Dan Informatika	1. Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi terutama wilayah kepulauan; 2. Masih adanya wilayah desa blank-spot Jaringan Komunikasi khususnya di wilayah pegunungan dan pulau-pulau (Menui Kepulauan dan Salabangka); 3. Belum optimalnya penggunaan website sebagai sarana dan prasarana komunikasi dan informasi; 4. Anggaran yang terbatas didalam penyiapan infrastruktur tower BTS dan akses jaringan internet pada wilayah terpencil.
2.17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1. Persentase koperasi aktif pada tahun 2020 sebesar 36,36 persen, mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2024 menjadi 43,20 persen; 2. Minimnya pendampingan terhadap pengembangan koperasi 3. Minimnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 4. Terbatasnya akses modal bagi UMKM 5. Terbatasnya akses informasi pasar bagi UMKM 6. Terbatasnya interkoneksi dengan Kawasan Industri yang ada.
2.18	Penanaman Modal	1. Sektor penanaman modal masih terfokus pada industri ekstraksi berbasis sumber daya alam khususnya pertambangan; 2. Promosi investasi belum memadai; 3. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta) pada tahun 2020 sebanyak 104 investor, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 225 Investor;



Kode	Urusan	Permasalahan
		4. Jumlah nilai investasi berskala nasional. (PMDN/PMA) pada tahun 2020 realisasi investasi sebesar US\$ 22.684 Milyar, pada tahun 2024 mengalami peningkatan nilai investasi menjadi US\$ 117.577 Triliun.
2.19	Kepemudaan Dan Olahraga	1. Data jumlah organisasi kepemudaan, kegiatan organisasi kepemudaan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan masih terbatas; 2. Kontribusi organisasi kepemudaan serta koordinasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah masih terbatas; 3. Sarana dan prasarana olah raga belum memadai.
2.20	Statistik	1. Sistem Data statistik belum terintegrasi dan termanfaatkan dengan baik didalam pengambilan keputusan.
2.21	Persandian	1. Sampai dengan tahun 2024 belum adanya tenaga sandiman di kabupaten Morowali; 2. Keamanan data dan informasi daerah sangat diperlukan didalam menjalankan pemerintahan termasuk keamanan tanda tangan pejabat daerah menghindari pemalsuan.
2.22	Kebudayaan	1. Sumber Daya Manusia dan sarana- prasarana kegiatan kebudayaan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan masih minim; 2. Identifikasi dan riset situs kebudayaan belum dilakukan.
2.23	Perpustakaan	1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan meningkat dari tahun 2020 sebanyak 2.286 menjadi 5.105 orang pada tahun 2024, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung perpustakaan yang memadai; 2. Kemampuan literasi masyarakat relatif masih rendah; 3. Keterbatasan pemerataan dan Inovasi layanan perpustakaan; 4. Belum tersedianya SDM Pustakawan.
2.24	Kearsipan	1. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih belum memadai 2. Pengelolaan digitalisasi kearsipan masih terbatas; 3. Tradisi tata kelola arsip daerah belum dibudayakan.
3	Urusan Pilihan	
3.25	Pertanian	1. NTP Menurun di Tahun 2024; 2. Menurunnya kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB; 3. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan kelompok tani; 4. Belum optimalnya peran PPL Pertanian dalam peningkatan SDM petani, produksi dan pemasaran hasil pertanian; 5. Kualitas-Produk pertanian masih rendah;



Kode	Urusan	Permasalahan
		6. Terbatasnya Sarana Prasarana Produksi Petani Seperti Modal Usaha, Alsintan, Pupuk/Obat-obatan Terbatas; 7. Nilai Tambah Produk Pertanian Rendah; 8. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi; 9. Kawasan pertambangan, permukiman dan niaga; 10. Rendahnya penyediaan irigasi pada daerah baru; 11. Rendahnya Minat Kerja di sektor pertanian.
3.26	Kelautan Dan Perikanan	1. Masih rendahnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan; 2. Menurunnya produksi budidaya perikanan; 3. Menurunnya hasil perikanan tangkap, 4. Lemahnya daya tawar nelayan; 5. Terbatasnya sarana dan prasarana alat tangkap ikan bagi nelayan; 6. Besarnya potensi perikanan tangkap Kabupaten Morowali yang belum dikelola; 7. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan lingkungan perikanan; 8. Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan; 9. Masih rendahnya konsumsi ikan perkapita.
3.27	Pariwisata dan EKonomi Kreatif	1. Masih rendahnya kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten; 2. Belum optimalnya penataan Daya Tarik Wisata (DTW); 3. Belum optimalnya dukungan Sarana dan prasarana pariwisata; 4. Masih rendahnya SDM dan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 5. Rendahnya Kontribusi Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB.
3.30	Perdagangan	1. Stabilitas harga belum terjamin; 2. Sarana dan Prasarana Perdagangan belum memadai.
3.31	Perindustrian	1. Masih rendahnya akses permodalan bagi IKM/informal; 2. Masih rendahnya kemitraan IKM dengan Industri Besar; 3. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali mengalami penurunan atau bahkan berkurang dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,37 persen. Ditahun 2022 industri di Kabupaten Morowali meningkat sebesar 37,44 persen; 4. Rasio PDRB industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 35,25 persen, mengalami penurunan setiap tahun dan pada tahun 2024 menjadi 20,01. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali tidak bisa mengandalkan industri pengolahan.
3.32	Transmigrasi	1. Masih Rendahnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi;



Kode	Urusan	Permasalahan
		2. Pembinaan Masyarakat transmigrasi belum dilakukan secara tepat dan berkelanjutan; 3. Masih rendahnya produktivitas masyarakat transmigrasi; 4. Belum optimalnya penataan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
4	Urusan Pemerintahan Penunjang	
4.01	Sekretariat Daerah	1. Reformasi Birokrasi belum berjalan maksimal; 2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Masih perlu ditingkatkan; 3. Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Administrasi Kewilayahan; 4. Belum optimalnya Kerjasama Daerah; 5. Belum Optimalnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Adaptif dan responsif; 6. Terbatasnya Aparatur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (JF-PPBJ); 7. Masih terbatasnya ketersediaan, penyusunan SOP dan Penerapan Standar Pelayanan minimal; 8. Rendahnya koordinasi penyelenggaraan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.
4.02	Sekretariat DPRD	1. Belum optimalnya layanan terhadap penyelenggaraan fungsi DPRD
5.01	Perencanaan	1. Belum optimalnya kualitas perencanaan; 2. Pengolahan data dan informasi pembangunan daerah belum optimal; 3. Koordinasi perencanaan masih perlu ditingkatkan.
5.02	Keuangan	1. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah; 2. Masih rendahnya ratio PAD terhadap total pendapatan daerah; 3. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah; 4. Alokasi anggaran untuk pencapaian target pembangunan sulit tercapai.
5.03	Kepegawaian	1. Penegakan hukuman disiplin ASN belum optimal; 2. Rendahnya produktifitas kinerja ASN; 3. Masih rendahnya kesejahteraan ASN.
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	1. Belum optimalnya capaian aparatur yang mengikuti diklat struktural fungsional dan teknis.
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	1. Masih rendahnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan; 2. Penyusunan kebijakan belum berbasis bukti/Hasil kajian.
6.01	Inspektorat Daerah	1. Masih kurangnya tindak lanjut temuan pemeriksaan internal; 2. Kurangnya aparatur pemeriksa yang profesional dan berkualitas auditor; 3. Masih lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di setiap Perangkat Daerah.

Kode	Urusan	Permasalahan
7.01	Kecamatan	1. Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan; 2. Infrastruktur pendukung pelayanan publik di kecamatan belum memadai.
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	1. Kurangnya Cakupan Sekolah, Ormas, dan keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan; 2. Belum optimalnya cakupan Pendidikan politik masyarakat; 3. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan; 4. Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa.

2.3.2. Isu Strategis

2.3.2.1. Isu Strategis Global

Isu strategis (*strategic issues*) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dalam penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, Provinsi dan daerah, serta pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Sementara penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan khususnya Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali. Melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya, pada proses Penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 dilakukan juga penelaahan

terhadap isu strategis Global yang mempengaruhi Indonesia, SDGs 2023, Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045, Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi yang temuat dalam Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif dengan mempertimbangan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika internasional, nasional dan regional.

A. Isu Strategis Global Megatren 2045

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: (1) perkembangan demografi global; (2) geopolitik dan geoekonomi; (3) perkembangan teknologi; (4) peningkatan urbanisasi dunia; (5) konstelasi perdagangan global, (6) tata kelola keuangan global; (7) pertumbuhan kelas menengah (*middle class*); (8) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam; (9) perubahan iklim; dan (10) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).



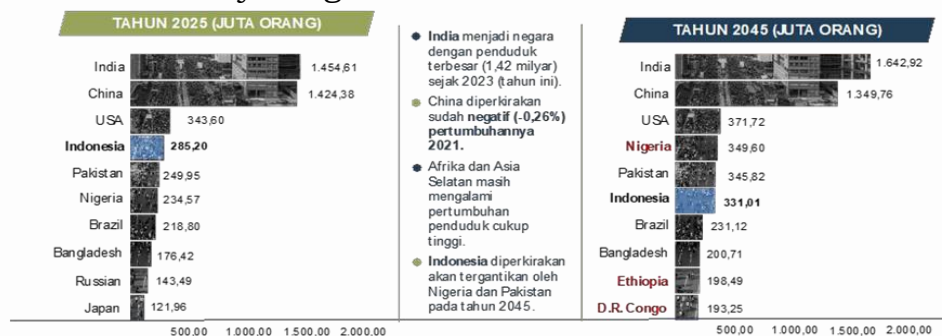
Gambar 2.75
Megatren Tahun 2045

B. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunya angka kelahiran.



Sumber: United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022 dan Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.76

Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Tahun 2025 dan 2045

Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

C. Geopolitik dan Geoekonomi

1) Geopolitik

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan setiap negara. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan

pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo- Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

2) Perang Tarif USA dan China

Kebijakan Tarif Trump. Kebijakan tarif Trump adalah langkah yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengenakan tarif impor terhadap barang-barang dari berbagai negara. Tarif resiprokal yang ditetapkan Trump mengacu pada kebijakan perdagangan, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif impor atau bea masuk yang serupa maupun sebanding dengan tarif yang dibebankan oleh negara lain terhadap barang-barang ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dan meningkatkan produksi dalam negeri.

Berikut adalah beberapa poin utama dari kebijakan tarif Trump:

1. Tarif Universal: Tarif universal sebesar 10% dikenakan pada semua barang impor dari negara-negara asing.
2. Tarif Timbal Balik: Tarif timbal balik khusus dikenakan pada negara-negara yang dianggap memberlakukan tarif impor lebih tinggi terhadap produk AS. Indonesia, misalnya, dikenakan tarif sebesar 32%.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa penghitungan tarif impor Trump tidak memiliki satu basis ekonomi yang jelas. uga, angka-angka itu muncul karena AS memperkirakan negara seperti Indonesia mengenakan tarif 64 persen terhadap produk AS. hubungan dagang antara Indonesia dan AS, Tanah Air mencatat surplus sebesar US\$ 16,8 miliar. Angka tersebut selanjutnya dibagi dengan jumlah nilai impor AS dari Indonesia yang berada di angka US\$ 28,3 miliar, sehingga menghasilkan persentase sekitar 64 persen. Persentase tersebut dianggap oleh pihak

Amerika Serikat sebagai tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk-produk dari negaranya. Dampak tarif tersebut bagi ekonomi Indonesia adalah :

1. Penurunan Ekspor: Tarif yang tinggi menyebabkan produk Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, sehingga menurunkan daya saing dan volume ekspor.
2. Tekanan pada Sektor Industri: Sektor-sektor seperti tekstil, peralatan listrik, dan minyak nabati yang bergantung pada ekspor ke AS mengalami tekanan signifikan.
3. Potensi Resesi: Kebijakan tarif ini dapat memicu resesi ekonomi di Indonesia pada kuartal IV 2025, dengan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan.
4. Pelemahan Rupiah: Guncangan di pasar keuangan global akibat kebijakan tarif Trump menyebabkan kurs rupiah terhadap dolar AS jatuh ke level terendah sepanjang sejarah.
5. PHK dan Pengangguran: Peningkatan biaya produksi dan penurunan ekspor dapat menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatkan angka pengangguran.

China telah mengambil beberapa langkah strategis untuk menghadapi kebijakan tarif yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump:

1. Tindakan Balasan: China menaikkan tarif atas barang-barang Amerika Serikat dari 84% menjadi 125% sebagai respons langsung terhadap tarif yang
2. Diplomasi dan Aliansi: Presiden Xi Jinping mengajak Uni Eropa untuk bersatu menghadapi kebijakan dagang sepihak Amerika Serikat. China berusaha memperluas poros diplomasi dengan menjadikan Eropa sebagai mitra dalam menyeimbangkan dominasi dagang AS
3. Pembatasan Impor Produk Budaya: China mengurangi impor film asal Amerika Serikat sebagai langkah untuk menyesuaikan selera pasar dan sebagai sinyal bahwa produk budaya juga bisa menjadi senjata dalam perang dagang
4. Revitalisasi Ekonomi: China tetap teguh dalam menghadapi ancaman tarif tambahan dari Trump, dengan menyatakan akan terus melawan kebijakan tarif tersebut untuk melindungi hak dan kepentingan negara yang bermitra.
5. Stabilitas Ekonomi Global: China menyebut ancaman tarif Trump telah menimbulkan kekhawatiran dalam keseimbangan ekonomi global untuk menghadapi kebijakan tarif Trump.

Dampak kebijakan tarif China dalam menghadapi kebijakan tarif Trump memiliki beberapa implikasi penting bagi ekonomi global dan Indonesia.

Adapun dampak Global yang akan dihadapi adalah:

1. Perlambatan Ekonomi Global: Perang tarif antara AS dan China menyebabkan ketidakpastian ekonomi global, yang berdampak pada penurunan investasi dan perdagangan internasional.
2. Volatilitas Pasar Keuangan: Kebijakan tarif ini meningkatkan volatilitas di pasar keuangan global, termasuk pasar saham dan mata uang.

Adapun dampak bagi Ekonomi Indonesia adalah:

1. Penurunan Ekspor: Tarif tinggi yang dikenakan oleh AS dan China menyebabkan penurunan permintaan produk Indonesia di kedua negara tersebut
2. Tekanan pada Sektor Industri: Sektor-sektor seperti tekstil, elektronik, dan komoditas mengalami tekanan akibat penurunan ekspor dan peningkatan biaya produksi
3. Pelemahan Rupiah: Ketidakpastian ekonomi global akibat perang tarif menyebabkan pelemahan kurs Rupiah terhadap Dollar AS
4. Inflasi: Peningkatan biaya impor dan produksi dapat menyebabkan inflasi di Indonesia, yang berdampak pada penurunan daya beli.
5. Diversifikasi Pasar: Indonesia berusaha untuk diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara lain yang dapat menjadi mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan China.

3) Geoekonomi

Nilai *output* dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai *output* dunia. Pada tahun 2045, nilai *output* negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai *output* dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai *output* yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas



komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang. Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai *output* dunia.

D. Perkembangan Teknologi Informasi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupti teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation* (RPA), *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*.



Gambar 2.77
Disrupsi Teknologi

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik (Gambar diatas). Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupti teknologi. Perkembangan kemajuan IT telah mendorong akselerasi disrupti teknologi di berbagai sektor. Saat ini, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: nanotechnology; blockchain; robotika cerdas, IoT, AI, dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung

konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari *additive manufacturing* (3D printing, rapid prototyping, powder bed system, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas- tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (remote working) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola work from anywhere (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan real estate. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan

regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

E. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

F. Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7 (Grafik 2.1.2). Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks/GPN) dan rantai pasok global (global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

G. Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

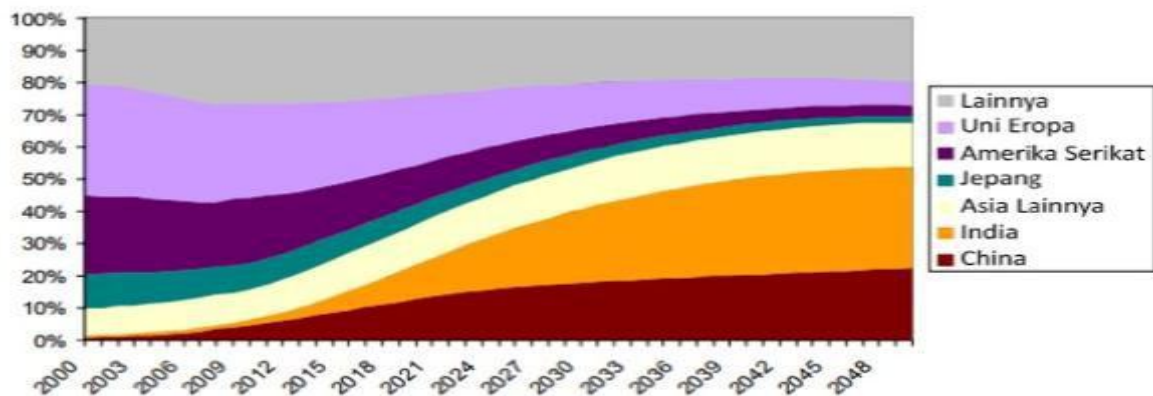
Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya

perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

H. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.



Gambar 2.78

Share Konsumsi Penduduk Kelas Menengah Global, 2000-2050

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

I. Degradasi Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

J. Perubahan Iklim

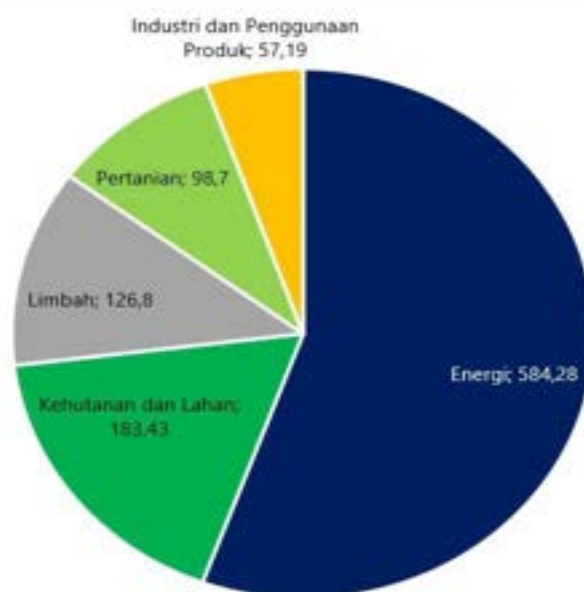
Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori *kode merah bagi manusia*. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga tahun 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat *Celcius* di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan konsentrasi GRK yang signifikan di atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Kenaikan konsentrasi GRK menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan laut Indonesia berkisar 0,7- 0,9 cm/tahun. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian,

dan kesehatan. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari perubahan iklim. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun selama periode tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO₂e atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO₂e (Our World in Data based on the Global Carbon Project, 2022). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan penggunaan produk.



Gambar 2.79
Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Juta ton CO₂e)

Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma pembangunan tidak berubah. Pembangunan dan aktivitas perekonomian saat ini masih bertumpu pada energi fosil, bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam, serta penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan emisi GRK nasional akan terus meningkat hingga dua kali lipat mencapai 2,27 GtCO₂e di tahun 2045.

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi risiko perubahan iklim. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2023 memberikan peringatan bahwa waktu untuk bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan semula, khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative Designs* termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi elektrolisis *Green Hydrogen* (GH₂) dan *fuel cell* menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH₂ sebagai *feedstock* industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

K. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian



antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

L. Sustainable Development Goals (SDG's)

Isu strategis global mengambil sumber salah satunya dari *Sustainable Development Goal's (SDG's)* sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun TPB dimaksud memberikan panduan dalam pembangunan secara global yang berkelanjutan yang mencakup 4 (empat) dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan) yang terdiri dari:

1. Tujuan 1 tanpa kemiskinan;
2. Tujuan 2 tanpa kelaparan;
3. Tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera;
4. Tujuan 4 pendidikan berkualitas;
5. Tujuan 5 kesetaraan gender;
6. Tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak;
7. Tujuan 7 energi bersih dan terjangkau;
8. Tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Tujuan 9 industri, inovasi dan infrastruktur;
10. Tujuan 10 berkurangnya kesenjangan;
11. Tujuan 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan;
12. Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Tujuan 13 penanganan perubahan iklim.

Pembangunan dan aktivitas masyarakat juga telah mengakibatkan berbagai masalah lingkungan (*environmental problems*) dan berbagai gangguan kesehatan yang diakibatkan buruknya kondisi dan kualitas lingkungan. Perkembangan produksi kemudian dipicu oleh peningkatan dan gaya hidup konsumsi masyarakat telah mengakibatkan produksi sampah melimpah di berbagai negara. Produksi sampah yang melimpah ini tanpa diikuti oleh pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sampah menumpuk dan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang (*developing countries*).

Perilaku manusia dan kegiatan ekonomi juga telah menghasilkan emisi yang terus meningkat di berbagai negara. Polusi udara dan air telah mengakibatkan merebaknya berbagai penyakit, bahkan kematian. Penurunan kondisi sanitasi dan makanan yang tidak sehat telah mengakibatkan kematian sebanyak 1,7 miliar manusia setiap tahunnya. Polusi udara di perkotaan telah mengakibatkan kematian sekitar 800 ribu



orang setiap tahunnya. Pencemaran tembaga (*lead*) telah mengakibatkan 13 juta manusia cacat, dalam bentuk keterbelakangan mental, dan penyakit kardiovaskular. Upaya mengintegrasikan pencapaian SDGs di Indonesia dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB). Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Regulasi ini menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya.

Pelaksanaan SDG's berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Untuk keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDG's tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDG's.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB Kabupaten Morowali.

M. Dunia menghadapi Ancaman Bencana Alam Global

Sejak masa lalu manusia telah menghadapi bencana alam yang berulang kali melenyapkan populasi. Pada zaman dahulu, manusia sangat rentan akan dampak bencana alam dikarenakan keyakinan bahwa bencana alam adalah hukuman dan simbol kemarahan sang maha pencipta. Semua peradaban kuno menghubungkan lingkungan tempat tinggal mereka dengan dewa atau tuhan yang dianggap manusia dapat

memberikan kemakmuran maupun kehancuran. Kata bencana dalam Bahasa Inggris "disaster" berasal dari kata Bahasa Latin "dis" yang bermakna "buruk" atau "kemalangan" dan "aster" yang bermakna "dari bintang-bintang". Kedua kata tersebut jika dikombinasikan akan menghasilkan arti "kemalangan yang terjadi di bawah bintang", yang berasal dari keyakinan bahwa bintang dapat memprediksi suatu kejadian termasuk peristiwa yang buruk.

Menjelang akhir abad ini, banyak bagian dunia akan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus, yang disebabkan perubahan iklim. Menurut para ahli, bencana yang dimaksud mulai dari gelombang panas dan kebakaran, sampai hujan lebat dan ombak besar bahkan tsunami yang akan menghantam kawasan pantai. Manusia akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi. Tingkat karbon dioksida, gas methana dan gas-gas rumah kaca lainnya yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu akibat Perubahan Iklim Peningkatan suhu bumi memicu musim hujan yang sulit diprediksi, kemarau panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan seperti yang kini sedang terjadi di negara bagian USA, wilayah Eropa dan Asia. Sebaliknya, di kawasan yang biasanya lebih basah, justru terjadi hujan lebat dan banjir. Di laut, peningkatan suhu memicu badai yang semakin besar yang menimbulkan bencana karena permukaan air laut yang terus naik. Sampai saat ini para pakar hanya mempelajari dampak perubahan iklim ini satu per satu. Mereka belum mempertimbangkan kemungkinan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini terjadi sekaligus.

Perjanjian iklim yang ditandatangani di Paris tahun 2015 oleh 195 negara menyerukan supaya dilakukan usaha terkoordinir untuk mencegah kenaikan suhu bumi diatas dua derajat Celsius menjelang akhir abad ini. Kalau emisi gas karbon dioksida berlanjut pada tingkat yang sekarang, kota-kota didunia kemungkinan akan dilanda empat jenis bencana alam sekaligus. Termasuk di antaranya adalah hujan lebat, kenaikan permukaan laut, dan ombak besar yang akan menghantam kota itu. Kalau itu terjadi maka kawasan-kawasan pantai di daerah tropis akan menghadapi bencana paling besar.

Cuaca ekstrem, angin topan, dan tornado adalah beberapa bencana alam yang sering terjadi pada tahun 2019-2022 diperkirakan akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana-bencana ini sering kali dikaitkan dengan perubahan iklim global. Oleh karena bencana alam adalah sesuatu yang kompleks, dan perubahan iklim dapat memperparah kondisinya. Pemanasan global yang terjadi sebagai salah satu efek perubahan iklim menyebabkan kandungan uap air di atmosfer semakin meningkat. Semakin tingginya

kadar uap air akan mempengaruhi tingkat kelembapan di atmosfer. Kondisi atmosfer yang lembap akan memicu terjadinya badai besar yang terjadi. Ancaman badai semakin diperparah oleh berkurangnya perbedaan suhu antara ekuator dengan kutub. Akibat adanya *global warming*, temperatur di kutub mengalami lebih banyak peningkatan jika dibandingkan dengan perubahan temperatur yang terjadi di ekuator. Peningkatan suhu yang sangat drastis di kutub membuat perbedaan suhu antara ekuator dengan kutub menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini sebenarnya membuat potensi kejadian badai dengan intensitas kecil semakin jarang terjadi. Namun, secara bersamaan, hal tersebut ternyata meningkatkan ancaman terbentuknya badai berintensitas tinggi di atmosfer bumi.

Gempa bumi dan likuifaksi yang maha dasyat terjadi di Palu-Sulawesi Tengah dan di Turki dan Suriah merupakan contoh nyata dari ancaman bencana alam global yang dihadapi dunia saat ini. Isu ini sangat penting karena bencana alam dapat berdampak besar pada kehidupan manusia, ekonomi, lingkungan, dan keberlangsungan hidup planet bumi. Beberapa ancaman bencana alam pasca gempa bumi dan bencana lainnya yang sering terjadi antara lain a) Kerusakan lingkungan dan kehilangan habitat menyangkut Bencana alam seperti gempa bumi menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, dan kehilangan habitat bagi makhluk hidup. Dampak ini dapat mengancam mempertahankan spesies tertentu dan menyebabkan efek domino pada ekosistem secara keseluruhan; b) Kesehatan dan kesejahteraan manusia yaitu Bencana alam global seperti gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dapat mengakibatkan penyebaran penyakit, kekurangan pangan dan air, serta kondisi sanitasi yang buruk; c) Gangguan ekonomi menyangkut pasca Bencana alam dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara atau wilayah secara signifikan. Kerusakan infrastruktur, perkebunan, dan fasilitas produksi dapat mempengaruhi produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini dapat memicu kenaikan harga dan inflasi, serta mengurangi pendapatan dan lapangan kerja; d) Konflik dan keamanan yaitu Bencana alam dapat memicu konflik dan keamanan. Ketika masyarakat merasa tidak diuntungkan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antarkelompok. Selain itu, situasi darurat seperti ini juga dapat memungkinkan kelompok-kelompok ekstrimis untuk memperluas pengaruh mereka; e) Perubahan iklim dimana Bencana alam global seperti gempa bumi berkontribusi pada perubahan iklim. Dimana, gempa bumi dapat menyebabkan aktivitas

vulkanik, yang dapat melepaskan efek rumah kaca ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global.

Oleh karena itu, penting bagi dunia secara global untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, Likuifaksi, tanah longsor, banjir bandang, gunung berapi dan lain-lain baik melalui upaya penanggulangan, adaptasi, maupun penanganan darurat. Upaya ini harus dilakukan secara kolaboratif antar negara, antar wilayah provinsi, Kabupaten/Kota dan antar sektor untuk memastikan keberlangsungan hidup planet kita dan kesejahteraan umat manusia di masa depan.

N. Daya Dukung dan Daya Tampung

1) Daya Dukung Sumber Daya Alam

Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Penentuan daya dukung sumber daya alam dilakukan melalui beberapa konsep pendekatan yang berkaitan dengan lahan pertanian, fungsi lindung, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya energi, keanekaragaman hayati, dan sebagainya.

Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektare dari tahun 2025 sampai tahun 2060 (BaU). Hal tersebut dipengaruhi oleh pengurangan luas tutupan hutan dalam kawasan konservasi sebesar 700 ribu hektare selama kurun 2020-2045. Begitu pula dengan luas lahan sawah yang diproyeksikan akan terus menurun hingga 7 juta hektare yang diiringi dengan menurunnya tingkat produktivitas menjadi 7 ton/hektare/tahun akibat degradasi tanah.

Daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah di Indonesia. Secara umum, pada situasi *baseline* suplai air domestik pada tingkat nasional masih mampu memenuhi permintaan air keseluruhan. Namun pada skala pulau, pada wilayah tertentu di tahun 2000, tingkat ketersediaan air mulai menunjukkan kelangkaan yang dipengaruhi oleh kebutuhan air yang tinggi dan penurunan luas tutupan hutan lahan. Sampai dengan tahun 2045, tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa, sebagian Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, sudah berada pada tingkat langka atau kritis.

Daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral cukup besar tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan. Walaupun Indonesia memiliki berbagai sumber daya energi dan mineral seperti nikel, tembaga, bauksit, gas, dan batu bara yang diperkirakan cukup tinggi termasuk yang berada di laut dalam, namun tingkat cadangan terbukti yang telah ditemukan relatif lebih rendah dari yang

diperkirakan. Eksplorasi cadangan energi sumber daya mineral membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi, dan kapasitas SDM yang memadai.

Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin menurun. Ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan mengalami penurunan. Ketersediaan lahan mengalami tekanan dengan semakin meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain. Ketersediaan dan pasokan air untuk penyediaan pangan akan menurun, terutama akibat persaingan dengan penggunaan lain. Penurunan kualitas lahan dan air juga berdampak nyata pada menurunnya daya dukung untuk penyediaan pangan. Selain itu, menurunnya keanekaragaman hayati berdampak pada penurunan keragaman sumber pangan. Nantinya, potensi kerentanan pangan di beberapa wilayah perlu diwaspadai.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran, perubahan iklim, dan persebaran Jenis Asing Invasif (JAI). Alih fungsi lahan yang diproyeksikan terus terjadi dalam jangka panjang berimplikasi pada hilangnya habitat spesies kunci, seperti: Gajah, Orang utan, dan Harimau Sumatera; Badak dan Owa Jawa; Anoa; Babi rusa; Orang utan Borneo; dan Gajah Kalimantan. Luas habitat spesies kunci diproyeksikan menurun 6,6 juta hektare selama 2020-2045.

Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan antara lain pada aktivitas perikanan tangkap, pembangunan pesisir, transportasi dan pariwisata. Sampah plastik menurunkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati laut secara signifikan serta berdampak pada kualitas sumber pangan akuatik, keselamatan pelayaran, dan daya tarik wisata bahari. Lebih lanjut, naiknya suhu air laut semakin memperburuk daya dukung ekosistem laut salah satunya mengancam pemutihan yang semakin luas pada ekosistem terumbu karang.

2) Daya Tampung

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Saat ini 82 persen dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar (WWF, 2019) dan sekitar 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga tidak layak minum (UNICEF, 2022). Beban pencemaran limbah domestik terus meningkat mencapai 4,7 juta ton BOD per tahun dan berisiko mencemari badan air tanpa adanya pembangunan IPAL, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memadai. Selain itu, pencemaran sumber daya air juga terjadi akibat tidak baiknya pengelolaan limbah dari baik industri, pertanian, maupun pertambangan. Peningkatan beban *biological oxygen demand* (BOD) diperkirakan mencapai 3.000 ribu ton/tahun, jauh di atas beban maksimum (600 ribu ton/tahun). Selain itu, komponen Indeks Kualitas Air (IKA) nasional memiliki nilai yang paling rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKA memiliki tren fluktuatif dengan rata-rata tahun 2015-2021 sebesar 52,35 (KLHK, 2021).

Daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu. Konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari, atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan.

Daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas. Berdasarkan indeks kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas gambut pada tahun 2021, sebanyak 11 provinsi dalam kondisi buruk hingga sangat buruk terutama akibat kebakaran hutan dan lahan. Persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, tanpa adanya intervensi, daya tampung rata-rata lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) nasional diproyeksikan akan penuh pada tahun 2028 atau lebih cepat. Timbulan sampah pada tahun 2045 diprediksi mencapai 82,2 juta ton, ditambah dengan timbulan akibat susut dan limbah pangan (*food loss and waste*) yang mencapai sekitar 334 kg per kapita sehingga berkontribusi pada *overcapacity* TPA.

Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. *Ocean Health Index* (OHI) Indonesia berada pada peringkat 181 dari 221 negara dengan skor 62,66 yang mengindikasikan rendahnya pengelolaan yang berkelanjutan yang utamanya disebabkan oleh aktivitas perikanan, pariwisata, transportasi dan sampah laut. Selain itu, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai bagian dari IKLH sudah mulai dikembangkan dengan angka capaian tahun 2021 dan 2022 sebesar 81,04 dan 84,41. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di beberapa wilayah pulau besar di Indonesia memiliki kapasitas dan kualitas yang berbeda-beda.

Kualitas air dan tanah juga diperkirakan turun akibat upaya penanganan limbah dan sampah yang tidak optimal saat aktivitas perekonomian terus meningkat. Diperkirakan timbulan sampah akan melebihi kapasitas daya tampung TPA di mana sampah terkelola kurang dari 10 persen. Turunnya kualitas air terlihat dari beban *Biological Oxygen*

Demand (BOD) yang diperkirakan mencapai 3000 ribu ton/tahun, jauh di atas beban maksimum (600 ribu ton/tahun). Disisi lain, diproyeksikan persentase tutupan lahan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan.

Tabel 2.90 Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Ekoregion pada Tahun 2045

O. Krisis Pangan Dunia

Ancaman krisis pangan global sangat serius dan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, konflik, ketidakstabilan ekonomi, dan kesulitan distribusi pangan. Perubahan iklim ekstrem menyebabkan gangguan pada pertanian, seperti siklon dan hujan di atas normal, yang merusak areal pertanian dan memicu gagal panen. Selain itu, konflik dan ketidakstabilan ekonomi juga menghambat produksi dan distribusi pangan, sementara kesulitan distribusi dan tingginya harga pupuk juga turut memperparah krisis pangan.

Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) mencatat, lebih dari 333 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Jumlah itu meningkat hampir 200 juta orang dibandingkan dengan tingkat kerawanan pangan sebelum pandemi Covid-19. Menurut WFP, krisis pangan ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang mematikan. Konflik masih menjadi penyebab kelaparan terbesar. Sebanyak 70 persen orang di dunia yang menderita kelaparan tinggal di wilayah terdampak perang dan kekerasan. Krisis iklim juga menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kelaparan global.

Perubahan iklim ekstrem menghancurkan kehidupan, tanaman dan mata pencarian, serta melemahkan kemampuan masyarakat untuk mencari makan. Selain itu, harga pupuk global meningkat drastis. Dampak perang di Ukraina mengganggu produksi dan ekspor pupuk global sehingga mengurangi pasokan, menaikkan harga, dan mengancam panen. Harga pupuk yang tinggi dapat mendorong terjadinya krisis ketersediaan pangan, dengan produksi jagung, beras, kedelai, dan gandum semuanya turun pada tahun 2022.

Untuk mengatasi ancaman krisis pangan global, diperlukan tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta upaya untuk meningkatkan produksi pangan dan menjaga stabilitas harga. Mitigasi dapat dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, sementara adaptasi dapat dilakukan dengan mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrem dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Selain itu, perlu juga peningkatan kerjasama internasional dalam mengatasi krisis pangan dan memastikan akses pangan bagi semua orang.

2.3.2.2. Isu Nasional

A. Isu Nasional Umum

A.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM

Konstelasi di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara. Sejalan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pengarusutamaan dan pemajuan hak asasi manusia pada setiap keputusan pembangunan yang menegaskan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap individu, terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan, demi pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif. Pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.

A.2. Pertahanan, Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Ekonomi

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Dalam kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan. Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini diimplementasikan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita. Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia

mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat. Pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan meskipun sempat berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 akibat pandemi Corona Virus Disease 2019. Sebelum pandemi Corona Virus Disease 2019, pencapaian Gross National Income per kapita tahun 2019 menjadikan Indonesia masuk ke dalam negara Upper-Middle Income Countries. Namun demikian, adanya pandemi mengakibatkan penurunan Gross National Income per kapita sehingga Indonesia turun menjadi negara Lower Middle Income Countries. Berbagai upaya pemulihan yang dilakukan menyebabkan perekonomian Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif, ditandai oleh peningkatan Gross National Income per kapita dan menjadikan Indonesia kembali ke dalam negara *Upper-Middle Income Countries*. Dalam lima tahun terakhir, kinerja pertumbuhan industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami tekanan pada tahun 2020.

Salah satu kontribusi paling signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional datang dari sektor industri baja. Sektor industri baja sangat berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui nilai tambah serta menjadi multiplier effect bagi peningkatan daya saing ekonomi. Pertumbuhan industri baja di berbagai daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara terus didorong untuk memenuhi permintaan produk besi baja dari luar negeri, terutama China, dan peningkatan produksi domestik untuk produk ferronikel.

Program strategis yang mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto industri pengolahan antara lain (1) pemberlakuan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, (2) insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah sektor otomotif, (3) peningkatan penggunaan produk dalam negeri, (4) peningkatan jumlah standar nasional Indonesia industri, (5) program making Indonesia 4.0, (6) pengembangan sekolah menengah kejuruan link and match industri, (7) sertifikasi tenaga kerja industri, serta (8) program harga gas bumi tertentu. Penyediaan lapangan kerja per tahun berhasil ditingkatkan kembali setelah penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019. Pencapaian ini didorong melalui program bantuan berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019, stimulus ekonomi, kartu pra-kerja, pembukaan kembali sektor-sektor ekonomi secara bertahap dalam sektorsektor padat karya, dan penyelenggaraan pelatihan kerja dan uji kompetensi.

A.3. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, berkat upaya pemerintah yang terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial hingga graduasi bantuan sosial. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, serta meminimalisasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh berbagai krisis.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, upaya ini menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia secara bertahap. Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap modal usaha yang lebih mudah dan terjangkau, sebagai kunci dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup berbagai inisiatif seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan, serta kredit usaha rakyat yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu, program desa wisata dan produk unggulan desa mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur dasar yang merata juga menjadi prasyarat penting untuk mendukung pengurangan kemiskinan, dengan fokus pada pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, serta peningkatan akses listrik di daerah terpencil,

Tingkat kemiskinan meningkat pada tahun 2020 akibat kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun demikian, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial maka tingkat kemiskinan dapat kembali menurun hingga tahun 2023.

Program perlindungan sosial yang terintegrasi menjadi landasan utama dalam upaya pengurangan kemiskinan, mencakup program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, serta bantuan sosial tunai. Selain itu, inovasi perlindungan sosial adaptif dirancang untuk menghadapi berbagai risiko dan krisis, seperti Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang melindungi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan perluasan cakupan jaminan kesehatan nasional serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Registrasi sosial ekonomi menjadi dasar penting untuk pemutakhiran dan pengelolaan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi memanfaatkan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial dari berbagai sumber untuk mempermudah identifikasi dan penyaluran bantuan kepada yang berhak.

A.4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 73,55 (berdasarkan proyeksi sensus 2010) atau 74,39 (berdasarkan proyeksi sensus 2020), serta berbagai pencapaian positif lainnya yang telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses pendidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan pencapaian pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pencapaian pada bidang kesehatan di antaranya (1) cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, (2) penurunan stunting dan wasting pada balita, (3) pemenuhan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (4) peningkatan kualitas rumah sakit dan kuantitas tenaga kesehatan, serta (5) peningkatan kapasitas obat dan makanan memenuhi syarat. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat pada tahun 2023, meski sempat turun pada 2020–2021 akibat pandemi Corona Virus Disease 2019.

Pencapaian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional didorong dengan adanya intervensi dari pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (pendek dan sangat pendek) berhasil diturunkan dari tahun ke tahun. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai salah satu regulasi pemerintah dalam mendorong percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif. Provinsi Bali dan Papua merupakan provinsi dengan capaian rata-rata lama sekolah meningkat cukup signifikan selama tahun 2019 hingga 2023. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki capaian tertinggi, sedangkan daerah yang perlu didorong dalam upaya percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan antara lain Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

A.5. Pembangunan Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan. Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup provinsi tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tertinggi berada pada Provinsi Papua Barat, Papua, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, sedangkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang perlu dioptimalkan berada pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kualitas lingkungan hidup salah satunya dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi suatu daerah yang sangat bergantung pada sektor industri pengolahan, pertambangan, dan jasa.

A.6. Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Lapangan Kerja

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi. Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman,

pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan Peningkatan ekosistem digital.

A.7. Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi (*basic needs*) dan kesejahteraan masyarakat (*people welfare*), karena hal tersebut akan ikut menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Letak geografis dan luas wilayah Indonesia menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk sumber pangan yang dihasilkan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga ikut andil mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas pangan yang akan di konsumsi.

Secara umum potensi sumber pangan yang dimiliki Indonesia sebagai pilihan konsumsi masyarakat terbilang cukup banyak, yaitu ada 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah-rempahan dan bumbu-bumbuan, 40 jenis bahan minuman serta 1.260 jenis tanaman obat. Hal ini membuktikan bahwa bangsa kita sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya atau biasa disebut keanekaragaman hayati mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme serta ekosistem dengan proses ekologi dari bentuk kehidupan yang merupakan bagiannya.

Akibat belum maksimalnya pengelolaan hasil komoditas pangan menyebabkan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini dirasakan masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun setiap tahunnya angka produktivitas padi Indonesia selalu ada peningkatan antara 1-3 persen atau selama 30 tahun terakhir produksi panen padi telah meningkat dua kali lipat, bahkan untuk produksi jagung bisa meningkat sampai empat kali lipat. Sehingga pencapaian prestasi tersebut masih dirasakan belum signifikan, mengingat berdasarkan hitungan angka yang dihasilkan dari impor beberapa komoditas bahan pangan yang masuk ke Indonesia, tercatat cukup tinggi angka peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bangsa kita masih mengalami permasalahan di sektor ketahanan pangan.

B. Isu Regional Sulawesi

Isu mengenai pembangunan kawasan Kepulauan Sulawesi menjadi salah satu acuan penting bagi pengembangan wilayah Kabupaten Morowali. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40 persen (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional. Dalam dokumen RPJPN Tahun 2025-2029 juga memuat skenario rencana pembangunan wilayah Sulawesi. Arah kebijakan RPJMN untuk wilayah Sulawesi adalah:

➤ **Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis Sumberdaya Alam**

Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berfokus pada Pengembangan Industri Hilirisasi Mineral dan Lumbung Pangan Nasional.

Dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 juga menjabarkan arahan kebijakan untuk Wilayah Sulawesi, dimana Wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 7,0 persen pada tahun 2022 dan diproyeksikan menjadi 7,7 persen pada tahun 2029. Potensi peningkatan kontribusi tersebut didukung posisi geografis Sulawesi yang berada di antara 2 (dua) ALKI serta keuntungan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara, serta beragamnya sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata.



Gambar 2.80
Prioritas Pengembangan Regional Wilayah Sulawesi

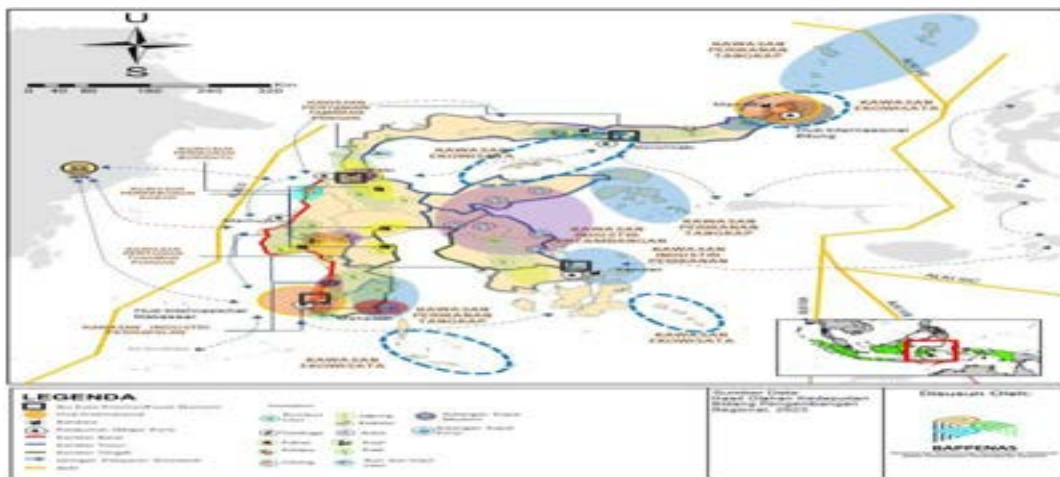
No	Provinsi	Tema
1	Sulawesi Utara	Gerbang perdagangan Asia Timur dan aAsifik, serta Pusat Pengolahan Hasil Perikanan dan Destinasi Ekowisata
2	Sulawesi Tengah	Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan
3	Sulawesi Selatan	Sentra Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Perikanan dan Rumput Laut
4	Sulawesi Tenggara	Sentra Pengolahan hasil pertambangan, Pertanian dan Destinasi Pariwisata Bahari
5	Gorontalo	Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan
6	Sulawesi Barat	Sentra Pengolahan Hasil Perkebunan

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai “Penunjang Ekonomi IKN berbasis SDA” secara khusus kedudukan Provinsi Sulawesi Tengah berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral pada Kawasan Industri Morowali-Morowali Utara, dan lumbung pangan nasional. Untuk itu dibangun konektivitas antarwilayah yang menjadi kunci rantai nilai domestik (*Domestic Value Chain*), diperkuat dengan *Global Value Chain* melalui skema kerja sama regional dan Peran Perguruan Tinggi (Pentahelix). Ke depannya pertumbuhan tinggi daerah akan lebih diimbangi dengan upaya-upaya yang inklusif dan berkelanjutan melalui perkuatan kebijakan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Berdasarkan arah pembangunan tersebut, pembangunan di Wilayah Sulawesi mencakup 5 (lima) prioritas:

1. pembangunan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi.
2. pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pertambangan, kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan kakao, kelapa, dan kopi.
3. pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi *hub* dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan III, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital. *Kelima*, peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana serta

- penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.
4. perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi, khususnya di kawasan perbatasan.
5. peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.

Rincian arah kebijakan yang berfokus kepada kelima prioritas di atas adalah sebagai berikut.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 2.81

Tema Pembangunan dan Arah kebijakan Wilayah Sulawesi dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 khususnya Morowali sebagai Kawasan Industri (KI) Prioritas Nasional



➤ **Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah**

Tabel. 2. 84
Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Aspek Pengembangan	Lokasi Prioritas
1	Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali	Kabupaten Morowali
2	Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara (Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral)	Kabupaten Morowali dan Morowali Utara
3	Kawasan Hilirisasi Gas Bumi Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai
4	Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Sulawesi Tengah	Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, Parigi Moutong, Buol, dan Tolitoli
5	Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT)	Kabupaten Parigi Moutong,, Donggala, Morowali, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan
6	Kawasan Hilirisasi Rumput Laut Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan
7.	Kawasan Perdesaan Prioritas	Kabupaten Morowali
8	Kawasan Perbatasan Prioritas	Kec. Paleleh Barat, Kec Gadung, Kec. Bokat, Kec Biau, Kec. Keramat Kab Buol Kec. Tolitoli Utara, Kec. Dakopamean dan Kec Dampal Utara Kab Tolitoli
9	Kawasan Transmigrasi	KT. Tampolore Kab Poso KT Bungku Kab Morowali KT Palolo Kab Sigi
10	Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah	Taman Nasional Lore Lindu Kab Sigi Taman Nasional Kepulauan Togean Kab Tojo Una-Una Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Tolitoli
11	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu	Kota Palu

Kabupaten Morowali bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena wilayahnya menjadi pusat pertambangan industri dan pengolahan biji nikel. Kabupaten Morowali memiliki tambang nikel salah satu terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki pelabuhan laut yang cukup besar, sehingga memudahkan proses ekspor-impor barang. Dalam pembangunan nasional, Kabupaten Morowali diharapkan dapat menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kabupaten Morowali merupakan Kawasan Peruntukan Industri khususnya pada Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali; Kawasan Industri di Kabupaten Morowali. Pemerintah pusat juga telah menetapkan beberapa proyek strategis nasional di provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali yang berkaitan dengan pengembangan industri hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi. Salah satunya adalah proyek penambangan dan pengolahan nikel berbasis rendah karbon dan terintegrasi yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia dan IMIP.

Di samping itu Kabupaten Morowali juga memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikembangkan seperti **pulau/Kecamatan** Sembori yang belum dikembangkan secara baik sebagai suatu Kawasan Pariwisata Nasional.

2.3.2.3. Isu Provinsi Sulawesi Tengah

Isu strategis Sulawesi Tengah diperlukan sekali sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat top down tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali dengan Propinsi Sulawesi Tengah. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktifitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah.

Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sumber dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Terdapat isu-isu Strategis di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a. Sumberdaya Manusia

Dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia maka diperlukan Transformasi Sosial yang dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing.

Namun demikian, masih terdapat tantangan pada masing-masing bidang pembangunan.

- a.1. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness sistem kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa permasalahan bidang kesehatan yang perlu ditangani secara ekstra yakni Angka Kematian Ibu yang masih tinggi (264/100.000 kelahiran), stunting masih tinggi 27,2%, prevalensi obesitas, kasus TBC, ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, serta kualitas rumah sakit dan puskesmas yang perlu ditingkatkan.
- a.2. Sementara pada bidang pendidikan masih menghadapi tantangan di antaranya, belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah antara lain disebabkan oleh saranaprasarana pendidikan yang belum memadai, dan keterbatasan guru berkualitas yang belum terdistribusi secara merata. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global juga masih rendah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang seperti: akses pendidikan belum merata, kualitas pendidikan masih rendah, PTK bersertifikat masih kurang dan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Perguruan Tinggi.
- a.3. Adapun perlindungan sosial berfokus untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, risiko bencana alam dan non alam, perubahan iklim, transisi besar lainnya, terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum

meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, perempuan dan perlindungan anak serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

a.4.Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terdapat lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) adalah pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak. Upaya yang tengah dilakukan Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sementara itu, pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Bencana alam gempa bumi dengan kekuatan 7,4 SR disusul tsunami dan likuefaksi yang terjadi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada tanggal 28 September 2018, meninggalkan penderitaan dan trauma mendalam yang berkepanjangan bagi masyarakat setempat, khususnya pada perempuan dan anak. Berbagai masalah sosialpun bermunculan seperti meningkatnya kasus perkawinan anak, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pelecehan dan kekerasan seksual, perempuan rentan terserang penyakit reproduksi, terganggunya hak Pendidikan anak, serta hak perempuan terkait sanitasi yang belum terpisah dengan laki-laki.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan kasus anak sebanyak 246 kasus yang dihitung dari Januari hingga Oktober 2019. Dari 246 kasus tersebut, sebanyak 82 kasus atau sebesar 9,7 persen adalah kasus perkawinan anak di bawah umur. Pada awal Tahun 2019, jumlah perkawinan anak masih relatif kecil karena beberapa perkawinan dilaksanakan “di bawah tangan” sehingga belum semuanya terungkap. Akan tetapi pada Bulan Agustus hingga Oktober 2019 jumlah perkawinan anak meningkat disebabkan karena permasalahan ekonomi dan lingkungan. Selain perkawinan anak, kasus lain yang dialami para

penyintas di hunian sementara (huntara) adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah kasus KDRT pasca bencana selama satu tahun, terhitung sejak Oktober Tahun 2018 hingga Oktober 2019 sebanyak 76 kasus. Jenis kasus yang terjadi berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik seperti perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yaitu penelantaran anak dan istri.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulteng selama periode 2016-2020 mengalami penurunan dari 91,97 poin pada 2016 menjadi 91,87 poin pada 2020. Demikian pula pada periode 2019-2020 menurun dari 92,01 poin menjadi 91,87 poin. Secara historis, penurunan IPG dimulai dari Tahun 2014 yakni sebesar 92,69 poin menjadi 92,25 poin atau terjadi penurunan terbesar yakni 0,44 poin pada periode tersebut. Lalu pada periode 2015-2016 menurun lagi menjadi 91,91 poin atau menurun 0,34 poin, lalu menurun lagi menjadi 91,66 poin atau mengalami penurunan sebesar 0,25 poin pada periode 2016-2017, sebelum meningkat lagi sebesar 0,42 poin menjadi 92,08 pada 2018. Ada tiga dimensi komponen pembentuk IPG yakni UHH laki-laki dan perempuan, HLS laki-laki dan perempuan, RLS Perempuan, dan Pengeluaran Perkapita Tahunan (*Purchasing Power Parity*). Pada Tahun 2020, komponen UHH, UHH laki-laki lebih singkat daripada perempuan masing-masing 66,77 tahun 70,72 tahun. Pada komponen HLS, laki-laki lebih singkat daripada perempuan masing-masing 13,07 tahun dan 13,51 tahun. Sebaliknya, pada komponen RLS, RLS laki-laki lebih lama daripada perempuan yakni masing-masing 9,07 tahun dan 8,58 tahun. Hal ini berarti kecenderungan perempuan bersekolah justru dikorbankan demi Pendidikan laki-laki di dalam setiap keluarga.

b. Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah jangka menengah dalam rangka keluar dari Provinsi pendapatan Tinggi dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas akan menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural. Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peranannya cenderung mengalami penurunan. Sulawesi Tengah memiliki beberapa komoditas unggulan daerah dari sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan seperti: padi, jagung, kakao, kelapa dalam, sapi potong, rotan, getah pinus, nikel, gas alam, ikan tuna dan rumput laut. Sampai saat ini, tingkat produktivitas sektor unggulan daerah masih berada dalam kategori rendah karena nilai tambah produk yang belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah, meskipun persentase tenaga kerja dan profesi di sektor petani, pekebun, penambang dan nelayan memiliki persentase terbesar dibandingkan

profesi lainnya. Jika dilihat dari Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut Lapangan Usaha (persen) pada tahun 2023, maka lapangan usaha pertanian, perikanan dan kelautan memberikan andil yang cukup besar yaitu 14,78% yang menempati posisi kedua dari sektor pertambangan dan penggalan sebesar 15,59% (BPS Sulteng, 2024).

Tingkat produktivitas sektor unggulan yang masih minim disebabkan oleh proporsi tenaga kerja yang besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang rendah sehingga akses petani/pekebun/nelayan terhadap kemampuan pengelolaan dan aksesibilitas terhadap faktor produksi terutama lahan, peralatan dan modal adalah sangat minim yang selanjutnya tingkat pengembalian dari keuntungan usaha akan menjadi rendah dan cenderung penduduk pada profesi sektor-sektor unggulan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2–3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya. Selain itu, biaya pengolahan produk pangan lokal juga cukup tinggi sehingga menyebabkan harga jual produk pangan lokal kurang kompetitif dibandingkan beras dan terigu. Selain itu, konsumsi juga dipengaruhi oleh selera dan preferensi masyarakat terhadap makanan. Preferensi masyarakat terhadap pangan lokal sebagai pangan pokok ternyata tidak setara dengan beras atau terigu. Walaupun di beberapa kabupaten seperti Donggala, Sigi, Tojo Una-Una, Buol dan Morowali, diversifikasi pangan antara beras, jagung, ubi kayu dan sagu berjalan cukup baik, sehingga tetap dipertahankan, dan jika perlu ditingkatkan seperti diperlukan upaya pengolahan untuk memperpanjang masa simpan dengan tetap menjaga nilai gizi.



Subsektor perkebunan memainkan peran yang cukup penting dalam ekonomi nasional. Sekitar seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian disumbang oleh subsektor perkebunan. Subsektor ini juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemasukan devisa negara melalui ekspor produk-produk hasil pertanian. Hingga kini, subsektor perkebunan masih dihadapkan pada persoalan struktural seperti relatif rendahnya produktivitas tanaman perkebunan yang diusahakan perkebunan rakyat dibandingkan dengan perkebunan besar, baik yang dikelola perusahaan negara maupun swasta. Hal ini terlihat jelas pada komoditas kopi, kakao, dan tebu yang merupakan komoditas perkebunan strategis yang sebagian besar dibudidayakan oleh perkebunan rakyat. Selain itu, ketimpangan produktivitas lahan dan tenaga kerja yang cukup lebar juga terjadi antar wilayah.

Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan ekspor pertanian hingga tiga kali lipat melalui program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks). Khusus untuk subsektor perkebunan, Kementan akan fokus pada komoditas strategis perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, lada, pala, dan vanili, serta dengan tetap dengan komoditas andalan ekspor yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, teh, dan tembakau. Dalam pelaksanaannya Kementan tidak berkerja sendiri, Kementan akan merangkul berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, sehingga diharapkan nantinya terbangun Korporasi petani. Petani dan pekebun harus berada dan menjadi mitra Swasta dan BUMN, sehingga petani terangkat pendapatan dan kesejahteraannya.

Daerah penghasil kakao Indonesia adalah Sulawesi Selatan 184.000 ton atau sebesar 28,26 persen; Sulawesi Tengah 137.000 ton atau sebesar 21,04 persen; Sulawesi Tenggara 111.000 ton atau sebesar 17,05 persen; Sumatera Utara 51.000 ton atau sebesar 7,85 persen; Kalimantan Timur 25.000 ton atau sebesar 3,84 persen; Lampung 21.000 ton atau sebesar 3,23 persen dan daerah lainnya 122.000 ton atau sebesar 18,74 persen. Pemerintah menetapkan empat provinsi di Sulawesi sebagai produsen utama kakao nasional yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Keempat provinsi itu sudah sejak lama bergelut dengan komoditas kakao sehingga lebih potensial dikembangkan sebagai sentra pengembangan kakao berikut industri pengolahannya. Selain itu juga didukung dengan kondisi alam beriklim tropis yang dibutuhkan bagi tanaman budidaya kakao.

Pada 2020, keempat provinsi tersebut masih tercatat sebagai provinsi penghasil kakao tertinggi yakni Sulawesi Tengah sebanyak 127,3 ribu ton, Sulawesi Tenggara sebanyak 114,9 ribu ton, Sulawesi Selatan sebanyak 103,5 ribu ton dan Sulawesi Barat sebanyak 71,3 ribu ton. Komoditi kakao menjadi primadona petani di Provinsi Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Sigi. Lima desa yang telah ditetapkan sebagai sentra pengembangan komoditas perkebunan khususnya kakao organik adalah Desa Berdikari, Desa Karunia, Desa Bahagia, Desa Sintuwu dan Desa Petimbe.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (*replanting*) sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton/ha. *Replanting* dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), sehingga terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia dengan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). ISPO menegaskan komitmen Indonesia dalam penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit. Salah satu data global yang digunakan untuk men-judge Indonesia adalah data yang baru-baru ini dirilis Global Forest Watch (GFW) yang merupakan data dari *global land analysis and discovery, University of Maryland* menyebutkan Indonesia berada pada posisi 10 teratas dengan laju deforestasi tertinggi. Dengan menggunakan informasi tutupan lahan, GFW mengkategorikan hutan primer sebagai area dengan kerapatan tutupan pohon minimum 30 persen. Konversi lahan perkebunan sawit di Indonesia bermula dari penanaman kelapa sawit pada lahan yang terlebih dahulu terdegradasi akibat kegiatan industri lain seperti kegiatan penebangan dan karet. Salah satu penyebab dari tingginya angka deforestasi tersebut dipengaruhi pemberian izin baik perkebunan maupun pertambangan. Terdapat 54 perusahaan yang mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) dan izin lokasi (Inlok) dengan luas total mencapai 713.217 hektare, tersebar di Kabupaten Donggala, Buol, Morowali, Banggai, Tojo Unauna, Tolitoli dan Morowali Utara.

Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Sulteng berada pada tingkat terendah di Pulau Sulawesi dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 75,10 poin atau berada pada urutan ke 17 dari 34 provinsi di Indonesia. Sulteng memerlukan kebijakan pemanfaatan secara optimal ketersediaan lahan pangan pertanian dan berkelanjutan (LP2B) dengan upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat berupa pembangunan Kawasan Pertanian Food Estate yang terintegrasi. Pemerintah Provinsi Sulteng menyiapkan lahan pertanian dalam Kawasan LP2B yang produktif untuk dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat petani dan swasta dengan mekanisme pola kerja yang saling menguntungkan.

Terkait kebijakan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulteng selama pandemi virus corona dinilainya sudah sinkron, seperti memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan pertanian ke petani tetap lancar dan tidak terganggu meski berlaku kebijakan pembatasan akses keluar masuk antar wilayah. Adapun isu strategis dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tengah menyangkut:

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
2. Ketersediaan Pangan;
3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan;
4. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
5. Penanganan kerawanan pangan/Cadangan Pangan Daerah.

c. Daya Saing Sektor Kelautan dan Perikanan

Sulawesi Tengah merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi penangkapan cukup besar karena menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki empat wilayah pengelola perikanan (WPP) yakni WPP NRI-713 Selat Makasar di sebelah barat, WPP NRI-716 Laut Sulawesi di sebelah Utara, WPP NRI-714 Teluk Tolo, dan Laut Banda sebelah Selatan, dan WPP NRI-715 Teluk Tomini Laut Maluku di sebelah timur sehingga memiliki garis pantai yang panjang. Luas wilayah perairan laut Sulawesi Tengah diperkirakan 193.923,75 Km² terbagi atas 3 kelompok wilayah pengelolaan perikanan yang diistilahkan Cluster, yakni Cluster I (Selat Makasar/Laut Sulawesi meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Tolitoli dan Buol), Cluster II (Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una dan sebagian Banggai), dan Cluster III (Teluk Tolo meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Morowali/Morowali Utara). Mengingat jumlah penduduk dan diikuti kebutuhan pangan ikan yang semakin meningkat, upaya untuk menumbuhkan kegiatan usaha perikanan guna peningkatan

produktivitas usaha perikanan, pendapatan nelayan dan pembudidaya, kualitas gizi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta pengurangan angka kemiskinan di kawasan pesisir masih memiliki peluang yang cukup besar. Selanjutnya, dengan keberadaan wilayah perairan tersebut, maka potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di provinsi ini sangat besar baik potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun bioteknologi kelautan. Selain itu, investasi Pemerintah di sektor kelautan perikanan dalam 10 tahun terakhir cukup signifikan mencapai Rp 200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan sarana, prasarana serta fasilitas untuk nelayan, belum termasuk pembangunan kapal-kapal penangkap ikan bertonase 30 GT. Namun demikian, para nelayan yang menangkap ikan di laut Sulteng cenderung menjual hasil tangkapannya ke luar daerah.

d. Daya Saing Kepariwisata

Sulawesi Tengah memiliki keanekaragaman wisata yang meliputi wisata Bahari, wisata alam serta wisata budaya yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Beberapa potensi wisata berbasis kealamiah sumberdaya alam laut seperti Kepulauan Togean, Kepulauan Sambori, Banggai Kepulauan (Paisupok), Biodiversitas Lore Lindu, dan wisata air terjun di beberapa kabupaten. Isu strategis kedepannya yaitu bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui nilai tambah pariwisata yang saling terkait satu sama lainnya. Kondisi saat ini, pariwisata yang ditawarkan belum memiliki hubungan obyek wisata yang saling terkait dan mendukung antara satu dengan lainnya, misalnya wisata Bahari yang ditawarkan belum dilengkapi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti: bandara dan pelabuhan yang memadai, hotel dan cottage, restaurant dan kuliner lokal serta aksesibilitas jalan yang memadai.

Kondisi obyek wisata yang tidak berdiri sendiri atau wisata yang dapat menggerakkan pusat-pusat perekonomian lainnya maka akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya. Sudah saatnya, pariwisata Sulawesi Tengah mempromosikan paket wisata bernilai tambah. Sulawesi Tengah tidak hanya sekedar melakukan strategi business as usual atau hanya menjadi trend followers tetapi keanekaragaman budaya, bahasa, kuliner, dan alam yang dimiliki dapat mengantarkan Sulawesi Tengah menjadi pusat pariwisata nasional bahkan dunia.

Kedepannya isu pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tengah harus diikuti dengan kegiatan mempertahankan kualitas lingkungan (carrying capacity), meningkatkan kualitas tata kelola destinasi, meningkatkan pelayanan pariwisata yang prima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, membuka aksesibilitas udara, darat, dan

laut, membuka peluang investasi sektor pariwisata, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya di daerah-daerah wisata.

Upaya peningkatan pariwisata yang berkualitas ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah yang dapat diterima oleh Sulawesi Tengah atau masyarakat setempat, peningkatan nilai devisa melalui peningkatan lama tinggal dan belanja para wisatawan, peningkatan kualitas destinasi, kesiapan industri dan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Penerimaan nilai tambah dipersiapkan dengan peningkatan daya saing dan membangun ketahanan sektor pariwisata, termasuk melalui diversifikasi aktivitas ekonomi dalam rantai pasok pariwisata, perbaikan lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif dan berkenambungan serta pembangunan citra pariwisata Sulawesi Tengah yang berkualitas.

e. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Sulteng

Reformasi Birokrasi konteks daerah Sulawesi Tengah tetap mengacu pada RoadMap Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi yakni bertumpu pada masalah- masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masalah- masalah mendasar yakni: Manajemen Perubahan Birokrasi, Organisasi yang gemuk, Peraturan Perundang- Undangan *overlapping* (tumpang tindih), SDM Aparatur tidak Kompeten, Tumpang Tindih Kewenangan, Pelayanan Publik masih buruk, Pola pikir *Rule-based* dan Budaya kinerja belum terbangun.

Namun dalam konteks Daerah Sulawesi Tengah disesuaikan dengan kondisi karakter Daerah, situasi Sosial politik, budaya dan kondisi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu Fokus Sentral Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah: Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Perampangan- Pengabungan OPD sesuai Tugas dan Fungsi dan Penggunaan Teknologi Informasi serta *Big Data* dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan.

Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah mengantisipasi juga Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur dengan mempersiapkan Birokrasi Pemerintah Sulawesi Tengah yang **Responsif** perubahan-perubahan dan mampu menjadi patner seimbang secara kualitatif dengan kebutuhan Ibukota Negara Baru.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas diarahkan pada peningkatan tata kelola ASN dengan meningkatkan kualitas SDM ASN serta menerapkan system merit dan manajemen talenta ASN. Sementara

itu dilakukan peningkatan kualitas layanan publik terpadu (fisik dan non fisik) yang inklusif berbasis digital. Pemerintahan yang efektif dan efisien akan dilaksanakan berbasis digital dan inovatif yang didukung oleh penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat Daerah, peningkatan Integritas ASN, penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk kemandirian fiskal berbasis elektronik serta penataan kelembagaan daerah menuju organisasi pemerintahan yang modern, adaptif dan profesional. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya penguatan budaya kepatuhan hukum guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peningkatan Integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil, pemberdayaan masyarakat sipil untuk terwujudnya Open Government Partnership. Stabilitas ekonomi daerah bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan, serta stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Serta meningkatkan investasi di provinsi Sulawesi Tengah.

f. Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan data BPS (2021), Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 12,30 persen, menurun sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 389,71 ribu orang, meningkat masing-masing sebesar 1,36 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022, dan 8,50 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2021.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2022 sebesar 9,03 persen, naik menjadi 9,13 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2022 sebesar 13,87 persen, turun menjadi 13,79 persen pada September 2022. Per Maret 2022, jumlah penduduk miskin pada September 2022 di daerah perkotaan naik sebanyak 2,67 ribu orang (dari 90,26 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 92,93 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebanyak 1,32 ribu orang (dari 298,09 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 296,77 ribu orang pada September 2022).

Sementara Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp. 557.183,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 423.390,- (75,99 persen), dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 133.793,- (24,01 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Tengah memiliki

5,11 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.847.205,-/rumah tangga miskin/bulan Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, telur ayam ras, cabe rawit, mie instan, dan bawang merah. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

g. Dilema Industrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup

Beberapa isu lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;
2. Kerusakan hutan kawasan dari hutan *mangrove* di pesisir akibat kegiatan pertambangan dan pemukiman, pembalakan liar, (Illegal Logging), alih fungsi lahan dan pembukaan jalan oleh masyarakat, pemukiman penduduk di dalam kawasan;
3. Terjadinya kerusakan lahan di kawasan pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang berakibat sering terjadi banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan/lahan pada musim kemarau serta hilangnya flora dan fauna tertentu yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat alih fungsi lahan, pembukaan lahan dan *illegal logging*;
4. Menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung (termasuk debit air) beberapa sungai yang disebabkan oleh semakin berkurangnya daerah tangkapan air di hulu dan penggunaan air oleh kegiatan pertambangan dan industri logam dasar;
5. Sedimentasi yang tinggi di muara sungai dan tingginya aliran permukaan akibat semakin berkurang hutan dan masuk ke wilayah perairan laut yang menyebabkan terjadi kekeruhan sehingga mengganggu pertumbuhan terumbu karang, rumput laut dan ikan;
6. Kerusakan terumbu karang yang tidak terkontrol pada wilayah kepulauan, yang disebabkan oleh penggunaan bahan peledak, potasium dan bius dalam penangkapan ikan, serta kurangnya pengawasan oleh masyarakat dan aparat berwajib;
7. Rendahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggalian, kerusakan bentang alam dan bentang lahan, eksploitasi yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan, menurunnya kualitas tanah dan air, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca, meningkatnya debu,

meningkatnya tingkat sedimentasi, bertambahnya limbah, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi hutan dan lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terganggunya pasokan air bersih, terganggunya sistem air tanah, peningkatan alih fungsi lahan, memicu terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir, dan sebagainya.

8. Meningkatnya kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kondisi lingkungan hidup juga terus memburuk seiring dengan terus di bukanya lahan-lahan baru untuk pembangunan kelapa sawit dan pertambangan. Krisis pangan dan air juga melanda di beberapa daerah belakangan ini akibat kondisi lingkungan yang terus memburuk. Kondisi ini tentu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencapai dua digit itu.
9. Sampah masih menjadi permasalahan serius di ibu kota kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Tengah. Selama Tahun 2020 saja, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu perharinya mencatat sampah dihasilkan kurang lebih sebanyak 228 ton atau 228 meter kubik. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, volume sampah selalu mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2019 hanya menghasilkan 117 ton sampah perharinya. Angka itu didapat dari total sampah yang diangkut 38 armada dalam sehari. Data itu menurutnya menunjukkan bahwa ada satu sistem persampahan yang harus dibenahi yakni dari pemukiman warga sebagai tempat produsen sampah. Terlebih di Tahun 2019, tiap hari 30 persen sampah merupakan sampah plastik yang susah terurai. Belum lagi perilaku buruk masyarakat diperparah dengan kehidupan masyarakat yang cenderung konsumtif. Permasalahan lain adalah kurangnya inisiasi pemerintah untuk menambah sumberdaya/fasilitas Armada angkutan sampah yang dimiliki DLH tidak sebanding dengan cakupan wilayah yang harus mengangkut sampah di total 245 TPS. Kota Palu sudah seharusnya terus berupaya melakukan perubahan seperti daerah atau perkotaan lain di Indonesia. Dicontohkan di Kota Surabaya yang sudah mendorong badan khusus yang juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan sampah. Inovasi sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan sampah. Jangan hanya memakai metode lama sistem kumpul-angkut-buang. Apalagi masyarakat sangat jarang yang mengikuti anjuran program Reduce, Reuse, Recycle (3R).
10. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor sk.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tercatat seluas 264.874 Ha lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan di Sulawesi Tengah dalam kategori kritis. Kondisi lahan-lahan

yang kritis itu sangat berpengaruh terhadap daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan ancaman bencana hidrometeorologi di masa yang akan datang jika tidak secepatnya diatasi. Penanganan lahan kritis harus dilakukan secara komprehensif dengan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis dan teknik pembibitan serta mengaktifkan semua unsur/elemen dengan melibatkan masyarakat. Terjadinya lahan kritis tersebut terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akibat meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban dan juga kebutuhan tambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi. Pada masing-masing kebutuhan ini ada implikasi pada lingkungan. Kebutuhan lahan urban dan lahan pertanian akan meminta konversi lahan hutan. Semakin lama daerah-daerah resapan air makin berkurang, akibatnya terjadi krisis air tanah. Di sisi lain di beberapa kawasan berkemiringan cukup tajam menjadi rawan longsor, karena pepohonan yang tadinya menyangga sistem kekuatan tanah semakin berkurang. Kemudian karena resapan air ke tanah berkurang, terjadilah *over-flow* pada air permukaan. Ketika kondisi ini beresonansi dengan sistem drainase yang buruk di perkotaan terjadilah banjir. Banjir akan membawa berbagai penderitaan.

Permasalahan utama industrialisasi berbasis tambang juga terkait langsung dengan mata pencaharian yang “tergusur” terutama lingkungan pertanian. Hadirnya perusahaan tambang ini kemudian sering menjadi topik utama dampak pertambangan. Misalnya, 1) petani yang kini beralih profesi sebagai pekerja (buruh) tambang, hal ini terjadi karena problem kesuburan tanah yang berdampak pada kurangnya hasil pertanian. Begitu pula, terdapat persoalan minimnya perhatian pemerintah dalam hal peningkatan mutu pertanian seperti dengan pembuatan akses jalan tani, irigasi penunjang persawahan serta introduksi teknologi pertanian. Harga pasca panen juga menjadi bagian problem mendasar. Setelah musim panen tiba, harga turun, namun ketika musim tanam, penawaran harga naik. Sehingga dengan hasil panen rendah dan harga hasil panen murah, petani terus mengalami kekurangan. Topik lain yang menjadi perbincangan adalah 2) petani yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pekerja di perusahaan tambang; 3) upah yang tidak layak bagi para pekerja; 4) perekrutan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia (lokal), dll. Selain apa yang telah disebutkan di atas, ada topik reklamasi pasca tambang yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Reklamasi pasca tambang pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki kondisi tanah setelah aktivitas pertambangan selesai. Reklamasi pasca

tambang penting menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak. Selain hal ini sudah pasti merusak lingkungan, ada hal-hal penting lainnya yang perlu dilihat lebih dalam. Misalnya, areal-areal bekas eksploitasi ketika kandungan mineralnya telah habis dikeruk, harus segera dilakukan kegiatan reklamasi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang berdampak pada bencana lingkungan, banjir dan longsor yang membahayakan kehidupan masyarakat di lingkaran tambang. Hadirnya perusahaan tambang di Kabupaten Morowali misalnya mungkin di satu sisi berdampak pada meningkatnya PAD dari sektor sumber daya alam mineral.

Namun, di sisi lain juga perlu dilihat apakah kehadiran industri ekstraktif berbasis tambang ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang atau justru merugikan mereka. Sebelumnya, petani secara umum mengusahakan pertanian padi sawah basah, perkebunan merica dan pala. Setelah hadir dan beroperasinya perusahaan-perusahaan tambang, sebagian lahan yang tadinya merupakan sumber ekonomi petani kini telah menjadi areal eksploitasi perusahaan tambang. Hal ini terjadi karena sebelumnya petani (pemilik tanah) telah melakukan proses jual beli tanah dengan perusahaan tambang (ganti rugi lahan). Setelah petani kehilangan tanah dan mendapatkan harga ganti rugi lahan, hasilnya pun digunakan untuk membuat usaha-usaha kecil, misalnya pembangunan rumah kos-kosan, yang pada saat itu memang memenuhi kebutuhan tempat tinggal banyak para pekerja (buruh) tambang yang datang dari daerah lain. Selain itu, ada juga sebagian petani yang menggunakan hasil ganti rugi lahannya sebagai 'uang muka' pembelian kendaraan berupa mobil serta kendaraan roda dua (sepeda motor), bahkan ada yang sampai memiliki dua kendaraan mobil dengan status angsuran setiap bulan berjalan. Pasca kehilangan tanah dan tidak lagi mengusahakan pertanian, banyak petani yang kemudian terintegrasi sebagai pekerja (buruh) tambang. Singkatnya, kehidupan mereka menjadi bergantung pada perusahaan tambang. Dalam skala makro, rezim Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara mesti menjadi payung regulasi Pemerintah Provinsi Sulteng Bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM agar korporasi yang beroperasi di bidang pertambangan diharuskan melakukan divestasi atau melepas sahamnya hingga 51 persen kepada BUMN dan BUMD agar terjadi pemberdayaan BUMD sehingga pendapatan asli daerah meningkat



h. Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi

Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, dan Sigi, pada Jumat malam, 28 September 2018, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Betapa tidak gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkekuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dan prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.

Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama Kementerian/Lembaga terkait. Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m². Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut. Pasca gempa bumi 28 September 2018, maka pembangunan jangka Panjang yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Sulteng dan RPJMD Periode 2025-2029 nantinya wajib merujuk pada Indeks Risiko Bencana di Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP) Tahun 2020. Kejadian Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi pada tiga tahun yang lalu terjadi sekitar 28 km di Utara kabupaten Donggala atau 80 km di sebelah barat Kota Palu menghendaki perlunya memitigasi bencana. Provinsi Sulteng pada 2020 mempunyai

IRBi sebesar 144,96 poin termasuk kategori tinggi. Di Tahun 2016, IRBi Sulteng mencapai 150,25 poin, pada 2017 mencapai 147,43 poin, pada 2018 dan 2019 masing-masing IRBi Sulteng mencapai 146,39 poin dan 144,96 poin. Hal ini berarti IRBi Sulteng pada 2019 dan 2020 mempunyai nilai yang sama. Bencana yang mengancam Sulteng meliputi gempa, Tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, abrasi, gelombang ekstrim. Pada 2020, sembilan daerah di Sulteng masuk kategori IRBi tinggi yakni Kabupaten Morowali Utara 177,20 poin; Morowali 173,80 poin; Banggai Kepulauan 163,42 poin; Banggai 163,20 poin; Banggai Laut 163,20; Kota Palu 162,70 poin; Tolitoli 159,20 poin; Donggala 157,12 poin; dan Buol 149,60 poin. Sedangkan 4 (empat) daerah lainnya berada pada kategori IRBi sedang yakni Kabupaten Sigi 48,13 poin; Parigi Moutong 108,39 poin; Poso 121,14 poin; dan Kabupaten Tojo Una-Una 137,60 poin.

i. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Tahun ini ditargetkan dapat beroperasi delapan kawasan industri dan 10 kawasan industri lainnya masih tahap perencanaan terus dipacu agar dapat segera beroperasi. Berdasarkan catatan Kemenperin selama periode Tahun 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp 126,5 triliun. Investasi selama tiga tahun tersebut terdiri dari PMA sebesar Rp 103 triliun dan PMDN hingga Rp 23,5 triliun. Terdapat 3 (tiga) kawasan industri di Indonesia timur ditargetkan mulai beroperasi Tahun 2017. Ketiga kawasan industri tersebut adalah Konawe di Sulawesi Tenggara, Bitung di Sulawesi Utara, dan Palu di Sulawesi Tengah. Pada akhir Tahun 2020, Pemerintah menetapkan sebanyak 18 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) masuk dalam sektor kawasan proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan kawasan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang diterbitkan pada 17 November 2020. Perlu diketahui, Pemerintah telah menetapkan 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.809,7 triliun sebagai PSN. Salah satu kawasan industri dan KEK di Sulawesi Tengah adalah Kawasan Industri Morowali. Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang merupakan salah proyek kawasan industri strategis nasional yang diprioritaskan dalam program pengembangan basis industri logam dasar terus dipacu pembangunannya sebagai wujud implementasi arahan Pemerintah Pusat untuk



memfokuskan agenda pemerintah di Tahun 2017 pada pemerataan industri di luar Pulau Jawa yang berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, kawasan industri Morowali turut mendorong langkah pemerintah dalam program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Dalam waktu efektif sejak 2013 sampai dengan sekarang perkembangan industri di Morowali sangat pesat sekali.

Kawasan Industri berbasis nikel yang dikelola PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) di Kabupaten Morowali, merupakan kawasan tambang nikel terbesar di Indonesia. Selain itu, terdapat kawasan industri lainnya dalam proses konstruksi yaitu kawasan industri dikelola Transon Group/Transon Bumindo Resources di Desa Laroenae Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kawasan Industri dikelola PT. Stardust Estate Investment (SEI). Dengan fakta itu, peluang untuk menjadi kawasan industri berstatus obyek vital nasional terbuka lebar. Untuk pengembangan lebih optimal di Kawasan industri di Morowali dibutuhkan SDM yang memiliki keahlian. Ketersediaan SDM yang ahli adalah faktor penting dalam memacu pertumbuhan industri, selain melalui pengembangan teknologi dan peningkatan investasi. SDM tersebut dapat diperoleh dari dibangunnya Politeknik industri Morowali yang baru berjalan 1 tahun dengan jurusan Teknik perawatan mesin, teknik listrik dan teknik kimia /material. Diharapkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang meneruskan jenjang pendidikan ke Politeknik tersebut umumnya berasal dari lulusan SMA daerah setempat. Lulusan dari politeknik ini nantinya akan diserap oleh pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah perindustrian Morowali.

Pengembangan kawasan industri merupakan upaya untuk mendorong tumbuhnya industri nasional sekaligus upaya untuk penyebaran industri. Harapannya Pulau Jawa bukan satu-satunya pusat ekonomi. Sebaliknya, industri nasional dapat tersebar ke pulau- pulau lain selain Pulau Jawa. Dengan pembangunan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa, diharapkan peran wilayah di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri akan terus meningkat. Selain itu, menurut Kementerian Perindustrian, Kawasan industri Palu difokuskan pada pengolahan karet dan minyak astiri, Konawe untuk *smelter* nikel, dan Bitung untuk industri farmasi berbasis herbal. Kawasan industri tersebut memiliki lokasi yang strategis seperti Kota Palu yang memiliki pelabuhan sendiri. Meski demikian, pembangunan kawasan industri tersebut masih terkendala pembangunan infrastruktur. Terutama untuk kawasan industri Bitung dan Palu yang masih minim infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, ataupun air baku.

Dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun sebuah kawasan industri, dan untuk kawasan di luar Jawa, belum banyak yang berminat. Untuk itu, Pemerintah pun harus memberikan insentif bagi industri yang mau berinvestasi di kawasan, baik sebagai *tenant* ataupun infrastruktur pendukung. Dengan begitu, pengembangan kawasan industri dapat berjalan dan menarik lebih banyak investasi. Insentif yang diberikan pemerintah seperti pembebasan bea masuk atas impor mesin dan atau barang dan bahan keperluan industri, PPh penanaman modal, pengurangan PPh Badan dan pembebasan PPN atas impor. Insentif tersebut diharapkan dapat melancarkan pembangunan 14 kawasan industri di luar pulau Jawa. Besarnya insentif diberlakukan berdasarkan wilayah pembangunan, semakin ke timur insentifnya juga makin besar. Ke-14 kawasan industri yang tengah dikembangkan adalah Sei Mangkei (CPO & Karet), Kuala Tanjung (Alumina), Landak (Feronikel), Palu (Rotan), Bitung (Agro & Logistik), Buli, Haltim (Feronikel), Teluk Bintuni (Petrokimia), Tanggamus (Perkapalan), Ketapang (Alumina), Jorong (Feronikel), Batulicin (Feronikel), Bantaeng (Feronikel), Konawe (Feronikel), dan Morowali (Feronikel). Dari 14 ini, yang sudah beroperasi di Sei Mangkei, Bantaeng, dan Morowali. Untuk tiga tahun ke depan, juga akan dipercepat pembangunan kawasan industri Tanjung Buton, Dumai, Berau (Kalimantan Timur), Tanah Kuning (Kalimantan Utara), JIPE (Gresik), Kendal, dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Serang, Banten). Pembangunan kawasan-kawasan industri tersebut dilakukan dengan pendekatan Indonesia sentris dalam rangka mengurangi kesenjangan sekaligus membangun dari pinggiran.

Khusus untuk Kawasan industri Morowali pemerintah menargetkan kawasan industri ini mampu menarik investasi senilai Rp 78 triliun dan menciptakan tenaga kerja langsung sebanyak 20 ribu orang. Keberadaan industri di kawasan ini juga akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, melalui hilirisasi mineral. Kawasan ini akan difokuskan pada pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral logam dengan bahan dasar nikel. Penyerapan tenaga kerja yang dikelola PT. IMIP dapat direalisasikan apabila pabrik *stainless steel* berkapasitas 2 juta ton beroperasi. Kebutuhan tenaga kerja pelaksana di kawasan industri mencapai 11.257 orang dan tenaga kerja *level* supervisor sebanyak 1.577 orang. Pada tahap kedua 2017-2020 penambahan kebutuhan tenaga kerja pelaksana mencapai 10.800 orang dan tenaga kerja supervisor mencapai 1.620 orang.

j. Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki wilayah yang berupa daratan utama dan kepulauan. Paling tidak terdapat 4 kabupaten yang memiliki wilayah administratif pulau dan daratan. Gugusan pulau-pulau di

Kepulauan Banggai, Togean, Salabangka dan Kepulauan Menui yang secara administratif masing-masing merupakan wilayah pulau memiliki masalah dalam sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, transportasi, dan pelayanan pemerintahan lainnya sehingga mengalami kesenjangan yang sangat nyata dibandingkan dengan wilayah daratan Sulawesi Kabupaten Morowali. Kesenjangan dalam berbagai hal tersebut bermuara kepada kesenjangan kesejahteraan masyarakatnya. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi berakibat tingginya biaya transpor sehingga harga-harga bahan makanan, termasuk air minum yang pada banyak desa harus membeli air mineral yang justru didatangkan dari Kendari, barang-barang dan jasa kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan menjadi lebih mahal.

Demikian pula pada wilayah Kabupaten Banggai Laut, terutama di Kecamatan Bokan Kepulauan dan Bangkurung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di lain pihak, sumber pendapatan keluarga yang utama bertumpu pada usaha di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan sebagai nelayan dan budidaya rumput laut. Usaha perikanan pada umumnya masih dilaksanakan dengan peralatan sederhana dengan kapasitas yang sangat kecil yang hasilnya ditekan oleh biaya produksi/operasional yang tinggi dan harga jual hasil produksi yang rendah. Di gugusan Kepulauan Salabangka, usaha budidaya Rumput Laut yang sampai dengan Tahun 2012 masih merupakan sumber pendapatan yang cukup besar, terus mengalami penurunan luasan budidaya dan produksinya, satu sama lain ditengarai sebagai akibat dari rusaknya ekosistem perairan laut sekitar. Oleh karena itu, tidaklah aneh bila tingkat kemiskinan yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, APK dan APM yang rendah, derajat kesehatan masyarakat yang rendah berada di wilayah kepulauan ini. Kesenjangan taraf hidup masyarakat antar kedua wilayah ini (kepulauan dan daratan) menjadi isu strategis yang harus dijawab secara komprehensif, serius dan berkelanjutan.

k. Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri

Keberadaan kawasan industri dengan puluhan ribu pekerja sesungguhnya adalah sebuah potensi pasar yang besar bagi produk-produk lokal seperti bahan makanan, pakaian seragam pekerja, usaha pemondokan/kos-kosan, rumah makan, *cleaning service*, dan lain-lainnya. Dari sekian banyak dan besar peluang pasar tersebut sebagian sudah termanfaatkan yaitu jasa rumah makan/*warteg*, kos-kosan, toko/kios barang kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya dilakukan oleh pendatang secara tidak teratur. Ketidakteraturan ini menimbulkan

masalah baru berupa kemacetan arus lalu lintas, kesehatan lingkungan, dan keamanan. Di lain pihak, ketidakteraturan tersebut berakibat hilangnya potensi PAD bagi Pemerintah Daerah. Peluang lainnya seperti kebutuhan bahan makanan, pakaian seragam, *cleaning service* masih belum termanfaatkan. Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani, Nelayan, Peternak, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik harus segera diprogramkan secara baik dan berkelanjutan agar kawasan industri juga dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi lokal secara nyata.

1. Potensi Geopark Sulawesi Tengah

Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Kondisi geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang bernilai, Keragaman Geologi (*Geodiversity*). Keragaman ini memiliki nilai Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*). Nilai-nilai inilah yang dapat dimanfaatkan melalui konsep pengembangan taman bumi yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata, dan pengembangan taman bumi itu sendiri.

Pengembangan taman bumi dilakukan melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata kelola pengembangan Taman Bumi (Geopark) yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Republik Indonesia menganggap pengembangan taman bumi ini menjadi sangat penting. Ini ditunjukkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi atau Geopark.

Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi, merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengembangan Geopark (Pasal 2).

Tujuannya, seperti yang tertulis di Pasal 3, Melakukan tata kelola pengembangan Geopark guna mewujudkan pelestarian *Geoheritage*, *Biodiversity*, dan *Cultural Diversity* yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konversi, edukasi, dan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Terdapat sebanyak 110 potensi warisan geologi yang ada di Indonesia, 3 (tiga) di antaranya berada di Sulawesi Tengah antara lain sesar Palu-koro, Danau Poso dan sekitarnya, Danau Kars Banggai Kepulauan. Danau Poso memiliki fenomena yang jarang ditemukan di Indonesia, di mana fenomena itu adalah adanya batubatuan dasar kerak bumi. Selain itu, ia juga didukung oleh situs-situs megalitikum kelas dunia, serta didukung keberadaan sumberdaya hayati ikan sidat. Keberadaan sidat *anguilla marmorata* atau dalam bahasa lokal kami menyebutnya masapi yang melimpah dibandingkan tempat lain di seluruh Indonesia, menjadi salah satu alasan mengapa Danau Poso menjadi danau prioritas nasional untuk dilindungi. Namun, Danau Poso memiliki banyak hal lain yang perlu dilindungi selain sidat.

Danau Poso adalah danau tektonik. Sebagai danau tektonik, maka Danau Poso merupakan salah satu bukti sejarah peristiwa terbentuknya Pulau Sulawesi. Danau Poso adalah salah satu danau purba di dunia. Sebagai danau purba, Danau Poso memiliki keanekaragaman hayati endemik yang dimiliki dunia. Pemerintah Kabupaten Poso hampir setiap tahunnya menerima para peneliti dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk menggali dan menulis tentang Danau Poso. Ini menunjukkan banyak orang memberikan perhatian ke Danau Poso karena memiliki keunikan dan kekhasan yang luar biasa. Selain bagi para peneliti dan akademisi, Danau Poso merupakan sumber kehidupan masyarakat Poso. Selama ratusan tahun, Danau Poso dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air minum dan irigasi, menjadi sarana transportasi, menjadi obyek wisata, membuka lapangan pekerjaan yang menunjang perekonomian warga antara lain dengan menjadi nelayan, atau membuka usaha kecil. Di Danau Poso terdapat kebudayaan warga yang berkembang, antara lain wayamasapi-sebuah cara menangkap ikan secara tradisional menggunakan pagar dari bambu; monyilo-cara menangkap ikan menggunakan tombak dengan bantuan lampu petromaks pada malam hari, serta mosango. Sebagai aset kehidupan masyarakat, tentu saja Danau Poso perlu untuk dikelola dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pemahaman yang komprehensi mengenai *geopark* dan mengenai potensi *geopark* di Danau Poso yang sedang diusulkan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk model pembangunan berbasis danau dan sungai di Kabupaten Poso. Bukan hanya model pembangunan berkelanjutan yang melindungi alam, melestarikan

keanekaragaman hayati, menjaga sejarah dan kebudayaan tapi juga model pembangunan dimana pemerintah daerah berkolaborasi langsung dengan masyarakat serta para akademisi dalam mewujudkannya.

m. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 34A dan 34B serta regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka isu strategis terkait pengarusutamaan transformasi digital adalah pertama, infrastruktur digital. Selain infrastruktur terkait konektivitas antar penduduk secara fisik berupa jalan, jembatan, pelabuhan, bandara maupun infrastruktur fisik lainnya berupa irigasi maupun Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), infrastruktur digital menjadi sarana dan prasarana yang menghubungkan antar penduduk sebagai wahana pembangunan berbasis pembangunan komunitas. Pemerintah Provinsi Sulteng wajib mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa percepatan penetrasi pita lebar, dukungan Pemerintah Provinsi Sulteng dalam memfasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, efisien. Infrastruktur dimaksud tidak hanya terbatas pada gorong-gorong (*ducting*), tetapi mencakup pula tiang telekomunikasi (*tower*) dan lubang kabel (*manhole*) untuk dapat digunakan secara Bersama dan terjangkau.

Kedua, Pemerintah Digital. Pemerintah Provinsi Sulteng perlu menyelenggarakan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) melalui layanan administrasi pemerintah secara elektronik yang diimplementasikan melalui layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan system penghubung layanan.

Ketiga, Ekonomi Digital. Satu dari beberapa pendorong daya saing ekonomi Sulteng adalah strategi memanfaatkan teknologi digital melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, *digital farming* maupun system pembayaran digital melalui Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) seperti QR code Indonesia Standard (QRIS) dalam transaksi non tunai maupun di sisi hulu melalui *Drone Participatory Rural Appraisal* dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan termasuk memperkirakan potensi lestari perikanan dan kelautan sebagai implementasi *Maximum Sustainability Yield (MSY)*, serta di sektor lainnya seperti pariwisata dan transportasi maupun jasa pergudangan. Keempat, Masyarakat Digital. Implementasi pengarusutamaan transformasi digital dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng. Selain itu, sesuai Misi 1 Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi

Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Misi 4 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Misi 8 Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital dapat dilakukan melalui system Pendidikan untuk mendukung kesiapan tenaga kerja dalam era industri 4.0 melalui fasilitasi literasi digital pada masyarakat dan talenta digital.

2.3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Morowali

A. Penelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali termuat dalam peraturan daerah Kabupaten Morowali nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali tahun 2019-2039. Diman RTRW dibutuhkan untuk mengarahkan pembangunan yang produktif, terkendali, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Morowali Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Morowali maka terjadi perubahan besar terhadap batas-batas Wilayah Kabupaten Morowali yang berimplikasi terhadap RTRW Kabupaten Morowali.

Perencanaan Tata Ruang Morowali Tahun 2019-2039 yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam Struktur dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat perumahan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Morowali bertujuan untuk Mewujudkan Kabupaten Morowali yang Berdaya Saing, dengan konsep pengembangan Industri, Pariwisata, Minapolitan, dan Agropolitan dengan memperhatikan Asas Penataan Ruang. Kebijakan Penataan Ruang daerah terdiri atas:

1. Pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL secara berjenjang dan merata antara Wilayah darat dan pulau-pulau kecil untuk mendukung investasi;
2. Pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
3. Pengembangan kawasan agropolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;



4. Pengembangan kawasan minapolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
5. Pengembangan kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam untuk pemenuhan target Indonesia sebagai negara industri tangguh;
6. Pengembangan sektor pariwisata alam/bahari, sejarah dan budaya, dan pariwisata buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
7. Penetapan dan pengembangan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya.

Beberapa pengembangan kawasan yang akan dilakukan:

- 1) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL) secara berjenjang dan merata antara Wilayah darat dan pulau- pulau kecil untuk mendukung investasi meliputi:
 - a. mengusulkan PKL hingga pada Wilayah pulau-pulau kecil untuk mendorong kemandirian kawasan perkotaan;
 - b. menghubungkan antar PKL, PPK dan PPL melalui jaringan transportasi secara terpadu antara transportasi darat, laut, dan udara;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan yang menjangkau hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil;
 - d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil;
 - e. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana air baku hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. mengembangkan sistem jaringan parasarana lingkungan yang meliputi sistem jaringan air limbah, persampahan, dan drainase khususnya pada kawasan permukiman perkotaan.
- 2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan hutan lindung diluar kawasan *outline* yang telah ditetapkan, dari kegiatan industri, pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya yang dapat merubah fungsi alam, bentang alam dan ekosistem alami;
 - b. membatasi pertumbuhan permukiman pada kawasan perlindungan setempat;
 - c. menyediakan ruang terbuka hijau RTH public dan privat untuk kepentingan masyarakat di kawasan perkotaan;



- d. membatasi pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan konservasi;
 - e. mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung geologi;
 - f. mengendalikan pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan rawan bencana;
 - g. mempertahankan dan menjaga kelestarian benda cagar budaya yang bernilai tinggi;
 - h. mempertahankan dan menjaga kelestarian ekosistem mangrove; dan
 - i. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi.
- 3) Strategi pengembangan kawasan agropolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan agropolitan
 - b. mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) pangan;
 - c. mengembangkan pasar sentra pengembangan agrobisnis (SPA) yang lebih representatif untuk meningkatkan daya tarik pembeli lokal dan regional;
 - d. mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani yang terkoneksi dari lahan pertanian, tempat pengolahan hasil pertanian dan tempat pemasaran.
 - e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian lahan basah; dan
 - f. menetapkan dan meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 4) Strategi pengembangan kawasan minapolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan perikanan budidaya dengan dukungan balai benih ikan;
 - b. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan ikan; dan
 - d. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil dengan Wilayah darat sebagai jalur distribusi.
- 5) Strategi pengembangan kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam untuk pemenuhan target Indonesia sebagai negara industri tangguh terdiri atas:
- a. menetapkan dan membangun kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.

- 6) Strategi pengembangan sektor pariwisata alam/bahari, sejarah dan budaya, dan pariwisata buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan terdiri atas:
 - a. mengembangkan wisata bahari seperti wisata pantai, wisata pulau-pulau kecil, ekowisata mangrove, dan wisata alam bawah laut, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat;
 - c. mengembangkan wisata alam seperti wisata air terjun, wisata penangkaran/perlindungan satwa, wisata goa, dan wisata puncak, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
 - d. menjaga dan mengembangkan kelestarian kawasan dan/atau benda cagar budaya, serta kawasan lainnya yang memiliki nilai historis dan estetika tinggi sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya;
 - e. menjaga dan mengembangkan festival-festival budaya masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata budaya; dan
 - f. mengembangkan wisata buatan untuk memberikan daya tarik yang berberbeda sebagai destinasi alternatif dalam menunjang sektor pariwisata yang unggul.
- 7) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. menata dan mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. menata dan mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.

B. Isu dan Penyelarasan Dokumen KLHS RPJMD Morowali 2025-2029

SDGs merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan keberlanjutan MDGs. Ada banyak tujuan dari konsep SDGs. Namun ada tiga tujuan utama. *Pertama*, SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. *Kedua*, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. *Ketiga*, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia. Untuk mencapai tujuan SDGs diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan

kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali pada khususnya.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Aturan tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Regulasi tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya. Pelaksanaan SDGs berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Agenda SDGs juga untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda MDGs di Indonesia.

Dalam rangka percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional yang mengacu pada target dan sasaran global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional periode berjalan, serta sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran TPB/SDGs sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, Presiden RI Kembali menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB.

Berdasarkan Perpres Nomor 111/2022, presiden telah menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2025. TPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perpres 111/2022 bertujuan untuk:

- a. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
- b. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;

- c. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
- d. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah membentuk tim koordinasi nasional yang terdiri atas dewan pengarah nasional, tim pelaksana nasional, kelompok kerja nasional, dan tim pakar dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional Tahun 2025. Dengan telah ditetapkannya Perpres 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional Tahun 2025 dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Penilaian capaian TPB dilakukan di Kabupaten Morowali berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2025-2029 dan merupakan komitmen pelaksanaan dan pencapaian SDGs yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Kategori capaian indikator TPB Kabupaten Morowali berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yakni: (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (warna hijau). (2) sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (arna orange), (3) tidak relevan (warna biru), dan (4) tidak ada data (warna merah). Kategori “Hijau” berarti capaian indikator telah sesuai dengan target RPJMN sampai pada tahun 2023 (target Perpres No, 59 tahun 2017); kategori “Orange” sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target RPJMN sampai pada tahun 2023 (target Perpres No, 59 tahun 2017); kategori “Biru” tidak relevannya indikator dengan keadaan yang sesungguhnya; selanjutnya kategori “Merah” bermakna bahwa indikator TPB tersebut belum ada dalam program OPD di Kabupaten Morowali, sehingga data indikator yang diinginkan tidak ada datanya. Pencapaian TPB di Kabupaten Morowali dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

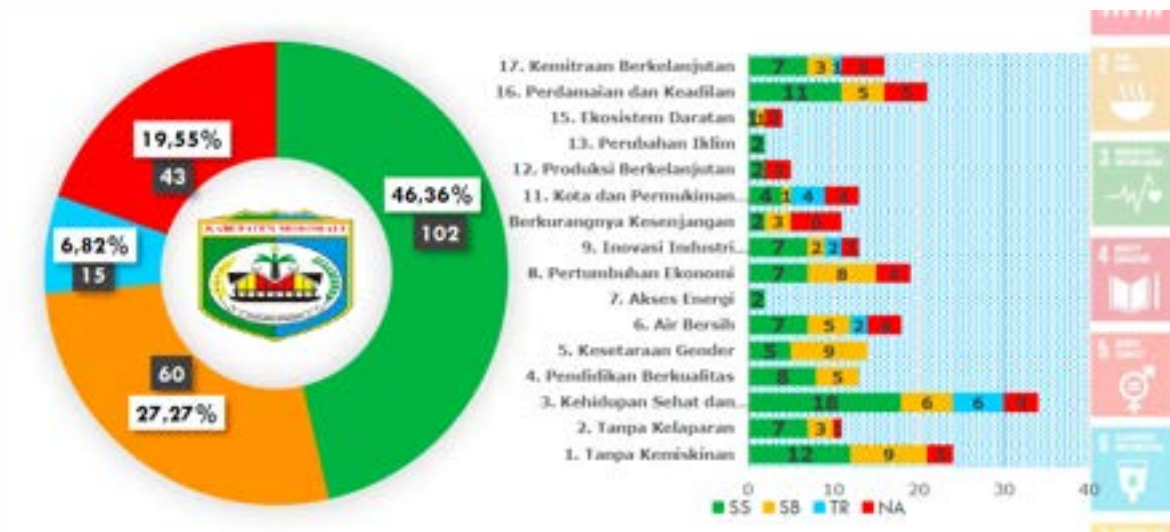


Tabel 2.85
Pencapaian TPB di Kabupaten Morowali

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	TR	NA	Jumlah Indikator
1. Tanpa Kemiskinan	12	9	0	3	24
2. Tanpa Kelaparan	7	3	0	1	11
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	6	6	4	34
4. Pendidikan Berkualitas	8	5	0	0	13
5. Kesenjangan Gender	5	9	0	0	14
6. Air Bersih	7	5	2	4	18
7. Akses Energi	2	0	0	0	2
8. Pertumbuhan Ekonomi	7	8	0	4	19
9. Inovasi Industri Infrastruktur	7	2	2	2	13
10. Berkurangnya Kesenjangan	2	3	0	6	11
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	4	1	4	4	13
12. Produksi Berkelanjutan	2	0	0	3	5
13. Perubahan Iklim	2	0	0	0	2
15. Ekosistem Daratan	1	1	0	2	4
16. Perdamaian dan Keadilan	11	5	0	5	21
17. Kemitraan Berkelanjutan	7	3	1	5	16
Jumlah	102	60	15	43	220
Persentase	46,36 %	27,27 %	6,82 %	19,55 %	100 %

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029.

Persentasi pencapaian tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.82
Persentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Morowali

Dari kajian terhadap permasalahan yang telah digambarkan pada uraian sebelumnya serta memperhatikan lingkungan strategis global, nasional, provinsi dan daerah, teridentifikasi isu strategis daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Morowali untuk RPJMD 2025-2029 adalah sejalan dengan isu strategis RPJPD periode waktu 2025-2045 pada gambar berikut.



Gambar 2.83
Isu Strategis RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045



C. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kompetensi ASN

Kualitas Sumberdaya Manusia merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan secara nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral. Dalam konteks ini, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli). IPM adalah indeks komposit diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) kesehatan; (2) Pendidikan; dan (3) ekonomi. SDM berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM.

IPM Kabupaten Morowali sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Morowali, perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan dan kesehatan.

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukkan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2018-2022. Kondisi ini ditunjukkan Tahun 2018 dimana IPM sebesar 71,14, terus meningkat hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 72,55. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2022 masuk kategori tinggi. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 72,91, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,28. Kelemahan dari pencapaian IPM Kabupaten Morowali yang tinggi saat ini hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah Kecamatan daratan yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan Kesehatan serta

ekonomi yang lebih baik dibandingkan pada kecamatan berbasis pulau yaitu pada Kecamatan Menui Kepulauan, kecamatan Sembori dan Kecamatan Bungku Selatan yang mengalami ketertinggalan aspek sosial ekonomi.

Aspek manajemen sumberdaya aparatur Kabupaten Morowali juga tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif dalam bentuk pengembangan SDM aparatur yang mampu menjawab tantangan era disrupsi dan industri 4.0. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian mesti diatasi jika memperbaiki dan mereformasi birokrasi dimana perbaikan kesejahteraan melalui perbaikan remunerasi untuk menunjang kinerjanya yang optimal. Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.

D. Hilirisasi Industri Pengolahan SDA dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kabupaten Morowali memiliki potensi SDA yang diperkirakan lebih dari 200.000 Ha tambang nikel. Potensi pertambangan nikel Morowali terkenal hingga mancanegara, dengan kualitas nomor satu di Asia Tenggara. Pertambangan nikel menjadi andalan dari perekonomian Morowali. Terdapat puluhan perusahaan pertambangan nikel besar di daerah ini yang menyerap tenaga kerja lokal hingga 19.000 orang. Dampak dari besarnya potensi sumberdaya alam tersebut terlihat Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan besaran PDRB serta peningkatan PDRB Perkapita.

Menjadikan pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan kedepan bagi Kabupaten Morowali, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas atau inklusif, jika pertumbuhan ekonomi berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terjadinya pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Tidak hanya daerah berkembang (*emerging*), seringkali di daerah maju juga memiliki tantangan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara empirik berkorelasi positif terhadap upaya nyata penurunan angka kemiskinan,

penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya.

Hilirisasi industri pengolahan Nikel dianggap sebagai katub penyelamat dari inklusifitas pertumbuhan ekonomi di wilayah pertambangan. Sejak bergulirnya program hilirisasi sumber daya alam, terutama logam nikel di Kabupaten Morowali, belum memberikan multiplier effect bagi penurunan kemiskinan di wilayah remot area pertambangan. Pengolahan Industri turunan Nikel berupa *Ferronickel (FENI)*, *Nickel Pig Iron (NPI)*, dan baja tahan karat yang diproduksi oleh sejumlah pabrik peleburan (smelter) Nikel di Kabupaten Morowali saat ini belum dapat memberikan pengaruh signifikan bagi tumbuhnya IKM yang berbasis hilirisasi nikel seperti prodak panci dan peralatan *home industry*. Pertumbuhan Industri pengolahan smelter dalam kerangka hilirisasi nikel pada sisi lain hanya berdampak pada tumbuhnya sektor UMKM di wilayah Kecamatan yang ada Industri karena banyaknya karyawan yang membutuhkan berbagai keperluan hidup. Selain itu, aglomerasi ekonomi di wilayah tersebut juga ikut meningkat tajam.

Bagi Pemerintah Kabupaten Morowali tata kelola pembangunan yang baik, sejatinya akan diukur dari pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagai perwujudan pemerintah hadir di tengah masyarakat. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali berdasarkan ADHK 2010 kurun waktu 2018-2022. Perekonomian Kabupaten Morowali yang diukur melalui indikator pertumbuhan PDRB memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 42,94 persen yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah sebesar 11,72 persen. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 112,20 persen. Hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sebesar 20,20 persen. Selanjutnya di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tetap tumbuh positif dan sangat tinggi yakni sebesar 28,93 persen. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Morowali tidak terdampak pandemi Covid-19, yang mana berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Morowali mencapai 25,15 (lebih rendah dari tahun sebelumnya). Selanjutnya data pada tahun 2022 ekonomi Morowali masih dua digit diangka 28,21 meningkat dari tahun sebelumnya.

Terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 62,22 persen, Sektor Konstruksi sebesar 151,77

persen dan Sektor Jasa Keuangan sebesar 34,62 persen. Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan kecil dan negatif yakni sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (3,00%), sektor lainnya yakni Jasa Pendidikan (0,48%), Konstruksi (14,62) persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,81 persen. Sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, mengingat pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan produktivitas di Sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor Pertanian. Salah satu yang menyebabkan ekonomi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sampai dengan tahun 2022 ekonomi Morowali Tumbuh sebesar 28,21 persen, tumbuh jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,31 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 15,17 persen. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menyisahkan masalah bagi kabupaten Morowali karena angka kemiskinan yang masih tinggi hingga Tahun 2022 sebesar 12,58 persen atau sebanyak 15,86 ribu jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali hingga Tahun 2019, masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana, persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,33 persen dan nasional sebesar 9,54 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kabupaten Morowali ternyata belum sepenuhnya mampu memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam kemiskinan, dan cenderung melebar jarak pendapatan kemiskinan di antara penduduk miskin. Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi idealnya memberikan jaminan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat serta angka kemiskinan yang menurun. Kemiskinan merupakan masalah paling utama dalam pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum

kondisi kemiskinan masyarakat tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

Kabupaten Morowali masih memiliki isu strategis berkaitan dengan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi penurunan angka kemiskinan belum berhasil (Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif). Pada sisi lain Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi faktanya masih banyak masyarakat miskin atau golongan menengah kebawah yang berada terutama masyarakat miskin khususnya pada wilayah pegunungan dan pulau-pulau. Konsentrasi kemiskinan di kabupaten morowali Sebagian besar berada pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Sejalan dengan hal itu Konsentrasi masalah sosial khususnya penanggulangan kemiskinan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah kawasan 3T (terpencil, tertinggal, dan terdepan). Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah sudah melakukan sinergi antar sektor. Masalah Kemiskinan lebih cepat diatasi, apabila semua potensi daerah bersama-sama mengambil peran, selain pemerintah, juga dunia usaha harus digerakkan untuk percepatan penyelesaian kemiskinan khususnya di Kabupaten Morowali.

Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Berlaku pada bulan Januari 2022 terdapat 91.623 orang. Sedangkan dalam kurun waktu Januari- Mei tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah TKA yang berlaku, yaitu sebanyak 96.574 orang pada bulan Mei 2022. (sumber Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI). Isu Ribuan tenaga kerja asing atau TKA Cina memadati wilayah industri di kawasan Morowali sejak awal tahun 2018 sampai tahun 2022 menghangat namun tidak semuanya benar. Data tentang jumlah karyawan lokal (Indonesia) yang saat ini bekerja di kawasan Morowali Industrial Park (IMIP) pada tahun data yang tercatat di Kemenaker jumlah TKA di seluruh Indonesia pada 2019 sebanyak 109.546 orang, kemudian pada 2020 turun menjadi 93.761 orang, lalu di 2021 menjadi 88.271 orang dan pada 2022 turun lagi menjadi 70.571 orang. Para Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja secara bersama dengan pekerja local di wilayah kawasan pabrik, pelabuhan Jetty, dan central kitchen khususnya pekerja yang berasal dari Tiongkok. Pelibatan Para Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja untuk transfer teknologi kepada karyawan Indonesia sehingga setiap tahunnya jumlahnya akan berkurang setelah kemampuan dan skiil tenaga kerja dalam negeri

khususnya di Kabupaten Morowali mampu untuk mengoprasikan berbagai teknologi pengolahan industri tambang nikel.

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali pada tahun mendatang bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menyiapkan strategi kedepan didalam menyiapkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri melalui penyelenggaraan sekolah vokasi, pelatihan dan magang kerja sehingga dampak keberadaan Industri dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi mampu menyerap tenaga kerja lokal di wilayah remote area Kabupaten Morowali dan calon pekerja di Provinsi Sulawesi Tengah.

E. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.

Kemiskinan (*poverty*) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali mengalami penurunan kurun Tahun 2018-2022. Pada Tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 14,34 persen, dan menurun hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 13,75 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 17,79 ribu jiwa, dan Tahun 2019 sebanyak 16,61 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali juga menurun sebesar 16,50 ribu jiwa atau sebesar 13,43 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 13,75 persen atau sebanyak 17,07 ribu jiwa. Tahun 2022, pandemic sudah dapat dikendalikan, berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang juga meningkat, sehingga penduduk miskin menurun cukup signifikan menjadi 12,58 persen atau sebanyak 15,86 ribu jiwa.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.



F. Konektivitas Infrastruktur Antar Wilayah

Kondisi wilayah geografis Kabupaten Morowali yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdalam dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah kecamatan seperti Jalan dan Jembatan, transportasi, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan. Adanya kesenjangan Infrastruktur pada wilayah khususnya di Kecamatan Bungku Tengah dan Menui Kepulauan merupakan isu strategis utama yang dihadapi Kabupaten Morowali saat ini.

Infrastruktur yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik.

Jaringan jalan yang baik, memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maupun terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2022 mengalami penurunan dan masih sangat rendah dari total panjang jalan yang ada. Secara keseluruhan tidak mencapai 50 persen dari Tahun 2018-2022. Tahun 2018 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali sebesar 0,31, menurun hingga Tahun 2019 menjadi 0,13, diakibatkan bencana alam yang terjadi berdampak pada banyaknya jalan yang mengalami kerusakan, sehingga proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Tahun tersebut menurun sangat signifikan menjadi 0,133 atau hanya sebesar 13,30 persen dari total panjang jalan yang ada, dan di tahun 2020 sebesar 0,14. Sampai dengan tahun 2022 sebesar 0,184.

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik

di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan, di mana Pembangunan sarana dan Prasarana Pelayanan publik dan listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi juga masih diperlukan dimasa yang akan datang guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Morowali baik di tingkan Kabupaten, kecamatan maupun di desa.

G. Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan yang baik dan Berkualitas

Tatakelola pemerintahan yang baik melalui institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima (*public services*). Dimana, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah subjek dan objek dari reformasi birokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian mandiri, atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang implementasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya pada Pemerintah Kabupaten Morowali di masa mendatang.

Pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, menjadi isu utama di dalam penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Morowali dalam periode awal RPJPD kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 yaitu periode RPJMD 2025-2029.

Pelayanan publik sebagai dampak perubahan orientasi layanan dari birokrasi daerah memerlukan: 1). standardisasi pelayanan yang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif Perangkat Daerah itu sendiri; 2). rasionalisasi penataan organisasi sudah dilakukan, namun tetap diperlukan untuk pengembangannya ke arah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien. Adanya unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang *fragmented* dan mengedepankan ego-sektoral; 3). mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinan bagi dunia bisnis/pelaku swasta yang cepat sesuai dengan arahan undang-undang cipta kerja; 4). pengembangan penatalaksanaan diperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural 5). aplikasi layanan *online* baik dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik tak terelakkan untuk merespon tuntutan industri 4.0 dewasa ini.

Di samping itu perubahan kewenangan dan organisasi pemerintah daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memerlukan berbagai penyesuaian (*adjustment*) termasuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

H. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

Saat ini merupakan era “*sharing & platform based*”. Kebangkitan era tersebut ditandai dengan: (1) data merupakan pelumas baru dalam kegiatan ekonomi (*internet of things, big data, cloud, OLT/blockchain, artificial intelligence, dan robotics*) dan, (2) model bisnis berbasis platform (*platform based*). Model bisnis *platform based* misalnya; (1) Perusahaan transportasi’ tanpa kendaraan; (2) Penyedia “*breaking news*” tanpa menyusun berita; (3) Penyedia *photosharing* tanpa membuat foto; (4) Jasa komunikasi tanpa infrastruktur telekomunikasi; (5) Peritel bervaluasi tinggi tanpa memiliki *inventory*; (6) Penyedia akomodasi tanpa memiliki kamar; (7) Media populer tanpa membuat *content*; (8) Pertemuan, seminar, webinar, rapat virtual dan pengelolaan kantor dari jarak jauh; (9) pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ)/kuliah daring menjadi model baru (PJJ/digitalisasi pendidikan).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Saat ini dunia berada pada Industri 4.0 dimana industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah *smart factory* akan menjadi hal yang lumrah dengar di era Industri 4.0 sebagaimana saat ini kita mendengar istilah *smartphone, smartcard* dan istilah-istilah lain ditambahkan kata *smart*. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang

mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online.

Pembatasan interaksi fisik antar manusia menyebabkan berbagai bentuk Layanan pemerintah berubah menjadi online, *Work from Home (WFH)* dan budaya rapat daring (online) menjadi sebuah kebiasaan baru didalam menyelesaikan berbagai tugas pemerintahan, transaksi ekonomi dilakukan secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidaklah berlebihan kalau Pelayanan pemerintah dan transaksi ekonomi yang berbasis teknologi digital. pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ) untuk layanan Pendidikan kedepan di Kabupaten Morowali akan berjalan seiring dengan adaptasi pada teknologi Pendidikan saat ini.

I. Potensi dan Mitigasi Bencana

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Kabupaten Morowali terdiri dari 10 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan dan 126 desa yang tersebar di bagian tenggara Pulau Sulawesi sehingga jika dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan curah hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor.

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir.

Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan.

Beberapa Tahun terakhir terdapat bencana Alam yang melanda Kabupaten Morowali banjir bandang, Gempa Bumi dan Longsor yang terjadi pada kurun Tahun 2019 s/d 2022. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku Tengah. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut.

- a. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir
- b. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- c. Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur.
- d. Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur

J. Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

Industri pertambangan Nikel tentu tidak bisa lepas dari dampak lingkungan yang ditimbulkan. Bukan tidak sedikit lahan-lahan bekas penambangan diberbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Morowali yang rusak, sebagai akibat kurang bertanggungjawabnya beberapa perusahaan pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Morowali yang utama adalah

makin tingginya kerusakan lingkungan (*environmental damage*) sebagai akibat adanya eksploitasi sumberdaya alam pertambangan nikel yang sangat massif berdampak pada penurunan produktivitas tanah, penyimpangan tata ruang, deforestasi, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, banjir, pencemaran air dan udara, terganggunya flora dan fauna, terganggunya keamanan dan kesehatan penduduk, serta perubahan iklim mikro (*microclimate change*).

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki setidaknya 72 juta cadangan Nikel (Ni) termasuk Limonit, atau sebesar 52 persen dari total cadangan nikel dunia sebanyak 139.419.000 Ton Ni (Booklet Peluang Investasi Nikel Indonesia, Kementerian ESDM, 2020). Karenanya, kegiatan pertambangan nikel sebagian besar hanya tersebar di 4 provinsi, dimana terkandung 90 persen dari seluruh cadangan sumber nikel yang ada di Indonesia, 3 provinsi berada di Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara), serta 1 provinsi di Maluku (Maluku Utara).

Merujuk pada data walhi dan kementerian ESDM hingga Tahun 2022, disebutkan terdapat sebanyak 19 perusahaan smelter yang mengolah bijih nikel menjadi berbagai produk setengah jadi, yang tersebar di beberapa wilayah dengan total kapasitas produksi mencapai 12,437,000 Ton per tahun, 14 diantaranya terdapat di pulau Sulawesi, dengan kabupaten morowali Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang memiliki smelter terbesar yaitu 9 (sembilan) Smelter.

Konsep Hilirisasi pertambangan nikel pertama di Indonesia dilakukan oleh *Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)*. Di kawasan ini hilirisasi nikel dilakukan untuk menghasilkan berbagai jenis produk nikel diantaranya feronikel, nickel pig iron, dan stainless steel. Hilirisasi Komoditas nikel di Indonesia selanjutnya didukung oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dengan larangan ekspor nikel kadar rendah dengan pertimbangan untuk pertambahan nilai dari komoditas nikel melalui proses pengolahan dalam negeri untuk mendukung masifnya pembangunan smelter beberapa tahun terakhir. Di tahun yang sama presiden Jokowi juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, dengan hadirnya peraturan ini semakin memperlihatkan ambisi besar pemerintah Indonesia dalam membangun ekosistem komoditas nikel dari hulu hingga hilir.

Di sisi lain kampanye terhadap transisi energi fosil ke energi terbarukan melalui pengembangan industri baterai untuk mendukung ekosistem mobil listrik dan peralihan dari kendaraan industri mobil

berbahan bakar fosil ke energi listrik tidak terlihat signifikan, perkembangan ekspansi pertambangan nikel yang ada di Indonesia. kebutuhan nikel kelas 1 (Ni 99,9 persen) untuk produksi baterai jenis lithium-ion hingga saat ini tidak ditemukan di Indonesia, sebagian besar dikarenakan kualitas bijih nikel yang ditemukan di Indonesia berkadar di bawah 1,7 persen Ni, dan dibutuhkan teknologi pengolahan hidrometalurgi untuk menghasilkan kualitas nikel yang lebih baik, berbeda dengan pengolahan bijih nikel yang selama ini digunakan di Indonesia dengan teknik pengolahan pirometalurgi untuk menghasilkan nikel kelas 2 seperti *Nickel Pig Iron*, Feronikel, dan *Nickel Matte* yang sebagian besar digunakan dalam industri stainless steel.

Sejalan dengan meningkatnya izin usaha pertambangan untuk komoditas nikel, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Kerusakan lingkungan, Deforestasi, perampasan ruang, hingga pemiskinan rakyat juga semakin masif terjadi. Masifnya pemberian izin bagi perusahaan tambang khususnya pertambangan nikel di Pulau Sulawesi, menimbulkan berbagai dampak ekologis yang besar, dimulai dari kerusakan hutan atau deforestasi, hingga pencemaran di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. kebutuhan akan lahan yang luas dari industri pertambangan nikel ini pun dipermudah oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi hingga kawasan hutan lindung yang selama ini terus dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat dan lokal.

K. Penggunaan dan Konversi Lahan

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Morowali tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah, terutama dalam kebijakan atau regulasi yang berlaku apabila merujuk paradigma kegiatan industri pertambangan yang mengacu pada konsep pertambangan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta penerapan kawasan pertambangan yang dapat memberikan manfaat diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR), studi kelayakan teknik, ekonomi, lingkungan (Studi Amdal), reklamasi dan pengelolaan lingkungan, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Hampir seluruh kecamatan di wilayah daratan Kabupaten Morowali, memiliki potensi yang besar apabila dikembangkan untuk pertambangan dan pertanian. Namun, saat ini sedang terjadi kegiatan pengelolaan penambangan secara besar-besaran, banyak perusahaan besar yang berdatangan untuk menggali kekayaan bumi di wilayah yang kaya akan nikel ini. Kedatangan para pemburu hasil bumi di wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan hasil buminya ini (nikel), mendapatkan respon dari

masyarakat khususnya petani, ada yang pro dan kontra terhadap kegiatan penambangan ini. Petani beranggapan bahwa kehadiran tambang di Daerah Morowali akan berdampak positif bagi pertanian dan lingkungan di sekitarnya. Namun ada pula yang beranggapan akan berdampak negatif nantinya. Kabupaten Morowali khususnya daerah Kecamatan Bungku Timur yang dulunya hanya dikenal sebagai daerah agraria sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani maupun nelayan, kini sebagian masyarakatnya beralih profesi sebagai buruh maupun karyawan di perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut sebagai akibat dari adanya alih fungsi lahan. Pada tahun 2024, Morowali kehilangan 4,61 kha hutan alam, bagian dari tren deforestasi di Sulawesi Tengah yang sebagian besar dipicu oleh ekspansi tambang, perkebunan, dan infrastruktur terkait. Nickel mining concession (IUP) memicu deforestasi signifikan: analisis nasional mencatat bahwa kelebihan izin tambang mencakup lebih dari sepertiga kawasan hutan di Sulawesi, termasuk Morowali. Secara nasional, dalam 20 tahun terakhir sekitar 24.811 ha lahan hutan di Sulawesi telah dikonversi menjadi tambang nikel, dengan puncak tahunan hampir 4.000 ha, sebagian besar berada di kawasan Morowali dan sekitarnya.

Pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali terjadi perubahan tutupan/penggunaan lahan pada kontribusi peningkatan luas tutupan/penggunaan lahan dari satu atau 2 beberapa kategori tutupan/penggunaan yang diikuti penurunan luas kategori lainnya pada suatu periode tertentu. Seperti yang diketahui bahwa konversi lahan hutan (tidak terbangun) menjadi penggunaan lahan lain (terbangun) merupakan fenomena yang sudah lama terjadi di dunia dan memiliki dampak langsung diantaranya polusi udara, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global dengan turunnya pengikat CO², erosi, kumuh sekitar DAS, dll. Hal ini banyak terjadi di Kecamatan Bahodopi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan wilayah yang terdapat perusahaan tambang. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional karena memiliki sumber daya alam strategis nasional berupa sumber daya mineral nikel yang keberadaannya mampu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Namun, pada kenyataannya inkonsistensi penataan ruang wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) banyak terjadi pada KSN karena sebahagian besar lokasi KSN Bahodopi dan sekitarnya berada di kawasan lindung dalam RTRW Kabupaten Morowali. RTRW sangat baik untuk pengendali perubahan tata guna lahan, mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu wilayah. Sebagian lokasi penambangan terletak di kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, tubuh air, dan konservasi perairan).



L. Ketahanan Pangan dalam Aktivitas Pertambangan

Isu utama terkait kebutuhan pangan di sekitar kawasan tambang Morowali adalah adanya ketimpangan antara peningkatan aktivitas penambangan dan penurunan produktivitas pertanian lokal, sehingga harga kebutuhan pokok menjadi tinggi. Ketergantungan pada impor beras dan bahan pangan lain juga meningkat, sementara ketahanan pangan lokal tergerus akibat perluasan area tambang. Isu pangan di kawasan tambang Morowali menjadi semakin kompleks akibat hilirisasi nikel yang masif, menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan, namun juga dampak negatif terhadap pertanian dan sumber daya alam. Kerusakan ekologi, terutama di lahan pertanian, menyebabkan gagal panen dan meningkatnya angka kelaparan serta kekurangan gizi, terutama di kalangan anak-anak.

Hilirisasi nikel di Morowali, khususnya di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), mendorong peningkatan kebutuhan pangan, terutama karena banyaknya pekerja tambang yang membutuhkan pasokan makanan. Aktivitas tambang menyebabkan kerusakan ekologi, seperti pencemaran air dan tanah, sehingga pertanian kesulitan beroperasi dan hasil panen berkurang. Gagal panen dan kerusakan ekologi berdampak pada peningkatan angka kelaparan dan stunting (kekurangan gizi) di kalangan anak-anak, terutama di daerah industri nikel. Pencemaran limbah tambang juga memengaruhi kualitas air dan sumber daya hayati, termasuk ikan, yang mengurangi sumber penghasilan masyarakat pesisir. Peningkatan kebutuhan pangan dan penurunan produksi lokal menyebabkan ketergantungan Morowali pada impor, yang dapat memicu kenaikan harga dan masalah logistik.

Upaya yang perlu dilakukan adalah Meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi, pupuk, dan sarana pertanian modern untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. Melakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah tambang, untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap air, tanah, dan sumber daya hayati. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang berubah, seperti tanaman pangan lokal dan komoditi lain. Melakukan program ketahanan pangan yang terintegrasi, termasuk pelatihan pertanian, penyediaan bibit, dan dukungan pemasaran produk pertanian. Selain itu, Memastikan perusahaan tambang bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.



M. Potensi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Kota Kecil dan Kawasan Perdesaan

Kabupaten Morowali yang terletak di Sulawesi Tengah, telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh pemerintah Indonesia. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada Kawasan Industri Morowali (KI Morowali), yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Keputusan Permenko Perekonomian No 9 Tahun 2022. Morowali memiliki potensi besar dalam industri pengolahan mineral, terutama ferronikel dan stainless steel. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan mencakup area seluas 4.000 hektar. Pengembangan infrastruktur di kawasan ini telah dipercepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk pembangunan jalan, revitalisasi drainase, dan pengelolaan sampah. Selain itu, pengembangan kawasan perdesaan di sekitar Morowali juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemugaran permukiman kumuh, peningkatan kapasitas jalan, dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bahodopi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai isu strategis seperti kemacetan, banjir, dan penumpukan sampah di kawasan tersebut.

Selain itu, pada tahun 2017, melalui serangkaian rapat koordinasi antara Kementerian PUPR dan kementerian yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan seperti: Kementerian DPDPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta dikomandoi Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, dicapai kesepakatan bahwa pengembangan kawasan perdesaan menjadi tanggung jawab bersama lintas kementerian dengan istilah pengembangan kawasan yang disepakati bersama yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). KPPN merupakan kawasan perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang mendukung pengembangan 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Dengan adanya KPPN, program-program lintas K/L yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan dapat difokuskan pada lokasi lokasi KPPN tersebut, sehingga pada akhir tahun penanganannya yaitu tahun 2019 didapatkan kawasan perdesaan yang sudah dikembangkan secara komprehensif sehingga mampu berdikari, menjadi pilar pengembangan ekonomi wilayah, mensejahterakan masyarakat dan dapat direplikasi pada kawasan-kawasan perdesaan lain di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Morowali pada khususnya. Melalui potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Morowali dengan luas 4.045,15 Km²



wilayah pengelolaan laut dari total luas wilayah 9.517.15 Km² mengharapkan pengelolaan ruang kawasan sentra produksi perikanan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berbasis minapolitan dengan lokasi di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa indikasi intervensi yang akan dilakukan menurut kawasan di Kabupaten Morowali adalah:

- 1. Kawasan Perkotaan Kecil;** Kabupaten Morowali: Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Morowali (Bahodopi), dengan output: bantuan pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja serta bantuan pembangunan rumah swadaya, pemugaran permukiman kumuh, bantuan prasarana dan sarana umum bidang perumahan, Ruang Terbuka Publik (RTP) Bahomakmur dan Keurea, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, Sistem Pengelolaan Persampahan termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahodopi, penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
- 2. Kawasan Industri Morowali:** Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral di Kabupaten Morowali, melalui:
 - Pengembangan Kawasan Industri (KI) Indonesia Huabao Industrial Park, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri Stardust,
 - Pengembangan konektivitas simpul transportasi, dengan output: pengembangan Bandar Udara Morowali dan pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali,
 - Peningkatan investasi kawasan, dengan output: penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal, percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan dan penataan kawasan industri, serta pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku,
 - Pengembangan kemitraan usah Pelebaran Jalan Akses Bandar Udara Morowali dan rantai pasok, dengan output: kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka, fasilitasi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangan, pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar di KI Prioritas, dan inkubasi bisnis untuk pembentukan wirausaha industri,

- Penyediaan pendidikan dan pelatihan, dengan output: pembangunan gedung dan penyediaan peralatan pendidikan tinggi vokasi industri,
- Pengembangan industri nikel sulfat, dengan output: penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel,
- Pembangunan industri baterai, dengan output: fasilitasi industri dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor serta perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi,
- Pengembangan industri kendaraan bennotor listrik berbasis baterai, dengan output: fasilitasi industri dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri serta peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan restrukturisasi mesin/peralatan sentra IKM dan UPT logam, mesin, elektronika, dan alat angkut,
- Pengembangan industri stainless steel, dengan output monitoring dan evaluasi perkembangan industri, fasilitasi peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri,
- Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang Bejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional, dengan output penurunan emisi Gas Rumah Kaca, pengkajian kebutuhan standar industri hijau, penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan sertifikasi industri hijau,
- Harmonisasi kebijaksn industri nikel, dengan output penguatan standarisasi untuk hilirisasi.

3. Kawassn Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT): Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) di Kabupaten Morowali dan 4 Kabupaten lain di Sulawesi Tengah, melalui:

- Pengembangan input produksi perikanan, dengan, output penyaluran benih ikan dan Penyaluran calon induk unggul ikan,
- Pengembangan sarana produksi perikanan, dengan output, penyaluran sarana penangkapan dan budidaya ikan,
- Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan pendampingan masyarakat kclautar dan pcirikanan, dengan output bantuan sarana pengembangan usaha nelayan, perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, dan pendanaan usaha nelayan.



4. Kawasan Perdesaan Prioritas, Pengembangan Kawasan Perdesaan prioritas Kabupaten Morowali, melalui:

- Penyediaan layanan dasar, dengan output pcEenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala dan sistem pengelolaan persampahan, berbasis masyarakat,
- Peningkatan aksesibilitas, dengan output pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, pengembangan OM BTS 4G/Lastmile dan akses internet,
- Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan output pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan,
- Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal ekowisata, dengan output preservasi dan resiliensi adat istiadat budaya lokal, pengembangan interaksi kemajuan budaya di wilayah adat, penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bcncana iklim.
- Peningkatan kapasitas tata kelola data kelembagaan berbasis digital, dengan output pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD.



Tabel 2.86

Rumusan Isu Strategis Daerah Kabupaten Morowali

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Geografi wilayah	Wilayah perbatasan dengan 2 provinsi	Hilirisasi Industri dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Geopolitik dan Geoekonomi	Pertahanan, Keamanan Negara	Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dan daratan	Konektivitas Sinfrastruktur antar Wilayah
Hidrologi	Penurunan debit air sungai	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Daya Dukung	Pembangunan Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup. dan Perubahan Iklim
Klimatologi	Peningkatan suhu udara dan banjir	Mitigasi Risiko kebencanaan dan Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup. dan Perubahan Iklim
Penggunaan Lahan	- Terjadi degradasi lahan akibat tambang. - Konversi lahan pertanian produktif	Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan	Pemanfaatan Luar Angkasa	Pembangunan Lingkungan Hidup	Industri Berbasis Sumberdaya Alam	Penggunaan dan konversi lahan
Tanaman Pangan	Penurunan produktivitas komoditi pertanian	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Krisis Pangan Dunia	Ketahanan Pangan Nasional	Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan
Tanaman Hortikultura	Produksi rendah	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Krisis Pangan Dunia	Ketahanan Pangan Nasional	Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan
Tanaman Perkebunan	Penurunan luas lahan dan produksi	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Krisis Pangan Dunia	Ketahanan Pangan Nasional	Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peternakan	Penurunan populasi ternak	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Krisis Pangan Dunia	Ketahanan Pangan Nasional	Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan
Perikanan dan Kelautan	Penurunan produksi	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	SDGs dan Degradasi SDA	Ketahanan Pangan Nasional	Daya Saing Sektor Kelautan dan Perikanan	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan
Hutan	Penurunan tutupan hutan	Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan	Perubahan iklim dan Degradasi SDA	Pembangunan Lingkungan Hidup	Industri Berbasis Sumberdaya Alam	Penggunaan dan konversi lahan
Sumberdaya hayati	Penurunan biodiversitas	Pemanfaatan Keanekaragaman hayati	Daya Dukung	Pembangunan Lingkungan Hidup	Industri Berbasis Sumberdaya Alam	Penggunaan dan konversi lahan
Daya dukung dan Daya Tampung	Penurunan DDTL pangana, air dan keanekaragaman hayati	Mitigasi Risiko kebencanaan dan Perubahan Iklim	Daya Dukung dan Daya Tampung	Pembangunan Lingkungan Hidup	Industri Berbasis Sumberdaya Alam	Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Energi dan Sumberdaya Mineral	Kapasitas terpasang rendah	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan	SDGs	Pembangunan Lingkungan Hidup	Dilema Industri	Potensi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional
Air	- Penurunan kualitas air - Air minum layak	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Daya Dukung dan Daya Tampung	Pembangunan Lingkungan Hidup	Industri Berbasis Sumberdaya Alam	Penggunaan dan konversi lahan
Pangan	Penurunan ketersediaan pangan lokal	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Daya Dukung dan Daya Tampung	Ketahanan Pangan Nasional	Arah Pembangunan Strategis Prov Sulawesi Tengah	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kemiskinan dan Kependudukan	-Peningkatan laju pertumbuhan -Kemiskinan masih tinggi	Hunian layak, terjangkau bebas kekumuhan	Kemiskinan, Demografis Global	Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan di Sulteng	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting
Ketenaga-kerjaan	Pengangguran	Hilirisasi Industri dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pertumbuhan Kelas menengah	Peningkatan Lapangan Kerja	Sumberdaya Manusia	Serbuan Tenaga Kerja Asing
Sumberdaya Wisata Alam	Degradasi SDA	Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan	Degradasi sumberdaya alam	Pembangunan Lingkungan Hidup	Daya Saing Kepariwisata	Penggunaan dan Konversi Lahan
Kawasan Strategis Nasional	Masalah ketimpangan dan sosial meningkat	Hilirisasi Industri dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Megatren 2045 dan Konstelasi Perdagangan	Penunjang superhub ekonomi nusantara	Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan PSN	Potensi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Kota Kecil dan Kawasan Perdesaan
Sumberdaya manusia	Penurunan kualitas SDM	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kompetensi ASN	Urbanisasi Dunia	Infrastruktur dan Peningkatan kualitas SDM	Sumberdaya Manusia	Kualitas SDM dan Kompetensi ASN
Pelayanan Pemerintahan dan birokrasi	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan.	Tatakelola Keuangan Global	Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Demokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan
Geologi dan topografi	Sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan banjir)	Mitigasi Risiko kebencanaan dan Perubahan Iklim	Dunia menghadapi bencana alam global	Pembangunan Lingkungan Hidup	Penanganan pasca gempa bumi, Tsunami dan Liquefaksi, Geopark Sulteng	Potensi dan mitigasi bencana



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Teknologi Informasi	Permasalahan sosial dan adaptif		Perkembangan teknologi informasi	Pengembangan Infrastruktur	Pengarusutamaan Transformasi Digital	Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi
Pertumbuhan ekonomi	Didominasi sektor pertambangan	Hilirisasi Industri dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Perang tarif USA-China	Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Ekonomi	Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri	Hilirisasi Industri Pengolahan SDA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Rumusan Visi

Visi pemerintah daerah adalah pernyataan aspiratif yang menggambarkan tujuan jangka panjang dan arah strategis yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Visi ini biasanya mencerminkan cita-cita dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah tersebut. Visi pemerintah daerah yang terpilih dari pemilihan kepala daerah tahun 2024 merupakan dasar dan pedoman serta bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana prinsip Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus realistis, disusun dan dirumuskan secara rinci disertai dengan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Visi pembangunan daerah sebagai gambaran arah tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, secara obyektif dan faktual harus memiliki kewajaran dan kelayakan untuk diwujudkan dalam situasi, kondisi dan kapasitas sumber daya daerah yang tersedia. Pengerahan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya yang bersifat strategis tersebut dimaksudkan guna menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi daerah, sehingga



pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terselenggara secara berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Dasar aturan yang menjadi acuan perumusan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Morowali 2025-2029 adalah:

1. Visi dan misi RPJPD Kabupaten Morowali tahun 2025-2045 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 (Visi RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 adalah **“Kabupaten Morowali sebagai Daerah Industri Berbasis Sumberdaya Alam Berkelanjutan yang Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”**).
2. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2019-2023 dan RPD Kabupaten Morowali 2024-2026;
3. Visi dokumen masterplan Pemetaan dan Pengembangan Kawasan Industri Morowali dengan City Branding “Morowali Terdepan bersama dalam industri nikel yang berkeadilan”;
4. Idenstifikasi Isu Global, Megatrend (kecendrungan) 2045, SDGs 2030 dan aspek lainnya yang ikut mempengaruhi pencapaian pembangunan Kabupaten Morowali sampai dengan 2045;
5. Integrasi dan harmonisasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2025-2045;
6. Hasil penelaah dan harmonisasi serta mempedomani Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025);
7. Integrasi dan harmonisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Morowali tahun 2025-2029;
8. Berpedoman pada Peraturan Daerah Morowali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali 2019-2039.

Selain itu, penyusunan visi dan misi Kabupaten Morowali juga diselaraskan dengan perwujudan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terpilih periode 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, baik skala lokal, regional, nasional maupun isu global, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2025 – 2029 adalah:



“Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan”

Sebagai harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Morowali 5 (lima) tahun ke depan, pada hakekatnya Penjelasan/Penjabaran Visi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:

- 1. Kabupaten** adalah tingkat pemerintahan daerah di Indonesia yang berada di bawah provinsi. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan memiliki wilayah administratif yang terdiri dari beberapa kecamatan. Setiap kabupaten memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten bertanggung jawab atas berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya.
- 2. Morowali:** adalah kesatuan wilayah, masyarakat kabupaten dan pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Poso berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan, termasuk sarana dan prasarana serta kelembagaan yang dipisahkan dari kabupaten induk. Daerah otonom Kabupaten Morowali merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur, dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Morowali menunjukkan kesatuan pemerintah dan masyarakat beserta semua potensi sumberdaya alam yang dimiliki dan dikelola bagi kemaslahatan masyarakat Morowali dan kemajuan Negara Republik Indonesia.
- 3. Maju,** dimaknai sebagai suatu keadaan yang menggambarkan kondisi Kabupaten Morowali yang maju berdasarkan capaian hasil-hasil pembangunan daerah meliputi pemenuhan pada capaian indikator pembangunan bidang infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya, politik dan tata kelola pemerintahan. Daerah yang maju juga ditandai dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, kualitas pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang lebih baik, angka harapan hidup yang lebih tinggi, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, ketersediaan prasarana dan sarana berbasis teknologi mutakhir, dan didukung dengan hadirnya aktivitas ekonomi modern yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan ekosistem digital dan



teknologi informasi berbasis akses internet cepat dan terjangkau, serta pencapaian yang tinggi pendapatan masyarakat dan daerah;

4. **Mandiri**, dimaknai sebagai suatu keadaan yang menandakan bahwa Kabupaten Morowali menjadi kabupaten yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah berdasarkan kemampuan dalam pencapaian pendapatan asli daerah yang tinggi dan berkelanjutan. Kemandirian pembangunan diperoleh melalui optimalisasi pemanfaatan berbagi potensi sumber daya alam dengan penggunaan teknologi yang tinggi dan ramah lingkungan serta dilakukan oleh sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, berdaya saing dan berbudaya, sehingga Kabupaten Morowali diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan akselerasi capaian hasil-hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
5. **Berkeadilan**, diartikan bahwa pembangunan di Kabupaten Morowali dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pemerataan capaian pembangunan yang tersebar pada seluruh masyarakat dan wilayah di Kabupaten Morowali berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki. Pembangunan Kabupaten Morowali yang berkeadilan juga mempertimbangkan konsep keadilan bagi semua penduduknya, yang dimaknai sebagai tingkat pencapaian pembangunan daerah yang diukur berdasarkan pemerataan pembangunan baik antar desa, kecamatan, dan wilayah daratan maupun wilayah kepulauan. Ketersediaan infrastruktur yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan dasar, non layanan dasar, pilihan dan penunjang yang memenuhi aspek kuantitas dan kualitas yang semakin berkeadilan ditandai dengan penyediaan infrastruktur daerah yang baik dan modern, menciptakan pelayanan yang baik, berkualitas, merata, didukung oleh distribusi sumberdaya manusia yang merata. Mengembangkan dan mewujudkan kekuatan-kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumberdaya alam berkelanjutan sebagai upaya akselerasi pemerataan di wilayah perkotaan dan perdesaan, daerah terpencil dan terisolir dalam penyediaan infrastruktur, dan teknologi informasi yang maju.

Visi RPJMD Morowali diselaraskan dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, RPJM Nasional 2025-2029, serta Visi RPJPD Kabupaten Morowali 2025-2045 (setidaknya mengandung makna kata maju dan berkeadilan). Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Keterkaitan Visi RPJMD Morowali 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan Visi RPJPN periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1

Hubungan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, serta Visi RPJPD Kabupaten Morowali 2025-2045 dengan Visi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029

Pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 merupakan tahap pembangunan ke-satu dari RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045. Dalam upaya mengukur pencapaian visi RPJMD Morowali Tahun 2025-2029, maka ditetapkan sasaran visi yang tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 3.1

Sasaran dan Indikator Visi RPJMD Morowali Tahun 2025-2029

No	SASARAN VISI RPJMD KABUPATEN MOROWALI 2025-2029	TARGET SASARAN	
		BASELINE 2025	SASARAN 2029
	PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA		
1	PDRB perkapita (Rp Juta)	1.262,78	2.330,84
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,17	53,68
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	75,17	74,95
	PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG		
1	Tingkat Kemiskinan (%)	9,86-11,35	8,50
2	Rasio Gini (Indeks)	0,210-0,265	0,227
3	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	46,02	41,07
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12,99	11,49
	PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PENGARUH DI DAERAH YANG MENINGKAT		
3	Indeks Inovasi Daerah	46,15	65,15
		Inovatif	Inovatif
	Indeks Daya Saing Daerah	3,75	4,03
	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA		
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,50-74,65	75,99
	PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERRO EMISSION		
5	Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO ² eq)	1.185.211,33	1.879.068,03
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,45	84,51

Sumber: RPJPD Morowali 2025-2045 yang Diolah, 2025



Tabel 3.2

Keterkaitan Sasaran RPJMD Provinsi Sulteng dan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029

No	SASARAN VISI RPJMD PROVINSI SULAWESI TENGAH 2025-2045	TARGET SASARAN		SASARAN VISI RPJMD KABUPATEN MOROWALI 2025-2029	TARGET SASARAN	
		BASELINE 2025	SASARAN 2029		BASELINE 2025	SASARAN 2029
	PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA			PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA		
1	PDRB perkapita (Rp Juta)	140,14-141,20	258,7	PDRB perkapita (Rp Juta)	1.262,78	2.330,84
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	49,15	58,75	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,17	53,68
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97 - 41,45	45,50-550,00	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	75,17	74,95
	PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG			PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG		
1	Tingkat Kemiskinan (%)	11,06-11,56	8,87 – 9,50	Tingkat Kemiskinan (%)	9,86 - 11,35	8,05
2	Rasio Gini (Indeks)	0,298 – 0,302	0,290 – 0,300	Rasio Gini (Indeks)	0,210 - 0,265	0,227
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,93	2,21	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi (%)	46,02	41,07
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12,72	12,95 – 14,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12,99	11,49
	PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PENGARUH DI DAERAH YANG MENINGKAT			PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PENGARUH DI DAERAH YANG MENINGKAT		
3	Indeks Inovasi Daerah	75 - 80	77 – 83	Indeks Inovasi Daerah	46,15	65,15
		Sangat Inovatif	Sangat Inovatif		Inovatif	Inovatif
	Indeks Daya Saing Daerah	3,43	3,82	Indeks Daya Saing Daerah	3,75	4,03
	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA			PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA		
4	Indeks Modal Manusia	0,50	0,54	Indeks Pembangunan Manusia	74,50 - 74,65	75,99
	PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERRO EMISSION			PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERRO EMISSION		
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	77,96	85,77	Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO ² eq)	1.185.211,33	1.879.068,03
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,75	82,60	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	83,45	84,51

Sumber: RPJPD Morowali 2025-2045 yang Diolah, 2025

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi RPJMD 2025 – 2029 memperhatikan tahapan pertama atau tahapan awal pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Morowali. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa pada tahap/periode pertama RPJPD, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Rumusan misi RPJMD disusun sedemikian rupa sehingga sejalan dengan Misi RPJMNas tahun 2025-2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025), untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran berikut indikatornya serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi daerah. Rumusan misi tersebut sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena pentingnya pernyataan misi, maka dalam penyusunannya perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, sebagai acuan dalam perumusan strategi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan, yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Sebagai penjabaran visi pembangunan Kabupaten Morowali yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Periode 2025–2029, maka berdasarkan konsultasi publik dan masukan dari stakeholder, dan FGD bersama pimpinan OPD di lingkungan Pemda Morowali, dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter dan berbudaya;
3. Memajukan sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan;
4. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan;
5. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi.

Adapun penjelasan misi pembangunan diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani

Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa poin utama dari misi ini:

1. Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*):
 - Transparansi: memastikan semua proses pemerintahan terbuka dan dapat diakses oleh publik.
 - Akuntabilitas: setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
 - Partisipasi Publik: melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*):
 - Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan.
 - Integritas: Menjaga kejujuran dan moralitas tinggi dalam setiap aspek pemerintahan.
3. Transformasi Tata Kelola:
 - Efisiensi dan Efektivitas: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal.
 - Profesionalisme: Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah.
4. Birokrasi yang Melayani:
 - Pelayanan Publik yang Prima: Memberikan layanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada masyarakat.
 - Responsif: Cepat tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan bersih, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Morowali.

Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkarakter dan Berbudaya

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter dan berbudaya bertujuan untuk mengembangkan masyarakat Morowali yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, serta memiliki karakter yang kuat dan budaya yang kaya.

Berikut adalah beberapa poin utama dari misi ini:

1. Kesehatan:

- o Kesehatan Fisik: meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat Morowali memiliki tubuh yang sehat.
- o Kesehatan Mental: Menyediakan dukungan dan layanan kesehatan mental untuk menjaga kesejahteraan psikologis masyarakat.

2. Karakter:

- o Pendidikan Karakter: mengintegrasikan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan untuk membentuk individu yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
- o Etika dan Moral: mendorong nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas.

3. Budaya:

- o Pelestarian Budaya: melestarikan dan mengembangkan budaya lokal agar tetap hidup dan dihargai oleh generasi muda.
- o Penghargaan terhadap Keragaman: menghargai dan merayakan keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa.

Dengan fokus pada aspek-aspek ini, diharapkan sumber daya manusia di Kabupaten Morowali dapat berkembang secara holistik, menjadi individu yang sehat, berkarakter kuat, dan memiliki budaya yang kaya.

Misi 3: Memajukan Sarana dan Prasarana Inklusif dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah Daratan dan Kepulauan

Memajukan sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan bertujuan untuk memastikan bahwa semua wilayah, baik daratan maupun kepulauan, mendapatkan akses yang sama terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan daerah Morowali. Berikut adalah beberapa poin utama dari misi ini:

1. Sarana dan Prasarana Inklusif:

- o Infrastruktur Transportasi: membangun dan meningkatkan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk memastikan konektivitas yang baik antara wilayah daratan dan kepulauan.
- o Aksesibilitas: memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus.
- o Ketersediaan sarana publik: menyediakan sarana pelayanan public yang mudah, terjangkau dan efisien guna menunjang pembangunan di wilayah terpencil dan kepulauan.

2. Pemerataan Pembangunan:

- o Pembangunan Berkeadilan: mengalokasikan sumber daya secara merata untuk pembangunan di wilayah terpencil, kepulauan dan kurang berkembang.
- o Pengembangan Wilayah: mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah yang kurang berkembang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah daratan dan kepulauan.

3. Dukungan Pembangunan:

- o Fasilitas Publik: membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat layanan masyarakat di wilayah daratan dan kepulauan.
- o Teknologi dan Komunikasi: membangun fasilitas teknologi informasi guna meningkatkan akses terhadap informasi dan memperlancar komunikasi guna mendukung pembangunan yang inklusif.

Dengan fokus pada aspek-aspek ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan secara merata dan inklusif, sehingga semua wilayah, baik daratan maupun kepulauan, dapat berkembang secara optimal.

Misi 4: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, serta Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan

Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morowali dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal, dilakukan terintegrasi, ramah lingkungan dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi. Berikut adalah beberapa poin utama dari misi ini:

1. Pengembangan Sektor Pertanian:

- o Peningkatan Produksi: meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan lokal, regional, nasional, dan serta produktivitas tanaman hortikultura dan perkebunan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
- o Teknologi Pertanian: menggunakan input dan teknologi modern (pertanian dan informasi) untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi hasil pertanian, dan diversifikasi produk pertanian.

2. Pengembangan Sektor Peternakan:

- o Ketahanan Pangan Asal Ternak: meningkatkan produksi ternak spesifik lokasi untuk memastikan ketersediaan pangan asal ternak yang cukup, dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

- o Nilai Tambah Produk Ternak: mengembangkan produk olahan ternak untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
 - 3. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan:
 - o Sumber Daya Laut: memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan.
 - o Sumberdaya di perairan umum: memanfaatkan sumberdaya pesisir, air payau dan air tawar untuk pengembangan perikanan budidaya.
 - o Teknologi Perikanan: menggunakan teknologi penangkapan ikan, budidaya yang ramah lingkungan guna meningkatkan efisiensi dan hasil perikanan, serta diversifikasi olahan hasil perikanan.
 - 4. Pengembangan Sektor Pariwisata:
 - o Destinasi Wisata: Mengembangkan destinasi wisata lokal untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.
 - o Promosi Wisata: Meningkatkan promosi wisata untuk memperkenalkan potensi wisata daerah.
 - 5. Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan:
 - o Produk Kreatif Lokal: Mengembangkan produk kreatif lokal yang unik dan memiliki nilai jual tinggi.
 - o Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha kreatif untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.
- Dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor ini, diharapkan kemakmuran masyarakat dapat meningkat secara signifikan melalui pemanfaatan potensi lokal dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Misi 5: Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi.

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang kuat dan adil dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut adalah beberapa poin utama dari misi ini:

1. Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan:
 - o Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - o Keadilan Ekonomi: Memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.



2. Pengelolaan Sumber Daya Alam:

- o Pemanfaatan Berkelanjutan: Menggunakan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang.
- o Konservasi: Melindungi dan melestarikan ekosistem alam untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

3. Revitalisasi Lingkungan:

- o Rehabilitasi Ekosistem: Memulihkan ekosistem yang rusak akibat aktivitas manusia untuk mengembalikan fungsi alam yang optimal.
- o Pengurangan Emisi: Mengurangi emisi karbon dan polusi untuk menjaga kualitas udara dan air.

4. Hilirisasi dan Industrialisasi:

- o Pengembangan Industri: Mendorong pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
- o Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri.

Dengan fokus pada aspek-aspek ini, diharapkan perekonomian dapat tumbuh secara kokoh dan berkeadilan, serta lingkungan dapat terjaga dengan baik melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Morowali Periode 2025-2045, juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025-2029 dan RPJM Nasional periode 2025-2029, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali menjadi bagian integral dari program provinsi dan nasional. Dengan demikian, rumusan Misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional sesuai tabel berikut:



Tabel 3.3

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dan Misi RPJMN (Asta Cita/Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi/Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045

Misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Misi RPJMN (Asta Cita/PN) Tahun 2025-2029	Misi RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045
Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani	Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.	Astacita 1/PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) Astacita 7 / PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	MISI 1 : Mewujudkan Kestinambungan Transformasi Tatakelola Pemerintahan Baik (Good Governance) Dan Reformasi Birokrasi Daerah Yang Melayani
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkarakter dan Berbudaya	Misi 1 Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.	Astacita / PN 4 Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas Astacita 8 / PN 8 Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	MISI 2 : Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi, memperkuat Ketahanan Sosial Budaya.
Misi 3: Memajukan Sarana dan Prasarana Inklusif dalam Mendukung Pemerataan	Misi 3 Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata	Astacita 3 / PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	MISI 4 : Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang serta Pemenuhan Sarana



Misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Misi RPJMN (Asta Cita/PN) Tahun 2025-2029	Misi RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045
Pembangunan Wilayah Daratan dan Kepulauan	ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Astacita 6/PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Prasarana dan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkesinambungan
Misi 4: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, serta Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan	Misi 2 Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	Astacita / PN 2 Menetapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Astacita 3 / PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	MISI 3 : Transformasi Perekonomian yang Tangguh dan berkesinambungan melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Sejahtera berkeadilan berbasis Hilirisasi Industri SDA dan pertanian serta pariwisata Berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi.	Misi 3 Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.	Astacita 5 / PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	MISI 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali selama Periode 2025–2029, terdiri dari Indikator kinerja Makro Bupati dan Wakil Bupati serta Indikator Sasaran Misi Pembangunan tahun 2025-2029 yang diturunkan dari misi dan sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045. Secara umum dapat diuraikan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali 2025-2029:

A. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui transformasi birokrasi yang melayani adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan di Kabupaten Morowali. Tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Reformasi birokrasi di Kabupaten Morowali bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, agile, dan fluid melalui penyederhanaan struktur, penggunaan teknologi digital, dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Transformasi birokrasi harus berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, responsif, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Untuk memastikan keberhasilan transformasi, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif, seperti audit kinerja dan penggunaan indikator yang jelas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan penjabaran misi sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali pada misi 1 ini adalah:

1. **Tujuan:** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*), dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Tujuan tersebut memiliki **Sasaran** : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)

Hasil penyusunan cascading dan perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis menurut misi pembangunan Kabupaten Morowali disajikan pada gambar dan tabel berikut.



Gambar 3.2

Logframe Tujuan dan Sasaran Strategis pada Misi



Tabel 3.4

Rumusan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikatornya pada Misi 1

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani	1.1 Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	BB	BB	BB	BB	
		1.1.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)	Urusan Perencanaan, Urusan Pengawasan, dan Unsur Penunjang (semua Perangkat Daerah)
			Indeks Pelayanan Publik	Predikat	C	B	B	B	A	A	Unsur Kewilayahan, Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kearsipan, Unsur Pendukung (Sekretariat DPRD)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A	Urusan Keuangan
			Tingkat Maturitas SPIP -T	Level	Level 3 (3.290)□	Level 3 (3.365)	Level 3 (3.430)□	Level 3 (3.505)	Level 3 (3.580)□	Level 3 (3.585)	Urusan Pengawasan
			Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	Urusan Komunikasi dan Informatika, persediaan dan Statistik



B. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter dan berbudaya.

Misi pembangunan 2 Kabupaten Morowali bertujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas, kompeten, dan sehat secara fisik, serta memiliki karakter kuat dan menjunjung tinggi budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Morowali berkomitmen untuk mencapai tujuan ini melalui pendidikan inklusif, program kesehatan komprehensif, pemberdayaan perempuan, kepemudaan dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Program unggulan seperti Pendidikan Plus (+) dan Kesehatan Plus (+) fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, perbaikan infrastruktur sekolah, penyuluhan gaya hidup sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, dan peningkatan fasilitas kesehatan yang menjangkau daerah terpencil. Dengan pendekatan ini, diharapkan generasi muda Morowali siap bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.

Berdasarkan penjabaran misi sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali pada misi 2 ini adalah:

1. **Tujuan 1:** Mewujudkan Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Manusia Yang Sehat dan Cerdas tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tujuan 1 memiliki **sasaran strategis**:

- a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

2. **Tujuan 2:** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Nilai Budaya, Ketahanan Keluarga dan Kerukunan Umat Beragama.

Tujuan tersebut memiliki **sasaran strategis**:

- a. Terwujudnya pembangunan kebudayaan lokal yang maju dan dinamis.
- b. Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak.
- c. Meningkatnya kerukunan umat beragama.



Gambar 3.3
Logframe Tujuan dan serta Sasaran Strategis pada Misi 2



Tabel 3.5
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 2

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter dan berbudaya	2.1. Mewujudkan Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Manusia Yang Sehat dan Cerdas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,50 - 74,65	74,65 - 74,95	74,91 - 75,25	75,21 - 75,55	75,99	75,99-76,26	
		2.1.1 Meningkatnya Kualitas dan pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	68,40	71,47	73,08	77,99	82,93	85,28	Urusan Pendidikan, urusan perpsutakaan, urusan kepemudaan dan olahraga
		2.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,808	0,814	0,821	0,826	0,833	0,839	Urusan Kesehatan, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
	2.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Nilai Budaya, Ketahanan Keluarga dan Kerukunan Umat Beragama		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	48,74	49,47	50,21	50,97	51,73	52,51	
		2.2.1 Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan Lokal Yang Maju dan Dinamis	Nilai Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	65,67	70,80	75,93	81,07	86,20	91,33	Urusan Kebudayaan
			Nilai Warisan Budaya	Indeks	48,47	59,67	70,86	82,06	100	100	
			Nilai Ekspresi Budaya	Indeks	48,64	60,48	72,32	85,49	100	100	
			Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	67,76	68,13	69,5	70	72,4	72,5	
		2.2.2 Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	0,55	0,60	0,64	0,70	0,74	0,78	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	85,57	85,87	86,17	86,47	86,77	87,07	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76,40	76,60	77,80	77,00	77,20	77,40	
		2.2.3 Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Nilai Toleransi	Nilai	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik, Unsur Penunjang (Sekretariat Daerah)
			Nilai Kesenjangan	Nilai	66,00	70,00	74,00	78,00	82,00	86,00	
			Nilai Kerjasama	Nilai	62,00	66,00	70,00	74,00	78,00	82,00	

C. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Misi 3: Memajukan sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan

Misi meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang inklusif, seperti sarana dan prasarana, di Kabupaten Morowali memiliki makna penting dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan yang berkelanjutan. Adapun infrastruktur dasar utama yang diperlukan adalah infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi (perhubungan) darat dan laut, komunikasi dan informasi, infrastruktur pertanian, perikanan, pariwisata, energi listrik dan air serta sosial budaya, olahraga dan kepemudaan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, akan tercipta konektivitas yang lebih baik, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih merata. Di wilayah kepulauan Kabupaten Morowali, pembangunan infrastruktur inklusif seperti pelabuhan dan dermaga (umum dan perikanan) yang dilengkapi fasilitas aksesibilitas, transportasi laut yang ramah disabilitas, jaringan telekomunikasi yang merata, sumber energi terbarukan, serta fasilitas kesehatan yang mudah diakses, sangat penting untuk mendukung pemerataan pembangunan. Pelabuhan dengan ramp dan lift, kapal feri dengan kursi roda dan toilet yang dapat diakses, serta peningkatan jaringan internet dan telekomunikasi akan memastikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan. Selain itu, pembangkit listrik tenaga surya atau angin dan klinik dengan fasilitas aksesibilitas akan menyediakan sumber energi yang berkelanjutan dan layanan kesehatan yang menjangkau daerah terpencil. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ini akan mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan Kabupaten Morowali.

Berdasarkan penjabaran misi sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali pada misi 3 ini adalah:

1. **Tujuan pembangunan adalah:** Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Yang Adil dan Berkelanjutan.
2. Tujuan tersebut memiliki **sasaran strategis:**
 - a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Dasar.
 - b. Meningkatnya Ketersediaan dan Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Laut.



Gambar 3.4
Logframe Tujuan dan Sasaran pada Misi 3



Tabel 3.6
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 3

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 Memajukan sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan											
	3.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Yang Adil dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	74,00	77,00	79,40	82,00	84,80	87,40	
		3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	70,00	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan
		3.1.2 Meningkatnya Ketersediaan dan Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Laut	Rasio Konektifitas	Rasio	6,31	6,38	6,46	6,52	6,59	6,66	Urusan Perhubungan

D. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi 4: Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan.

Misi meningkatkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Morowali melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumberdaya alam lokal. Dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti lahan pertanian yang subur, sumber daya laut yang melimpah, dan keindahan alam yang menarik wisatawan, serta mendorong inovasi dalam usaha ekonomi kreatif, masyarakat dapat memperoleh peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik. Pengembangan sektor-sektor ini akan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan secara holistik dan inklusif.

Berdasarkan penjabaran misi sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali pada misi 4 ini adalah:

1. **Tujuan 1** Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan. Tujuan 1 memiliki indikator tujuan yakni pertumbuhan ekonomi, gini rasio, pendapatan perkapita, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan.

Tujuan tersebut memiliki **sasaran strategis** yakni:

- a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan,
- b. Meningkatnya kontribusi sektor Koperasi UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif,
- c. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan agroindustri.
- d. Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kemandirian desa.
- e. Meningkatnya Angka Partisipasi Kerja Masyarakat



Gambar 3.5
Logframe Tujuan dan Sasaran Strategis pada Misi



Tabel 3.7
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 4

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan	4.1 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan		Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	12,99	12,65	12,32	12,00	11,49	11,19	
			Gini Ratio	Angka	0.210-0,265	0,2574	0,2498	0,2422	0,227	0,220	
			Pendapatan Perkapita (ADHK)	Ribu (Rupiah)	1.262,78	1.476,39	1.726,14	2.018,13	2.330,84	2.725,13	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	2,31 - 2,55	2,42	2,30	2,19	2,16	2,05	
			Tingkat Kemiskinan	Persentase	9,86 - 11,35	10,44	9,61	8,84	8,5	7,82	
		4.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan	Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69	Urusan Pertanian, Urusan Perikanan
		4.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	Milyar/Rupiah	53,70	67,70	81,70	95,70	110,30	124,30	Dinas Koperasi dan UMKM, DISPORA
		4.1.3 Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan dan Agroindustri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	Urusan Perdagangan
		4.1.4 Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kemandirian Desa	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	56,88	57,38	57,88	58,38	58,88	59,38	Dinas PMDP3A, Sosial, Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Perdagangan Dan Perindustrian
			Indeks Desa	Indeks	0,7286	0,7577	0,7881	0,8196	0,8524	0,8865	
			Indeks Ketahanan Pangan	Poin	82,21	82,91	83,60	84,30	85,00	85,30	
		4.1.5 Meningkatnya Angka Partisipasi Kerja Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase	62,45	64,52	67,74	71,13	74,69	78,42	Urusan Tenaga Kerja



E. Tujuan dan Sasaran Misi 5

Misi 5: Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi.

Urgensi misi 5 mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan di Kabupaten Morowali melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi, produk lokal dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Revitalisasi lingkungan yang berkelanjutan akan menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dalam menjaga kualitas lingkungan, diperlukan pengelolaan sampah yang baik dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat. Strategi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Berdasarkan penjabaran misi sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali pada misi 5 ini adalah:

1. Tujuan 1 adalah: Mewujudkan Stabilitas Perekonomian melalui Pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis Hilirisasi dan Industrialisasi, dengan indikator tujuan yakni kontribusi sektor industri pengolahan dan pembentukan modal tetap bruto.

Tujuan 1 pada misi 5 ini memiliki **sasaran strategis** yakni:

- a. Terwujudnya Usaha/Industri Kecil dan Menengah Sebagai Rantai Pasok Bagi Industri Pengolahan dan Pertambangan;
- b. Meningkatnya Investasi Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan.

2. Tujuan 2 adalah: Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Tujuan 2 tersebut memiliki **sasaran strategis** yakni:

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan ketangguhan terhadap bencana.



Gambar 3.6

Logframe Tujuan dan Sasaran pada Misi 5



Tabel 3.8
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 5

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi	5.1 Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Melalui Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Hilirisasi dan Industrialisasi		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase	75,17	75,12	75,06	75,01	74,95	74,90	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto	Ribu (Rupiah)	40.301,79	41.107,83	41.929,98	42.768,58	43.623,95	44.496,43	
		5.1.1 Terwujudnya Usaha/Industri Kecil dan Menengah Sebagai Rantai Pasok Bagi Industri Pengolahan dan Pertambangan	Pertumbuhan Industri Kecil	Persentase	5,47	5,58	5,69	5,80	5,92	6,04	Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian
		5.1.2 Meningkatnya Investasi Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Realisasi Investasi	Triliun	148.234.750.000.000	198.234.750.000.000	248.234.750.000.000	298.234.750.000.000	348.234.750.000.000	398.234.750.000.000	Urusan Penanaman Modal
		5.2 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,37	0,40	0,43	0,46	0,50	0,54	
		5.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	83,45	83,70	83,95	84,20	84,51	84,85	Urusan Lingkungan Hidup
		5.2.2 Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan ketangguhan terhadap bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantubumlinmas	Indeks	71,10	72,48	73,89	75,32	76,60	78,30	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik



3.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyatakan bahwa perumusan strategi dalam RPJMD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk emncapai tujuan dan sasaran RPJMD.. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Rumusan strategi akan dijadikan acuan dalam mengimplementasikan sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Morowali dalam kurun waktu lima tahun kedepan mengacu pada prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang diatur dalam arah kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu *economically feasible, socially acceptable dan environmentally sustainable*.

3.4.1 Penahapan Pembangunan

Sebelum perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Morowali, perlu dirumuskan fokus pembangunan pada setiap tahun pada periode 2025-2029. Penahapan fokus pembangunan didasarkan pada focus pembangunan pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Morowali, dan visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali periode 2025-2029 serta permasalahan dan urgensi kondisi pembangunan Kabupaten Morowali. Penahapan pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahunnya. Tahapan pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 3.9

Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029

Tujuan/Urusan Pembangunan	    				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih/ Reformasi Birokrasi	Transformasi digital dan transparansi peningkatan integritas aparatur sipil dan kepemimpinan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat untuk mendukung Pelayanan publik Peningkatan Pelayanan publik dan pengawasan, serta tata kelola keuangan	Transformasi digital dan transparansi peningkatan integritas aparatur sipil dan kepemimpinan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat untuk mendukung Pelayanan publik Peningkatan pemahaman regulasi dan aspek hukum bagi aparat dan masyarakat	Pemantapan Transformasi digital dan transparansi Penguatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat untuk mendukung Pelayanan publik Peningkatan pemahaman regulasi dan aspek hukum bagi aparat dan masyarakat	Pemantapan Transformasi digital dan transparansi Pemantapan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat untuk mendukung Pelayanan publik Peningkatan pemahaman regulasi dan aspek hukum bagi aparat dan masyarakat Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Pemantapan Transformasi digital, kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat, pemahaman regulasi dan aspek hukum, dan Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil



Tujuan/Urusan Pembangunan					
					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Mewujudkan Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Manusia Yang Sehat dan Cerdas	Penataan Sumberdaya Manusia Pendidik (Guru), dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan wilayah kecamatan.	Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Pendidik (Guru) dan penyediaan di daerah tugas.	Pemantapan kualitas Sumberdaya Manusia Pendidik dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan wilayah kecamatan.	Perbaikan kesejahteraan Sumberdaya Manusia Pendidik dan tenaga pendidikan distribusi yang merata sesuai kebutuhan wilayah kecamatan.	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Peningkatan kesejahteraan SDM Pendidik dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan wilayah kecamatan.
	Penambahan prasarana dan sarana kelas pada wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.	Penambahan prasarana dan sarana kelas pada wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.	Pemantapan prasarana dan sarana kelas pada wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.	Pemeliharaan prasarana dan sarana kelas pada wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kelas.
	Penyediaan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, seni dan budaya	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, seni dan budaya	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, seni dan budaya	pemeliharaan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, seni dan budaya	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, seni dan budaya



Tujuan/Urutan Pembangunan					
					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Pengembangan minat dan bakat olahraga, seni dan budaya guna peningkatan prestasi	Pengembangan minat dan bakat olahraga, seni dan budaya guna peningkatan prestasi	Pemantapan minat dan bakat olahraga, seni dan budaya guna peningkatan prestasi	Pengembangan even olahraga, seni dan budaya skala regional dan nasional	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Pengembangan even olahraga, seni dan budaya
	Pengembangan even olahraga, seni dan budaya skala propinsi	Pengembangan even olahraga, seni dan budaya skala Kabupaten	Pengembangan even olahraga, seni dan budaya skala Kabupaten		Pemantapan even olahraga, seni dan budaya skala Kabupaten
	Penataan Sumberdaya Manusia kesehatan (Dokter dan Tenaga Kesehatan) dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan tiap wilayah kecamatan.	Peningkatan skill Sumberdaya Manusia kesehatan (Dokter dan Tenaga Kesehatan) dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan tiap wilayah kecamatan.	Pemantapan kualitas Sumberdaya Manusia kesehatan (Dokter dan Tenaga Kesehatan) dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan tiap wilayah kecamatan.	Perbaikan kesejahteraan Sumberdaya Manusia kesehatan (Dokter dan Tenaga Kesehatan) dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan tiap wilayah kecamatan.	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan penataan dan distribusi sumber daya kesehatan, dan Peningkatan kesejahteraan SDM kesehatan
	Pemenuhan Prasarana dan sarana kesehatan guna mempermudah	Pemenuhan ketersediaan Prasarana dan sarana kesehatan	Pemenuhan ketersediaan Prasarana dan sarana kesehatan	Pemantapan Prasarana dan sarana kesehatan guna	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan



Tujuan/Urusan Pembangunan					
					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	akses pelayanan kesehatan	guna mempermudah akses pelayanan kesehatan.	guna mempermudah akses pelayanan kesehatan.	mempermudah akses pelayanan kesehatan	Pemenuhan Prasarana dan sarana kesehatan guna mempermudah akses pelayanan kesehatan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Nilai Budaya, Ketahanan Keluarga dan Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak berbasis responsif gender	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak berbasis responsif gender	Penguatan perlindungan perempuan dan anak berbasis responsif gender	Penguatan perlindungan perempuan dan anak berbasis responsif gender	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Penguatan perlindungan perempuan dan anak berbasis responsif gender
	Pengendalian penduduk melalui peningkatan akses layanan KB dan edukasi remaja	Pengendalian penduduk melalui peningkatan akses layanan KB dan edukasi remaja	Pengendalian penduduk melalui peningkatan akses layanan KB dan edukasi remaja	Pengendalian penduduk melalui peningkatan akses layanan KB dan edukasi remaja	Pengendalian penduduk melalui peningkatan akses layanan KB dan edukasi remaja
	Peningkatan sinergi antara FKUB dengan masyarakat sebagai Deteksi dini dan	Peningkatan sinergi antara FKUB dengan masyarakat sebagai Deteksi dini dan	Peningkatan sinergi antara FKUB dengan masyarakat sebagai Deteksi dini dan	Pemantapan sinergi antara FKUB dengan masyarakat sebagai Deteksi dini dan	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan sinergi antara FKUB dengan



Tujuan/Urusan Pembangunan					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan.	pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan.	pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan.	pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan.	masyarakat sebagai Deteksi dini dan pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan.
Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Yang Adil dan Berkelanjutan	Penataan kawasan, Penyediaan, dan Pemeliharaan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Perumahan, Air Minum, Irigasi dan Listrik) Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Penataan kawasan, Penyediaan, dan Pemeliharaan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Perumahan, Air Minum, Irigasi dan Listrik) Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Penataan kawasan, Penyediaan, dan Pemeliharaan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Perumahan, Air Minum, Irigasi dan Listrik) Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Pemantapan kawasan, dan Pemeliharaan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Perumahan, Air Minum, Irigasi dan Listrik) Pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan penataan kawasan, dan Pemeliharaan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Perumahan, Air Minum, Irigasi dan Listrik) Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan sarana dan prasarana perhubungan



Tujuan/Urusan Pembangunan					
					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan	Intensifikasi lahan pertanian untuk peningkatan produktifitas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Pengembangan fasilitas penunjang produksi, panen dan pascapanen tanaman pangan, fasilitas penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan ketersediaan pangan melalui partisipasi anggota rumahtangga dan pemanfaatan pekarangan	Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih/bibit unggul, pupuk, pengendalian hama/penyakit) Pengembangan fasilitas penunjang produksi, panen dan pascapanen tanaman pangan, fasilitas penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan ketersediaan pangan melalui partisipasi anggota rumahtangga dan pemanfaatan pekarangan	Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih/bibit unggul, pupuk, pengendalian hama/penyakit) Pengembangan fasilitas penunjang produksi, panen dan pascapanen tanaman pangan, fasilitas penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan ketersediaan pangan melalui partisipasi anggota rumahtangga dan pemanfaatan pekarangan	Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih/bibit unggul, pupuk, pengendalian hama/penyakit) Pemantapan fasilitas penunjang produksi, panen dan pascapanen tanaman pangan, fasilitas penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan ketersediaan pangan melalui partisipasi anggota rumahtangga dan pemanfaatan pekarangan	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan penunjang produksi, panen dan pascapanen tanaman pangan fasilitas penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Pengembangan ketersediaan pangan



Tujuan/Urusan Pembangunan					
					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Peningkatan akses pasar untuk produk pertanian melalui kerjasama dengan koperasi dan perusahaan Pelatihan dan peningkatan kapasitas petani dalam teknik pertanian modern berbasis IoT dan ramah lingkungan.	Peningkatan akses pasar untuk produk pertanian melalui kerjasama dengan koperasi dan perusahaan	Peningkatan akses pasar untuk produk pertanian melalui kerjasama dengan koperasi dan perusahaan Pelatihan dan peningkatan kapasitas petani dalam teknik pertanian modern berbasis IoT dan ramah lingkungan.	Peningkatan akses pasar untuk produk pertanian melalui kerjasama dengan koperasi dan perusahaan	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Peningkatan akses pasar untuk produk pertanian
	Peningkatan Produksi Perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan untuk mendukung hilirisasi Tongkol Cakalang Tuna (TCT)	Peningkatan Produksi Perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan untuk mendukung hilirisasi Tongkol Cakalang Tuna (TCT)	Peningkatan Produksi Perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan untuk mendukung hilirisasi Tongkol Cakalang Tuna (TCT)	Peningkatan Produksi Perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan untuk mendukung hilirisasi Tongkol Cakalang Tuna (TCT) dan	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Peningkatan Produksi Perikanan



Tujuan/Urusan Pembangunan					
					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	dan Kawasan Prioritas Perdesaan (KPP)	dan Kawasan Prioritas Perdesaan (KPP)	dan Kawasan Prioritas Perdesaan (KPP)	Kawasan Prioritas Perdesaan (KPP)	
	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan swasta dalam pengelolaan perikanan	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan swasta dalam pengelolaan perikanan	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan swasta dalam pengelolaan perikanan	Pemantapan kerjasama antar pemerintah daerah dengan swasta dalam pengelolaan perikanan	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan kerjasama antar pemerintah daerah dengan swasta dalam pengelolaan perikanan
	Peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan melalui pelatihan dan bantuan teknis		Peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan melalui pelatihan dan bantuan teknis		Peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan melalui



Tujuan/Urusan Pembangunan					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
					pelatihan dan bantuan teknis
	Peningkatan fasilitas destinasi wisata (penginapan/ <i>cottage</i>, restoran, dan pusat informasi.) Pengembangan kelembagaan dan pengelola Koperasi, UMKM, Usaha Wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Peningkatan aksesibilitas ke lokasi wisata dengan pembangunan jalan dan fasilitas transportasi	Pengembangan fasilitas destinasi wisata (penginapan/ <i>cottage</i>, restoran, dan pusat informasi.) Pengembangan kelembagaan dan pengelola Koperasi, UMKM, Usaha Wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Peningkatan aksesibilitas ke lokasi wisata dengan pembangunan jalan	Promosi dan pengembangan destinasi wisata utama berbasis alam dan laut Pengembangan kelembagaan dan pengelola Koperasi, UMKM, Usaha Wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Peningkatan aksesibilitas ke lokasi wisata dengan pembangunan jalan dan fasilitas transportasi	Pemantapan Promosi dan pengembangan destinasi wisata utama berbasis alam dan laut Pemantapan kelembagaan dan pengelola Koperasi, UMKM, Usaha Wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Pemeliharaan Infrastruktur aksesibilitas ke lokasi wisata	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Promosi dan pengembangan destinasi wisata Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan kelembagaan dan pengelola Koperasi, UMKM, Usaha Wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Pemeliharaan Infrastruktur



Tujuan/Urusan Pembangunan	    				
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		dan fasilitas transportasi			aksesibilitas ke lokasi wisata
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk menjamin keterjangkauan dan stabilitas harga barang serta perlindungan konsumen.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk menjamin keterjangkauan dan stabilitas harga barang serta perlindungan konsumen.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan untuk menjamin keterjangkauan dan stabilitas harga barang serta perlindungan konsumen.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan dalam menjaga stabilitas harga serta perlindungan konsumen.	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan Sarana dan Prasarana Perdagangan dalam menjaga stabilitas harga serta perlindungan konsumen.
	Peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin, rentan dan disabilitas	Peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin, rentan dan disabilitas	Peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin, rentan dan disabilitas	Peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin, rentan dan disabilitas	Peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin, rentan dan disabilitas
	Pengembangan ekonomi dan kualitas aparatur pemerintah desa guna	Pengembangan ekonomi dan kualitas aparatur pemerintah desa guna	Pengembangan ekonomi dan kualitas aparatur pemerintah desa guna	Penguatan ekonomi dan kualitas aparatur pemerintah desa guna	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan ekonomi dan kualitas aparatur



Tujuan/Urusan Pembangunan					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	meningkatkan Status desa	meningkatkan Status desa	meningkatkan Status desa	meningkatkan Status desa	pemerintah desa guna meningkatkan Status desa
	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja
	Memfasilitasi, memediasi dan mengawasi agar hak pekerja terlindungi, dan perusahaan tetap beroperasi secara kondusif	Memfasilitasi, memediasi dan mengawasi agar hak pekerja terlindungi, dan perusahaan tetap beroperasi secara kondusif	Memfasilitasi, memediasi dan mengawasi agar hak pekerja terlindungi, dan perusahaan tetap beroperasi secara kondusif	Memfasilitasi, memediasi dan mengawasi agar hak pekerja terlindungi, dan perusahaan tetap beroperasi secara kondusif	Memfasilitasi, memediasi dan mengawasi agar hak pekerja terlindungi, dan perusahaan tetap beroperasi secara kondusif
Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Melalui Pengelolaan	Penguatan Industri Kecil Menengah melalui kemitraan dengan Industri Pengolahan.	Penguatan Industri Kecil Menengah melalui kemitraan dengan Industri Pengolahan.	Penguatan Industri Kecil Menengah melalui kemitraan dengan Industri Pengolahan.	Penguatan Industri Kecil Menengah melalui kemitraan dengan Industri Pengolahan.	Penguatan Industri Kecil Menengah melalui kemitraan dengan Industri Pengolahan.



Tujuan/Urusan Pembangunan					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Sumberdaya Alam Berbasis Hilirisasi dan Industrialisasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri Kecil Menengah Mendorong kemudahan dan perluasan kesempatan berusaha untuk meningkatkan realisasi investasi Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri Kecil Menengah Mendorong kemudahan dan perluasan kesempatan berusaha untuk meningkatkan realisasi investasi Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri Kecil Menengah Mendorong kemudahan dan perluasan kesempatan berusaha untuk meningkatkan realisasi investasi Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri Kecil Menengah Mendorong kemudahan dan perluasan kesempatan berusaha untuk meningkatkan realisasi investasi Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri Kecil Menengah Mendorong kemudahan dan perluasan kesempatan berusaha untuk meningkatkan realisasi investasi Daerah
Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan Rehabilitas lingkungan yang mengalami degradasi akibat aktifitas pertambangan maupun kegiatan usaha lainnya Koordinasi dan fasilitasi dalam mendukung	Meningkatkan Rehabilitas lingkungan yang mengalami degradasi akibat aktifitas pertambangan maupun kegiatan usaha lainnya Koordinasi dan fasilitasi dalam	Meningkatkan Rehabilitas lingkungan yang mengalami degradasi akibat aktifitas pertambangan maupun kegiatan usaha lainnya Koordinasi dan fasilitasi dalam mendukung kebijakan	Meningkatkan Rehabilitas lingkungan yang mengalami degradasi akibat aktifitas pertambangan maupun kegiatan usaha lainnya Koordinasi dan fasilitasi dalam	Meningkatkan Rehabilitas lingkungan yang mengalami degradasi akibat aktifitas pertambangan maupun kegiatan usaha lainnya Koordinasi dan fasilitasi dalam



Tujuan/Urusan Pembangunan					
					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	kebijakan rehabilitasi lahan eks pertambangan Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan (Limbah B3 dan industri, Emisi GRK) Meningkatkan pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana	mendukung kebijakan rehabilitasi lahan eks pertambangan Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan (Limbah B3 dan industri, Emisi GRK) Meningkatkan pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana	rehabilitasi lahan eks pertambangan Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan (Limbah B3 dan industri, Emisi GRK) Meningkatkan pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana	mendukung kebijakan rehabilitasi lahan eks pertambangan Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan (Limbah B3 dan industri, Emisi GRK) Meningkatkan pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana	mendukung kebijakan rehabilitasi lahan eks pertambangan Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan (Limbah B3 dan industri, Emisi GRK) Meningkatkan pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana



Tujuan/Urusan Pembangunan					
					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penguatan wawasan kebangsaan dan partisipasi politik sehat Penguatan kapasitas Linmas Desa/kelurahan dalam penanganan keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana dan pertolongan darurat	Penguatan wawasan kebangsaan dan partisipasi politik sehat Penguatan kapasitas Linmas Desa/kelurahan dalam penanganan keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana dan pertolongan darurat Pengembangan sistem kewaspadaan dini melalui penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan membangun call center pengaduan cepat	Penguatan wawasan kebangsaan dan partisipasi politik sehat Pemberdayaan dan edukasi masyarakat terkait kesadaran hukum, ketertiban, anti-SARA dan kesiapsiagaan bencana Pengembangan sistem kewaspadaan dini melalui penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Penguatan wawasan kebangsaan dan partisipasi politik sehat Penguatan kapasitas Linmas Desa/kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemilukada Pengembangan sistem kewaspadaan dini melalui penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Penguatan wawasan kebangsaan dan partisipasi politik sehat Penguatan kapasitas Linmas Desa/kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemilukada Pengembangan sistem kewaspadaan dini melalui penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat



Arah kebijakan pada tahun pertama ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas IKM-UMKM dan sumber daya pangan pertanian serta perikanan, memperkuat pilar pertumbuhan hilirisasi industri pengolahan, dan mengoptimalkan permintaan produk industri pengolahan berbasis industri pertambangan hijau. Kabupaten Morowali diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Kebijakan ini juga mencakup penataan kawasan industri strategis nasional, penataan pola ruang dan pemanfaatan ruang, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang didukung oleh tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, dengan mengoptimalkan digitalisasi pelayanan pemerintahan daerah serta percepatan reformasi birokrasi yang profesional dan melayani.

Untuk mewujudkan visi Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan perlu ditetapkan langkah-langkah dan upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang jelas serta terarah hingga Tahun 2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Morowali mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 juga mengacu pada tahapan RPJPD Kabupaten Morowali Tahap ke- Satu. RPJPD kesatu ditujukan untuk mencapai Morowali Juara (Maju, Mandiri dan berkeadilan) sehingga tingkat ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan mineral yang terbatas potensinya dapat direduksi dengan mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa pada tahap/periode pertama RPJPD, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Penguatan modal dasar pembangunan dilakukan dengan mengarahkan seluruh sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata, dengan fokus pada hilirisasi industri dan daya saing ekspor hasil hilirisasi nikel yang didukung oleh usaha-usaha rumah tangga (home industry) seperti IKM dan UMKM. Kebijakan ini juga mendorong ekonomi dan investasi hijau, serta mempersiapkan ekonomi daerah pasca tambang secara dini. Selain itu, kebijakan ini mencakup perbaikan dan reklamasi lingkungan hidup di wilayah eks tambang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan sosial dasar, percepatan penyelesaian kemiskinan dan penghapusan kelaparan, serta menciptakan pertumbuhan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

3.4.2 Lokus Pembangunan Kabupaten Morowali

Penyajian lokus pembangunan untuk Kabupaten Morowali berdasarkan kecamatan dan wilayah pengembangan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan perhatian yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifiknya. Dengan mengelompokkan lokus pembangunan berdasarkan kecamatan, pemerintah dapat fokus pada isu-isu lokal yang unik dan memberikan solusi yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, penyajian berdasarkan wilayah pengembangan memungkinkan identifikasi potensi dan tantangan yang lebih luas, seperti pengembangan kawasan industri di Bahodopi. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah untuk memastikan bahwa setiap wilayah dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Lokus pembangunan Kabupaten Morowali didasarkan pada pentahapan pembangunan, selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Kecamatan Lokus Prioritas Pembangunan Kabupaten Morowali
Tahun 2026-2030

Aspek Pengembangan Lokus					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengembangan kawasan Kota Kecil	Bahodopi dan Bungku Tengah	Bahodopi dan Bungku Tengah	Bahodopi, Bungku Tengah dan Bungku Pesisir	Bahodopi, Bungku Tengah dan Bungku Pesisir	Bahodopi, Bungku Tengah dan Bungku Pesisir
Kemiskinan	Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Sombori Kepulauan,	Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Sombori Kepulauan,	Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Sombori Kepulauan,	Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Sombori Kepulauan,	Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Sombori Kepulauan,
Prasarana Pendidikan	Bahodopi, Bungku Barat, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Bungku Tengah	Bahodopi, Bungku Barat, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Bungku Tengah	Bahodopi, Bungku Barat, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Bungku Tengah	Bahodopi, Bungku Barat, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Bungku Tengah	Bahodopi, Bungku Barat, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, dan Bungku Tengah
SDM Pendidikan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kecamatan
Prasarana Kesehatan	Bahodopi Bungku Tengah Bumiraya Bungku Selatan Menui Kep Sombori Kep	Bungku Selatan Menui Kep Bumiraya Bahodopi Bungku Pesisir Sombori Kep	Menui Kep Witaponda, Bungku Pesisir, Bungku Timur Bungku Barat	Bumi Raya Bungku Barat	Bungku Selatan Menui Kep dan Sombori Kepulauan
SDM Kesehatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kecamatan

Aspek Pengembangan Lokus					
	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Infrastruktur Perhubungan dan Komunikasi	Bungku Selatan dan Sambori Kepulauan Menui Kep. dan Bungku Pesisir	Bungku Selatan dan Sambori Kepulauan Menui Kep. dan Bungku Pesisir	Bungku Selatan dan Sambori Kepulauan Menui Kep. dan Bungku Pesisir	Witaponda, Bungku Tengah, Bungku Barat Bungku Timur	Witaponda, Bungku Tengah, Bungku Barat Bungku Timur
Infrastruktur Energi dan Air	Bahodopi dan Bungku Tengah	Bungku Selatan, Sambori Kepulauan	Bungku Timur dan Bungku Pesisir	Bungku Barat dan Menui Kepulauan	Bumiraya dan Witaponda
Jalan dan perumahan	Bahodopi, Bungku Tengah	Bungku Pesisir, Sambori Kepulauan	Bungku Selatan, Bungku Barat	Bungku Timur, dan Witaponda	Menui Kepulauan, Bumi Raya
Pertanian dan Peternakan	Bumi Raya, Witaponda dan Bungku Barat	Bumi Raya, Witaponda dan Bungku Barat	Bumi Raya, Witaponda dan Bungku Barat	Bumi Raya, Witaponda dan Bungku Barat	Bumi Raya, Witaponda dan Bungku Barat
Perikanan	Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Sambori Kepulauan	Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Sambori Kepulauan	Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Sambori Kepulauan	Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Sambori Kepulauan	Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Sambori Kepulauan
Lingkungan dan RTH	Bungku Tengah, Bahodopi	Bungku Tengah, Bahodopi dan Bungku Pesisir	Bungku Barat, Witaponda	Bungku Selatan Sambori Kepulauan, Menui Kepulauan	Bumi Raya, Bungku Timur
Pariwisata	Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Pesisir, dan Sambori Kepulauan	Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Pesisir, dan Sambori Kepulauan	Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Pesisir, dan Sambori Kepulauan	Menui Kepulauan dan Bungku Selatan	Menui Kepulauan, Bungku Selatan dan Sambori Kepulauan
Ketenagakerjaan	Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Sombori Kep,	Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Sombori Kep,	Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Sombori Kep,	Witaponda, Bumi Raya, Bahodopi dan Bungku Barat	Witaponda, Bumi Raya, Bahodopi dan Bungku Barat
Perindustrian	Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Timur, Bungku Pesisir dan Bahodopi	Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Timur, Bungku Pesisir dan Bahodopi	Bungku Selatan, Sombori Kep dan Menui Kepulauan	Bungku Selatan, Sombori Kep dan Menui Kepulauan	Bungku Pesisir dan Bungku Barat
Perdagangan	Bungku Tengah Bahodopi	Bungku Selatan dan Bungku Barat	Bungku Pesisir dan Bungku Timur	Sombori Kep dan Menui Kepulauan	Bumiraya dan Witaponda

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, diperlukan adanya sebuah lembaga/badan yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Perdesaan. Badan/lembaga tersebut disebut sebagai Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya, baik pada tingkat

pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Sehubungan ketentuan tersebut, Bupati Morowali telah membentuk TKPKP Kabupaten Morowali sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.0264/DPMDP3A/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Morowali. Delineasi Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Selatan terdiri dari 16 (delapan) desa yang terletak di sebelah timur teluk tolo tepatnya berada di pesisir yang tepatnya berbatasan langsung sebelah selatan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kecamatan Menui Kepulauan. Keenam belas desa tersebut meliputi desa bakala, desa buajangka, desa kaleroang, desa padabale, desa paku, desa lakombulo, desa bungingkela, desa buton, desa koburu, desa jawi-jawi, desa pado-pado, desa umbele, desa umbele lama, desa polewali, desa boelimau dan desa pulau dua. Luas Kawasan Perdesaan sentra minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan mencakup 414,56 km². Kedepan Wilayah Bahodopi akan menjelma menjadi wilayah yang bonafide yang berkembang pesat. Kerja sama kesepahaman pemerintah dan sejumlah para investasi di wilayah Morowali lebih dipererat, memperkokoh sinergitas sehingga Sumber daya Manusia, masyarakat mendapatkan hak sesuai. Mengarah pada subtransi pengembangan dan pesatnya warga maupun peningkatan perbaikan infrastruktur mulai dari unsur SDM sampai pada hadirnya Sejumlah perusahaan ternama, Desa Keurea, Watufia, Labota Bahomakmur Makarti, Tabo, Bahodopi, Dampala, Siumbatu dan Desa lele. Dua Desa yang menjadi titik empu Kordinat wilayah Investasi Asia, yakni Desa Bahodopi dan Keurea.

3.4.3 Arah Kebijakan

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.



Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Morowali disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.11

**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali
Tahun 2025-2029**

MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
MISI I : Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani				
1.1.1.1.1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan inovatif melalui perencanaan tepat sasaran, Tranfromasi digitalisasi layanan, penguatan SDM, dan pengawasan efektif.	1.1.1.1.1.1	- penguatan pondasi reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengukuran, struktur, dan budaya organisasi - Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung perencanaan yang handal dan percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.	Urusan Perencanaan, Unsur Penelitian dan Pengembangan, Urusan Pengawasan, dan semua Perangkat Daerah (Unsur Penunjang)
		1.1.1.1.1.2	- Penguatan Pondasi penerapan aplikasi yang telah beroperasi, mengonsolidasikan aplikasi menjadi platform digital terpadu baik di internal maupun antar-instansi, serta interoperabilitas data dan aplikasi - Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di seluruh wilayah kecamatan dan wilayah terpencil guna optimalisasi akses jaringan internet dalam mendukung digitalisasi layanan publik dan inovasi pelayanan. - Meningkatkan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan kinerja dan pelaporan. - Memperkuat pengawasan, transparansi, dan keterbukaan informasi kinerja kepada publik melalui penyediaan layanan digital yang mudah di akses. - Penguatan keamanan dan perlindungan data pemerintah.	Urusan Komunikasi dan Infomatika, persadian dan Statistik



MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
1.1.1.1.2	Mewujudkan Aparatur pemerintahan yang berkualitas dan melayani	1.1.1.1.2.1	Penguatan sistem merit dan manajemen sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar	Urusan pendidikan dan pelatihan
		1.1.1.1.2.2	Penguatan peran dan kualitas pelayanan serta pemberdayaan Masyarakat, Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa secara optimal dan berkelanjutan melalui pengembangan inovasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kearsipan, Kecamatan, Unsur Pendukung (Sekretariat DPRD)
		1.1.1.1.2.3	Arah Kebijakan KLHS Hl. 253 : meletakkan fondasi penerapan standar pelayanan masyarakat di berbagai sektor.	Unsur Penunjang (Sekretariat Daerah)
1.1.3.1.1	Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1.1.3.1.1.1	Peletakan Pondasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tindak lanjut audit untuk mengurangi resiko dan efektifitas pencegahan korupsi pada ASN dan pemda Morowali	Unsur Pengawasan (Inspektorat)
		1.1.3.1.1.2	Penguatan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam pencegahan korupsi dan kerugian negara secara berkelanjutan	Unsur Pengawasan (Inspektorat)
			Optimalisasi penurunan persentase Korupsi di lingkungan pemerintah Morowali melalui pemetaan, pencegahan, dan mitigasi rawan korupsi	Unsur Pengawasan (Inspektorat)
1.1.4.1.1	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan yang terintegrasi.	1.1.4.1.1.1	Peningkatan PAD dan Bagi Hasil Daerah sebagai pendanaan pembangunan daerah yang bersinergi dgn kebijakan fiskal nasional menuju peningkatan kemandirian fiskal Morowali	Urusan Keuangan
		1.1.4.1.1.2	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara baik	
		1.1.4.1.1.3	Arah Kebijakan KLHS. Hal. 268 : •Penguatan Sistem Anti Korupsi; •Mengoptimalkan Penguatan Integritas Masyarakat, dan Penegakan Hukum; •Memperkuat kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah; •Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah	Unsur Pengawasan (Inspektorat) Unsur Penunjang (Sekretariat Daerah)



MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
MISI II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya				
2.1.1.1.1	Meningkatnya Kualitas dan pemerataan Pendidikan	2.1.1.1.1.1	Perluasan akses pendidikan dasar dan menengah secara merata melalui keterjangkauan biaya pendidikan	Urusan Pendidikan, urusan perpustakaan,
		2.1.1.1.1.2	Penguatan pondasi biaya pendidikan dan Optimalisasi kesetaraan pendidikan bagi penduduk putus sekolah	Urusan Pendidikan
		2.1.1.1.1.3	Arah Kebijakan KLHS hl. 105: Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun; • Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar siswa memperoleh keterampilan dasar, kemampuan berpikir kritis, memiliki nilai-nilai dan karakter pribadi untuk lebih produktif; • Meningkatkan kesetaraan kualitas layanan pendidikan; • Meningkatkan pemenuhan Anggaran Pendidikan	Urusan Pendidikan
		2.1.1.1.1.4	Penguatan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik jalur formal maupun nonformal, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi digital	Urusan Pendidikan, urusan kepemudaan dan olahraga
		2.1.1.1.1.5	Meletakkan Pemerataan distribusi guru dan peningkatan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	Urusan Pendidikan
		2.1.1.1.1.6	Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang layak dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter	Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,
				2.1.1.1.1.7
		2.1.1.1.1.8	Fasilitasi Penguatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah	Urusan Pendidikan
		2.1.1.1.1.9	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, serta pengembangan infrastruktur dan prestasi olahraga	Urusan kepemudaan dan Olahraga
2.1.1.1.2	Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan layanan,	2.1.1.1.1.1	Peningkatan kualitas akses layanan kesehatan dasar dan rujukan secara merata di seluruh wilayah melalui Penguatan sistem manajemen data dan digitalisasi layanan kesehatan.	Urusan Kesehatan



MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
	penguatan SDM, infrastruktur, dan perilaku hidup sehat yang berkelanjutan.	2.1.1.1.1.2	Penguatan sarana prasarana, obat-obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan.	Urusan Kesehatan
		2.1.1.1.1.3	Arah Kebijakan KLHS Hal. 215: - Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah; - Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; - Meningkatkan status gizi masyarakat; - Meningkatkan kesehatan ibu, anak; - Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); - Meningkatkan pemahaman masyarakat dan upaya pencegahan tentang penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan; - Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah; - Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Urusan Kesehatan
		2.1.1.1.1.4	Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan, Gizi Ibu dan Anak dalam mengurangi angka stunting	Urusan Kesehatan, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.1.1.1.1.5	Arah Kebijakan KLHS Hal. 216: - Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; - Meningkatkan status gizi masyarakat; - Meningkatkan kesehatan ibu, anak;	Urusan Kesehatan, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.1.1.1.1.6	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan untuk menjaga kualitas pelayanan yang berkelanjutan.	Urusan Kesehatan
		2.1.1.1.1.7	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	



MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
2.1.1.1.3	Mewujudkan pengarusutamaan gender yang optimal	2.1.2.1.1.1	Penguatan tata kelola, peran dan partisipasi, dan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan dan peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.1.2.1.1.2	Meletakkan pondasi dan penguatan kapasitas dan kemandirian perempuan dalam pekerjaan, keterwakilan dalam pemerintahan dan peran politik, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan	
		2.1.2.1.1.3	Peningkatan partisipasi aktif Perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan	
		2.1.2.1.1.4	Pemenuhan dan perlindungan hak Perempuan bebas dari kekerasan	
		2.1.2.1.1.5	Penguatan kualitas SDM Morowali melalui optimalisasi peran dan fungsi keluarga	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1.1.1.4	Mewujudkan Kualitas SDM melalui Penguatan Nilai Kerukunan Umat Beragama	2.1.1.1.4.1	Pemantapan kondisi sosial dan politik serta keamanan melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa serta upaya dini pencegahan konflik	Unsur Kesatuan bangsa dan Politik, Unsur Penunjang (Sekretariat Daerah)
2.1.1.1.5	Memperkuat ketahanan sosial, warisan budaya daerah, dan pelestarian dan pengembangan ekspresi budaya lokal melalui ruang kreativitas dan partisipasi masyarakat.	2.1.1.1.5.1	Mendorong pelestarian budaya lokal dan pengembangan komunitas adat.	Urusan Kebudayaan
		2.1.1.1.5.2	Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi sosial.	Unsur Kesatuan bangsa dan Politik
		2.1.1.1.5.3	Memfasilitasi ruang interaksi sosial dan penguatan lembaga kemasyarakatan.	Unsur Kesatuan bangsa dan Politik



MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
MISI III : Memajukan Sarana dan Prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan				
3.1.1.1.1	Mewujudkan infrastruktur wilayah Kecamatan yang merata	3.1.1.1.1.1	Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang akan menghubungkan wilayah hingga tingkat desa di Kabupaten Morowali. Menata Infrastruktur pusat/kawasan perdesaan prioritas/ kawasan industri yang didukung oleh sarana perhubungan yang baik guna menunjang mobilitas barang dan masyarakat seta aktivitas industri	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perhubungan
		3.1.1.1.1.2	Rehabilitasi lahan pasca tambang menjadi RTH/lahan hijau dan pengadaan resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kabupaten	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan
		3.1.1.1.1.3	Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan melancarkan arus lalu lintas di kawasan industri melalui fasilitasi saran parasarana perhubungan	Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
		3.1.1.1.1.4	Penataan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan perdesaan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.1.1.2	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	3.1.1.1.2.1	Optimalisasi konsumsi listrik masyarakat hingga pulau- pulau dan wilayah terpencil Memfasilitasi pengembangan klaster Industri pengolahan SDA dengan pembangkit listrik berbasis EBT yang ramah lingkungan	Urusan Perumahan,Kawasan Permukiman
		3.1.1.1.2.2	Arah Kebijakan KLHS HI.105- 106: • Memperluasjangkauan pelayanan ketenagalistrikan; • Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan	Urusan Perumahan,Kawasan Permukiman
		3.1.1.1.2.3	Optimalisasi penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berkualitas	Urusan Perumahan,Kawasan Permukiman
		3.1.1.1.2.4	Perbaikan dan Peningkatan Kondisi Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman pada air minum dan sanitasi layak	Urusan PUPR dan Urusan Perumahan,Kawasan Permukiman
		3.1.1.1.2.5	Arah Kebijakan KLHS hl. 205: • Layanan Sanitasi yang Berkelanjutan; • Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman	Urusan PUPR
		3.1.1.1.2.6	• Peningkatan pencapaian akses air minum layak 100% dan akses air minum aman yang terus meningkat; • Layanan Sanitasi yang Berkelanjutan; • Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman;	Urusan PUPR



MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
			- Tata kelola berkelanjutan sumber daya air terpadu; - Tata kelola berkelanjutan untuk perlindungan dan restorasi sumber daya air; - Pelibatan para pihak termasuk masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya air.	
MISI IV : Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatkan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan				
4.1.1.1.1	Optimalisasi produktivitas sektor pertanian dan perikanan melalui inovasi teknologi dan akses pasar	4.1.1.1.3.3	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian serta pengolahan pasca panen	Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Koperasi dan UMKM
			Meningkatkan produktivitas hasil peternakan melalui peningkatan sarana dan prasarana	Urusan pertanian
		4.1.1.1.3.2	Peningkatan ekonomi Masyarakat nelayan melalui Pengembangan Kawasan Prioritas Perdesaan (KPP) dan hirilisasi Tuna Cakalang Tongkol (TCT)	Urusan Perikanan
		4.1.1.1.3.1	Peningkatan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan serta meningkatkan pengawasan pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang ramah lingkungan	Urusan Perikanan
		4.1.1.1.1.4	Penguatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian dan perikanan	Urusan Pertanian dan Urusna Perikanan
		4.1.1.1.1.2	Arah Kebijakan KLHS HL. 107: • Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan;	Urusan Sosial
		4.1.1.1.1.5	Menumbuhkan kewirausahaan Mendorong Pembangunan infrastruktur sederhana perdesaan bersifat padat karya dan ekonomi sirkular Perbaikan iklim investasi hijau yang didukung iklim ketenagakerjaan kondusif dan hubungan industrial harmonis	Urusan Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, Pariwisata dan ekonomi Kreatif



MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
		4.1.1.1.1.6	Arah Kebijakan KLHS hal. 231: - Peningkatan produktivitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan; - Peningkatan AksesLayanan Keuangan bagi UMKM dan Kewirausahaan; - Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; - Peningkatan kualitas Destinasi Wisata	Urusan Pertanian, Perikanan, Tenaga Kerja, Pariwisata dan ekonomi kreatif, Koperasi UMKM
4.1.1.1.2	Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi serta ketahanan pangan masyarakat	4.1.1.1.2.1	Arah Kebijakan KLHS hl. 204: - Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar; - Peningkatan kualitas SDM; Peningkatan daya saing; - Pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan	Urusan Perikanan, Pertanian, Pangan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
		4.1.1.1.2.2	Penguatan partisipasi kelompok rentan dalam pasar kerja Pengembangan skema dan pemantapan perlindungan sosial bagi tenaga kerja Pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi Pencari kerja Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi	Urusan Tenaga Kerja
		4.1.1.1.2.3	Arah kebijakan KLHS hl.108: - Meningkatkan akses kependidikan dan pelatihan vokasi dan relevansi keahlian tenaga kerja; - Meningkatkankeahlian tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja yang kompleks dan bernilai tambah tinggi; - Menciptakanlapangan pekerjaan yang layak, inklusif, dan bernilai tambah tinggi;	Urusan Tenaga Kerja
		4.1.1.1.2.4	Penguatan intensitas pelatihan tenaga kerja untuk memiliki kapasitas enterprenaur, optimalisasi jaminan kesejahteraan tenga kerja meletakkan pondasi dalam Resilinsi TK terhadap perubahan permintaan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan Industri dan Hilirisasi Industri	Urusan Tenaga Kerja
		4.1.1.1.2.5	Melatakkkan pondasi ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi unggulan lokal desa dalam pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja Didesa dan memperkuat ketahanan pangan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Transmigrasi



MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
		4.1.1.1.2.6	Peningkatan ketersediaan energi dan protein perkapita dan peningkatan populasi ternak; melalui pengembangan agribisnis pertanian tanaman pangan, pengembangan agribisnis peternakan dan pengembangan agribisnis perkebunan serta pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan segar.	Urusan Pertanian, Urusan Pangan
4.1.1.1.4	Penguatan UMKM, pengembangan destinasi pariwisata, dan promosi ekonomi kreatif	4.1.1.1.4.1	Fasilitasi pengembangan promosi pariwisata berkelanjutan, dan pengembangan produk kreatif lokal	Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		4.1.1.1.4.2	Menumbuhkan kewirausahaan dan fasilitasi permodalan Koperasi dan UMKM serta mendorong koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat	Urusan Koperasi dan UMKM
4.1.1.1.5	Peningkatan efisiensi dan nilai tambah perdagangan	4.1.1.1.5.1	Meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha, infrastruktur perdagangan, menjaga kestabilan harga dan pasokan serta meningkatkan perlindungan terhadap konsumen	Urusan Perdagangan
4.1.1.1.6	Mengurangi kemiskinan dan kerentanan sosial	4.1.1.1.6.1	Meningkatkan pemberdayaan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, Meningkatkan Perlindungan Terhadap PMKS dan Penanganan kedaruratan bencana	Urusan Sosial
4.1.1.1.7	Meningkatkan Status Desa	4.1.1.1.7.1	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Desa, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan lingkungannya	Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa
4.1.1.1.8	Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi serta ketahanan pangan masyarakat	4.1.1.1.8.1	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat transmigrasi melalui pembinaan dan pemberdayaan ekonomi serta pengembangan infrastruktur kawasan	Urusan Transmigrasi
4.1.1.1.9	Peningkatan keterampilan dan kesejahteraan tenaga kerja	4.1.1.1.9.1	Penguatan intensitas pelatihan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan Industri, penyebaran informasi bursa kerja dan kesempatan kerja serta menciptakan hubungan industrial kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.	Urusan Tenaga Kerja



MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
MISI V : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi				
5.1.1.1.1	Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Melalui penguatan industri kecil	5.1.1.1.1.1	Peningkatan kapasitas SDM Pelaku IKM, Fasilitasi Perizinan dan Bantuan sarana IKM	Urusan penanaman modal, Perindustrian
		5.1.1.1.1.2	Penguatan nilai tambah ekonomi melalui Hilirisasi Industri Pengolahan.	Urusan Perindsutrian
5.1.1.1.2	Mendorong peningkatan realisasi investasi untuk mewujudkan Stabilitas Ekonomi	5.1.1.1.2.1	Menjamin Iklim Investasi padat modal dan optimalisasi Industri smelter ramah lingkungan dan hilirisasi industri Peningkatan ekspor dan penguatan rantai pasok/nilai industri pertambangan nikel	Urusan Penamaman Modal
5.1.1.1.3	Meningkatkan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim Serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tentram dan Harmonis	5.1.1.1.3.1	Penguatan Pondasi kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan Industri rendah karbon	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindaungan Masyarakat (BPBD)
		5.1.1.1.3.2	Arah Kebijakan KLHS hl. 107: • Peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi bencana;	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindaungan Masyarakat (BPBD)
		5.1.1.1.3.3	Penguatan Pondasi transisi ekonomi hijau Morowali pasca Tambang yang memprioritaskan pembangunan dan investasi rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan setara dengan eksplorasi pertambangan. penguatan peraturan daerah yang mewajibkan Industri Pertambangan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), termasuk pengembangan biofuel, pembangunan pembangkit listrik Non disel dan batubara untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.	Urusan Lingkungan Hidup
		5.1.1.1.3.4	Arah Kebijakan KLHS RPJPD : Menyelaraskan tujuan dan target pengendalian perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten dengan target pembangunan TPB Provinsi Sulawesi tengah, nasional, sub- nasional dan internasional.	Urusan Lingkungan Hidup
		5.1.1.1.3.5	Penguatan melaksanakan kewajiban reklamasi Industri sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan Menguatkan penerapan Regulasi kewajiban jaminan reklamasi bagi perusahaan pertambangan, yang ditempatkan pada pemda Morowali sebagai pelaksanaaan pemulihan kerusakan lingkungan pada wilayah pertambang mikro	Urusan Lingkungan Hidup



MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		KET
No.	Uraian	No.	Uraian	
		5.1.1.1.3.6	Arah Kebijakan KLHS HI.253 : Penguatan upaya pengurangan, penanganan, daur ulang, dan penggunaan kembali limbah; Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis dalam pengelolaan sampah dan limbah; Mendorong meningkatnya produk lokal ramah lingkungan;	Urusan Lingkungan Hidup
		5.1.1.1.3.7	Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban Umum melalui koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait serta penegakan Perda	Urusan Ketentraman dan ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
5.1.1.1.4	Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hijau yang Sirkular	5.1.1.1.4.1	Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat Desa hingga Ibukota Kecamatan	Urusan Lingkungan Hidup
		5.1.1.1.4.2	Optimalisasi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 yang aman	Urusan Lingkungan Hidup
		5.1.1.1.4.3	Peningkatan kualitas udara, air, dan tanah, edukasi lingkungan, pengelolaan sampah dan LB3 serta penguatan penegakan hukum lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup
		5.1.1.1.4.4	Penguatan koordinasi penanganan ketertiban umum, pembangunan fasilitas mitigasi bencana dan penyediaan sarana	Urusan Ketentraman dan ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

3.4.4 Program Prioritas/Unggulan Daerah Tahun 2025-2029

Program/agenda prioritas/unggulan Bupati dan Wakil Bupati Morowali merupakan janji-janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Morowali pada saat kampanye yang mendukung terhadap pencapaian visi “IKLAS JUARA” dan 5 misi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Morowali memiliki beberapa program prioritas yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa program utama yang akan dijalankan menurut 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah:

1. Program prioritas yang menjadi *tagline* dalam Misi 1 guna mewujudkan transformasi tatakelola dan birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah “IKLAS JUARA Integritas”, merupakan program unggulan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur sipil, peningkatan pelayanan, dan sarana pelayanan masyarakat.
2. Program prioritas yang menjadi *tagline* dalam Misi 2 guna meningkatkan pelayanan pendidikan adalah “IKLAS JUARA Pendidikan”, dan layanan kesehatan yakni “Jemput Sakit, Pulang Sehat”, serta layanan untuk keluarga (Perempuan, anak dan pemuda), olahraga dan budaya yang harmoni yakni “IKLAS JUARA Berbudaya”.
3. Program prioritas yang menjadi *tagline* dalam Misi 3 melalui peningkatan aksesibilitas, konektivitas, mobilitas dan distribusi sumberdaya guna efisiensi pelayanan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah daratan dan kepulauan yakni “IKLAS JUARA Terang dan Terkoneksi”.
4. Program prioritas yang menjadi *tagline* dalam Misi 4 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui integrasi pengelolaan sumberdaya pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan pariwisata local (Agrominawisata) menjadi usaha ekonomi kreatif yakni “IKLAS JUARA Produktif dan Mapan”. Sementara program prioritas yang ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan dilakukan adalah “Bansos IKLAS JUARA” dan “Berkah IKLAS JUARA”.
5. Program prioritas dalam Misi 5 guna mewujudkan stabilitas perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi memiliki *Tagline* yakni “IKLAS JUARA Lingkungan Harmoni”.

Program-program ini sangat penting karena tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Morowali. Adapun program prioritas/unggulan tersebut disajikan pada Tabel berikut :



Tabel 3.12

Program Prioritas RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VISI : Terwujudnya Kabupaten Morowali Yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan						
MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani	TUJUAN 1.1 : Mewujudkan tata Kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)			Indeks Reformasi Birokrasi	IKLAS JUARA Integritas	
		Sasaran 1.1.1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)		1. Nilai SAKIP Daerah 2. Indeks Pelayanan Publik 3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Tingkat Maturitas SPIP -T		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				5. Indeks Pemerintahan Digital		
			1. Meningkatnya Upaya ekstensifikasi Pendapatan	1. Persentase Peningkatan Potensi Pajak 2. Persentase Objek Pajak yang Ditetapkan terhadap Potensi Pajak 3. Persentase Objek Pajak yang Tertagih terhadap Potensi Pajak yang Ditetapkan 4. Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Urusan Keuangan
			1. Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Urusan Keuangan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
			3. Meningkatnya Tata Kelola Akutansi dan Pelaporan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebelumnya 2. Persentase Penurunan SILPA 3. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Urusan Perencanaan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Urusan Perencanaan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemerintahan dan pembangunan manusia	Pembangunan Manusia	PEMBANGUNAN DAERAH	
			1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan 3. Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan 2. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah 3. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Urusan Penelitian dan Pengembangan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			meyelesaikan permasalahan daerah 4. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah 4. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		
			Meningkatnya Pelayanan Publik dan Urusan Pemerintahan	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Urusan
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Urusan penunjang (Sekretariat Daerah)



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1. Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan 2. Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undnagan	1. Persentase Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Ketetapan Penetpaan Perda APBD Tahun N 3. Persentase Penetpaan Ranperda Tahun N	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Urusan Penunjang (Sekretariat DPRD)
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pandaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Urusan Penanaman Modal
			Meningkatnya kualitas pengelolaam aplikasi informatika	1. Indeks SPBE 2. Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Urusan Komunikasi dan Informatika



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Urusan Komunikasi dan Informatika
			1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian 2. Meningkatkan Pengembangan Kompetensi ASN 3. Meningkatkan Tata Kelola Pengembangan Karir ASN 4. Meningkatkan Kualitas Penilaian Kinerja ASN	1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi 2. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 3. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya 4. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Urusan Pendidikan dan pelatihan
			1. Meningkatkan Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader,	1. Persentase ASN yang Mendapatkan pengembangan kompetensi dasar,	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Manajerial dan Fungsional 2. Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi 3. Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar serta Sertifikasi Kompetensi 4. Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	manajerial dan fungsional 2. Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan 3. Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi 4. Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Unsur Pengawasan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			proses dan kewenangan			
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2. Manajemen Risiko Indeks (MRI) 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter dan berbudaya	TUJUAN 2.1 : Mewujudkan Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Manusia Yang Sehat dan Cerdas			Indeks Pembangunan Manusia	IKLAS JUARA Pendidikan (Cerdas Berkarakter) IKLAS JUARA Kesehatan (“Jemput Sakit, Pulang Sehat”) IKLAS JUARA Berbudaya Berkah IKLAS JUARA	
		Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Kualitas dan pemerataan Pendidikan		1. Indeks Pendidikan		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	1. Tingkat Partisipasi Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 2. Tingkat Partisipasi Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 3. Tingkat Partisipasi Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Urusan Pendidikan
		Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Urusan Kesehatan
	TUJUAN 2.2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Nilai Budaya, Ketahanan Keluarga dan Kerukunan Umat Beragama			1. Indeks Pembangunan Kebudayaan 2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama		
		Sasaran 2.2.1 : Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan Lokal Yang Maju dan Dinamis		1. Nilai Ketahanan Sosial Budaya 2. Nilai Warisan Budaya 3. Nilai Ekspresi Budaya		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Urusan Kebudayaan
			Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
		Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak		1. Indeks Pembangunan Gender 2. Indeks Perlindungan Anak		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Urusan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 2. Indeks Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
		Sasaran 2.2.4 : Meningkatnya Kerukuann Umat Beragama		1. Nilai Toleransi 2. Nilai Kesetaraan 3. Nilai Kerjasama		
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di Laksanakan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Unsur Penunjang Sekretariat Daerah
MISI 3 : Memajukan sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah	TUJUAN 3.1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung			Indeks Infrastruktur Daerah	IKLAS JUARA Terang dan Terkoneksi	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
daratan dan kepulauan	Akselerasi Pembangunan Yang Adil dan Berkelanjutan					
		Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Dasar		1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya Ketersediaan dan Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Laut		Rasio Konektifitas		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Urusan Perhubungan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI 4 : Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan	TUJUAN 4.1 : Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan			1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Gini Rasio 3. Pendapatan Perkapita (ADHK) 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5. Tingkat Kemiskinan	IKLAS JUARA Produktif dan Mapan (Dapur Hidup Keluarga Iklas) Bansos IKLAS JUARA Perlindungan Sosial Nelayan (PESONA) Musim Pancaroba	
		Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan		Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Holtikultura Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Urusan Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Urusan Pertanian
			Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Urusan Perikanan
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Urusan Perikanan
			Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Urusan Pangan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kontribusi sektor Koperasi UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif		1. PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)		
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Urusan Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kretaif
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kretaif
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan dan Agroindustri		1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Urusan Perdagangan
			Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Urusan Perdagangan
		Sasaran 4.1.4 : Meningkatnya kesejahteraan sosial dan		1. Indeks Kesejahteraan Sosial 2. Indeks Desa		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kemandirian Desa		3. Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Urusan Sosial
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				setelah Tanggap Darurat Pasca 2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya 3. Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Urusan Sosial



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Urusan Pangan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya Angka Partisipasi Kerja Masyarakat		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	PROGRAM PELATIAHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Urusan Tenaga Kerja
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak- Hak Pekerja dan Dialog Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI 5 : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi	TUJUAN 5.1 : Mewujudkan stabilitas Perekonomian melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis hilirisasi dan industrialisasi			1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto	IKLAS JUARA Lingkungan Harmoni	
		Sasaran 5.1.1 : Terwujudnya Usaha/Industri Kecil dan Menengah Sebagai Rantai Pasok Bagi Industri Pengolahan dan Pertambangan		Pertumbuhan Industri Kecil		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Urusan Perindustrian
		Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya Investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Realisasi Investasi		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Urusan Penanaman Modal
			Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Urusan Penanaman Modal
	TUJUAN 5.2 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan			1. Indeks Ketahanan Daerah		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 5.2.1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Menurunnya pencemaran dan /atau kerusakan	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayat	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Urusan Lingkungan Hidup
		Sasaran 5.2.2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan ketangguhan terhadap bencana		1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2. Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat 3. Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana 2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 3. Persentase Penanganan Pasca Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat
			1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada 2. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 2. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas 3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3. Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat 4. Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	4. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			1. Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran 2. Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 3.13

Sinkronisasi Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	Jenis Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Unggulan Kabupaten Morowali 2025-2029	Jenis Program Unggulan Kabupaten Morowali
1. Berani Cerdas	1) Nambaso (Anak Bisa Sekolah) : Sekolah Gratis, Pemberian BOSDA, pemberian Biaya Prekerin dan Uji Kompetensi	1. Iklas Juara Pendidikan	1) Peningkatan beasiswa + bagi pelajar SD, SMP, SMA, 2) Peningkatan beasiswa + Mahasiswa,



Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	Jenis Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Unggulan Kabupaten Morowali 2025-2029	Jenis Program Unggulan Kabupaten Morowali
	2) Kuliah Gratis 3) Beasiswa Kuliah S1 bagi Mahasiswa Berprestasi 4) Beasiswa Bagi Guru dan ASN di Dalam dan Luar Negeri 5) Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK berbasis Digital 6) Pelatihan Vokasional Siap Kerja bagi Milenial Gen-Z 7) Sulteng Career Center.	(Cerdas Berkarakter)	3) Peningkatan bantuan studi + bagi mahasiswa, 4) Tindaklanjut MoU dengan berbagai perguruan tinggi 5) Bus gratis Siswa Juara – Penyediaan dan Penambahan dan Pemanfaatan jumlah Bus Sekolah Gratis
2. Berani Sehat	1) Integrasi layanan Kesehatan Bersama BPJS, berobat Gratis Menggunakan KTP 2) Pencegahan Stunting 3) Makan Bergizi Gratis 4) Pemeriksaan Kesehatan Gratis 5) Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum UNDATA dan MADANI 6) Mendorong RS. Undata dan Madani menjadi RS Rujukan Bertaraf Internasional 7) Jaminan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Naseha Kami) 8) Integrasi Layanan Kesehatan dengan Rumah Sakit Lainnya di Kota Palu	2. Iklas Juara Kesehatan (Jemput Sakit, Pulang Sehat)	1) Memfasilitasi MEDICAL CHEK UP JUARA kesehatan bagi masyarakat; 2) Bantuan biaya rujukan kelas 3 (Palu, Makassar, Kendari) 3) Memberikan pembiayaan ambulance GRATIS pada pasien kelas 3 rujukan palu, Makassar dan Kendari 4) Ambulance laut GRATIS bagi wilayah kepulauan 5) Peningkatan jumlah unit Ambulance berbasis kewilayahan 6) Mewajibkan Tenaga Kerja memiliki BPJS ketenagakerjaan untuk Menjamin jika terjadinya PHK. 7) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga yang mumpuni untuk peningkatan pelayanan kesehatan RS, Puskesmas dan Puskesmas pembantu. 8) Pelayanan kesehatan --- pada 1 Puskesmas 1 dokter Spesialis, Perawat, bidan dan Apoteker.



Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	Jenis Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Unggulan Kabupaten Morowali 2025-2029	Jenis Program Unggulan Kabupaten Morowali
			9) Menu Juara Gizi Seimbang GRATIS ---- Makanan 4 sehat 5 sempurna sekali seminggu bagi Anak Sekolah PAUD dan Wajib Belajar 9 Tahun (SD-SMP).
3. Berani Lancar	1) Pembangunan 1.000 Km Jalan Desa untuk menjamin konektivitas antar wilayah 2) Perbaikan Infrastruktur jalan Provinsi Kondisi Rusak Berat sepanjang 462 Km, 3) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (Bypass) Tambu-Kasimbar; 4) Melaksanakan rekonstruksi dan pembangunan beberapa ruas jalan melalui paket Multi Year Contrac (MYC) yang berlokasi di Kabupaten Morowali Utara, Banggai, Donggala, Sigi, Poso, Toli toli, Buol, Tojo Una-Una dan Parigi Moutong. - Pembangunan Kawasan Agropolitan Buol, Toli2, Donggala dan Parimo 5) Pembangunan Jembatan Penghubung Bangkep – Banggai Laut 6) Pembangunan Gawalise Internasional Stadium (GIS), Jaminan ketersediaan Air Bersih bagi desa-desa yang belum mempunyai Akses Air Bersih.	3. Iklas Juara Terkoneksi	1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kewenangan Kabupaten khususnya ke wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan, Bungku Selatan dan Bungku Pesisir, serta Menui Kepulauan. 2. Penyediaan Tambatan Perahu. 3. Fasilitasi pembangunan pelabuhan Kapal Fery (Lafeu-Bungku Selatan-Sambori-Menui). 4. Penyediaan air bersih.
4. Berani Menyala	1) Jaminan Ketersediaan Jaringan Internet bagi 686 Desa yang masih termasuk dalam wilayah Blank Spot	4. Iklas Juara Terang	1) Peningkatan kapasitas terpasang listrik di Kecamatan Daratan 2) Peningkatan jaringan dan kapasitas serta meteran listrik bagi masyarakat kepulauan.



Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	Jenis Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Unggulan Kabupaten Morowali 2025-2029	Jenis Program Unggulan Kabupaten Morowali
	2) Jaminan Ketersediaan Akses Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan Penerangan Jalan Umum bagi Daerah yang belum terjangkau 3) Peningkatan kualitas Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso agar dapat menjamin ketersediaan Pasokan Listrik Sulawesi Tengah		3) Bantuan listrik tenaga disel dan surya bagi masyarakat di Pulau-Pulau Kecil.
5. Berani Sejahtera	1) Jaminan Harga Bahan Pokok murah dan stabil 2) Menjamin kebutuhan dasar Masyarakat miskin melalui program pangan daerah (PANADA) 3) Graduasi Masyarakat miskin melalui UEP Graduasi 4) Revitalisasi Rutilahu 5) Program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM	5. Bansos Iklas Juara Pesona Pancaroba	1) Pasar sembako murah bagi masyarakat miskin. 2) Bansos musim pancaroba bagi masyarakat kepulauan. 3) Bansos rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
6. Berani Berkah	1) Sulteng Berjamaah 2) Sulteng Mengaji 3) Insentif bagi Guru Mengaji, Marbot, Pendeta/Tokoh Agama dan Pemangku Adat 4) Perbaikan sarana prasarana keagamaan 5) Penyetaraan Status Pesantren, Madrasah dan Sekolah Keagamaan	6. Berkah Iklas Juara	1) Bantuan sosial bagi pengurus rumah ibadah, dan guru mengaji. 2) Bantuan sosial bagi masyarakat miskin lansia dan penyandang disabilitas. 3) Pajak (Subsidi PBB) bagi masyarakat miskin, 4) Bantuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin, penyandang disabilitas dan Memiliki Potensi untuk Dikembangkan.



Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	Jenis Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Unggulan Kabupaten Morowali 2025-2029	Jenis Program Unggulan Kabupaten Morowali
			5) Bantuan sosial pembangunan rumah ibadah.
7. Berani Makmur	1) Program Petani Milenial 2) Modernisasi Alsintan, Bibit dan Pemberian Subsidi Pupuk 3) Program Resi Gudang 4) Bantuan Alat Tangkap Nelayan 5) Jaminan Sosial bagi Petani dan Nelayan 6) Jaminan Harga Jual Tinggi 7) Pembangunan Sentra Pangan Berbasis Kawasan dan Masyarakat 8) Pembangunan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	7. Iklas Juara Produktif dan Mapan	Pertanian Plus (+) Terintegrasi: 1) Baseline data petani Calon Petani Calon Lahan (CPCL) 2) Validasi Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 3) Kemudahan permodalan bagi petani (angsuran perpanen) 4) Asuransi petani jika terjadi gagal panen (banjir, serangan hama, dan penyakit) 5) Meningkatnya ketersediaan pupuk 6) Pengembangan Pengelolaan Pupuk Organik 7) Peningkatan Populasi dan Produksi Peternakan 8) Bantuan dan penyediaan benih unggul Perikanan dan Kelautan Plus: 1) Memberdayakan masyarakat kepulauan melalui Budidaya Karamba Jaring (Apung dan Tancap) terintegrasi dengan Usaha Wisata. 2) Memfasilitas pengadaan alat tangkap dengan Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten Morowali hanya pemberdayaan nelayan (peranan dinas perikanan dengan bumdes dan perusda). 3) Pemberdayaan nelayan melalui bantuan rompon. 4) Sinergitas program perikanan tangkap provinsi dan kabupaten.



Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	Jenis Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Unggulan Kabupaten Morowali 2025- 2029	Jenis Program Unggulan Kabupaten Morowali
			5) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 6) Pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan. 7) Pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 8) Fasilitasi penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bagi Nelayan (SPBN-Iklas Juara). 9) Menjaga Ketersediaan Gas Elpiji dengan Harga Terjangkau 10) Bantuan permodalan dan alat produksi bagi UMKM. 11) Bumdes/Koperasi Desa untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan, kerjasama dengan Perusda dalam Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perikanan. 12) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Buruh melalui Pelibatan Peran PEMDA dalam menjalin Hubungan dengan Industri secara Berkelanjutan
		8. Iklas Juara Lingkungan Harmoni	1) Lahan marginal diolah menjadi lahan produktif berbasis pewilayahan komoditas pertanian. 2) RTH merupakan Fasilitas publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, ketersediaan



Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	Jenis Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Unggulan Kabupaten Morowali 2025- 2029	Jenis Program Unggulan Kabupaten Morowali
			3) UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah; 4) Revitalisasi Lingkungan melalui restorasi habitat, pengelolaan limbah, dan penghijauan. 5) Bank Sampah: “Nabung sampah, dapat uang”. 6) Ketersediaan prasarana pengelolaan dan Transportasi Persampahan (kendaraan angkut sampah) untuk mengangkut sampah domestik/sampah rumah tangga.
8. Berani Harmoni	1) Berani Wisata dengan Program Kunjungan Desa Wisata (Dewi) di Sulteng Pariwisata Partipatoris, Kabupaten Poso (Seribu Megalith dan Geopark), Kabupaten Tojo Una Una Kepulauan Togean sebagai destinasi Pariwisata 2) Pelestarian Bahasa Kaili dan daerah lainnya, Batik Bomba dan Potensi Adat Lokal Lainnya di Sulawesi Tengah, 3) Pelestarian Bahasa Daerahi dan Tenun Ikat Tradisional Bomba dengan menggandeng UMKM, Berani Kreatif melalui Sulteng Creative Hub 4) Sentra Sarana Olahraga dan Budaya Setiap Kabupaten/Kota 5) Inkubasi UMKM (Pelatihan, Bantuan Modal Usaha dan Mempermudah Izin Usaha) Peningkatan WUB sebanyak	9) Iklas Juara Berbudaya dan Berprestasi	1) Pelestarian seni budaya masyarakat lokal 2) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, ekonomi daerah, pendampingan usaha, fasilitasi perizinan usaha, dan dukungan bagi usaha perempuan 3) Pengembangan Wisata Alam (Wisata Bahari) dan Wisata Budaya 4) Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. 5) Pengembangan kepemudaan. 6) Pengembangan atlet melalui usia dini, peningkatan kapasitas pelatih dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.



Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	Jenis Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Unggulan Kabupaten Morowali 2025-2029	Jenis Program Unggulan Kabupaten Morowali
	20rb +- - Pemberdayaan Bumdes sebagai Sumber Ekonomi Desa, Berani Investasi lewat Program Sulteng Investment Forum dan pemberian kemudahan bagi Investor 6) Dukungan pelaksanaan Koperasi Merah Putih.		
9. Berani Berintegritas	1) Tim Gaspoll (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) – Call Center, Siaga Laporan-Command Center 2) Sistem Administrasi Layanan Publik Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE 3) Budaya Kerja Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif(Berani) 4) Co Working Space (CWS) bagi ASN 5) Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa	10. Iklas Juara Melayani	1) Perbaikan Kesejahteraan ASN Melalui Kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2) Transformasi pemerintahan untuk Perbaikan Capaian Evaluasi Penyenggaraan Pemerintahan Daerah, 3) Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi 4) Pajak (Subsidi PBB) bagi masyarakat miskin 5) Pajak (Subsidi PBB) bagi masyarakat miskin 6) 1 Desa 1 Mobil ----- untuk Akselerasi pembangunan desa melalui bantuan keuangan khusus (Berdasarkan Grading). 7) Pelayanan pembuatan KTP, KK, akte Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya berbasis kewilayahan 8) 1 BPD 1 Motor 9) Pelayanan berbasis layanan 1 pintu untuk Morowali Juara (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perizinan lainnya)



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH & KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI



PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program pembangunan suatu daerah adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan dimulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Penetapan program dan rencana pendanaan sampai tahun 2030 ditujukan untuk upaya antisipasi dan menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sebagai pijakan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggungjawab kepala daerah yang terpilih pada periode 2030-2034.

Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk program penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah. Sub Program Perangkat juga menguraikan kerangka pendanaan pembangunan untuk membiayai program-program yang dikelompokkan sebagai program prioritas I, prioritas II, serta prioritas III. Penyajian program prioritas ini disertai dengan indikator kinerja, kondisi target capaian awal Perubahan RPJMD, serta capaian kinerja program dan kerangka pendanaan yang diarahkan guna pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali periode 2025-2029. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali untuk periode RPJMD 2025–2030 merinci besaran proyeksi Kapasitas Riil Keuangan yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan guna pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali. Besaran nilai Kapasitas Riil Keuangan sangat menentukan besaran anggaran untuk membiayai setiap program prioritas.

Indikasi Rencana Program pada Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali untuk tahun 2021-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rincian Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.1.



Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					640.600.857. 057		674.278.054. 076		727.121.431. 345		790.067.842 .514		849.560.4 70.287	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					639.104.273. 435		664.860.527. 372		717.545.437. 615		779.244.722 .191		838.131.8 29.315	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	204.032.054.1 35	100	272.257.537.9 33	100	279.718.974.8 41	100	286.518.941. 832	100	293.662.7 58.391	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	Tingkat Partisipasi Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	77,99	83,99	432.114.781.9 90	86,96	387.700.180.6 00	89,93	432.467.728.7 62	92,90	487.209.657. 267	95,87	538.699.1 99.689	
	Tingkat Partisipasi Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	98,77	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Tingkat Partisipasi Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	41,91	56.61		63,10		69,59		76,08		76,84		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen	98,00	0	-	100	1.392.974.730	100	1.450.000.000	100	1.507.000.000	100	1.560.000.000	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Persen	85	100	2.957.437.310	100	3.509.834.109	100	3.908.734.012	100	4.009.123.092	100	4.209.871.234	
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.496.583.622		9.417.526.704		9.575.993.730		10.823.120.323		11.428.640.972	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	100	100	855.028.622	100	3.523.420.951	100	3.581.290.120	100	4.674.611.619	100	4.423.111.288	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	85	85	641.555.000	90	960.640.351	95	1.008.672.368	100	1.059.105.987	100	1.112.061.286	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak Benda yang Ditetapkan	Persen	80	80		85		90		90		100		
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN														
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	NA	0	-	50	2.650.531.260	70	2.873.057.822	80	2.996.710.714	85	3.521.546.249	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisonal	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen	NA	0	-	75	1.100.066.456	80	1.100.066.456	90	768.820.983	100	1.270.400.897	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap tinjauan Sejarah Lokal	Persen	NA	0	-	60	1.182.867.686	75	1.012.906.964	85	1.323.871.020	100	1.101.521.252	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					594.540.771.351		630.250.248.668		671.509.288.211		728.161.058.262		781.704.423.258	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					593.912.882.882		629.379.557.314		670.562.496.857		727.094.366.908		780.553.409.220	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	410.928.690.288	100	416.161.539.153	100	464.339.573.752	100	489.169.169.436	100	538.274.922.087	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Angka	237	183	180.166.742.459	172,5	209.257.318.162	162	201.893.423.105	151,5	233.112.197.473	140	237.317.687.133	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	4,61	4		3,5		3		2,5		2		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	5,56	33,37	1.935.850.000	47,27	2.302.700.000	61,18	2.570.000.000	75,08	2.987.000.000	100,00	3.042.800.000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan dan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Persen	53,09	58,16	281.600.135	60,07	628.000.000	61,91	694.500.000	63,69	730.000.000	100	836.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	600.000.000	100	630.000.000	100	660.000.000	100	690.000.000	100	675.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					627.888.469		870.691.354		946.791.354		1.066.691.354		1.151.014.038	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terkendalinya Pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,04	2	174.985.962	2	317.498.596	2	347.498.596	2	378.498.596	2	412.014.0 38	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15 - 19)	Angka	40,57	58,3		55,4		52,6		50		42,5		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>	Persen	66,67	70	252.902.507	72	293.192.758	75	299.292.758	75	326.192.758	75	345.000.0 00	
	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	6,81	6,5		6,3		6		6		6		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	12,37	22,37	200.000.000	32,37	260.000.000	42,37	300.000.000	52,37	362.000.000	62,37	394.000.0 00	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					440.311.872. 334		425.972.132. 448		514.376.756. 776		629.382.725 .935		767.211.7 41.423	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					440.311.872.334		425.972.132.448		514.376.756.776		629.382.725.935		767.211.741.423	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	17.665.252.064	100	18.000.000.000	100	19.000.000.000	100	20.000.000.000	100	21.000.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	41,50	45,75	22.583.920.000	47,45	6.600.000.000	49,15	6.600.000.000	50,85	6.600.000.000	52,55	6.600.000.000	
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari Abrasi dan Banjir ROB	Persen	54,00	57		58		59		60		61		
	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Persen	60,00	61,65		63,65		64,75		65,85		66,25		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum	Persen	73,63	74,06	12.950.000.000	74,28	25.900.000.000	74,50	25.900.000.000	74,71	25.900.000.000	74,93	25.900.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan sampah yang di kelola di TPA/TPST Regional	Persen	46,20	0	-	55	350.000.000	60	400.000.000	65	450.000.000	70	500.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak)	Persen	94,57	95,19	1.481.950.000	95,41	3.481.950.000	95,67	4.481.950.000	95,93	5.481.950.000	96,26	6.481.950.000	
	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	0,00	0	-	2		4		5		7		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas sistem drainase dalam kondisi baik perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	30,00	40	11.200.000.000	45	9.200.000.000	50	12.200.000.000	55	15.200.000.000	60	18.200.000.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	48,00	0	-	63	30.000.000.000	69	30.000.000.000	79	30.000.000.000	83	30.000.000.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN														
Meningktanya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	20,00	30	55.000.000.000	35	79.897.610.136	40	52.136.588.244	45	40.738.810.928	50	29.646.976.277	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	29,80	42,68	316.000.000.000	46,32	249.317.080.312	49,96	360.347.870.532	53,59	481.701.617.007	57,23	625.631.595.146	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli/Terampil	Persen	7,91	34,17	544.113.270	37,40	425.492.000	37,20	310.348.000	59,22	310.348.000	100,00	251.220.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	Persen	50,00	75	2.886.637.000	78	2.800.000.000	80	3.000.000.000	85	3.000.000.000	88	3.000.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN					269.896.963.841,00		196.771.051.125,00		184.321.431.080,95		181.856.807.844,05		180.592.302.750	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					146.441.159.841,00		136.180.887.818,00		124.235.200.773,95		121.266.644.537,05		120.506.072.443	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	11.132.930.786,00	100	7.122.382.315,00	100	7.238.538.443,00	100	7.240.604.669,00	100	7.238.538.443	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	980.743.950,00	100%	872.783.477,00	100%	824.000.000,00	100%	975.000.000,00	100%	824.000.000	
	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Kabupaten yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	0	0	-	20		20		20		20		



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya kualitas kawasan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen	5,17	16	5.691.531.250,00	21	2.471.296.198,00	26	2.422.981.146,00	31	2.471.296.198,00	36	2.422.981.146	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														
Meningkatnya kualitas dan keteraturan permukiman untuk mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru	Persentase Luas Kawasan Permukiman yang ditata untuk mencegah kawasan kumuh baru	Persen	50	61,5	38.750.000.000,00	65	16.500.000.000,00	68,5	16.750.000.000,00	72	16.500.000.000,00	75	15.250.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase PSU Kawasan Permukiman	Persen	68	75	89.885.953.855,00	80	109.214.425.828,00	85	96.999.681.184,95	90	94.079.743.670,05	95	94.770.552.854	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					123.455.804.000,00		60.590.163.307,00		60.086.230.307,00		60.590.163.307,00		60.086.230.307,00	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikanya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang di lakukan melalui mediasi	Persen	100	100	29.070.000,00	100	16.702.000,00	100	15.907.500,00	100	16.702.000,00	100	15.907.500	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan	Persen	60	70	123.374.802.000,00	73	60.369.172.807,00	75	59.862.572.807,00	80	60.348.052.807,00	85	59.837.228.807	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap Direistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	100	100	22.190.000,00	100	91.492.500,00	100	88.200.000,00	100	91.492.500,00	100	88.200.000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH														
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak asasi tanah	Persentase luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persen	0	30	29.742.000,00	35	64.796.000,00	40	61.950.000,00	45	64.796.000,00	50	61.950.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak asasi tanah	Persentase tanah kosong yang dikelola	Persen	0	0	-	55	48.000.000,00	60	57.600.000,00	65	69.120.000,00	70	82.944.000	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					17.585.013.698		16.847.867.871		20.984.967.809		32.199.012.929		39.208.628.262	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					17.585.013.698		16.847.867.871		20.984.967.809		32.199.012.929		39.208.628.262	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persen	100	100	5.634.138.603	100	8.786.936.341	100	10.899.960.818	100	11.547.900.765	100	14.427.293.666	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	33,50	58,7	11.950.875.095	64,86	8.060.931.530	89,6	10.085.006.991	95,8	20.651.112.164	100	24.781.334.596	
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	71,00	80		85		85		85		90		



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	93,00	100		100		100		100		100		
SATUAN POLISI PAMONGPRAJA					17.610.880.284		43.293.630.306		45.349.708.390		47.980.262.115		50.846.097.576	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					17.610.880.284		43.293.630.306		45.349.708.390		47.980.262.115		50.846.097.576	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100	15.673.434.984	100	34.952.816.623	100	34.327.220.494	100	33.857.027.841	100	35.467.459.843	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	95	100	1.791.031.000	100	5.663.195.005	100	7.886.930.574	100	10.292.840.170	100	11.098.656.453	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	0	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	100	100	146.414.300	100	2.677.618.678	100	3.135.557.322	100	3.830.394.104	100	4.279.981.280	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100		100		100		100		100		
DINAS SOSIAL					49.132.451.881		57.375.595.533		60.353.800.973		64.651.136.549		68.849.612.463	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					49.132.451.881		57.375.595.533		60.353.800.973		64.651.136.549		68.849.612.463	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100	5.027.172.111	100	6.803.317.953	100	6.051.800.973	100	6.465.536.549	100	6.826.212.463	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pembedayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persen	0,00	0	-	23	100.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN														
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga negara Migran Korban tindak kekerasan yang ditangani	Orang	8	0	-	15	75.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Presentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	11,20	25	20.328.305.060	30	25.619.277.580	40	27.947.000.000	50	30.500.600.000	60	32.958.400.000	
	Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	2,20	2,5		10		15		20		25		
	Presentase lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	25,73	66		68		70		75		80		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi	Persen	99,68	99,75	8.178.554.500	99,8	8.530.000.000	100	9.500.000.000	100	10.500.000.000	100	11.500.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kebutuhan Dasar													
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	4,40	8,4		8,4		15		20		23,4		
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persen	100,00	100		100		100		100		100		
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	20,00	10		10		10		10		10		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
Mrningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100,00	100	15.531.734.460	100	16.180.000.000	100	16.530.000.000	100	16.855.000.000	100	17.230.000.000	
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	Persen	15,00	15		15		15		20		15		
PROGRAM PENGELOLAAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
TAMAN MAKAM PAHLAWAN														
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Persen	100,00	100	66.685.750	100	68.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH					9.760.842.464,00		13.256.727.244,73		14.161.610.723,22		14.967.104.865,00		15.631.599.393	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					9.229.709.054,00		12.685.593.834,73		13.550.477.313,22		14.315.971.455,00		14.940.465.983	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	6.296.225.229,00	100	6.836.910.859,73	100	6.998.251.631	100	7.163.625.922,00	100	7.333.134.570	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
Terkelolanya informasi tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Menyusun RTK	Persen	29,17	0,00	-	36,46	192.539.000,00	40,10	205.326.000,00	43,75	266.189.000,00	47,40	285.952.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	229,26	236,86	1.726.837.558,00	244,74	3.326.837.558,00	253,17	3.792.433.246,00	261,91	3.995.525.697,00	271,02	4.196.133.588	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Persen	40,22	48,30	738.280.017,00	56,37	1.362.153.167,00	63,00	1.555.929.186,00	69,62	1.791.689.086,00	75,97	1.948.217.075	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	35742,00	36242	468.366.250,00	36.742	967.153.250,00	37.152	998.537.250,00	37.562	1.098.941.750,00	37.955	1.177.028.750	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					531.133.410,00		571.133.410,00		611.133.410,00		651.133.410,00		691.133.410	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persen	51,99	52,84	531.133.410,00	54,11	571.133.410,00	55,80	611.133.410,00	57,50	651.133.410,00	59,19	691.133.410	Target Kinerja Tidak Sama
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					61.757.823.059,96		78.727.691.275,22		85.258.309.723,83		88.018.806.031,28		90.302.267.849,05	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					24.470.558.446,96		28.026.148.516,22		28.692.914.188,33		29.582.103.127,28		30.279.388.060,05	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	23.674.359.811,96	100	23.944.524.435,22	100	24.518.624.505,33	100	25.312.831.202,28	100	25.912.759.336	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN														
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	Persen	100			100 Persen	536.000.000,00	100 Persen	549.400.000,00	100 Persen	563.135.000,00	100 Persen	577.213.375	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	86,80	87,23	399.196.690,00	87,66	2.344.532.081,00	88,1	2.398.770.383,00	88,53	2.454.364.642,60	88,97	2.511.348.758,75	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	2,26	1,504	326.862.760,00	0,7518797	940.000.000,00	0	958.500.000,00	0	977.462.500,40	0	996.899.063,25	
PROGRAM PENGAWASAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KEAMANAN PANGAN														
Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	50	60	70.139.185,00	70 Persen	261.092.000,00	80 Persen	267.619.300,00	90 Persen	274.309.782,00	100 Persen	281.167.527	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					37.287.264.613,00		50.701.542.759,00		56.565.395.535,50		58.436.702.904,00		60.022.879.789,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	18	90	12.107.546.667,00	95	10.377.241.629,50	100	13.405.010.102,25	100	14.846.635.069,50	100	16.688.527.090,50	
	Peningkatan produksi hortikultura	Persen	-60	90		95		100		100		100		
	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	-67	90		95		100		100		100		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Persen	100	100	20.402.855.385,00	100	27.754.353.129,50	100	29.961.687.433,25	100	31.162.526.084,50	100	32.422.871.105	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	100	100	765.930.600,00	100	2.291.950.600,00	100	2.320.700.600,00	100	2.349.544.350,00	100	2.383.484.194	
	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	100	100	1.990.315.000,00	100	5.494.375.000,00	100	5.494.375.000,00	100	5.494.375.000,00	100	4.244.375.000	
	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh pertanian	Jumlah Kegiatan penyuluhan tingkat desa/kecamatan/kabupaten	Persen	100	100	2.020.616.961,00	100	4.783.622.400,00	100	5.383.622.400,00	100	4.583.622.400,00	100	4.283.622.400	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH					19.234.723.918		30.017.566.002		32.022.022.410		34.144.959.672		36.436.638.760	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19.234.723.918		30.017.566.002		32.022.022.410		34.144.959.672		36.436.638.760	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	6.791.476.368	100	6.842.681.750	100	6.930.428.500	100	7.018.175.250	100	7.105.922.000	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100	99.290.000	100	101.775.600	100	103.811.112	100	105.887.334	100	108.005.081	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	64,39	82,36	134.733.200	82,56	4.569.832.520	82,76	4.909.073.515	82,96	5.026.815.772	83,16	6.144.558.029	
	Indeks Kualias Udara	Indeks	83,46	77,74		78,04		78,34		78,64		78,94		
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	92,06	96,85		96,92		96,99		97,06		97,13		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	20	30	169.970.000	35	3.808.160.353	40	4.534.421.158	50	4.534.421.158	55	5.893.315.630	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)														
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	83,33	84,33	-	84,83	260.000.000	85,33	272.000.000	85,83	286.400.000	86,33	303.680.000	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														
Meningkatnya Kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	0	0	-	100	25.000.000	100	50.000.000	100	86.400.000	100	100.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	17,95	21,37	46.740.000	23,08	60.000.000	24,79	60.000.000	26,50	68.617.709	28,21	69.990.063	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	0	0	-	25	60.000.000	37,5	72.000.000	50	86.400.000	62,5	103.680.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100,00	100	35.095.000	100	35.796.900	100	36.512.838	100	37.243.095	100	37.987.957	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	NA	24,25	11.957.419.350	27,3	14.224.318.879	30,45	15.023.775.287	33,52	16.844.599.354	36,52	16.469.500.000	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	20	0	-	20	30.000.000	20	30.000.000	20	50.000.000	20	100.000.000	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah					15.258.534.638		8.393.690.468		8.761.134.701		9.219.652.831		9.716.756.777	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					15.258.534.638		8.393.690.468		8.761.134.701		9.219.652.831		9.716.756.777	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100	11.823.442.988	100	5.882.719.400	100	6.025.390.603	100	6.166.494.384	100	6.312.243.951	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	100	100	2.398.693.750	100	1.543.561.713	100	1.672.593.807	100	1.988.156.837	100	2.338.759.214	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENCATATAN SIPIIL														
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	430.785.750	100	370.687.075	100	407.755.783	100	408.081.987	100	408.308.4 53	
	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	455.389.550	100	487.657.280	100	535.423.008	100	536.852.146	100	537.281.6 28	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	150.222.600	100	109.065.000	100	119.971.500	100	120.067.477	100	120.163.5 31	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.494.989.96 1		14.879.439.4 98		18.854.588.4 08		16.054.827. 303		16.712.36 7.892	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					700.289.000		1.101.791.843		1.159.467.299		1.355.102.013		1.571.986.883	
PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	32,49	33,49	225.580.000	33,99	247.328.349	34,49	190.463.440	34,99	227.750.383	35,49	268.767.357	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	30,82	29,22		33,22		37,22		41,6		45,6		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	124.705.000	100	235.377.349	100	264.012.440	100	303.599.383	100	347.566.357	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesenjangan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	100	0	-	100	56.472.349	100	70.107.440	100	94.694.383	100	95.161.357	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	NA	54,37	207.014.000	54,62	318.951.447	54,87	347.586.539	54,62	387.173.481	54,87	431.140.455	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	142.990.000	100	193.662.349	100	222.297.440	100	261.884.383	100	305.851.357	
	Indeks Perlindungan Anak (IPKA)	Persen	83,37	85,87		86,17		86,47		86,77		87,07		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Sistim Data Gender dan Anak	Persen	100	0	-	100	50.000.000	100	65.000.000	100	80.000.000	100	123.500.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.794.700.961		13.777.647.655		17.695.121.109		14.699.725.290		15.140.381.009	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	6.943.818.961	100	8.735.259.925	100	9.096.828.102	100	9.477.671.457	100	9.871.426.253	
PROGRAM PENATAAN DESA														
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	100	0	-	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA														
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	100	100	132.540.000	100	158.842.349	100	187.477.440	100	227.064.383	100	271.031.357	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	100	100	1.601.135.000	100	2.756.810.346	100	6.255.445.441	100	2.800.032.382	100	2.758.999.356	
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	100	100	117.207.000	100	2.101.735.035	100	2.130.370.126	100	2.169.957.069	100	2.213.924.043	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PersentaseFasili tasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	100		100		100		100		100		
Dinas Perhubungan Daerah					38.854.398.134		27.150.590.000		28.780.000.000		29.550.000.000		31.110.000.000	Dinas Perhubungan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					38.854.398.134		27.150.590.000		28.780.000.000		29.550.000.000		31.110.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	100	100	7.881.751.518	100	7.730.590.000	100	7.530.000.000	100	7.050.000.000	100	7.550.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Persen	32	35	3.343.737.270	38	3.920.000.000	42	4.450.000.000	45	5.500.000.000	48	6.000.000.000	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	30	35		37		36,5		40		45		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningktanya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	Persen	47,00	55	27.628.909.346	57	15.500.000.000	60	16.800.000.000	63	17.000.000.000	65	17.560.000.000	
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah					24.850.918.741		16.473.847.002		18.997.029.702		20.811.273.459		24.546.064.661	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					23.692.876.891		15.186.242.782		17.598.474.849		19.314.323.121		22.964.979.289	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100	17.442.566.461	100	7.145.469.223	100	7.145.469.223	100	7.145.469.223	100	7.145.469.223	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (Survei)	Persen	NA	50	2.058.048.431	50	2.675.462.960	50	3.478.101.848	50	3.101.478.986	50	4.031.922.681	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pengelolaam aplikasi informatika	Indeks SPBE	Indeks	3,25	3,37	4.192.261.999	3,49	5.365.310.599	3,61	6.974.903.778	3,73	9.067.374.912	3,85	11.787.587.385	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					560.836.850		673.004.220		773.954.853		852.350.338		936.485.372	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik IPS)	Indeks	2.63	2,7	560.836.850	2,8	673.004.220	2,9	773.954.853	3	852.350.338	3,1	936.485.372	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					597.205.000		614.600.000		624.600.000		644.600.000		644.600.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
Meningkatnya Keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan pengamanan informasi pemerintah Daerah	Persen	0,37	0,55	597.205.000	0,65	614.600.000	0,75	624.600.000	0,8	644.600.000	0,85	644.600.000	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.601.420.456		11.270.334.024		11.460.842.574		12.698.489.621		13.567.849.151	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.601.420.456		11.270.334.024		11.460.842.574		12.698.489.621		13.567.849.151	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	5.100.897.646,00		6.459.105.999,00		6.210.056.307,00		6.459.616.088,00		7.225.723.578	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI														
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	44,38	70,20	99.360.000,00	71,19	300.000.000,00	72,18	320.000.000,00	73,1788	360.000.000,00	74,17	380.000.000	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI														
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	43,20	45,20	113.249.500,0	46,20	300.000.000,00	47,2	320.000.000,00	48,20	340.000.000,00	49,20	360.000.000	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														
Meningkatnya Kualitas SDM Pengkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	11,83	8,14	231.502.040,0	43,32	2.000.177.625,00	43,32	2.160.191.835,00	43,32	2.382.115.338,00	43,32	2.628.759.216	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	9,47	6,19	46.360.000,0	10,42	400.550.400,00	14,01	432.594.432,00	17,26	481.758.195,00	21,17	538.366.357	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal yang diberdayakan	Persen	4,53	7,01	733.866.810,0	9,26	1.460.500.000,00	11,61	1.568.000.000,00	14,04	1.675.000.000,00	16,56	1.785.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
Meningkatnya Daya saing UMKM	Persentase UMKM yang bermitra	Persen	0,76	0,76	276.184.460,0	1,19	350.000.000,00	1,65	450.000.000,00	2,15	1.000.000.000,00	2,68	650.000.000	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					9.596.214.195,00		9.792.791.779,00		10.058.226.548,00		10.574.066.549,00		11.074.427.550,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9.596.214.195,00		8.792.791.779,00		9.058.226.548,00		9.574.066.549,00		10.074.427.550,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan	Persen	100	100	8.682.553.695,00	100	8.057.170.779,00	100	8.233.600.048,00	100	8.414.440.049,00	100	8.599.801.050	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KABUPATEN/KOT A	yang dilaksanakan													
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Persen	128	100	346.712.500,00	102	177.707.000,00	104	316.712.500,00	106	401.712.500,00	108	616.712.500,00	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	50,00	50	259.034.000,00	60	600.000.000,00	70	300.000.000,00	80	300.000.000,00	85	300.000.000,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	100,00	100	172.120.000,00	100	322.120.000,00	100	472.120.000,00	100	622.120.000,00	100	772.120.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	100	100	135.794.000,00	100%	535.794.000,00	100%	635.794.000,00	100%	735.794.000,00	20%	685.794.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	6	6	-	6%	100.000.000,00	6%	100.000.000,00	6%	100.000.000,00	6%	100.000.000	
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					27.499.997.788		26.451.678.654		26.506.819.826		25.578.389.528		25.687.150.542	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					14.624.391.717		15.336.677.854		15.391.819.026		15.563.388.728		14.672.149.742	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	9.557.527.843	100	9.349.677.854	100	9.396.819.026	100	9.508.388.728	100	8.880.066.702	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	76,17	82,03	2.233.543.176	87,71	1.940.000.000	93,40	1.950.000.000	99,09	1.960.000.000	104,78	2.000.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	25,00	50	845.347.400	75%	1.877.000.000	100%	1.875.000.000	100%	1.925.000.000	100%	2.025.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem kratif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	Persen	1,37	4,12	-	6,87	90.000.000	9,62	90.000.000	12,36	90.000.000	15,11	90.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	Persen	70,88	77,47	1.987.973.298	83,38	2.080.000.000	89,29	2.080.000.000	95,19	2.080.000.000	100,00	1.677.083.040	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					12.875.606.071		11.115.000.800		11.115.000.800		10.015.000.800		11.015.000.800	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Persen	0,68	1,65	342.871.056	1,75	560.000.000	1,85	560.000.000	1,96	560.000.000	2,06	560.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi oleh raga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persen	41,94	48,39	8.925.272.425	51,61	5.940.000.000	54,84	5.940.000.000	58,06	5.940.000.000	61,29	6.940.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN														
Meningkatnya kualitas kepamukraan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	1,73	2,17	3.607.462.590	2,24	4.615.000.800	2,24	4.615.000.800	2,24	3.515.000.800	2,24	3.515.000.800	
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH					10.840.501.353		12.162.453.477		12.565.067.033		13.069.869.691		13.617.805.637	Dinas Perpustakaan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					10.194.090.433		11.108.313.538		11.398.963.447		11.784.017.578		12.216.939.052	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	88,33	100	6.168.904.160	100	6.915.223.650	100	7.022.504.242	100	7.328.206.848	100	7.691.217.019	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	60,53	64,79	3.949.692.273	65,21	4.137.694.205	67,10	4.277.013.279	69,15	4.355.000.000	71,22	4.424.415.360	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
NASIONAL DAN NASKAH KUNO														
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	66,6	85.00	75.494.000	85.00	55.395.683	95.00	99.445.926	100	100.810.730	100	101.306.673	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					646.410.920		1.054.139.939		1.166.103.586		1.285.852.113		1.400.866.585	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP														
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip		27,28	28,24	646.410.920	30,57	954.139.939	31,21	1.055.103.586	32,72	1.164.632.113	33,25	1.266.918.485	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP														
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	99,00	0	-	100	100.000.000	100	111.000.000	100	121.220.000	100	133.948.100	
DINAS PERIKANAN DAERAH					47.918.936.934,00		62.141.408.252,30		69.424.845.080,06		67.536.557.218,20		68.219.251.251,43	Dinas Perikanan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					47.918.936.934,00		62.141.408.252,30		69.424.845.080,06		67.536.557.218,20		68.219.251.251,43	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	100,00	100	9.330.902.840,00		11.606.946.993,30		12.205.715.213,56		11.926.000.049,20		12.283.510.291	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	33036	36.000	18.422.088.965,00	37.000	22.877.230.629,50	38.000	24.749.564.933,25	39.000	22.065.278.584,50	40.000	20.702.870.480	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi peikanan budi daya	Ton	9505,24	10.301	15.708.865.655,00	10.800	19.457.230.629,50	10.850	21.629.564.933,25	11.900	22.695.278.584,50	12.500	24.332.870.480	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap Perairan	Persen	0,00	12,5	668.644.200,00	13	700.000.000,00	13,5	2.340.000.000,00	14	850.000.000,00	15	900.000.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
Meningkatnya Konsumsi ikan oleh Masyarakat	Angka konsumsi ikan	nilai	64,16	77	3.788.435.274,00	79,26	7.500.000.000,00	81,63	8.500.000.000,00	84,07	10.000.000.000,00	86,59	10.000.000.000	
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					29.968.957.833,09		31.056.123.119,73		31.349.164.980,89		52.202.520.700,02		33.145.373.820,44	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					28.180.481.837,00		28.463.877.119,73		28.776.399.980,89		49.523.285.700,02		30.359.097.120,44	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	98,00	100	7.014.326.272,00	100	6.268.749.754,73	100	6.353.220.712,89	100	6.612.738.445,02	100	7.279.527.520	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen	100,00	10000%	111.271.000,00	10000%	74.660.000,00	100	76.770.000,00	100	47.879.000,00	100	48.999.900	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	100,00	10000%	16.760.058.665,00	10000%	17.092.858.665,00	100	17.068.800.568,00	100	37.162.800.555,00	100	17.189.700.000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitasasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	99,98	100	2.978.182.320,00	100	4.112.670.000,00	100	4.312.670.000,00	100	4.684.929.000,00	100	4.775.931.000	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														
Meningkatnya tertib niaga dan Mutu Produk	Persentase Alat UTTP yang Tera Ulang	Persen	1,57	14	1.119.717.580,00	7	664.938.700,00	7	714.938.700,00	7	764.938.700,00	7	814.938.700	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	Persen	50,00	35	196.926.000,00	40	250.000.000,00	41	250.000.000,00	43	250.000.000,00	45	250.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.788.475.996,09		2.592.246.000,00		2.572.765.000,00		2.679.235.000,00		2.786.276.700,00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten	Persen	50,34	25	1.599.058.996,09	38	2.350.000.000,00	40	2.325.000.000,00	42	2.425.000.000,00	45	2.525.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI														
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Persen	100,00	100	122.240.500,00	100	159.370.000,00	100	163.005.000,00	100	166.885.000,00	100	170.603.500	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100,00	100	67.176.500,00	100	82.876.000,00	100	84.760.000,00	100	87.350.000,00	100	90.673.200	
SEKRETARIAT DAERAH					140.153.424.611,00		146.610.422.546,00		155.685.084.224,00		169.285.957.006,00		181.789.018.144,00	SEKERTARIAT DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	100,00	100	52.929.510.801,00	100,00	54.889.599.400,00	100,00	57.462.774.858,00	100,00	62.094.709.571,00	100,00	64.642.011.461	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												90,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas kerja sama Daerah	Persen	80,00	82	83.537.901.660,00	84,00	86.252.698.006,00	86,00	92.316.067.231,00	88,00	100.679.325.172,00	90,00	109.962.389.717	
	Kinerja penyelenggara n Pemerintah	Persen	80,00	82		84,00		86,00		88,00		90,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Tahun	100,00	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
Meningkatnya kualitas prodak Hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum Yang dihasilkan	Persen	100,00	100		100,00		100,00		100,00		100,00		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100,00	100	3.686.012.150,00	100,00	5.468.125.140,00	100,00	5.906.242.135,00	100,00	6.511.922.263,00	100,00	7.184.616.966	
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	Persen	95,00	95		95,00		95,00		95,00		95,00		
Meningkatnya Kulitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	Persen	100,00	100		100,00		100,00		100,00		100,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					33.762.742.962		50.596.255.353		54.244.891.569		59.223.296.513		64.736.394.884	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					33.762.742.962		50.596.255.353		54.244.891.569		59.223.296.513		64.736.394.884	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	100,00	100	21.645.037.462	100	27.343.269.103	100	29.572.839.749	100	30.629.779.363	100	34.068.579.776	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	100,00	100	12.117.705.500	100	23.252.986.250	100	24.672.051.820	100	28.593.517.150	100	30.667.815.108	
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100,00	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggara n Pemerintahan	Persen	100,00	100		100		100		100		100		
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH					33.245.265.481		28.922.347.559		23.023.913.644		24.460.098.094		26.233.897.892	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
PERENCANAAN					30.877.739.841		24.975.720.608		18.671.074.560		19.536.955.626		20.474.939.574	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	26.568.060.94 1	100	19.662.975.33 6	100	12.929.188.20 9	100	13.201.653.5 12	100	13.480.52 4.333	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	1.365.075.500	100	2.446.626.951	100	2.852.839.084	100	3.423.142.46 8	100	4.058.958. 318	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	2.944.603.400	100	2.866.118.321	100	2.889.047.267	100	2.912.159.64 6	100	2.935.456. 923	
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan bidanginfrastrukt ur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	Persen	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
bidangPerekonomi an dan SDA	Perekonomian dan SDA													
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.367.525.640		3.946.626.951		4.352.839.084		4.923.142.468		5.758.958.318	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	100	100	2.367.525.640	100	3.246.626.951	100	3.652.839.084	100	4.223.142.468	100	5.058.958.318	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	NA	NA		100		100		100		100		
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	NA	NA		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan di daerah	Peresentase Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait Penelitian, Pengembanmga n, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	NA	NA		100		100		100		100		
PROGRAM RISET DAN INOVASI														
Meningkatnya Pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	NA	0	-	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen	NA	0	-	100		100		100		100		
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persen	NA	0	-	100		100		100		100		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen	NA	0	-	100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					571.300.627.522		678.701.358.792		684.243.955.993		689.925.118.123		695.748.309.306	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100	231.560.261.647	100	304.913.114.102	100	310.455.711.303	100	316.136.873.433	100	321.960.064.616	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang di alokasikan melalui TKD	Persen	20,85	21.85	338.157.323.895	23.35	372.046.414.512	24.35	372.046.414.512	25.85	372.046.414.512	27.35	372.046.414.512	
Meningkatnya tata kelola pembendaharaan	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	37,68	37.68		38.68		41.18		43.18		45.18		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelapora	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	84,18	85.18		87.68		88.68		91.18		92.18		
	Persentase penurunan SILPA	Persen	64,14	63.14		61.64		60.64		59.14		58.14		
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
Meningkatnya penerapan sistem informasi Keuangan berbasis digital	Persentase penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	79,32	80,32	1.583.041.980	81,82	1.741.830.178	82,82	1.741.830.178	84,32	1.741.830.178	85,32	1.741.830.178	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					60.713.841.3 52		74.457.528.0 03		78.516.689.1 76		82.957.079. 503		87.686.39 6.886	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	58.895.572.10 2	100	68.739.185.71 6	100	72.340.226.91 1	100	76.147.226.1 57	100	80.173.07 1.955	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
Meningkatnya Upaya ekstensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan Potensi Pajak	Persen	4,19	5	1.818.269.250	5	5.718.342.288	5	6.176.462.265	5	6.809.853.34 6	5	7.513.324. 931	
	Persentase Objek Pajak yang Ditetapkan terhadap Potensi Pajak	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Objek Pajak yang Tertagih terhadap Potensi Pajak yang Ditetapkan	Persen	89,65	90		90		90		90		90		
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Persen	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					19.573.082.933		20.447.211.832		21.687.301.250		23.337.123.931		25.153.635.422	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
KEPEGAWAIAN					16.707.649.933		16.947.211.832		17.387.301.250		18.537.123.931		19.853.635.422	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100	14.633.132.933	100	12.888.662.832	100	13.263.727.250	100	14.695.423.931	100	15.965.075.422	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	96,67	97	2.074.517.000	97	4.058.549.000	97	4.123.574.000	97	3.841.700.000	97	3.888.560.000	
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	27,81	31		36		41		45		50		
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	82,00	85		85		85		85		85		
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	98,00	98		98		99		100		100		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.865.433.000		3.500.000.000		4.300.000.000		4.800.000.000		5.300.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	51,08	55	2.865.433.000	57	3.500.000.000	59	4.300.000.000	61	4.800.000.000	63	5.300.000.000	
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persen	51,08	100		100		100		100		100		
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	100,00	100		100		100		100		100		
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	22,00	22		23		25		27		29		
INSPEKTORAT DAERAH					27.067.408.711		30.097.683.229		31.558.535.958		33.454.833.742		35.272.852.878	Inspektorat Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
INSPEKTORAT DAERAH					27.067.408.711		30.097.683.229		31.558.535.958		33.454.833.742		35.272.852.878	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100	21.028.016.711	100	20.392.788.868	100	20.102.310.997	100	20.521.842.750	100	21.073.252.189	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	72,94	73,9	4.149.942.000	74,25	6.541.885.413	74,75	7.311.168.226	75	8.215.076.881	75,25	8.923.036.875	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asisteni	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,100)	1.889.450.000	Level 3 (3,150)	3.163.008.948	Level 3 (3,200)	4.145.056.735	Level 3 (3,250)	4.717.914.111	Level 3 (3,300)	5.276.563.814	
	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Level	Level 3 (3,059)	Level 3 (3,080)		Level 3 (3,090)		Level 3 (3,100)		Level 3 (3,150)		Level 3 (3,190)		
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	Level 2 (2,574)	Level 2 (2,875)		Level 3 (3,000)		Level 3 (3,050)		Level 3 (3,100)		Level 3 (3,150)		
KECAMATAN BUNGKU TIMUR					4.392.048.252		9.095.000.000		9.690.000.000		9.785.000.000		10.390.000.000	Kecamatan Bungku Timur
UNSUR KEWILAYAHAN					4.392.048.252		9.095.000.000		9.690.000.000		9.785.000.000		10.390.000.000	
KECAMATAN					4.392.048.252		9.095.000.000		9.690.000.000		9.785.000.000		10.390.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	3.543.547.452	100	7.500.000.000	100	8.000.000.000	100	8.000.000.000	100	8.500.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	100	75%	24.450.000	80	50.000.000	85	70.000.000	90	90.000.000	100	100.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	100	100	217.488.300	100	900.000.000	100	910.000.000	100	920.000.000	100	950.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	NA	70	10.420.000	75	30.000.000	80	40.000.000	85	50.000.000	90	60.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	100	100	533.852.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100	100	62.290.500	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	
KECAMATAN WITA PONDA					4.329.816.684		4.168.209.884		5.510.857.294		6.510.856.400		7.492.804.813	Kecamatan Wita Ponda



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UNSUR KEWILAYAHAN					4.329.816.684		4.168.209.884		5.510.857.294		6.510.856.400		7.492.804.813	
KECAMATAN					4.329.816.684		4.168.209.884		5.510.857.294		6.510.856.400		7.492.804.813	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	3.490.674.884	100	3.490.674.884	100	4.490.574.894	100	5.490.574.000	100	6.352.622.413	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													58.965.000	
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	75	80	22.650.000	80	30.650.000	80	58.965.000	85	58.965.000	85		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													500.000.000	
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	100	70	385.100.600	75	395.100.000	80	400.100.000	80	400.100.000	85		
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													40.000.000	
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	0	0		100	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													471.217.400	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	0	100	372.898.700	100	168.292.500	100	471.217.400	100	471.217.400	100		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													70.000.000	
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	0	100	58.492.500	100	58.492.500	100	60.000.000	100	60.000.000	100		
KECAMATAN BUNDKU TENGAH					13.565.466.865		13.904.414.569		14.252.218.625		14.608.524.091		14.973.737.193	Kecamatan Bungkuk Tengah
UNSUR KEWILAYAHAN					13.565.466.865		13.904.414.569		14.252.218.625		14.608.524.091		14.973.737.193	
KECAMATAN					13.565.466.865		13.904.414.569		14.252.218.625		14.608.524.091		14.973.737.193	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	94	100	12.346.518.127	100	12.655.181.080	100	12.971.560.607	100	13.295.849.622	100	13.628.245.863	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	100	83	37.793.500	86	38.549.370	86	39.706.796	91	40.699.466	93	41.716.952	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	100	100	620.951.638	100	636.475.429	100	652.387.315	100	668.696.998	100	685.414.422	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	NA	80	5.220.000	82	5.350.500	85	5.484.263	88	5.621.369	90	5.761.903	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	100	100	462.763.600	100	474.332.690	100	486.191.007	100	498.345.782	100	510.804.427	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100	95	92.220.000	97	94.525.500	97	96.888.638	100	99.310.853	100	101.793.625	
KECAMATAN BUNGKU PESISIR					4.962.955.082		5.087.028.959		5.214.204.683		5.344.559.800		5.478.173.795	Kecamatan Bungku Pesisir
UNSUR KEWILAYAHAN					4.962.955.082		5.087.028.959		5.214.204.683		5.344.559.800		5.478.173.795	
KECAMATAN					4.962.955.082		5.087.028.959		5.214.204.683		5.344.559.800		5.478.173.795	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	90,56	100	4.207.370.432	100	4.312.554.693	100	4.420.368.560	100	4.530.877.774	100	4.644.149.718	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	NA	100	64.500.000	100	66.112.500	100	67.765.313	100	69.459.445	100	71.195.931	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	66,36	100	303.800.000	100	311.395.000	100	319.179.875	100	327.159.372	100	335.338.356	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	99,86	100	58.000.000	100	59.450.000	100	60.936.250	100	62.459.656	100	64.021.148	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	83,16	100	300.582.150	100	308.096.704	100	315.799.121	100	323.694.099	100	331.786.452	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100,00	100	28.702.500	100	29.420.063	100	30.155.564	100	30.909.453	100	31.682.189	
KECAMATAN BAHODOPI					6.783.791.957		6.806.791.957		7.332.152.667		7.569.846.827		7.667.106.027	Kecamatan Bahodopi
UNSUR KEWILAYAHAN					6.783.791.957		6.806.791.957		7.332.152.667		7.569.846.827		7.667.106.027	
KECAMATAN					6.783.791.957		6.806.791.957		7.332.152.667		7.569.846.827		7.667.106.027	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	5.633.497.467	100%	5.653.497.467	100%	5.980.756.827	100%	5.980.756.827	100%	5.980.756.827	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	77	100	19.777.500	100%	19.777.500	100%	25.630.900	100%	36.973.500	100%	39.246.700	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	92	100	377.494.800	100%	380.494.800	100%	410.567.340	100%	530.788.900	100%	620.450.700	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	82	100	23.614.900	100%	23.614.900	100%	30.967.500	100%	30.967.500	100%	35.679.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	96	100	666.102.290	100%	666.102.290	100%	786.230.100	100%	890.360.100	100%	890.872.300	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	54	100	63.305.000	100%	63.305.000	100%	98.000.000	100%	100.000.000	100%	100.100.000	
KECAMATAN BUNGKU BARAT					5.054.756.768		6.499.922.413		6.501.922.413		7.401.922.413		7.701.922.413	Kecamatan Bungku Barat
UNSUR KEWILAYAHAN					5.054.756.768		6.499.922.413		6.501.922.413		7.401.922.413		7.701.922.413	
KECAMATAN					5.054.756.768		6.499.922.413		6.501.922.413		7.401.922.413		7.701.922.413	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	4.323.985.368	100%	5.150.622.413	100%	5.152.622.413	100%	6.052.622.413	100%	6.352.622.413	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	75	80	45.955.000	80	58.965.000	80	58.965.000	85	58.965.000	85	58.965.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	70	70	157.049.000	75	710.567.600	80	710.567.600	80	710.567.600	85	710.567.600	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	NA	0	-	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	100	100	471.217.400	100	471.217.400	100	471.217.400	100	471.217.400	100	471.217.400	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100	100	56.550.000	100	56.550.000	100	56.550.000	100	56.550.000	100	56.550.000	
KECAMATAN BUMI RAYA					5.349.059.726		7.525.240.650		7.525.240.650		7.525.240.650		7.525.240.650	Kecamatan Bumi Raya
UNSUR KEWILAYAHAN					5.349.059.726		7.525.240.650		7.525.240.650		7.525.240.650		7.525.240.650	
KECAMATAN					5.349.059.726		7.525.240.650		7.525.240.650		7.525.240.650		7.525.240.650	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	96,00	100	4.333.990.106	100	5.456.520.000	100	5.456.520.000	100	5.456.520.000	100	5.456.520.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	97,00	0	-	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	96,00	100	318.000.470	100	1.285.000.000	100	1.285.000.000	100	1.285.000.000	100	1.285.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	95,00	0	-	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	96,00	100%	483.720.650	100%	483.720.650	100%	483.720.650	100%	483.720.650	100%	483.720.650	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	98,00	100%	213.348.500	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	
KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN					4.046.854.142		4.451.539.556		4.896.693.512		5.386.362.863		5.924.999.149	Kecamatan Sombori Kepulauan
UNSUR KEWILAYAHAN					4.046.854.142		4.451.539.556		4.896.693.512		5.386.362.863		5.924.999.149	
KECAMATAN					4.046.854.142		4.451.539.556		4.896.693.512		5.386.362.863		5.924.999.149	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	95	100%	2.790.424.112	100%	3.069.466.523	100%	3.376.413.176	100%	3.714.054.493	100%	4.085.459.942	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	95	100%	22.500.000	100%	24.750.000	100%	27.225.000	100%	29.947.500	100%	32.942.250	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	95	100%	685.272.050	100%	753.799.255	100%	829.179.181	100%	912.097.099	100%	1.003.306.808	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	100	100%	39.540.000	100%	43.494.000	100%	47.843.400	100%	52.627.740	100%	57.890.514	
PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	persen	95	100%	390.648.240	100%	429.713.064	100%	472.684.370	100%	519.952.807	100%	571.948.088	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100	100%	118.469.740	100%	130.316.714	100%	143.348.385	100%	157.683.224	100%	173.451.546	
KECAMATAN BUNGU SELATAN					5.788.536.895		6.154.460.000		6.179.460.000		6.204.460.000		6.229.460.000	Kecamatan Bungku Selatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UNSUR KEWILAYAHAN					5.788.536.895		6.154.460.000		6.179.460.000		6.204.460.000		6.229.460.000	
KECAMATAN					5.788.536.895		6.154.460.000		6.179.460.000		6.204.460.000		6.229.460.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	91	100	4.701.371.895	100	5.053.460.000	100	5.063.460.000	100	5.073.460.000	100	5.083.460.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	100	100	18.160.000	100	21.000.000	100	24.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	100	100	497.990.000	100	500.000.000	100	505.000.000	100	508.000.000	100	510.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	100	100	2.040.000	100	5.000.000	100	7.000.000	100	9.000.000	100	12.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	persen	100	100	353.890.000	100	357.000.000	100	360.000.000	100	364.000.000	100	368.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100	100	215.085.000	100	218.000.000	100	220.000.000	100	223.000.000	100	226.000.000	
KECAMATAN MENUI KEPULAUAN					7.861.573.103		7.791.075.981		7.985.852.880		8.185.499.201		8.390.136.683	Kecamatan Menui Kepulauan
UNSUR KEWILAYAHAN					7.861.573.103		7.791.075.981		7.985.852.880		8.185.499.201		8.390.136.683	
KECAMATAN					7.861.573.103		7.791.075.981		7.985.852.880		8.185.499.201		8.390.136.683	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	6.801.086.203	100	6.983.874.718	100	7.158.471.586	100	7.337.433.375	100	7.520.869.210	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	75	80	8.550.000	100	14.940.988	100	15.314.512	100	15.697.375	100	16.089.810	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	100	100	655.232.500	100	251.130.904	100	257.409.177	100	263.844.406	100	270.440.516	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	100	100	30.870.000	100	55.339.205	100	56.722.685	100	58.140.752	100	59.594.271	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	100	100	292.564.900	100	365.963.445	100	375.112.531	100	384.490.344	100	394.102.603	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100	100	73.269.500	100	119.826.721	100	122.822.389	100	125.892.949	100	129.040.273	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH					13.735.962.318		13.510.858.271		14.341.135.892		15.448.069.797		16.667.435.996	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					13.735.962.318		13.510.858.271		14.341.135.892		15.448.069.797		16.667.435.996	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					13.735.962.318		13.510.858.271		14.341.135.892		15.448.069.797		16.667.435.996	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	92	100	5.553.716.753	100	6.064.545.254	100	6.296.539.613	100	6.540.683.908	100	6.797.783.544	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	99	100	3.338.950.350	100	1.945.853.099	100	2.109.600.028	100	2.503.524.933	100	2.959.886.481	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	100	100	1.450.810.538	100	1.722.105.117	100	1.858.151.421	100	2.004.945.384	100	2.163.336.069	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	96	100	223.037.000	100	433.454.801	100	467.697.730	100	504.645.851	100	544.512.873	



BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2024	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaa n Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di Laksanakan	Persen	98,00	100	542.765.000	100	863.200.000	100	931.392.800	100	1.004.972.83 1	100	1.084.365. 685	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yg Di Selesaikan	Persen	100,00	100	2.626.682.677	100	2.481.700.000	100	2.677.754.300	100	2.889.296.89 0	100	3.117.551. 344	
PAGU TOTAL					3.303.004.28 5.285,69		3.501.390.27 0.378,31		3.730.607.15 6.725,09		4.045.339.2 12.568,79		4.342.802 .351.433, 31	



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja mencerminkan kondisi yang perlu diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk memahami tingkat pencapaian hasil instansi terkait dengan visi organisasi atau kepala daerah, serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menunjukkan apakah tujuan organisasi atau pemerintahan daerah tercapai atau tidak. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi pemerintahan daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Sementara Indikator kinerja daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Indikator kinerja daerah dirumuskan secara teknis dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja daerah terkait, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

IKU dan IKD dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Morowali berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Perubahan RPJMD dapat dicapai.



4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali menetapkan arah kebijakan strategis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Jaminan atas capaian dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan perumusan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil. IKU menjadi alat evaluasi kunci yang menghubungkan perencanaan dengan implementasi kebijakan, serta sebagai dasar akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.

Target keberhasilan yang dituangkan melalui IKU tidak hanya mencerminkan capaian angka semata, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan pembangunan sosial dan infrastruktur daerah. Dengan memperhatikan potensi strategis Kabupaten Morowali, khususnya sebagai pusat industri berbasis nikel dan kawasan strategis nasional. Penyusunan target indikator kinerja ini diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan hingga Tahun 2029.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan Tahun 2029, dicantumkan pada Tabel 4.2



Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	BB	BB	BB	BB	
2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)	Semu Perangkat Daerah
3	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	C	B	B	B	A	A	Unsur Kewilayahan, Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Penanaman Modal, Urusan Kearsipan, Unsur Pendukung (Sekretariat DPRD)
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A	Urusan Keuangan
5	Tingkat Maturitas SPIP -T	Level	Level 3 (3.290)	Level 3 (3.365)	Level 3 (3.430)	Level 3 (3.505)	Level 3 (3.580)	Level 3 (3.585)	Urusan Pengawasan
6	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	Urusan Komunikasi dan Infomatika, persediaan dan Statistik



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,50-74,65	74,65-74,95	74,91-75,25	75,21-75,55	75,99	75,99-76,26	
8	Indeks Pendidikan	Indeks	68,40	71,47	73,08	77,99	82,93	85,28	Urusan Pendidikan, urusan perpustakaan, urusan kepemudaan dan olahraga
9	Indeks Kesehatan	Indeks	0,808	0,814	0,821	0,826	0,833	0,839	Urusan Kesehatan
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	48,74	49,47	50,21	50,97	51,73	52,51	
11	Nilai Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	65,67	70,80	75,93	81,07	86,20	91,33	Urusan Kebudayaan
12	Nilai Warisan Budaya	Indeks	48,47	59,67	70,86	82,06	100	100	
13	Nilai Ekspresi Budaya	Indeks	48,64	60,48	72,32	85,49	100	100	
14	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	67,76	68,13	69,5	70,00	72,40	72,50	
15	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	0,55	0,60	0,64	0,70	0,74	0,78	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	85,57	85,87	86,17	86,47	86,77	87,07	
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	76,4	76,6	76,8	77,0	77,2	77,4	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18	Nilai Toleransi	Nilai	64	68	72	76	80	84	Urusan Penunjang (sekretariat Daerah) Unsur Kesatuan bangsa dan Politik
19	Nilai Kesetaraan	Nilai	66	70	74	78	82	86	
20	Nilai Kerjasama	Nilai	62	66	70	74	78	82	
21	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	74,0	77,0	79,4	82,0	84,8	87,4	
22	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	70	75	75	75	80	85	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan kawasan permukiman
23	Rasio Konektifitas	Rasio	6,31	6,38	6,46	6,52	6,59	6,66	Urusan Perhubungan
24	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	12,99	12,65	12,32	12	11,49	11,19	
25	Pendapatan Perkapita (ADHK)	Ribu (Rupiah)	1.262,78	1.476,39	1.726,14	2.018,13	2.330,84	2.725,13	
26	Tingkat Kemiskinan	Persentase	9,86-11,35	10,44	9,61	8,84	8,5	7,82	
27	Gini Rasio	Angka	0,210-0,265	0,2574	0,2498	0,2422	0,227	0,22	
28	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	2,31-2,55	2,42	2,3	2,19	2,16	2,05	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
29	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69	Urusan Pertanian, Urusan Perikanan
30	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	Milyar Rupiah	53,7	67,7	81,7	95,7	110,3	124,3	Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Pariwisata dan ekonomi Kreatif
31	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	Urusan Perdagangan
32	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	56,88	57,38	57,88	58,38	58,88	59,38	Urusan Sosial
33	Indeks Desa	Indeks	0,7286	0,7577	0,7881	0,8196	0,8524	0,8865	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
34	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	82,21	82,91	83,6	84,3	85	85,3	Urusan Pangan
35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase	62,45	64,52	67,74	71,13	74,69	78,42	Urusan Tenaga Kerja
36	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase	75,17	75,12	75,06	75,01	74,95	74,9	
37	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	Ribu (Rupiah)	40.301,79	41.107,83	41.929,98	42.768,58	43.623,95	44.496,43	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
38	Pertumbuhan Industri Kecil	Persentase	5,47	5,58	5,69	5,80	5,92	6,04	Urusan Perindustrian
39	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	148.234.750.000.000	198.234.750.000.000	248.234.750.000.000	298.234.750.000.000	348.234.750.000.000	398.234.750.000.000	Urusan Penanaman Modal
40	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,37	0,40	0,43	0,46	0,50	0,54	
41	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	83,45	83,70	83,95	84,20	84,51	84,85	Urusan Lingkuagn Hdiup
42	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	71,1	72,48	73,89	75,32	76,6	78,3	Urusan Ketentraman da Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik



4.2.2. Indikator Kinerja Kunci/Daerah

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali untuk 5 tahun mendatang (2025-2030) pada tabel 4.3.



Tabel 4.3

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1,1	Ketahanan Energi,Air dan Kemandirian Pangan						
1	Indeks Ketahanan Pangan	82,21	82,91	83,6	84,3	85	85,3
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	7,2	6,85	6,5	6,15	5,8	5,45
3	Konsumsi Listrik Perkapita	378,82	373,37	368,42	363,7	359,25	355,07
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	89,86	90,8	91,74	92,68	93,62	94,56
5	Kapasitas Air Baku	66.563,60	66.563,60	66.563,60	66.563,60	66.563,60	66.563,60
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	0,5	0,60	0,71	0,83	0,95	1,19
1,2	Kualitas Lingkungan Hidup						
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0	0	2	4	5	7
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	1.483	1.665	1.847	2.029	2.211	2.393
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	73,21	76,42	79,63	82,84	86,05	89,26
4	Persentase timbulan sampah yang dikelola (daur ulang)	51,78	57,36	62,94	68,52	74,1	79,68
5	Persentase Limbah B3 yang dikelola	83,83	84,33	84,83	85,33	85,83	86,33
1,3	Resilensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim						
1	Penurunan Emisi GRK	1.185.211,33	1.339.923,33	1.494.635,33	1.649.347,33	1.879.068,03	2.033.780,03
2	Indeks Resiko Bencana (IRB)	210,5	207,85	205,2	202,55	199,9	196,9
3	Indeks Ketahanan Daerah	0,37	0,4	0,43	0,46	0,5	0,54
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,45	83,66	83,87	84,09	84,3	84,85



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1,4	Demografi						
1	Rasio Penduduk	115,18	114,98	114,78	114,58	114,38	114,18
2	Kepadatan Penduduk	37,33	38,3	39,27	40,24	41,21	42,18
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,6	1,46	1,34	1,3	1,24	1,18
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
2,1	Kesejahteraan Ekonomi						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12,99	12,65	12,32	12	11,49	11,19
2	Tingkat Kemiskinan	9,86-11,35	10,44	9,61	8,84	8,5	7,82
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,5	1,41	1,32	1,23	1,14	1,05
4	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26
5	Garis Kemiskinan	615.027	640.027	665.027	690.027	715.027	740.027
6	Persentase Penduduk Miskin	10,99	10,43	9,87	9,31	8,75	8,79
7	Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota	3.870	3.727	3.574	2.404	2.279	1.983
8	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	19,35	18,63	17,87	12,02	11,39	10,63
9	PDRB Perkapita (ADHB)	570.117,47	615.726,87	664.985,02	718.183,82	775.638,52	837.689,61
10	PDRB Perkapita (ADHK)	1.262,78	1.476,39	1.726,14	2.018,13	2.330,84	2.725,13
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,31-2,55	2,42	2,3	2,19	2,16	2,05
12	Indeks Gini	0,210-0,265	0,2574	0,2498	0,2422	0,227	0,22
13	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	49,59	50,18	50,77	51,36	51,95	52,54
14	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	74,50-74,65	74,65-74,95	74,91-75,25	75,21-75,55	75,99	75,99-76,26
2,2	Kesehatan untuk Semua						
1	Usia Harapan Hidup	69,81	70,21	70,61	71,01	71,41	71,81
2	Prevalensi Stunting (SKI dan SSGI)	19	17,07	14,84	12,9	11,21	9,75



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Angka Kematian Ibu	210	183	172,5	162	151,5	140
4	Angka Kematian Anak						
*	Angka Kematian Bayi	7,88	5,91	4,43	3,32	2,49	1,87
*	Angka Kematian Balita	15	13,8	13,1	12,5	11,9	11
5	Cakupan kepersertaan jaminan kesehatan nasional	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Keluarga Sehat	0,45	0,46	0,48	0,49	0,5	0,51
7	Indeks Kesehatan	0,808	0,814	0,821	0,826	0,833	0,839
2,3	Pendidikan Berkualitas yang Merata						
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,37	9,84	10,09	11,33	12,58	13,05
2	Harapan Lama Sekolah	13,38	13,92	14,2	14,48	14,76	15,04
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	62,43	63,63	64,83	66,03	67,23	68,43
4	Indeks Literasi Digital	45,03	45,08	45,13	45,18	45,23	45,28
5	Indeks Pendidikan	68,40	71,47	73,08	77,99	82,93	85,28
2,4	Perlindungan Sosial yang Adaptif						
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	90,64	92,05	93,48	94,93	96,40	97,90
2	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	68,72	70,47	72,22	73,97	75,72	77,44
3	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak	64,44	70,88	72,3	73,75	75,22	76,73
2,5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,4	76,6	76,8	77	77,2	77,4
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,74	49,47	50,21	50,97	51,73	52,51
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	70	75	75	75	80	85
4	Persentase Jalan Kondisi Mantap	40,26	41,47	42,71	43,99	45,31	46,67



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase Akses Jaringan Internet	87,16	87,3	87,44	87,58	87,72	87,86
2,6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, Masyarakat Inklusif						
1	Indeks Perlindungan Anak	85,57	85,87	86,17	86,47	86,77	87,07
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	53,34	54,13	54,94	55,76	56,59	57,44
3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,76	68,96	70,16	71,36	72,4	73,6
4	Indeks Ketimpangan Gender	0,465	0,45	0,435	0,42	0,406	0,391
5	Indeks Pemberdayaan Gender	67,5	70,5	73,5	76,5	79,5	82,5
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	25,22	29,22	33,22	37,22	41,6	45,6
7	Indeks Pembangunan Gender	0,55	0,6	0,64	0,7	0,74	0,78
8	Indeks Pembangunan Pemuda	55,84	56,69	57,56	58,44	59,33	60,23
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
3,1	Daya Saing Sumber Daya Manusia						
1	Angka Ketergantungan	0,456	0,457	0,456	0,454	0,449	0,443
3,2	Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi						
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,46	6,65	6,85	7,06	7,27	7,49
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	21,43	21,86	22,3	22,74	23,2	23,66
3	Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
5	Rasio Kewirausahaan	40,21	40,99	41,79	42,6	43,43	44,27
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,45	64,52	67,74	71,13	74,69	78,42
7	Indeks Inovasi Daerah	46,15	50,95	55,75	60,55	65,15	69,65
8	Persentase UMKM yang naik kelas	24	24,72	25,47	26,23	27,02	27,83



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69
10	Kontribusi UMKM dan Koperasi terhadap PDRB	0,50	0,52	0,54	0,56	0,59	0,61
11	Persentase Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	50	50	66,67	83,33	100	100
3,3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru						
1	Indeks Ekonomi Hijau	72,78	74,07	75,26	76,31	77,24	78,28
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	48,17	49,67	51,17	52,67	53,68	55,18
3	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	10	11	12	13	14	15
3,4	Transformasi Digital						
1	Indeks Pemerintahan Digital	1	1	1,25	1,5	1,75	2,0
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	3,37	3,49	3,61	3,73	3,85
3	Indeks Pembangunan Statistik	2,63	2,7	2,8	2,9	3	3,1
4	Indeks Keamanan Informasi	0,45	0,55	0,65	0,75	0,80	0,85
3,5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global						
1	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	53,7	67,7	81,7	95,7	110,3	124,3
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	40.301,79	41.107,83	41.929,98	42.768,58	43.623,95	44.496,43
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)	83.082,58	88.898,36	95.121,24	101.779,73	108.904,31	116.527,61
3,6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	1000	1275	1550	1825	2025	2300
2	Presentase Desa Mandiri	36,51	40,48	44,44	48,41	52,38	56,35
3	Indeks Desa	0,7286	0,7577	0,7881	0,8196	0,8524	0,8865



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
3,7	Stabilitas Ekonomi Makro						
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,34	0,51	0,68	0,85	1,01	1,18
2	Tingkat Inflasi	3,25	3,08	2,91	2,74	2,57	2,4
3	Indeks Harga Konsumen (IHK)	110	109	108	107	106	105
4	Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi	46,02	44,72	43,42	42,12	41,07	39,77
5	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah	11,1	10,93	10,76	10,59	10,4	10,23
6	Pertumbuhan Industri Kecil	5,47	5,58	5,69	5,8	5,92	6,04
7	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
*	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	12,85	13,21	13,77	14,28	14,88	15,2
*	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1.188.897,08	2377794,16	3.566.691,24	4.755.588,32	5.944.485,40	7.133.382,48
*	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	2,39	4,78	7,18	9,57	11,96	14,35
*	Total Kredit/PDRB (%)	2,39	4,78	7,18	9,57	11,96	14,35
*	Inklusi Keuangan (%)	50	50,05	55,05	65,05	75,05	85,05
8	Return On Aset (ROA) BUMD (%)	10	10	10	10	10	10
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM						
4,1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif						
1	Indeks Reformasi Hukum	87,4	87,62	87,84	88,06	88,28	88,5
2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	C	B	B	B	A	A
4	Indeks Integritas Nasional	65,81	66,71	67,61	68,51	69,36	70,26
5	Nilai LPPD	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
6	Indeks Kematangan Organisasi	37	37	39	39	39	39
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4,2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial						
1	Persentase Penegakan Perda	95	100	100	100	100	100
2	Persentase Capaian Aksi HAM	85	90	90	90	95	100
3	Indeks Demokrasi Indonesia	60-80	60-80	60-80	80-85	80-85	80-85
4	Indeks Rasa Aman	77,85	78,3	78,75	79,2	79,65	80,1
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	72,21	72,66	72,66	72,66	73,11	73,56
6	Indeks Profesionalitas ASN	68,11	69,81	71,56	73,35	75,18	77,06
4,3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya melalui Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel						
1	Indeks Daya Saing Daerah	3,75	3,82	3,89	3,96	4,03	4,1
2	Tingkat Maturitas SPIP -T	Level 3 (3,290)	Level 3 (3,365)	Level 3 (3,430)	Level 3 (3,505)	Level 3 (3,580)	Level 3 (3,585)
3	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,200)	Level 3 (3,250)	Level 3 (3,300)
4	Survei Penilaian Integritas	71,86	72,94	73,89	74,92	75,97	77,04
5	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,290)	Level 3 (3,365)	Level 3 (3,430)	Level 3 (3,505)	Level 3 (3,580)	Level 3 (3,585)
6	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	6,16	6,16	6,16	6,17	6,17	6,17
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A	A	A	A	A	A
	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah						
A	Urusan Pemerintahan Wajib						
1	Wajib Pelayanan Dasar						
1.1	Pendidikan						
1	Angka Literasi/Numerasi :						



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
*	Literasi Membaca SD	62,55	65,05	67,55	70,05	72,55	75,05
*	Literasi Membaca SLTP	70,03	71,13	72,23	73,33	74,43	75,53
*	Numerasi SD	56,28	59,18	62,08	64,98	67,88	70,78
*	Numerasi SLTP	63,13	64,63	66,13	67,63	69,13	70,63
2	Angka Putus Sekolah						
*	APS SD	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
*	APS SMP	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
*	APS SMA	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
3	Angka Melek Huruf	99,27	99,29	99,31	99,33	99,35	99,37
4	Akreditasi Sekolah di Kabupaten Morowali						
*	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30,5	40,67	50,84	61,01	71,18	81,35
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	95,14	97,3	100	100	100	100
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	98,12	99,5	100	100	100	100
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	90,85	97,12	99,85	100	100	100
5	Angka Partisipasi Kasar						
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	107,45	107,45	107,45	107,45	107,45	107,45
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	97,89	99,82	101,28	101,28	101,28	101,28
6	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	100	100	100	100	100	100
7	Angka Partisipasi Murni						
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	95,57	96,07	96,57	97,07	97,57	98,07
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	78,98	79,78	80,58	81,38	82,18	82,98
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	80,14	80,94	81,74	82,54	83,34	84,14



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	99,34	99,84	100	100	100	100
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	95,47	95,97	96,47	96,97	97,47	97,97
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	93,29	94,09	94,89	95,69	96,49	97,29
9	Angka Kelulusan						
*	SD	100	100	100	100	100	100
*	SMP	100	100	100	100	100	100
*	SMA	100	100	100	100	100	100
10	Angka Yang Melanjutkan						
*	SD	100	100	100	100	100	100
*	SMP	100	100	100	100	100	100
*	SMA	100	100	100	100	100	100
11	Rasio Ketersediaan Sekolah						
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	1 : 95	1 : 95	1 : 95	1 : 95	1 : 95	1 : 95
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
12	Rasio Guru/Murid Sekolah						
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	10,94	10,79	10,64	10,49	10,34	10,19
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	12,4	12,27	12,14	12,01	11,88	11,75
13	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah						
*	Pendidikan Anak Usia Dini (SD/MI)	01:14	1: 16	1 : 17	01:18	01:18	01:18
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	01:13	1: 14	1 : 15	1 : 18	1 : 18	1 : 18
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	1 : 18	1 : 16	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	98,03	98,05	98,07	98,09	98,11	98,13
15	Tingkat Partisipasi Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	81,03	83,99	86,96	89,93	92,90	95,87
16	Tingkat Partisipasi Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	99,41	100	100	100	100	100
17	Tingkat Partisipasi Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	50,12	56,61	63,10	69,59	76,08	76,84
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	25,53	56,61	63,1	69,59	76,08	76,84
19	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	72,49	73,14	73,81	74,47	75,13	75,79
20	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	62,97	63,38	65,65	73,00	81,81	90,63
21	Iklim keamanan SD	75,82	76,72	77,62	78,52	79,42	80,32
22	Iklim keamanan SMP	71,20	73,41	74,91	76,41	77,91	79,41
23	Iklim kebhinekaan SD	72,53	73,98	74,98	75,98	76,98	77,98
24	Iklim kebhinekaan SMP	71,20	73,70	74,70	75,70	76,70	77,70
25	Iklim inklusivitas SD	61,40	65,32	67,82	70,32	72,82	75,32
26	Iklim inklusivitas SMP	59,66	62,06	64,46	66,86	69,26	71,66
1.2	Kesehatan						
1	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	7,2	6,3	5,4	4,5	3,6	2,7
2	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	2,6	4,1	5,6	7,1	8,6	10,1
4	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,232	0,243	0,254	0,265	0,276	0,287
5	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,016	0,017	0,018	0,019	0,02	0,021



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72
7	Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk	8,97	8,98	8,99	9,00	9,01	9,02
8	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Balita Yang Pernah di Imunisasi Campak	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	91,04	90,28	89,52	88,76	88	87,24
12	Angka Keberhasilan pengobatan TB (treatment success rate)	91	92,1	93,2	94,3	95,4	96,5
13	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	314,21	274,09	233,97	193,85	153,73	113,61
14	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
15	Penderita Diare Yang Ditangani	100	100	100	100	100	100
16	Angka Kejadian Malaria	6,38	6,08	5,78	5,48	5,18	4,88
17	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
18	Cakupan Puskesmas	91	92	93	94	95	96
19	Cakupan Pembantu Puskesmas	20	20	25	25	30	30
20	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	85	85	86	86	87	87
21	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
22	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100	100	100	100	100	100
23	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	100
24	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100
26	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	100	100
27	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
28	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
29	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
30	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
31	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
32	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	100
33	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	100
34	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	100
35	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	4,5	4	3,5	3	2,5	2
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	82	83	84	85	85	87
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0,0057	0,0058	0,0059	0,006	0,0061	0,0062
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	30,47	34,75	38,38	42,02	45,65	49,29



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Rasio Jaringan Irigasi	0,269	0,279	0,292	0,307	0,325	0,348
6	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk	2,23	2,31	2,34	2,42	2,45	2,50
7	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	54,19	54,43	54,67	54,91	55,15	55,39
8	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di Wilayan Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	60,06	60,3	60,54	60,78	61,02	61,26
9	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	60,90	61,65	63,65	64,75	65,85	66,22
10	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,74	78,98	79,22	79,46	79,7	79,94
11	rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	4,57	4,99	5,20	5,41	5,61	5,93
12	tingkat kemantapan jalan	38,40	42,68	46,32	49,96	53,59	57,23
13	rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	29,48	37,39	51,63	58,56	65,48	68,74
14	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	23,08	38,46	53,85	69,23	84,62	100
1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1	Persentase kawasan kumuh yang ditata untuk mencegah kawasan kumuh baru	58	61,5	65	68,5	72	75
2	Rasio Rumah Layak Huni	47,10	49,22	50,32	52,60	54,45	56,66
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	68,72	70,47	72,22	73,97	75,72	77,44
4	Capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	20	20	20	20	20	20
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	10,4	16	21	26	31	36
7	Penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86
8	Persentase PSU Kawasan Permukiman	70	75	80	85	90	95
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
	Pol PP						
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	80	81	82	83	84	85
2	Angka Kriminalitas	10,50-9,00	10,50-9,00	10,50-9,00	9,00-7,52	9,00-7,51	9,00-7,50
3	Persentase jumlah pelanggaran K3 yang tertangani	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	825	825	825	975	975	975
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	95	100	100	100	100	100
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100
9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	14	14	14	14	14	14



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penanggulangan Bencana						
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Resiko Bencana Banjir	11,09	10,92	10,76	10,60	10,44	10,28
5	Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi	30,01	29,62	29,24	28,86	28,48	28,11
6	Indeks Resiko Bencana Tsunami	17,80	17,59	17,38	17,17	16,96	16,76
7	Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	22,25	21,97	21,70	21,42	21,16	20,89
8	Indeks Resiko bencana Tanah Longsor	22,25	21,97	21,70	21,42	21,16	20,89
9	Indeks Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi	33,37	32,95	32,54	32,13	31,73	31,33
10	Indeks Resiko bencana Kekeringan	14,83	14,65	14,46	14,28	14,10	13,93
11	Indeks Resiko Bencana Cuaca Ekstrim	12,60	12,44	12,29	12,13	11,98	11,83
1.6	Sosial						
1	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya	2,84	2,75	2,69	2,63	2,57	2,51
2	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	61,45	64,52	67,74	71,13	74,69	78,42
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	53.911	54.411	54.911	55.411	55.911	56.411
4	Persentase PMKS yang tertangani	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1	1	1	1	1	1



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100	100	100	100	100	100
7	Korban bencana alam (Jiwa/KK)	0	0	0	0	0	0
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	100
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2.7	Tenaga Kerja						
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	232,31	236,86	244,74	253,17	261,91	271,02
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang)	47	42	37	32	27	21
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	60	70	80	85	90	100
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	15,09	15,31	15,53	15,75	15,97	16,19
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	30,21	31,25	33,85	36,46	39,06	41,67
6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	48,30	48,30	56,37	63,00	69,62	75,97
7	Besaran pencari kerja yang ditempatkan	695	500	500	410	410	393



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Besaran Pekerja Buruh yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan (orang)	35.742	36.242	36.742	37.152	37.562	37.955
9	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	304	304	320	336	352	368
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	27,44	27,94	28,44	28,94	29,44	29,94
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintahan dan swasta	25,76	26,79	27,86	28,98	30,14	31,34
2	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
3	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
4	Rasio KDRT	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
6	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
7	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
8	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	32,99	33,49	33,99	34,49	34,99	35,49
9	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
10	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
2.9	Pangan						
1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	85,2	87,23	87,67	88,10	88,54	88,97
2	Ketersediaan Pangan Utama	271,85	293,85	315,85	337,85	359,85	381,85
3	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita						
*	Energi (Kilo Kal)	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
*	Protein Perkaapita (Gram)	65,12	66,14	67,16	68,18	69,2	70,22
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	77,95	78,97	79,99	81,01	82,03	83,05
2,1	Pertanahan						
1	Persentase Fasilitas Umum/Pemerintah yang memiliki status lahan yang tetap	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100
3	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100	100	100	100
4	persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	100	100	100	100	100
5	persentase ketersediaan tanah untuk Masyarakat	100	100	100	100	100	100
2.11	Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Air	82,16	82,36	82,56	82,76	82,96	83,16
2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	96,78	96,85	96,92	96,99	97,06	97,13
3	Indeks Kualitas Udara	77,44	77,74	78,04	78,34	78,64	78,94
4	Ruang Terbuka Hijau	28,78	30,78	32,78	34,78	36,78	38,78
6	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	100	100	100	100	100
8	Penetapan Hak MHA	0	100	100	100	100	100
9	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	NA	24,25	27,30	30,45	33,52	36,52
2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	100	100	100	100	100	100
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	100	100	100	100	100	100
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	100	100	100	100	100	100
6	Perekaman KTP elektronik	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100	100	100	100	100	100
8	Kepemilikan akta kelahiran	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	6	8	9	9	9	9
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	100	100	100	100	100	100
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	144	144	144	144	144	144
3	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	0	0	0	0	0
6	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	32,54	40,48	45,24	48,41	52,38	56,35
7	Persentase Peningkatan Status Desa Maju	18,25	26,19	30,95	35,71	39,68	43,65



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang	49,21	33,33	23,81	15,87	7,95	0
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	88,89	89,09	89,29	89,49	89,69	89,89
2	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	59,57	59,77	59,97	60,17	60,37	60,57
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,9	17,1	17,3	17,5	17,7	17,9
4	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	100
5	TFR (Angka Kelahiran Total)	2	2	2	2	2	2
6	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,01	67,21	67,41	67,61	67,81	68,01
7	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,7	6,5	6,3	6	6	6
2,15	Perhubungan						
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
2	Rasio Ijin Trayek	13	13	13	13	13	13
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	10	10	10	10	10	10
4	Pemasangan Rambu-Rambu	60	70	80	85	90	100
5	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3
6	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun						
*	Angkutan Laut						
	Jumlah Penumpang Turun	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	Jumlah Penumpang Naik	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	220.000	220.200	220.400	220.600	220.800	221.000
	Jumlah barang muat (ton)	510.000	510.200	510.400	510.600	510.800	511.000
7	kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,43	0,52	0,61	0,7	0,79	0,88
2,16	Komunikasi dan Informatika						
1	Indeks SPBE Kabupaten Morowali	3,25	3,37	3,49	3,61	3,73	3,85
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan kualitas Informasi Publik	80%	85%	90%	95%	95%	95%
4	Akses Jaringan Komunikasi	80	82	82,5	83	83,5	84
5	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	83,71	85,71	87,71	89,71	91,71	93,71
6	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	80	82	82,5	83	83,5	84
7	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	95	96	97	98	99	100
8	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	47,5	48	48,5	49	49,5	50
9	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Keterpaduan Informasi Publik Digital	20	25	30	35	40	45
2,17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	5,53	6,18	7,16	8,79	10,42	12,05
2	Rata-Rata Omzet UMKM	142.684.075	142.772.807	142.861.538	142.950.269	143.039.000	143.127.731
3	Persentase Koperasi Aktif	69	70	71	72	73	74
4	Rasio Volume usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,0091	0,0093	0,0095	0,0098	0,0100	0,0103



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase usaha mikro yang menjadi Wirausaha	0,55	0,65	0,74	0,84	0,93	1,03
6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8
2,18	Penanaman Modal						
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	10.968	13.468	15.968	18.468	20.968	23.468
2	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	33,91	45,85	54,13	60,22	64,88	68,56
2,19	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Indeks Pembangunan Olahraga	62,5	65	67,5	70	72,5	75
2	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (Jumlah Organisasi Pemuda)	59,12	61,27	63,42	65,57	67,72	69,87
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,87	3,53	4,19	4,85	5,51	6,17
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	22,16	22,82	23,48	24,14	24,8	25,46
5	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	45,16	48,39	51,61	54,84	58,06	61,29
2,2	Statistik						
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100
2,21	Persandian						
1	Persentase Pemerintah daerah yang terhubung pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	100	100	100	100	100
2,22	Kebudayaan						



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	90,29	90,29	90,29	90,29	90,29	90,29
2,23	Perpustakaan						
1	Persentase Perpustakaan ber Standar Norma Prosedur (SNP)	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	5000	5100	5200	5300	5400	5500
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	64,37	64,79	65,21	67,10	69,15	71,22
2,24	Kearsipan						
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	40,99	44,27	47,81	51,64	55,77	60,23
2	Tingkat ketersediaan arsip	26,73	28,24	30,57	31,21	32,72	33,25
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	100	100	100	100	100
3	Urusan Pemerintahan Pilihan						
3,25	Kelautan dan Perikanan						
1	Nilai Tukar Nelayan	106	107	108	109	110	111
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	115	116	117	118	119	120
3	Produksi Perikanan (ton)						
*	Produksi Perikanan Laut	34.350	34.550	34.750	34.950	35.150	35.350
*	Produksi Perikanan Darat	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
*	Produksi Perikanan Budidaya	9.903	10.301	10.800	10.850	11.900	12.500
4	Angka Konsumsi Ikan	74,74	77	79,26	81,63	84,07	86,59



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap Perairan	12	12,5	13	13,5	14	14,5
3,26	Pariwisata						
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi , Makan, Minum	0,05	0,24	0,43	0,62	0,8	0,99
2	Jumlah Kunjungan Wisata	6.469	6.744	7.019	7.294	7.569	7.844
3	Lama Kunjungan Wisata	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	0,250	0,275	0,550	0,825	1,025	1,300
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	0,48	0,53	0,74	0,92	1,03	1,16
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.27	Pertanian						
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	118,01	118,33	118,65	118,97	119,29	119,61
2	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Ton Per Hektar						
*	Padi	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
*	Jagung	23	23	23	23	23	23
*	Ubi Jalar	203,95	203,95	203,95	203,95	203,95	203,95
*	Ubi Kayu	290,69	290,69	290,69	290,69	290,69	290,69
*	Kacang Tanah	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
*	Kacang Kedelai	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82
3	Produksi Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Ton						
*	Padi	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00
*	Jagung	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
*	Ubi Jalar	800	800	825	825	850	850
*	Ubi Kayu	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
*	Kacang Tanah	60	60	65	65	70	70
*	Kacang Kedelai	130	130	135	135	140	140
4	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29
3,3	Perdagangan						
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	100	100	100	100	100	100
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	100	100	100	100	100
3,31	Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	22,8	23,92	25,04	26,16	27,28	28,4
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,32	Transmigrasi						
1	Persentase Penduduk Miskin di Kawasan Transmigrasi yang Dibina	50	60	70	80	90	100
4	Unsur Pendukung						
4,1	Sekretariat Daerah						
1	Nilai Sakip Daerah	B	BB	BB	A	A	A
2	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	0	1	2	2	3	3
4,2	Sekretariat DPRD						
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	98,23	98,43	98,62	98,82	99,02	99,22
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Unsur Penunjang						



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5,1	Perencanaan						
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	61- 70	71 - 80	81 - 90	81 - 90	81 - 90	81 - 90
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5,2	Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15,18	15,4	15,62	15,84	16,06	16,28
5,3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
1	Presentase disiplin ASN	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,11	66,12	68,13	70,14	72,15	74,16
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,69	27,7	29,71	31,72	33,73	35,74
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,33	27,34	29,35	31,36	33,37	35,38
5.5	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	25	27,5	30	32,5	35	37,5



NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Unsur Pengawasan						
6,1	Inspektorat						
1	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,200)	Level 3 (3,250)	Level 3 (3,300)
2	Manajemn Resiko Indeks (MRI)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,080)	Level 3 (3,090)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,150)	Level 3 (3,190)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 2 (2,655)	Level 2 (2,875)	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,150)
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggran N-1	73,50	73,90	74,25	74,75	75,00	75,25
8	Unsur Pemerintahan Umum						
8,1	Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Persentase gangguan /konflik yang ditangani	100	100	100	100	100	100
2	Angka partisipasi pemilih	76,15	76,15	76,15	76,15	85,29	85,29
3	Presentase data Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan LSM yang telah Berbadan Hukum	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100	100	100	100	100	100



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BAB V

PENUTUP

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Tanggal 27 November 2024 yang dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Sistematika dokumen RPJMD ini didasarkan pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, substansi dijabarkan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan. RPJMD ini dimaksudkan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kabupaten Morowali kurun waktu 2025 sampai dengan 2029, dengan berpedoman pada substansial penting, Kaidah Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaannya sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Berdasarkan potensi sumberdaya, capaian pembangunan sebelumnya dan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Morowali, disimpulkan bahwa untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan pentahapan dan arah pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025-2029 yang mencakup peningkatan daya saing dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang prima, pengelolaan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta penyediaan infrastruktur yang maju dan mandiri. Setiap tahun, fokus pembangunan bergeser dari penataan dan peningkatan SDM serta prasarana, hingga pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Lokus pembangunan tersebar di berbagai kecamatan, dengan prioritas pada pengembangan kawasan kota kecil, pengentasan kemiskinan, prasarana pendidikan dan kesehatan, infrastruktur perhubungan dan komunikasi, energi dan air, jalan dan perumahan, pertanian dan peternakan, perikanan, lingkungan dan ruang terbuka hijau, pariwisata, ketenagakerjaan, serta perindustrian dan perdagangan. Kecamatan seperti Bahodopi, Bungku Tengah, Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Witaponda, dan Bumi Raya menjadi fokus utama dalam berbagai aspek pembangunan untuk memastikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



5.2. Kaidah Pelaksanaan dan Pengendalian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus diimplementasikan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Perencanaan Penganggaran sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Di samping itu, RPJMD merupakan Pedoman bagi setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra (Rencana Strategis) OPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Periode 2025-2029 disusun dalam kondisi keterbatasan data dan informasi sehingga bila dalam perjalanannya dapat terhimpun data yang lebih lengkap dan akurat yang menyebabkan dinilai perlu untuk melakukan revisi terhadap RPJMD ini, maka RPJMD harus segera direvisi dan disesuaikan dengan data dan informasi yang akurat tersebut. Penyesuaian dilakukan tidak hanya pada aspek teknis perencanaan dan anggaran, tetapi juga pada hal-hal yang menyangkut manajemen perencanaan pembangunan secara menyeluruh serta adanya tambahan regulasi;
2. Pengarusutamaan pembangunan dalam dokumen RPJMD dan Renstra OPD terkait di Kabupaten Morowali menekankan keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis industri pertambangan dengan pemerataan sosial, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan, serta inklusivitas masyarakat.
3. RPJMD adalah barometer untuk mengukur sejauhmana capaian dari pelaksanaannya sehingga merupakan ukuran kinerja Pemerintah Daerah. Karena pada RPJMD belum semua tujuan dan sasaran disajikan secara terukur, maka Renstra OPD harus disajikan dengan sasaran yang lebih terukur sehingga memudahkan pelaksanaan evaluasi baik terhadap Renstra yang bersangkutan juga terhadap RPJMD;
4. Sebagai barometer, RPJMD harus dievaluasi baik dalam kurun waktu setiap tahun, pertengahan periode pelaksanaannya, dan akhir periode pelaksanaannya, sehingga jika dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan dan kekurangan dapat segera disesuaikan agar efektivitas pelaksanaan pembangunan dapat tercapai dan dapat menjadi acuan penyusunan RPJMD periode berikutnya;
5. RPJMD harus menjadi pedoman bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh karena itu,

maka sosialisasi RPJMD harus segera dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu agar jelas bagi seluruh pemangku kepentingan tentang tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini;

6. RPJMD menerapkan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah, ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengantisipasi ketidakpastian, meminimalisir potensi hambatan, serta menjaga agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Penerapan manajemen risiko juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin keberlanjutan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan sasaran RPJMD
7. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (renja) OPD, dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Prioritas, Program dan Kegiatan Prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya serta menjamin konsistensi dan keberlanjutan program, maka kegiatan serta pembiayaannya ditetapkan oleh masing-masing pimpinan OPD;
8. Bila dalam pelaksanaannya dinilai perlu untuk melakukan perubahan sasaran pada tahun-tahun tertentu tetapi tidak mengubah sasaran akhir RPJMD untuk program yang bersangkutan, maka atas persetujuan Bupati, penetapan perubahan sasaran tersebut dimuat dalam RKPD tahun yang bersangkutan.

5.3. Evaluasi terhadap dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali periode 2025-2029 didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perencanaan pembangunan dilakukan melalui tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang optimal. Implementasi pembangunan diarahkan oleh visi "Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan," dengan fokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang inklusif, peningkatan kemakmuran masyarakat melalui sektor-sektor unggulan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Setiap tahapan pembangunan dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi daerah, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Diperlukan pelibatan masyarakat, DPRD, dan lembaga/stakeholders lain dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025-2029 yang dilakukan melalui mekanisme:

- Konsultasi Publik, Pemerintah Kabupaten Morowali mengadakan konsultasi publik untuk menghimpun saran dan masukan dari masyarakat terkait rencana pembangunan. Ini dilakukan melalui forum-forum seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten
- Partisipasi Aktif, Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi proyek. Ini memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
- Transparansi Informasi: Pemerintah menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengikuti dan berpartisipasi secara efektif.
- Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran mereka dalam rapat paripurna, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan.
- Pengawasan dan Evaluasi, DPRD berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan mengevaluasi efektivitas program-program yang dijalankan. Mereka memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Morowali.
- Kolaborasi dengan Eksekutif, DPRD bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun program yang bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta memastikan program tersebut selaras dengan visi dan misi pembangunan baik dari tingkat nasional (Presiden/Wakil Presiden), dan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pengawasan Hukum, Lembaga hukum seperti kejaksaan dan kepolisian serta BPK berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka memastikan tidak ada penyimpangan atau korupsi dalam penggunaan anggaran pembangunan.
- Penegakan Hukum, Lembaga hukum menindaklanjuti setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga tercipta lingkungan yang transparan dan akuntabel.



- Kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga hukum bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan hukum dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan, serta memastikan semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Demikian kesimpulan substantiasial penting, Kaidah Pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Morowali Periode 2025-2029 ini disusun untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan guna pencapaian visi "IKLAS JUARA".

BUPATI MOROWALI

ttd.

IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIPO.19820602 2 00604 1 005



RPJMD

KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025-2029